



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

### PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 30 TAHUN 2021

#### TENTANG

#### RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Laporan dan Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana APBD pada tahun mendatang yang akan dibahas dan disahkan menjadi APBD.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**Pasal 2**

- (1) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 1 (satu) tahun anggaran dimulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022;
  - b. acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022; dan
  - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2022.

**Pasal 3**

Penyusunan RAPBD Tahun 2022, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di DPRD; dan
- b. Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-PD) Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD.

**Pasal 4**

- (1) Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya bulan bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh PD yang bersangkutan.

## Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

## Pasal 6

- (1) Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pagu anggaran dalam RKPD menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Jika terjadi perbedaan dalam pembahasan RAPBD Tahun 2022 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka keputusan yang diambil adalah hasil kesepakatan bersama dengan memperhatikan RKPD Tahun 2022 dan semua aspek yang mempengaruhi penetapan RAPBD.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

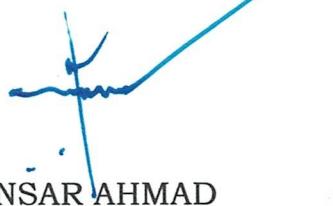
### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 30 Juni 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 30 Juni 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



LAMIDI



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan .....	I-10
1.5 Sistematika RKPD.....	I-11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>II-1</b>
2.1 Kondisi Umum Daerah.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi .....	II-1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II-22
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum (Per urusan) .....	II-45
2.1.4. Aspek Daya Saing .....	II-144
2.1.5. Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Riau ....	II-153
2.2 Permasalahan Pembangunan.....	II-213
2.2.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (Isu strategis) .....	II-213
2.2.2. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah .....	II-214
<b>BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III-1
3.1.1 Arah kebijakan ekonomi nasional .....	III-1
3.1.2 Arah kebijakan ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau .....	III-6
3.2 Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-12
<b>BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 .....	IV-7
4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022.....	IV-11
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA .....</b>	<b>V-1</b>
5.1 Sasaran Pembangunan Kabupaten/Kota .....	V-1
5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota.....	V-2



<b>BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>	<b>VI-1</b>
6.1    Dukungan Program RKPD Terhadap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	VI-2
6.2    Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM .....	VI-8
6.3    Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SDGs .....	VI-10
6.4    Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	VI-16
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>VII-1</b>
7.1    Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	VII-1
7.2    Indikator Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	VII-3
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	I-1
Gambar 1.2	Bagan Alir Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	I-5
Gambar 2.1	Peta Provinsi Kepulauan Riau .....	II-2
Gambar 2.2	Gambar Komposisi Penduduk Menurut Generasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-21
Gambar 2.3	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-26
Gambar 2.4	Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Di Wilayah Sumatera Tahun 2020 .....	II-26
Gambar 2.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-27
Gambar 2.6	Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	II-27
Gambar 2.7	Gambar 2.5 Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah).....	II-29
Gambar 2.8	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 September (%).....	II-30
Gambar 2.9	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2020 September (%) .	II-30
Gambar 2.10	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota SeProvinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Maret (%) .....	II-31
Gambar 2.11	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	II-32
Gambar 2.12	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020 .....	II-32
Gambar 2.13	Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2020 .....	II-33
Gambar 2.14	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020 .....	II-34
Gambar 2.15	Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-35
Gambar 2.16	Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-35
Gambar 2.17	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 September .....	II-36
Gambar 2.18	Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2020 September .....	II-37



Gambar 2.19	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 .....	II-38
Gambar 2.20	Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2020 .....	II-38
Gambar 2.21	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2020.....	II-39
Gambar 2.22	Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 (Tahun) .....	II-40
Gambar 2.23	Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2020.....	II-40
Gambar 2.24	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 (Tahun) .....	II-41
Gambar 2.25	Perbandingan Harapan Lama (HLS) Sekolah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2020.....	II-42
Gambar 2.26	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 .....	II-42
Gambar 2.27	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2020 .....	II-43
Gambar 2.28	Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020.....	II-44
Gambar 2.29	Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-44
Gambar 2.30	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020 .....	II-69
Gambar 2.31	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2020 (Agustus) (%) ....	II-69
Gambar 2.32	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-70
Gambar 2.33	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	II-73
Gambar 2.34	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	II-74
Gambar 2.35	Skema Perumusan Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 .....	II-218
Gambar 3.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2016-2020.....	III-6
Gambar 3.2	Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 .....	III-7
Gambar 3.3	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	III-7



Gambar 3.4	Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	III-8
Gambar 3.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	III-9
Gambar 4.1	Tema dan Prioritas RKP Tahun 2022 .....	IV-10
Gambar 4.2	Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 berdasarkan Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026, Prioritas RKP tahun 2022, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD .....	IV-12
Gambar 4.3	Tema Pembangunan Tahun 2022 dengan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025 Tahap RPJMD Ke-4 .....	IV-13
Gambar 4.4	Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 .....	IV-14
Gambar 4.5	Keterkaitan Misi RPJPD dengan Prioritas RKPD Tahun 2022 .....	IV-14
Gambar 4.6	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan 7 Prioritas Nasional RKP Tahun 2022 .....	IV-15
Gambar 4.7	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Misi RPJMD Tahun 2021=2026.....	IV-15

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 .....	II-3
Tabel 2.2	Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007.....	II-3
Tabel 2.3	Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau .....	II-4
Tabel 2.4	Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi .....	II-5
Tabel 2.5	Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau .....	II-5
Tabel 2.6	Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota.....	II-6
Tabel 2.7	Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota .....	II-7
Tabel 2.8	Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau .....	II-10
Tabel 2.9	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun Tahun 2020 .....	II-12
Tabel 2.10	Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau .....	II-16
Tabel 2.11	Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau .....	II-17
Tabel 2.12	Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Provinsi Kepulauan Riau .....	II-18
Tabel 2.13	Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau .....	II-19
Tabel 2.14	Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau .....	II-19
Tabel 2.15	Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kepulauan Riau .....	II-20
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020.....	II-21
Tabel 2.17	Evaluasi Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 .....	II-23
Tabel 2.18	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (Juta rupiah) .....	II-24
Tabel 2.19	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (Juta rupiah) .....	II-25
Tabel 2.20	Komoditi Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-28
Tabel 2.21	PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 ..	II-29
Tabel 2.22	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-46
Tabel 2.23	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 .....	II-48



Tabel 2.24	Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-50
Tabel 2.25	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020 .....	II-53
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-54
Tabel 2.27	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020 .....	II-57
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-58
Tabel 2.29	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Tahun 2020 .....	II-59
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-60
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Kebencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-62
Tabel 2.32	Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020 .....	II-63
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-64
Tabel 2.34	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020 .....	II-68
Tabel 2.35	Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-71
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-75
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-77
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-79
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-81
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-83
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-84
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-86
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-87
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-90
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-91
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-93



Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	II-95
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ...	II-96
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-97
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-99
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-100
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.	II-102
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Tahun 2020.....	II-104
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	II-108
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	II-110
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-112
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-114
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-116
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-118
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-120
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Fungsi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-122
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.....	II-124
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Fungsi Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020..	II-126
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-129
Tabel 2.65	Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.	II-131
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-134
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-142
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-144
Tabel 2.69	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2020.....	II-145
Tabel 2.70	Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 .....	II-145



Tabel 2.71	Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Jenisnya Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-146
Tabel 2.72	Jumlah Hotel dan Kamar Hotel di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 .....	II-147
Tabel 2.73	Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 .....	II-147
Tabel 2.74	Persentase Pelayanan Akses Air Bersih/Minum yang Aman di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020.....	II-148
Tabel 2.75	Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 .....	II-148
Tabel 2.76	Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020 .....	II-149
Tabel 2.77	Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 .....	II-149
Tabel 2.78	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan tahun 2015-2019 .....	II-150
Tabel 2.79	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-150
Tabel 2.80	Capaian Tujuan 1 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-153
Tabel 2.81	Capaian Tujuan 2 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-158
Tabel 2.82	Capaian Tujuan 3 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-161
Tabel 2.83	Capaian Tujuan 4 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-168
Tabel 2.84	Capaian Tujuan 5 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-173
Tabel 2.85	Capaian Tujuan 6 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-176
Tabel 2.86	Capaian Tujuan 7 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-182
Tabel 2.87	Capaian Tujuan 8 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-183
Tabel 2.88	Capaian Tujuan 9 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-187
Tabel 2.89	Capaian Tujuan 10 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-190



Tabel 2.90	Capaian Tujuan 11 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-192
Tabel 2.91	Capaian Tujuan 12 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-197
Tabel 2.92	Capaian Tujuan 13 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-200
Tabel 2.93	Capaian Tujuan 14 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-201
Tabel 2.94	Capaian Tujuan 15 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-203
Tabel 2.95	Capaian Tujuan 16 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-205
Tabel 2.96	Capaian Tujuan 17 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 .....	II-210
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Jangka Menengah 2020-2024 .....	III-3
Tabel 3.2	Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (% PDB) .....	III-4
Tabel 3.3	Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2021-2022 .....	III-5
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2022.....	III-10
Tabel 3.5	Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	III-17
Tabel 3.6	Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	III-20
Tabel 4.1	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....	IV-3
Tabel 4.2	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 .....	IV-4
Tabel 4.3	Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	IV-16
Tabel 5.1	Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	V-1
Tabel 6.1	Dukungan Program RKPD Tahun 2022 Terhadap Pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau .....	VI-2
Tabel 6.2	Dukungan Program RKPD Tahun 2022 Terhadap Pencapaian Target SPM Provinsi Kepulauan Riau .....	VI-9
Tabel 6.3	Dukungan Program RKPD Tahun 2022 Terhadap Pencapaian Target SDGs Provinsi Kepulauan Riau .....	VI-11



Tabel 6.4	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pendidikan .....	VI-16
Tabel 6.5	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kesehatan .....	VI-17
Tabel 6.6	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	VI-19
Tabel 6.7	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	VI-22
Tabel 6.8	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	VI-23
Tabel 6.9	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sosial ....	VI-24
Tabel 6.10	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Tenaga Kerja.....	VI-26
Tabel 6.11	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .....	VI-28
Tabel 6.12	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pangan .	VI-29
Tabel 6.13	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pertanahan .....	VI-30
Tabel 6.14	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup .....	VI-30
Tabel 6.15	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	VI-32
Tabel 6.16	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....	VI-33
Tabel 6.17	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	VI-34
Tabel 6.18	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perhubungan .....	VI-34
Tabel 6.19	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika.....	VI-38
Tabel 6.20	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .....	VI-38
Tabel 6.21	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Penanaman Modal.....	VI-40
Tabel 6.22	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga .....	VI-41
Tabel 6.23	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Statistik	VI-42
Tabel 6.24	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Persandian .....	VI-42



Tabel 6.25	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kebudayaan .....	VI-42
Tabel 6.26	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perpustakaan .....	VI-44
Tabel 6.27	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kearsipan .....	VI-44
Tabel 6.28	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan .....	VI-45
Tabel 6.29	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pariwisata .....	VI-48
Tabel 6.30	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pertanian .....	VI-49
Tabel 6.31	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kehutanan .....	VI-50
Tabel 6.32	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .....	VI-51
Tabel 6.33	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perdagangan .....	VI-53
Tabel 6.34	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perindustrian .....	VI-55
Tabel 6.35	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Transmigrasi .....	VI-56
Tabel 6.36	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sekretariat Daerah .....	VI-56
Tabel 6.37	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sekretariat DPRD .....	VI-58
Tabel 6.38	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Perencanaan .....	VI-58
Tabel 6.39	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Keuangan .....	VI-59
Tabel 6.40	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian .....	VI-60
Tabel 6.41	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan .....	VI-60
Tabel 6.42	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan .....	VI-61
Tabel 6.43	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pengawasan .....	VI-61



Tabel 6.44	Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik.....	VI-62
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	VII-1
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 .....	VII-3



## BAB I

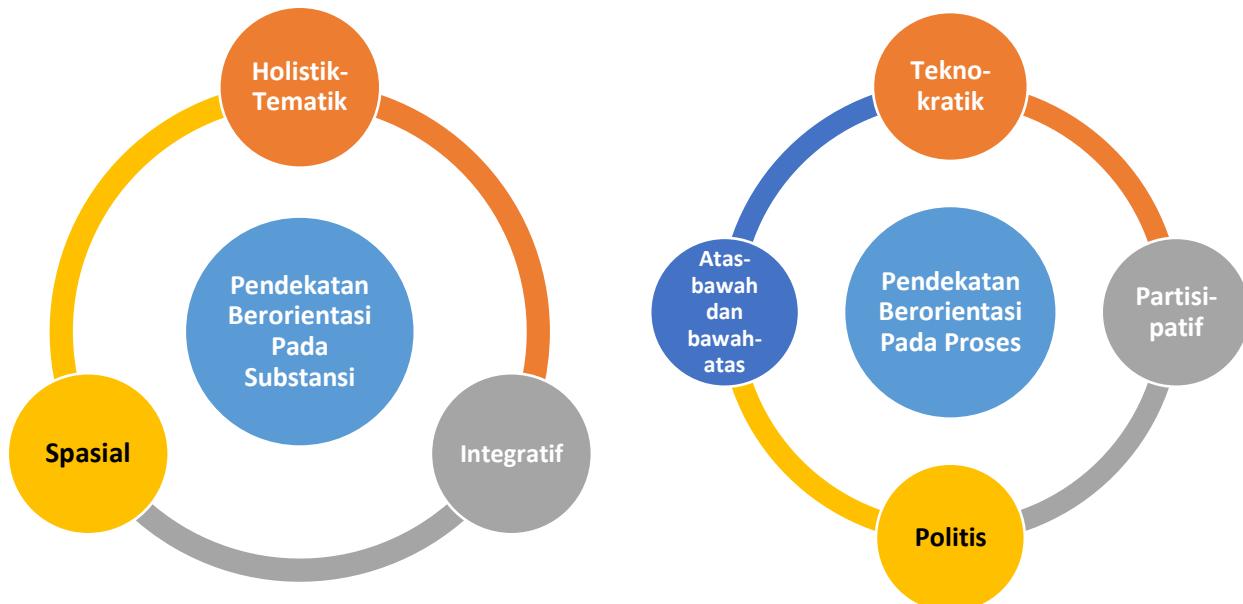
### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan sebagai penjabaran atas dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. RKPD memuat tentang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan partisipasi masyarakat. RKPD tahun 2022 merupakan periode pertama RPJMD Tahun 2021-2026 yang diarahkan pada **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.**

Penyusunan RKPD ditujukan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Secara substansi penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 berpedoman pada Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2022 dan RKP tahun 2022. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 juga memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral nasional maupun daerah termasuk peraturan perundungan mengenai SPM dan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Penyusunan prioritas dan kebijakan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2020, isu-isu strategis yang akan dihadapi pada tahun 2022, pokok-pokok pikiran DPRD, dan usulan stakeholder terkait.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dilaksanakan menggunakan pendekatan baru serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan pendekatan ***money follows program*** melalui ***penganggaran berbasis kinerja***, yaitu pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih holistik, integratif, tematik dan spasial dari berbagai Program Prioritas yang sejalan dengan visi misi Kepala Daerah. Tujuan dari pelaksanaan *money follow program* adalah untuk mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.



**Gambar 1.1 Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kepulauan Riau Tahun 2022**

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dilaksanakan melalui beberapa pendekatan berorientasi pada proses yaitu:

- 1) Pendekatan Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan.
- 2) Pendekatan Bottom-up, yaitu pendekatan perencanaaan yang mengakodomasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui musrenbang desa, musrenbang kecamatan, dan musrenbang kabupaten/kota. Dilaksanakan sejak Bulan Januari Tahun 2019, dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi Kepulauan Riau.
- 3) Pendekatan Top-down, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Komitmen ini telah dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) yang dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2020 dimana Program dan Kegiatan Prioritas yang tertuang didalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau dibahas dan diselaraskan dengan Program, Kegiatan dan Proyek Strategis Nasional.
- 4) Pendekatan Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau dan konsultasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD dengan DPRD.



Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada substansi meliputi: pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan integratif dan pendekatan spasial. Tematik, holistik, integratif, dan spasial merupakan penjabaran tema Prioritas Pembangunan ke dalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

- 1) Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 2) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
- 3) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RKPD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.
- 4) Pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja yang merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan Kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian Kinerja tersebut. Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran (output) dan/atau hasil, dari kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui e-Planning. Seluruh usulan perencanaan Perangkat Daerah, Masyarakat, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui e-planning.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dilaksanakan dengan tahapan mulai

### **1. Persiapan penyusunan RKPD**

Tahapan ini meliputi: pembentukan Tim Penyusun RKPD, penyusunan agenda kerja, penyiapan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan untuk melengkapi perencanaan pembangunan daerah;



### **2. Penyusunan rancangan awal RKPD**

Tahapan ini merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh perangkat daerah untuk menyusun rancangan Rencana Kerja perangkat daerah. Proses-proses penyusunan tersebut antara lain: Penelaahan tentang prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD pada tahun 2022, Penyusunan Rancangan Awal RKPD, serta Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD.

### **3. Penyusunan rancangan RKPD**

Tahapan ini bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan RKPD dengan prioritas nasional dan RKP Tahun 2022. Rancangan RKPD disusun dengan memperhatikan Rakor Teknis tekn, dan Hasil Forum Perangkat Daerah.

### **4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD**

Tahapan ini merupakan forum untuk menghasilkan sinergisitas rancangan RKPD dengan aspirasi masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Proses Musrenbang ini melibatkan berbagai *stakeholders*, seperti dari unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, termasuk pelibatan kaum perempuan dan anak secara partisipatif.

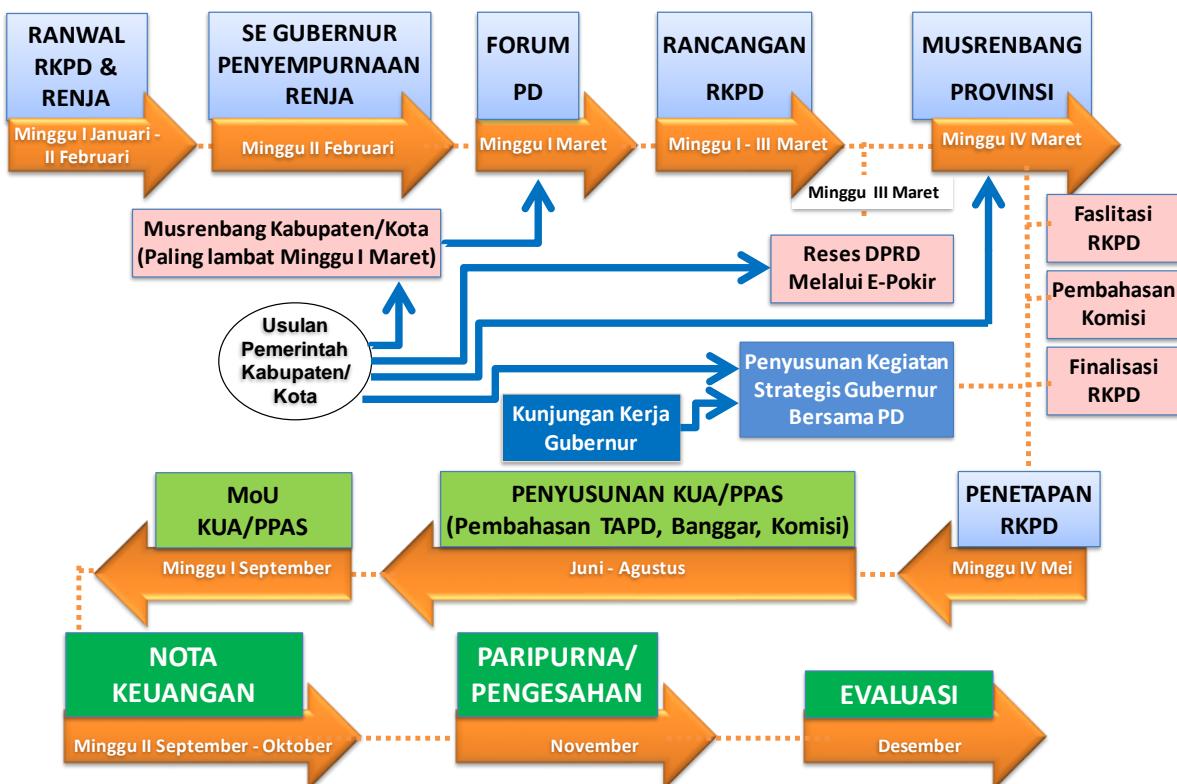
### **5. Perumusan rancangan akhir RKPD**

Tahapan ini merupakan perbaikan rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan hasil Musrenbang Nasional.

### **6. Penetapan RKPD**

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Skema penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:



**Gambar 1.2 Bagan Alir Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan penganggaran pembangunan tahunan. RKPD Tahun 2022 setelah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. RKPD juga menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2022 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2022. Dengan adanya prioritas dan arah kebijakan tahunan pembangunan daerah tercipta kepastian mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

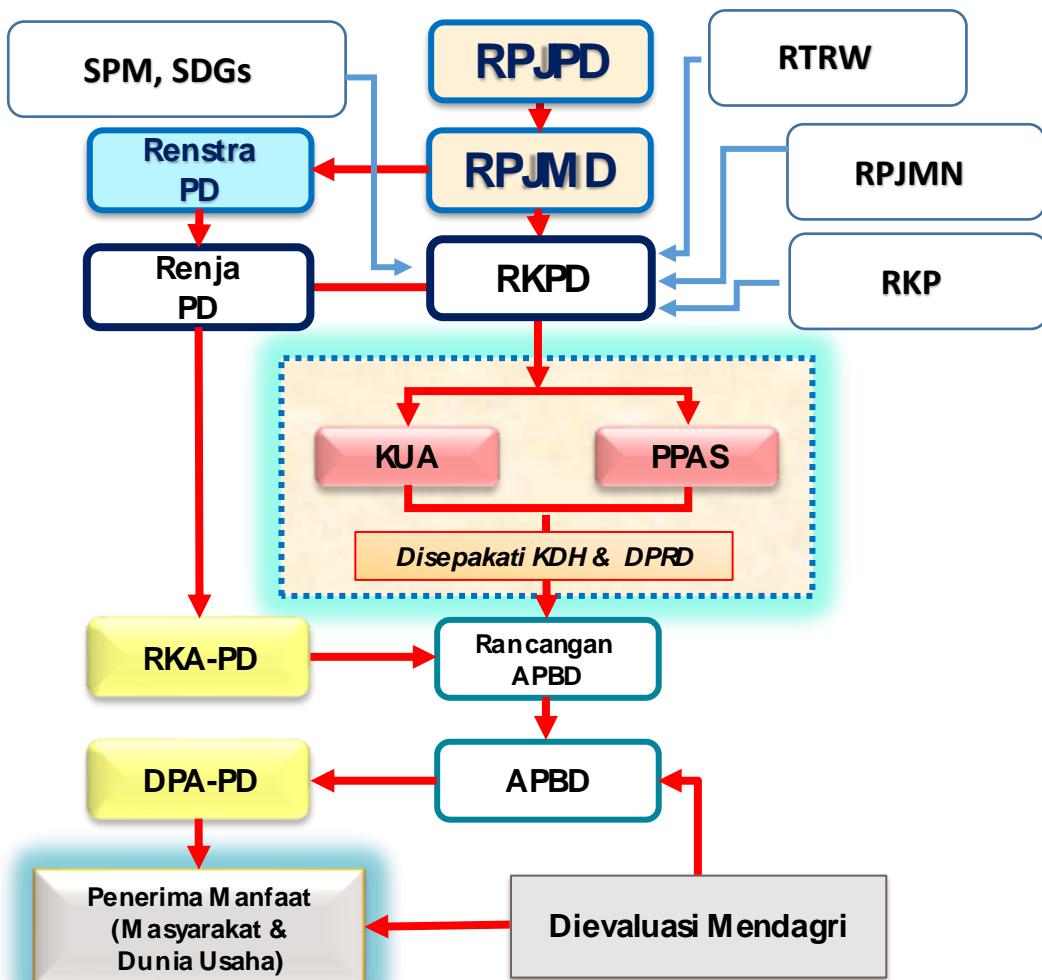


25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
30. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Adapun hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut.



**Gambar 1.2. Hubungan Antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penjelasan keterkaitan erat antara RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

### 1. Hubungan RKPD Tahun 2022 dengan RPJMD tahun 2021-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD Tahun 2022 merupakan RKPD tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Dengan demikian RKPD yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam RPJMD.



### 2. Hubungan RKPD Tahun 2022 dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 juga disusun dengan memperhatikan pada kebijakan RKP tahun 2022. RKP sebagai acuan untuk mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Substansi dari dokumen RKP Tahun 2022 yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan tema dan prioritas pembangunan nasional tahun 2022.

Tema RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Adapun 7 prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sebagai pedoman dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

### 3. Hubungan RKPD dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya Rencana Kerja PD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD.

### 4. Hubungan RKPD dengan KUA-PPAS dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2022 yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022.

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

##### 1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen RKPD adalah untuk merumuskan program prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022 berdasarkan penjabaran dari misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan mengacu pada program prioritas yang



ada dalam RKP Nasional, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

## 1.4.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Mewujudkan konsistensi dan sinergitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau
2. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menjadi acuan dalam penyusunan KUA, PPAS dan dasar dalam membuat kerangka acuan kerja penyusunan RAPBD Tahun 2022.
3. Memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja).
4. Memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengendalian pada saat pelaksanaan dan evaluasi pada saat akhir perencanaan.

## 1.5 Sistematika RKPD

Penyusunan rancangan awal RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, terdiri dari enam (6) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Mencakup uraian tentang latar belakang penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, rumusan maksud dan tujuan, penjelasan tentang hubungan RKPD Tahun 2022 dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya, serta Sistematika dokumen RKPD.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Menjelaskan tentang aspek kewilayahan Provinsi Kepulauan Riau yang mencakup geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Menjelaskan tentang kondisi ekonomi daerah yaitu tantangan dan prospek perekonomian daerah, arah kebijakan ekonomi daerah serta proyeksi kondisi keuangan daerah dan kerangka pendanaan pembangunan serta arah kebijakan pendapatan.



## **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

Menjelaskan tentang visi dan misi RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, isu-isu strategis pembangunan tahun 2022, tujuan dan sasaran pembangunan, serta prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022.

## **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

Berisi tentang sasaran pembangunan dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2022.

## **BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2022**

Menjelaskan tentang rencana kerja kegiatan-kegiatan program prioritas, pencapaian visi dan misi dalam RPJMD tahun 2021-2026 dan rencana kerja pembangunan tahun 2022.

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Berisi tentang Indikator Kinerja utama dan Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah beserta target kinerja yang akan dicapai tahun 2022.

## **BAB VIII PENUTUP**

Berisi tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD serta tindak lanjut yang diperlukan dalam implementasi RKPD Tahun 2022 sebagai acuan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.



### BAB II

#### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

##### 2.1 Kondisi Umum Daerah

###### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

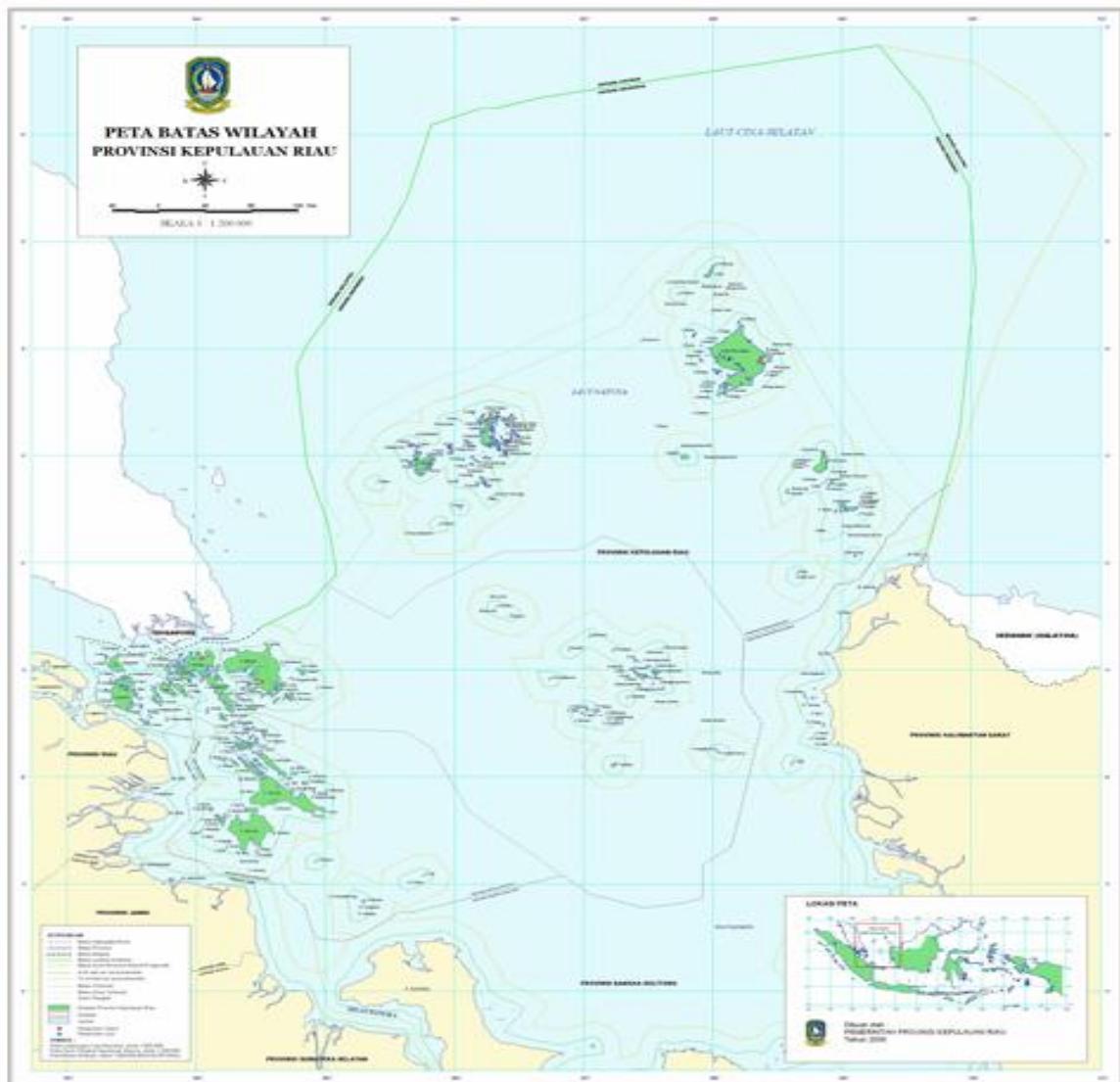
###### 2.1.1.1 Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Provinsi di Indonesia secara Geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas daratan sebesar 8.201,72 km<sup>2</sup>, terletak pada 0°29'LS - 4°40'LU dan 103°22'BT - 109°40'BT.

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau



**Gambar 2.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau**

Provinsi Kepulauan Riau hampir 95% adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km<sup>2</sup>, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 2.1**  
**Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau**  
**Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km <sup>2</sup> )
1.	Kabupaten Karimun	912,75
2.	Kabupaten Bintan	1.318,21
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6.	Kota Batam	960,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56
	<b>Total</b>	<b>8.201,72</b>

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015*

Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km<sup>2</sup>. Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

**Tabel 2.2**  
**Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan**  
**Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007**

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km <sup>2</sup> )
1	Kabupaten Karimun	4.698,09
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kabupaten Lingga	43.339,00
5	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
6	Kota Batam	3.675,25
7	Kota Tanjungpinang	149,13
	<b>Total</b>	<b>417.012,97</b>

*Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007*



### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, letak astronomis kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terlihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.3**

**Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

*Sumber: BPS, Kepulauan Riau dalam Angka 2021*

Setelah terbitnya Undang–Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian “Pulau” menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Adapun hasil Verifikasi Tim Nasional dimaksud terdapat 1.795 pulau yang sudah bernama, kecuali satu pulau yaitu Pulau Berhala dimana saat itu masih dalam sengketa dengan Provinsi Jambi. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, maka pulau Provinsi Kepulauan Riau bertambah 1 (satu) buah menjadi 1.796 pulau, dengan perincian terlihat pada Tabel 2.4 berikut.



**Tabel 2.4**

**Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional  
Pembakuan Nama Rupabumi**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1	Kota Batam	371	133
2	Kota Tanjungpinang	9	2
3	Kabupaten Bintan	241	48
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Natuna	392	62
6	Kabupaten Lingga	532	76
	Jumlah	1.796	394

*Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna*

*Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG),  
2016*

Perkembangan terakhir pulau di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 125.1/4275/BAK, tanggal 12 Oktober 2015 perihal penyampaian data pulau, ada penambahan pulau di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 122 pulau.

Di samping itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar sebagaimana terlihat pada Tabel 2.5 berikut ini.

**Tabel 2.5**

**Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Karimun	2	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Kecil
2	Kota Batam	4	Pulau Pelampung, Pulau Nipa, Pulau Batu Berantai/Batu Berhanti, Pulau Nongsa/Putri
3	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar
5	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Boro, Pulau Sebetul, Pulau Semiun, Pulau Sekatung, Pulau Senua, Pulau Subi Kecil, Pulau Kepala
	Jumlah	22	

*Sumber: Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017*



### 2.1.1.3 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

#### 2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

#### 3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

#### 4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

Ketinggian wilayah menurut kabupaten/kota sesuai dengan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 posisi depan kantor pemerintah daerah, diperoleh hasil dengan rincian terlihat pada Tabel 2.6 berikut.

**Tabel 2.6**

**Rata-rata Ketinggian Tempat Menurut Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
1	Karimun	5 m
2	Bintan	6 m
3	Natuna	14 m
4	Lingga	6 m



No	Kabupaten/Kota	Tinggi (m DPL)
5	Kepulauan Anambas	7 m
6	Batam	8 m
7	Tanjungpinang	65 m

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2021)

Di Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat sebanyak 15 gunung dengan ketinggian bervariasi, tertinggi Gunung Daik di Kabupaten Lingga setinggi 1.272 m, selanjutnya Gunung Ranai setinggi 959 m di Kabupaten Natuna, kemudian Gunung Sepincan di Kabupaten Lingga setinggi 800 m. Secara rinci data nama gunung dan ketinggiannya dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut ini.

**Tabel 2.7**  
**Nama Gunung dan Ketinggiannya Menurut Kabupaten/Kota**

No	Kabupaten/Kota	Nama Gunung	Tinggi (m)
1	Karimun	Gunung Jantan	478
2	Bintan	Gunung Bintan	380
3	Natuna	Gunung Ranai	959
		Gunung Datuk	510
		Gunung Tukong	477
		Gunung Selasih	387
		Gunung Lintang	610
4	Lingga	Gunung Daik	1.272
		Gunung Sepincan	800
		Gunung Tanda	343
		Gunung Lanjut	519
		Gunung Muncung	415
5	Kepulauan Anambas	Gunung Punjang	443
		Gunung Kute	232
		Gunung Pelawan Condong	405

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020)

#### 2.1.1.4 Kondisi Geologi, Struktur Tanah dan Hidrologi

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Provinsi Kepulauan Riau merupakan bagian kontinental yang terkenal dengan nama "paparan sunda" atau bagian dari kerak Benua Asia. Batuan-batuan yang terdapat di Kepulauan Riau diantaranya adalah batuan ubahan seperti mika geneis, meta batulana, batuan gunung api seperti tuf, tuf litik, batupasir tufan yang tersebar di bagian timur Kepulauan Riau, batuan terobosan seperti granit muskovit dapat dijumpai di Pulau Kundur bagian



timur, batuan sedimen seperti serpih batu pasir, metagabro, yang tersebar di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Buru. Juga terdapat batuan aluvium tua terdiri dari lempung, pasir kerikil, dan batuan aluvium muda seperti lumpur, lanau dan kerakal.

Geomorfologi Pulau Kundur dan Pulau Karimun Besar terdiri dari perbukitan dan dataran, dengan pola aliran sungai radial hingga dendritik yang dikontrol oleh morfologi bukit granit yang homogen. Struktur geologi berupa sesar normal dengan arah barat-timur atau barat daya-timur laut. Geomorfologi Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang berupa perbukitan memanjang dengan arah barat laut-tenggara dan sebagian kecil dataran yang terletak di bagian kakinya. Geomorfologi Pulau Bintan berupa perbukitan granit yang terletak di bagian selatan pulau dan dataran yang terletak di bagian kaki. Struktur geologi sesar Pulau Bintan dominan berarah barat laut-tenggara dan barat daya-timur laut, beberapa ada yang berarah utara-selatan atau barat-timur.

Pulau-pulau kecil di sebelah timur dan tenggara Pulau Bintan juga disusun oleh granit berumur Trias (Trg) sebagai penghasil bauksit. Geomorfologi Pulau Lingga berupa perbukitan dengan puncak Gunung Lingga, membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran yang menempat di bagian kaki, dengan pola aliran sungai trellis hingga sejajar. Demikian juga geomorfologi Pulau Selayar dan Pulau Sebangka berupa perbukitan yang membentang dengan arah barat laut-tenggara dan dataran di bagian kakinya, pola aliran sungai adalah trellis yang dikontrol oleh struktur geologi yang berupa perlipatan dengan sumbu memanjang barat laut-tenggara dan arah patahan utara-selatan. Stratigrafi keempat pulau ini tersusun oleh Formasi Pancur (Ksp) yang terdiri dari serpih kemerahan dan urat kwarsa, sisipan batupasir kwarsa dan konglomerat polemik.

Geomorfologi Pulau Singkep selain terdiri dari Formasi Pancur dan Formasi Semarung juga terdapat granit (Trg) yang mendasari kedua formasi di atas dan menjadi penghasil timah atau bauksit. Geomorfologi Pulau Bunguran berupa perbukitan yang membujur dari tenggara barat laut dengan puncak Gunung Ranai dan dataran yang menempati bagian barat dari Pulau Bunguran. Pola aliran sungai adalah radial hingga dendritik di sekitar Gunung Ranai, sedangkan ke arah barat laut berubah menjadi pola aliran trellis.

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tiga pulau yang relatif besar yaitu Pulau Matak, Pulau Siantan dan Pulau Jemala. Ketiga pulau tersebut disusun oleh granit Anambas (Kag) yang tersusun oleh granit, granodiorit dan syenit. Batuan granit Anambas (Kag) ini menerobos batuan mafik dan ultramafik (Jmu) yang terdiri dari diorit, andesit, gabro, gabro porfir, diabas dan basalt, bersisipan rijang-radiolaria. Pola struktur sesar dominan berarah barat laut-tenggara dan sedikit berarah utara-selatan hingga barat daya-timur laut seperti di Pulau Jemaja. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai potensi tambang granit, sedangkan Kabupaten Natuna dan



Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan cekungan tersier yang kaya minyak dan gas bumi yaitu Cekungan Natuna Barat yang masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Cekungan Natuna Timur yang masuk wilayah Kabupaten Natuna.

Tekstur tanah di Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi tekstur halus (liat), tekstur sedang (lempung) dan tekstur kasar, sedangkan jenis tanahnya, sedikitnya memiliki 5 macam jenis tanah yang terdiri dari *organosol*, *glei* humus, *podsolik* merah kuning, *latosol* dan *aluvial*. Jenis tanah *Organosol* dan *glei* humus merupakan segolongan tanah yang tersusun dari bahan organik, atau campuran bahan mineral dan bahan organik dengan ketebalan minimum 50 cm dan mengandung paling sedikit 30% bahan organik bila liat atau 20% bila berpasir. Kepadatan atau *bulkdensity* kurang dari 0,6 dan selalu jenuh. Lapisan tanah *Organosol* tersebar di beberapa pulau Kecamatan Moro (Kabupaten Karimun), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Jenis lainnya adalah tanah *Latosol*, dijumpai di Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur dan beberapa pulau di Kecamatan Moro. Sementara tanah *Aluvial* yang belum mempunyai perkembangan, dangkal sampai yang berlapis dalam, berwarna kelabu, kekuningan, kecokelatan, mengandung glei dan bertolol kuning, merah dan cokelat. Tekstur bervariasi dari lempung hingga tanah tambahan yang banyak mengandung bahan-bahan organik. Tanah ini terdapat di Pulau Karimun, Pulau Kundur dan pulau-pulau lainnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kondisi hidrologi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari dua jenis, yaitu air permukaan dan air bawah tanah (hidrogeologi). Untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih, dapat diperoleh dari air permukaan berupa air sungai, mata air/air terjun, waduk, dan kolong, sedangkan air bawah tanah (hidrogeologi) didapat dengan menggali sumur dangkal. Kolong merupakan kolam bekas tambang bauksit, timah dan pasir yang terbentuk akibat eksplorasi yang dapat digunakan sebagai sumber air bersih, juga dimanfaatkan sebagai kawasan pariwisata.

Daerah Aliran Sungai mencakup sebanyak tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau, dengan jumlah terbanyak di Kabupaten Lingga. Mata air sebagai sumber air permukaan terdapat di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Bintan, Tanjungpinang dan Lingga. DAM/Waduk tersebar di seluruh kabupaten/kota. Beberapa DAM/Waduk/Embung yang direncanakan dibangun pada yaitu Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus di Kota Batam, dan DAM/Waduk/Embung Dompak di Kota Tanjungpinang. Sementara itu Kolong terdapat di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga.

Secara rinci data mengenai potensi sumberdaya air di Kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini.



**Tabel 2.8**  
**Persebaran Potensi Sumberdaya Air Menurut Kabupaten/Kota**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/Embung	Kolong
1	Batam	Terong, Gading, Ladi, Pesung, Bukit Jodoh, Tiban Lama, Tiban Lama, Balo, Nongsa, Gata, Medang, Galang Baru, Galang, Kangka, Sembulang, Abang Besar	-	Duriangkang, Muka Kuning, Sei Ladi, Nongsa, Sei Harapan, Rempang, Sekanak I, Sekanak 2, Sei Tembesi, Rempang Utara, Sei Gong, Sei Raya, Sei Galang Utara, Galang Timur, Sei Ta'tas dan Sei Curus	-
2	Natuna	Midai, Kampung Hilir, Pajang, Serasan, Lagong, Batang, Tiga Sedanau, Selor, Segeram, Kelarik, Cinak, Cinak Besar, Kelarik Hulu, Hulu, Bunguran Timur, Binjai.	Nuraja, dan Gunung Datuk	Balau Sedanau, Ranai Darat, Selat Lampa, Kelarik, Tapau, Sebayar.	-
3	Kepulauan Anambas	Air Abu, Nyamuk, Telaga, Siantan, Batu Belah, Air Asuk, Wampu, Ladan, Mubur, Matak, Anambas, Panai	Tarempa, Temurun, Gunung Bini, dan Gunung Kesayana	Batu Tambun, Gunung Lintang, Batu Tabir, dan Gunung Samak	-
4	Bintan	Logo, Ekang, Bintan, Cikolek, Sumpai, Angus, Sopor, Mapor, Katubi, Pengibu, Tambelan, Benuwa, Tambang Besar.	Gunung Lengkuas	Waduk Tanjung Uban/Sei Jeram, Waduk Sei Jago, Waduk Lagoi, Waduk Gesek, Kolong Enam, Busung, Galang Batang, Kawal, Anculai, Kangboi, dan Sekuning	Danau Kolong Gunung Kijang, Danau Belakang Mesjid Raya, Ex. Galian Pasir Galang Batang, Ex. Galian Pasir Simpang Busung, Ex. Galian Pasir Pengujan, Bloreng, Katen, Nyirih, Tembeling dan Mantang
5	Karimun	Gemuruh, Urung, Ungar, Sawang, Teluk Radang,	-	Waduk Sei Bati, Pongkar 1, Pongkar 2, Sentani,	Ex. Galian Timah Perayon, Ex. Galian



No	Kabupaten/ Kota	Daerah Aliran Sungai	Mata Air	DAM/Waduk/ Embung	Kolong
		Bela, Rapit, Papan, Buru, Lebuh, Pauh, Durian, Tjitim, Sebesi, Karimun, Moro, Sugi, Combol, Alai, Sanglar, Durai, Terong		Paya Manggis, Sei Gunung Jantan (Pulau Karimun Besar), Waduk Tempan, Sawang (Pulau Kundur) dan Waduk Sidodadi, Sidomoro (Pulau Moro)	Pasir Kobel, Galian Pasir Tempan
6	Tanjungpinang	Dompak, Jang	Hutan Lindung (Pancur)	Waduk Sei Pulai, Sei Timun, Dompak	-
7	Lingga	Durslin, Selamak, Musal, Pengok, Sekarim, Buluh, Bidai, Posik, Mamut, Tjempah, Mentuda, Telok, Ketam, Canot, Selapan, Jelutung, Kredong, Awak, Duara, Resun, Tembok, Kerasing, Lieng, Dabo, Sergong, Kumbang, Langkap, Maroktua, Bajau, Ara, Temiang, Sebangka, Penuba, Air Merah	Gunung Daik, Gunung Muncung, Batu Ampar, Kampung Menserai, dan Kampung Tanjung Tinggi	Gemuruh	Ex. Galian Timah Singkep

Sumber: Kepmen PU No. 4/PRT/M/2015; BWSS IV Kepulauan Riau dan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

#### 2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Terdapat 6 Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) di Provinsi Kepulauan Riau, di antaranya yaitu: Stasiun BMKG Raja Haji Abdullah Tanjung Balai Karimun; Stasiun BMKG Ranai; Stasiun BMKG Dabo Singkep; Stasiun BMKG Tarempa; Stasiun BMKG Hang Nadim Batam; dan Stasiun BMKG Kijang Tanjungpinang.

Kondisi iklim di Provinsi Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi angin sehingga secara umum wilayah ini beriklim laut tropis basah. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim puncaroba. Suhu rata-rata tertinggi di Karimun sebesar  $28,8^{\circ}\text{C}$  dan rata-rata terendah di Dabo (Lingga)  $26,8^{\circ}\text{C}$ . Rata-rata Kelembaban Udara tertinggi di Dabo (Lingga) sebesar 87,5%, sedangkan rata-rata terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 81,73%. Curah hujan tertinggi di Tanjungpinang sebanyak  $287,23 \text{ mm}^3$  sedangkan curah hujan terendah di Tarempa (Kepulauan Anambas)  $147,03 \text{ mm}^3$ . Tekanan udara tertinggi di Hang Nadim (Batam) sebesar 1.011,69 mb, sedangkan tekanan udara terendah di Karimun sebesar 1.010,0



mb. Kecepatan angin tertinggi di Karimun sebesar 8,92 knot, terendah di Dabo (Lingga) sebesar 3,25 knot. Penyinaran matahari tertinggi di Ranai (Natuna) sebesar 65,16%, terendah di Hang Nadim (Batam) sebesar 22,50%.

Secara rinci data kondisi cuaca yang tercatat di 6 stasiun BMKG di Provinsi Kepulauan Riau ditampilkan pada Tabel 2.9 berikut ini.

**Tabel 2.9**  
**Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari**  
**Menurut Stasiun Tahun 2020**

No	Stasiun	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	Rata-rata Tekanan Udara (mb)	Rata-rata Kecepatan Angin (m/s)	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Penyinaran Matahari (%)
1	Karimun	28,8	81,8	1.010,0	8,92	183,9	55,3
2	Ranai (Natuna)	27,9	86,4	1.010,57	3,66	222,35	65,16
3	Dabo (Lingga)	26,8	87,5	1.010,58	3,25	264,98	48,08
4	Tarempa (Kepulauan Anambas)	28,28	81,8	1.009,79	4,33	147,03	53,92
5	Hang Nadim (Batam)	28,08	81,73	1.011,69	5,14	192,15	22,50
6	Tanjungpinang	27,38	83	1.010,74	5,42	287,23	38,25

Sumber : BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).

### 2.1.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

#### 1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 867/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu: Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 164.662 hektar, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebanyak 49.439 hektar, Kawasan Hutan yang dapat dikonversi (HPK) seluas 252.940.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas lebih kurang 231.441 hektar. Selain itu Kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS) seluas 23.872 hektar. Non DPCLS seluas 207.569 hektar. Selanjutnya perubahan fungsi kawasan hutan seluas 60.299 hektar dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 536 hektar.



### 2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Rencana kawasan peruntukan pertanian di Provinsi Kepulauan Riau seluas 227.682,63 Ha. Kawasan pertanian ini terdiri dari kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Pengembangan Kawasan Budidaya Tanamana Pangan, Hortikultura dan Peternakan dialokasikan di Kabupaten Lingga sebagai sentra pengembangan sektor pertanian dan Kabupaten Bintan. Pemanfaatan kawasan pertanian ditujukan untuk pemanfaatan potensi dan berdasarkan kesesuaian lahan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan berorientasi agribisnis pertanian.

Sementara itu kawasan peternakan dibagi berdasarkan peruntukan skala agribisnis dan skala peternakan rakyat (*backyard farming*). Untuk kawasan agribisnis diprioritaskan pada Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Bintan serta beberapa pulau yang memiliki potensi dan kesesuaian dari aspek daya dukung lahan dan agroklimat. Khusus untuk Kota Batam, kawasan peternakan dikembangkan pada daerah *hinterland*. Sedangkan pengembangan sub sistem hilir peternakan diarahkan di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.

### 3. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri atas Kawasan Perikanan Tangkap dan Kawasan perikanan budidaya. Kawasan perikanan tangkap merupakan kawasan yang digunakan untuk kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Potensi perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah laut dan perairan umum Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah pengelolaan perikanan yang ada sudah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terkendala arah angin utara selama tiga bulan dalam setahun sehingga nelayan berhenti melaut.

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Pengembangan perikanan budidaya yang meliputi usaha pembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya sangat cocok di provinsi ini. Potensi perikanan budidaya yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau meliputi budidaya laut seluas lebih kurang 435.000 ha, rumput laut lebih kurang 38.520 ha, tambak seluas lebih kurang 4.948 ha.



### 4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan pertambangan, baik wilayah yang sedang/sudah/belum dikerjakan kegiatan pertambangan dan sudah ditetapkan dalam Perencanaan Wilayah Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Rencana kawasan peruntukan pertambangan di Provinsi Kepulauan Riau seluas 13.759,28 Ha. Potensi pertambangan yang ada di provinsi Kepulauan Riau berupa batu granit di wilayah Karimun, Bintan, Lingga dan Kepulauan Anambas; Pasir di wilayah Karimun, Bintan, Batam dan Lingga; Timah di wilayah Karimun dan Lingga; Bauksit di wilayah Karimun, Bintan dan Lingga; Biji Besi di wilayah Karimun, Lingga dan Kepulauan Anambas; Minyak dan Gas di wilayah Natuna dan Kepulauan Anambas, serta potensi galian tambang lainnya.

### 5. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri. Kawasan ini berbasiskan potensi daerah dan tidak boleh mengganggu kelestarian dan fungsi lingkungan hidup. Arahan Pengembangan Kawasan Industri ditekankan pada pengembangan kawasan industri sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang, dengan berbasiskan potensi daerah yang berwawasan lingkungan. Rencana kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau seluas 28.434,12 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Kawasan peruntukan industri di Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari :

- a. Kawasan industri besar, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri paling rendah 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri-industri unggulan yang terdiri dari industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika.
- b. Kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan kawasan industri yang memiliki luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil dan menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan. Industri yang dikembangkan meliputi industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

### 6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata. Rencana kawasan pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau seluas



37.929,83 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Adapun arahan Kepariwisataan Provinsi Kepulauan Riau diimplementasikan ke dalam 7 (tujuh) Koridor Pariwisata Daerah yang berdasarkan keunggulan kooperatif terdiri dari:

- a. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Batam sebagai kawasan Wisata Kota, Wisata Bahari dan Wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition), Wisata Minat Khusus, Wisata Terpadu, Eksklusif, Wisata Agro dan Wisata Alam;
- b. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Bintan sebagai kawasan Wisata Terpadu, Eksklusif, Kawasan Wisata Terbuka Umum dan Wisata Minat Khusus;
- c. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Karimun sebagai kawasan Wisata Alam, Wisata Minat Khusus dan Wisata Agro;
- d. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Tanjungpinang sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya dan Wisata Kreatif;
- e. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Natuna sebagai kawasan Wisata Bahari, Ekowisata dan Minat Khusus;
- f. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Kepulauan Anambas sebagai kawasan Wisata Bahari dan Ekowisata;
- g. Koridor Pariwisata Daerah (KPD) Lingga sebagai kawasan Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Alam dan Wisata Bahari.

### 7. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman merupakan kawasan yang diperuntukan bagi permukiman penduduk diluar kawasan lindung yang digunakan sebagai lingkungan tempat tinggal masyarakat yang berada di wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun rencana kawasan permukiman di Provinsi Kepulauan Riau seluas lebih kurang 84.208,26 Ha yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

### 8. Pemanfaatan Ruang Laut

Wilayah perairan laut Provinsi Kepulauan Riau menyimpan berbagai potensi sumberdaya antara lain di Selat Malaka-Singapura-Phillip yang berada di ALKI I-A karena merupakan salah satu simpul jalur pelayaran internasional yang sangat ramai. Selat Malaka-Singapura-Phillip, ALKI I-A dan perairan di sekitarnya merupakan area yang memiliki *comparative advantage* yang tinggi karena posisi geografinya. Indonesia belum memiliki kedaulatan negara ditandai dengan kapal-kapal yang melewati ruang laut Indonesia, tetapi melapor dan membayar retribusi ke Malaysia dan Singapura. Juga potensi 37 kapal tenggelam (harta karun) di sekitar Pulau Bintan, ditengah Laut Natuna, serta adanya kawasan laut tertutup sebagai tempat pembuangan amunisi militer. Selain itu perairan lau Provinsi Kepulauan Riau juga



memiliki sumberdaya yang melimpah meliputi perikanan laut, pertambangan dan sumberdaya mineral.

#### 2.1.1.7 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kerawanan bencana, meliputi sebagai berikut :

##### a. Kawasan Rawan Tanah Longsor/Gerakan Tanah

Kawasan rawan tanah longsor / gerakan tanah adalah kawasan yang memiliki kriteria berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran. Kawasan tanah longsor ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang penurunan muka tanahnya sedang sampai tinggi. Kawasan ini tersebar di seluruh kabupaten dan kota dengan tingkat bahaya sedang. Kawasan ini terdapat di area dan kawasan bekas tambang dan kawasan terkena pemotongan lereng di Pulau Karimun dan Pulau Kundur di Kabupaten Karimun, Pulau Singkep di Kabupaten Lingga, Kabupaten Bintan, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara total luas bahaya tanah longsor sebesar 149.798 hektar. Berikut ini disajikan potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau. Secara rinci potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Tabel 2.9.

**Tabel 2.10**

**Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	13.397	Tinggi
2	Bintan	3.061	Sedang
3	Natuna	26.919	Tinggi
4	Lingga	49.963	Tinggi
5	Kepulauan Anambas	48.922	Tinggi
6	Batam	7.468	Tinggi
7	Tanjungpinang	68	Sedang
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>		<b>149.798</b>	<b>TINGGI</b>

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

Berdasarkan Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020 diketahui bahwa Provinsi Kepulauan Riau juga terdapat bahaya gempa bumi dengan luas bahaya mencapai 799,838 hektar. Tabel 2.10 berikut ini disajikan perincian potensi luas bahaya gempa bumi di Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 2.11**

**Potensi Luas Bahaya Gempa Bumi di Provinsi Kepulauan Riau**



No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	88,931	Rendah
2	Bintan	130,314	Rendah
3	Natuna	196,386	Rendah
4	Lingga	214,712	Rendah
5	Kepulauan Anambas	59,014	Rendah
6	Batam	96,025	Rendah
7	Tanjungpinang	14,456	Rendah
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>		<b>799,838</b>	<b>Rendah</b>

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020

#### b. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

Kawasan rawan gelombang pasang berada sekitar pantai rawan terhadap gelombang pasang akibat angin kencang dengan kecepatan tinggi atau gravitasi bulan atau matahari. Kriteria kawasan ini adalah kawasan yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai 100 kilometer per jam yang timbul akibat kecepatan angin atau gravitasi bulan dan matahari. Kawasan rawan gelombang pasang ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai atau pesisir. Arahan kebijakan kawasan rawan gelombang pasang adalah melalui pengamanan pantai dan penanaman *mangrove* untuk meredam dan agar terlindung dari gelombang pasang (rob). Gelombang pasang ini juga mengakibatkan terjadinya abrasi pantai.

Kawasan rawan abrasi meliputi kawasan yang mengalami perubahan bentuk pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut, arus laut dan pasang surut laut terutama yang berada di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terluar. Pantai-pantai yang rawan terhadap abrasi antara lain:

- a. Pulau Karimun: Pantai Tanjung Balai sepanjang  $\pm$  4 km, Pantai Pelawan sepanjang  $\pm$  3 km, Pantai Pongkar sepanjang  $\pm$  6 km, Pantai Tanjung Sebatak sepanjang  $\pm$  4 km dan Pantai Sepedas sepanjang  $\pm$  4 km.
- b. Pulau Kundur: Pantai Timur sepanjang  $\pm$  5 km, Pantai Selat Beliah sepanjang  $\pm$  7 km, Pantai Urung sepanjang  $\pm$  3 km dan Pantai Parit Jepang sepanjang  $\pm$  3 km.
- c. Pulau Bintan: Pantai Trikora sepanjang  $\pm$  10 km, Pantai Tanjung Uban sepanjang  $\pm$  5 km, Pantai Sei Kecil - Sakera sepanjang  $\pm$  10 km, Pantai Lobam sepanjang  $\pm$  4 km, Pantai Senggarang sepanjang  $\pm$  4 km, Pantai Penyengat sepanjang  $\pm$  8 km, Pantai Barat Tanjungpinang sepanjang  $\pm$  8 km, Pantai Pulau Dompa, Pantai



Dompak Seberang sampai Tanjung Mocoh serta pulau-pulau kecil di Kecamatan Bintan Pesisir, Mantang dan Tambelan.

- d. Pulau Singkep: Pantai Kota Dabo sepanjang ± 4 km, Pantai Kote sepanjang ± 3 km, Pantai Jagoh sepanjang ± 2 km dan Pantai Kebun Nyiur sepanjang ± 4 km
- Pulau Batam: Pantai Jodoh sepanjang ± 3 Km, Pantai Punggur sepanjang ± 500 m, Pantai Nongsah sepanjang ± 5 Km dan Pantai Melayu sepanjang ± 10 km.
- e. Pulau Ranai: Pantai Kota Ranai sepanjang ± 8 km, Pantai Tanjung sepanjang ± 4 km.

Luas kawasan rawan gelombang ekstrim dan abrasi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 125.040 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan bahaya kategori Sedang, dengan perincian pada Tabel 2.11.

**Tabel 2.12**  
**Potensi Luas Bahaya Gelombang Ekstrim dan Abrasi**  
**di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	16.310	Sedang
2	Bintan	16.016	Sedang
3	Natuna	16.024	Sedang
4	Lingga	32.359	Sedang
5	Kepulauan Anambas	19.817	Sedang
6	Batam	22.745	Sedang
7	Tanjungpinang	1.769	Sedang
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>		<b>125.040</b>	<b>Sedang</b>

Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Prov. Kepri 2016-2020

### c. Kawasan Rawan Banjir dan Banjir Bandang

Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir. Kawasan banjir terutama terdapat di kawasan tangkapan air yang daerah resapan airnya sudah mengalami kerusakan lingkungan (berubah fungsi lahan) seperti reklamasi dan wilayah dengan drainase yang kurang berfungsi secara baik, sehingga sungai tidak mampu lagi menampung jumlah aliran permukaan dan air meluap dari badan sungai. Kawasan rawan banjir tersebar di 7 kabupaten/kota dengan luasan mencapai 478.906 hektar. Untuk Kota Batam, Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan termasuk kategori tinggi, sedangkan Kabupaten Karimun, Natuna, Lingga dan Kepulauan Anambas termasuk kategori sedang. Kabupaten Anambas dan Natuna



termasuk kategori ringan. Potensi luas bahaya banjir terlihat pada Tabel 2.12 berikut ini.

**Tabel 2.13**  
**Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	60.696	Sedang
2	Bintan	95.717	Tinggi
3	Natuna	151.087	Sedang
4	Lingga	103.560	Sedang
5	Kepulauan Anambas	1.162	Sedang
6	Batam	54.975	Tinggi
7	Tanjungpinang	11.709	Tinggi
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>		<b>478.906</b>	<b>Tinggi</b>

*Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020*

Potensi bencana banjir bandang terdapat di Kabupaten Natuna dan Kepulauan Anambas, dengan luasan mencapai 6.886 hektar, dengan perincian tercantum pada Tabel 2.13 berikut ini.

**Tabel 2.14**  
**Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Natuna	6.327	Tinggi
2	Kepulauan Anambas	559	Tinggi
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>		<b>6.886</b>	<b>Tinggi</b>

*Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020*

**d. Kawasan Rawan Bencana Angin Puting Beliung**

Kawasan rawan angin puting beliung ditetapkan dengan ketentuan kawasan permukiman yang berada di sekitar pantai atau pesisir. Semua kabupaten/kota menjadi kawasan rawan bencana angin puting beliung.

**e. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kepulauan Riau tersebar di seluruh kabupaten/kota dengan kategori tinggi dengan luasan mencapai 409.760 hektar, dengan perincian pada Tabel 2.14.



**Tabel 2.15**  
**Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan**  
**di Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten / Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Karimun	20.051	Tinggi
2	Bintan	51.372	Tinggi
3	Natuna	120.376	Tinggi
4	Lingga	155.443	Tinggi
5	Kepulauan Anambas	39.773	Tinggi
6	Batam	20.789	Tinggi
7	Tanjungpinang	1.956	Tinggi
<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>		<b>409.760</b>	<b>Tinggi</b>

*Sumber : Peta Kajian Risiko Bencana Provinsi Kepulauan Riau 2016-2020*

#### 2.1.1.8 Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2020 September 2020 sebanyak 2,064 juta jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Kepulauan Riau hasil SP2020 sebanyak 1,053 juta orang atau 51,02%. Jumlah penduduk perempuan di Provinsi Kepulauan Riau hasil SP2020 sebanyak 1,011 juta orang, atau 48,98%. Pada tahun 2020, rasio jenis kelamin penduduk provinsi Kepulauan Riau sebesar 104. Artinya terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Dengan luas daratan provinsi Kepulauan Riau sebesar 8,2 ribu km<sup>2</sup> maka kepadatan penduduk provinsi Kepulauan Riau sebanyak 252 jiwa per km.

Dalam kurun waktu 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk Kepulauan Riau sebesar 2,02 persen per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,93 persen jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010 sebesar 4,95 persen.

Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni pada tahun 2020 sebanyak 1.196.396 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 47.402 jiwa. Secara rinci jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.



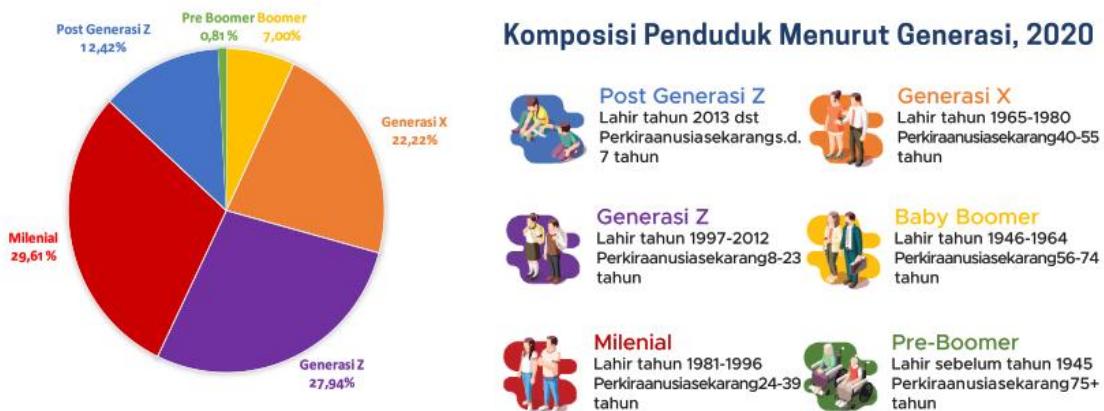
Tabel 2.16

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020

No	Kab/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
1	Karimun	129.761	123.696	253.457	104,90	277,69
2	Bintan	82.190	77.328	159.518	106,29	121,01
3	Natuna	41.890	39.605	81.495	105,77	40,56
4	Lingga	50.870	47.763	98.633	106,51	43,51
5	Kepulauan Anambas	24.502	22.900	47.402	107	80,32
6	Kota Batam	609.399	586.997	1.196.396	103,82	1.245,92
7	Kota Tanjungpinang	114.684.	112.979	227.663	101,51	1.574,87
	<b>Provinsi Kepulauan Riau</b>	<b>938.612</b>	<b>1.011.268</b>	<b>2.064.564</b>	<b>104</b>	<b>251,72</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Potret Sensus Penduduk 2020).

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 68,63 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,60 persen di tahun 2020. Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Dengan struktur penduduk demikian, Kepulauan Riau masih berada pada periode jendela kesempatan untuk menikmati bonus demografi. Jika dimanfaatkan secara optimal, maka Kepulauan Riau dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Sumber: BPS Provinsi Kepri (Potret Sensus Penduduk 2020).

**Gambar 2.2 Gambar Komposisi Penduduk Menurut Generasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**



Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Berdasarkan gambar diatas, hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Kepulauan Riau didominasi oleh Generasi Milenial dan Generasi Z. Proporsi Generasi Milenial sebanyak 29,61 persen dari total populasi dan Generasi Z sebanyak 27,94 persen dari total populasi Kepulauan Riau. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan Generasi Z terdiri dari penduduk usia belum produktif dan produktif. Sekitar tujuh tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi Kepulauan Riau, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan Kepulauan Riau.

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Evaluasi pencapaian aspek Kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari beberapa indikator, meliputi: Pertumbuhan Ekonomi; Laju inflasi; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); Persentase Penduduk Miskin; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Indikator Gini; Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik; Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Nilai Keterbukaan informasi publik; dan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri.

Terlihat sebanyak 6 indikator telah mencapai target tahun 2020 meliputi: Laju inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Gini, Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik, dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Nilai Keterbukaan informasi publik. Sementara itu sebanyak 4 indikator lainnya belum mencapai target tahun 2020, yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, dan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.17**  
**Evaluasi Capaian Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Tata Kelola**  
**Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020			Status Capaian
							Target	Realisasi	% Capaian Target	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,03	2,01	4,56	4,84	5±1	-3,80	-95	Tidak Tercapai
2.	Laju inflasi	%	3,53	4,32	3,47	2,03	3,50±1	1,18	152,8	Tercapai
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,69	7,16	7,12	6,91	6,74	10,34	46,59	Tidak Tercapai
4.	Percentase Penduduk Miskin	%	5,84	6,13	5,83	5,80	5,83	5,92	98,46	Tidak Tercapai
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	73,99	74,23	74,55	74,55*	74,95	75,59	100,85	Tercapai
6.	Indeks Gini	Indeks	0,35	0,359	0,339	0,337	0,35±0,01	0,34	102,86	Tercapai
7.	Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor	NA	76,09	76,81	67,00	68	82,89	121,90	Tercapai
8.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	Tercapai
9.	Nilai Keterbukaan informasi publik	Skor	59,5	13,03	53,87	43,24	74,18	114,12	153,84	Tercapai
10.	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Skor	60	64,18	64,18	65,83	72	65,83*	91,43	Tidak Tercapai

### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### 1. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Mulai tahun 2014 perhitungan PDRB atas dasar harga konstan Provinsi Kepulauan Riau menggunakan tahun dasar tahun 2010.

Nilai PDRB Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Berlaku pada 2020 mencapai 254.253.285,10 juta rupiah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 267.658.243,70 juta rupiah. sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami penurunan.



**Tabel 2.18**  
**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (Juta rupiah)**

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.729.469,47	7.981.525,77	8.100.215,59	8.223.770,09	8.061.287,21
B	Pertambangan dan Penggalian	33.038.027,38	32.061.779,41	35.148.524,03	34.964.435,85	28.391.325,00
C	Industri Pengolahan	80.842.352,97	84.404.227,84	91.792.574,06	100.705.378,60	105.899.714,30
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.468.475,52	2.689.974,52	2.644.609,63	2.763.729,27	2.603.102,35
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	252.516,79	282.713,05	288.735,55	291.287,12	281.458,37
F	Konstruksi	38.848.425,33	41.409.192,35	46.628.248,31	52.239.254,82	49.317.721,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	17.716.678,00	19.653.105,04	22.074.794,10	24.314.345,42	21.561.951,67
H	Transportasi dan Pergudangan	6.953.586,88	7.471.819,99	7.648.632,38	7.219.023,71	4.111.948,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.346.139,36	5.061.473,37	5.585.876,45	6.208.870,52	3.391.339,93
J	Informasi dan Komunikasi	3.969.123,83	4.485.789,72	5.016.209,28	5.603.091,08	6.483.543,90
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.800.406,69	6.254.648,42	6.781.343,52	7.271.530,18	6.991.384,68
L	Real Estate	3.131.440,89	3.415.727,76	3.467.236,77	3.563.184,73	3.195.114,26
M,N	Jasa Perusahaan	10.095,46	11.341,95	12.475,70	11.378,51	5.823,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	5.106.639,00	5.914.071,69	6.385.002,87	6.791.467,49	7.347.301,63
P	Jasa Pendidikan	2.931.368,92	3.415.199,47	3.708.434,66	3.849.230,76	3.896.178,95
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.882.147,27	2.119.212,96	2.228.235,58	2.305.965,16	2.277.838,82
R,S,T,U	Jasa lainnya	980.770,38	1.075.073,68	1.311.084,62	1.332.300,44	436.250,56
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>216.007.664,12</b>	<b>227.706.877,03</b>	<b>248.822.233,10</b>	<b>267.658.243,70</b>	<b>254.253.285,10</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021



PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kepulauan Riau tahun 2020 sebesar 174.976.703,10 juta rupiah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 181.895.864,00 juta rupiah. Sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami penurunan.

**Tabel 2.19**

**PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 (Juta rupiah)**

Kategori	Uraian	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
		2016	2017	2018*	2019**	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.018.413,60	5.945.614,56	5.757.782,20	5.717.726,27	5.466.778,56
B	Pertambangan dan Penggalian	26.883.189,09	25.648.826,82	25.995.357,85	26.037.643,04	24.951.044,54
C	Industri Pengolahan	61.497.861,06	62.436.275,20	65.018.044,52	69.079.808,12	71.325.791,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1.523.109,16	1.621.700,22	1.600.284,11	1.653.050,62	1.580.657,23
E	Pengadaan Air, pengelolaan Sampah,Limbah Konstruksi	203.257,26	222.655,41	225.029,88	224.902,32	218.654,78
F	Konstruksi	28.073.932,69	29.042.762,62	31.345.831,67	33.924.659,03	31.752.166,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	12.858.549,08	13.665.031,43	14.523.505,54	15.408.880,01	13.449.606,58
H	Transportasi dan Pergudangan	4.413.812,90	4.654.491,90	4.696.771,85	4.280.152,26	2.558.454,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.159.140,69	3.536.015,49	3.895.599,70	4.283.338,26	2.526.908,72
J	Informasi dan Komunikasi	3.469.615,17	3.736.381,99	4.136.735,14	4.626.508,88	5.392.392,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.335.032,48	4.466.528,76	4.724.106,92	4.951.671,68	4.798.291,00
L	Real Estate	2.443.353,94	2.549.267,98	2.539.776,70	2.542.823,27	2.330.974,37
M,N	Jasa Perusahaan	8.279,22	8.879,10	9.486,22	8.649,43	5.027,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	3.583.271,97	3.750.526,90	4.013.016,35	4.073.850,16	4.398.445,23
P	Jasa Pendidikan	2.201.366,09	2.418.955,47	2.450.779,09	2.461.456,04	2.259.576,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.467.870,22	1.618.900,27	1.668.139,23	1.714.535,77	1.679.459,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	712.984,39	758.861,59	898.504,38	906.208,82	282.473,77
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>162.853.038,99</b>	<b>166.081.675,71</b>	<b>173.498.751,40</b>	<b>181.895.864,00</b>	<b>174.976.703,10</b>

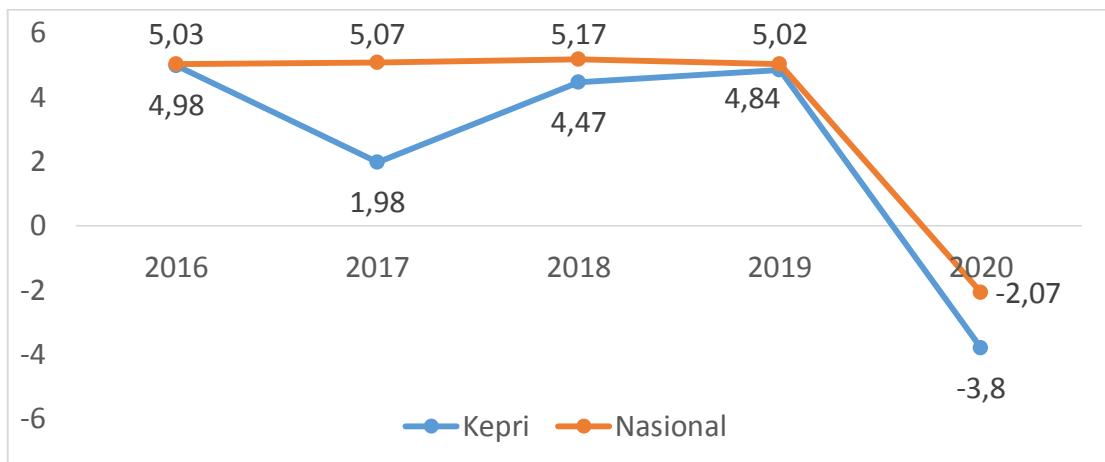
*Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021*

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi



yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan.

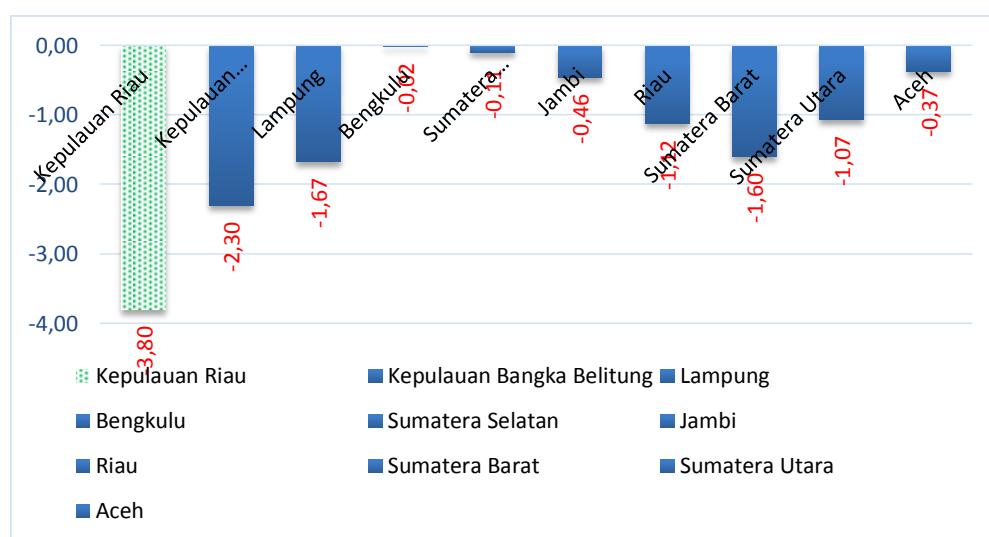
Perekonomian Kepulauan Riau tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,80% setelah pada tahun 2019 mampu tumbuh sebesar 4,84%. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mengalami kontraksi pertumbuhan -2,07% (c-to-c) dibandingkan tahun 2019.



Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

**Gambar 2.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020**

Pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar -2,21%. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau paling rendah dibandingkan provinsi lainnya di Wilayah Sumatera.

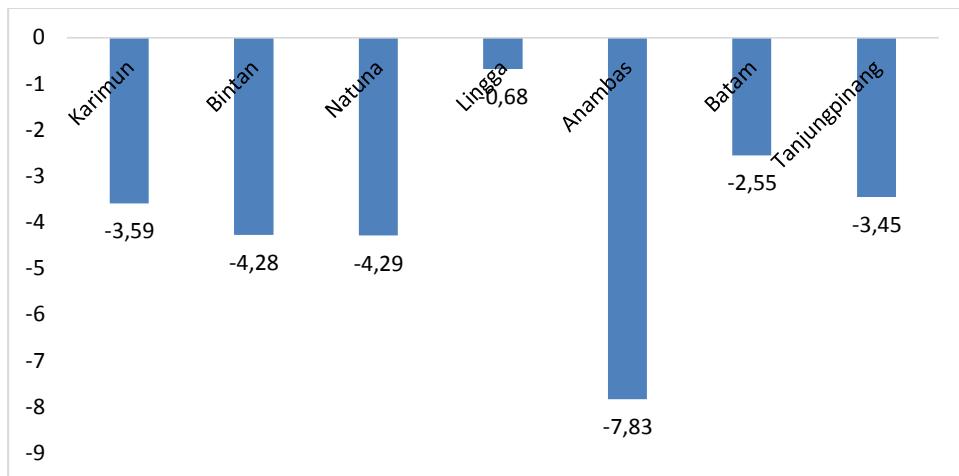


Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

**Gambar 2.4 Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Per Provinsi Di Wilayah Sumatera Tahun 2020**



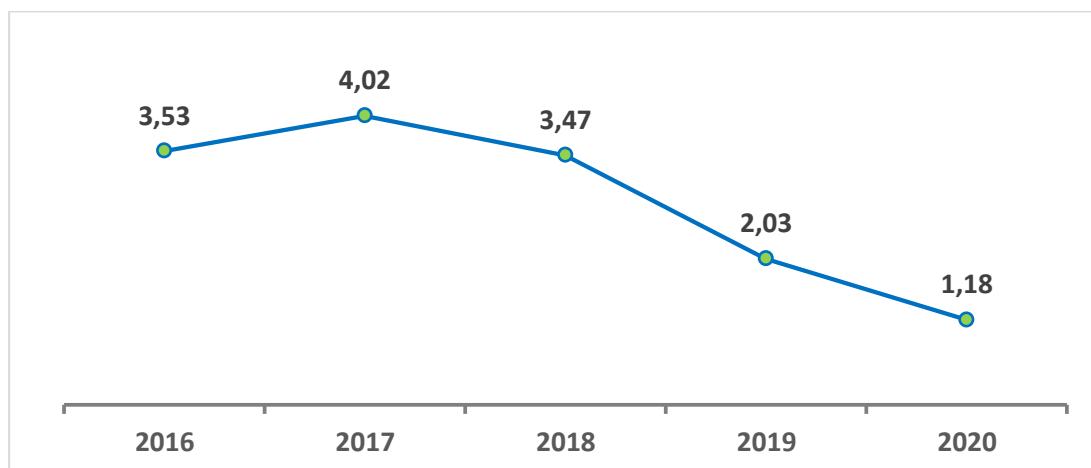
Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,80%. Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau juga mengalami hal yang sama. Kontraksi pertumbuhan ekonomi terkecil berada di Kabupaten Lingga sebesar 0,68% kemudian diikuti oleh Kota Batam sebesar 2,55%. Laju pertumbuhan PDRB ADHK yang terendah diduduki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nilai pertumbuhan sebesar -7,83%, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

## 2. Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga dan kegiatan industri. Tingkat inflasi selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan dari sebesar 3,53% pada tahun 2016 menjadi sebesar 1,18% pada tahun 2020. Perkembangan laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau (gabungan dua kota) dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



*Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021*

**Gambar 2.6 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

Pada tahun 2020 sebanyak 10 komoditas yang memberikan andil terbesar sumbangan inflasi adalah emas perhiasan, selanjutnya rokok kretek filter, cabai merah, minyak goreng, bawang merah, rokok putih, telur ayam ras, taman kanak-kanak, ikan selar/ikan tude, dan sotong. Perincian perubahan harga dan sumbangan inflasi komoditas tersebut tercantum pada tabel berikut ini.

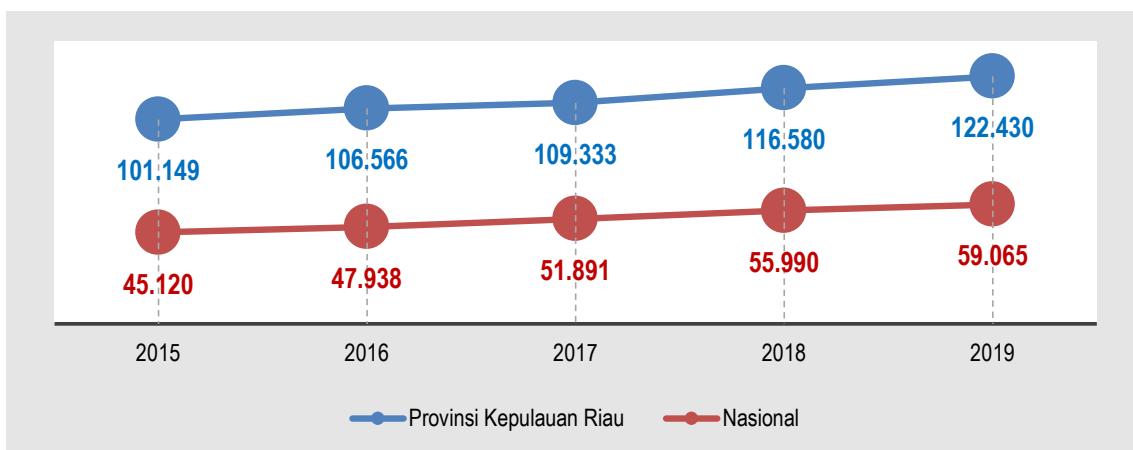
**Tabel 2.20**  
**Komoditi Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2020**

No	Jenis Komoditas	% Perubahan Harga	Sumbangan Inflasi Jan-Des
1	Emas perhiasan	24,8228	0,3057
2	Rokok kretek filter	8,8994	0,1804
3	Cabai merah	21,8615	0,1778
4	Minyak goreng	15,2257	0,1575
5	Bawang merah	19,9059	0,1040
6	Rokok Putih	12,5699	0,0946
7	Telur ayam ras	11,1353	0,0832
8	Taman kanak-kanak	18,9401	0,0757
9	Ikan selar/ikan Tude	16,0794	0,0628
10	Sotong	26,5708	0,0588

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau

### 3. PDRB per Kapita

PDRB perkapita sering digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran suatu wilayah, yang menggambarkan nilai PDRB yang diterima oleh setiap penduduk. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, nilai PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau atas dasar harga berlaku sebesar Rp 101.149 ribu meningkat menjadi Rp 122.430 ribu pada tahun 2019. Dengan meningkatnya PDRB perkapita tersebut, maka secara umum tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau semakin baik. Apabila dibandingkan dengan PDB perkapita nasional, nilai PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Riau lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena PDRB Provinsi Kepulauan Riau yang sudah cukup tinggi nilainya dan pembagi PDRB yang jauh lebih kecil, dalam hal ini jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan jumlah penduduk seluruh Indonesia.



**Gambar 2.7      Gambar 2.5 Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2019 (Ribu Rupiah)**

Secara kewilayahan pendapatan perkapita yang dicapai oleh kabupaten/kota di Kepulauan Riau cukup senjang. Berdasar urutannya, kabupaten/kota dengan pendapatan perkapita tertinggi dinikmati oleh wilayah dengan dominasi sektor pertambangan, diikuti oleh industri dan terakhir sektor pertanian.

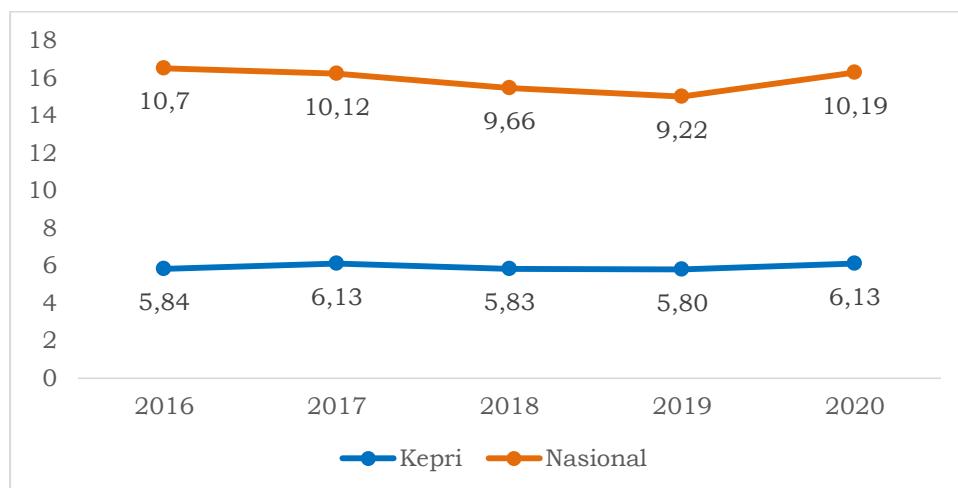
**Tabel 2.21**  
**PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2019**

No	Kabupaten/ Kota	PDRB Perkapita Tahun 2019 (Rp juta)
1	Kabupaten Kepulauan Anambas	415,05
2	Kabupaten Natuna	280,19
3	Kabupaten Bintan	133,63
4	Kota Batam	119,54
5	Kota Tanjungpinang	93,35
6	Kabupaten Karimun	58,15
7	Kabupaten Lingga	47,55
	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>163,92</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka, 2019

#### 4. Persentase Penduduk Miskin

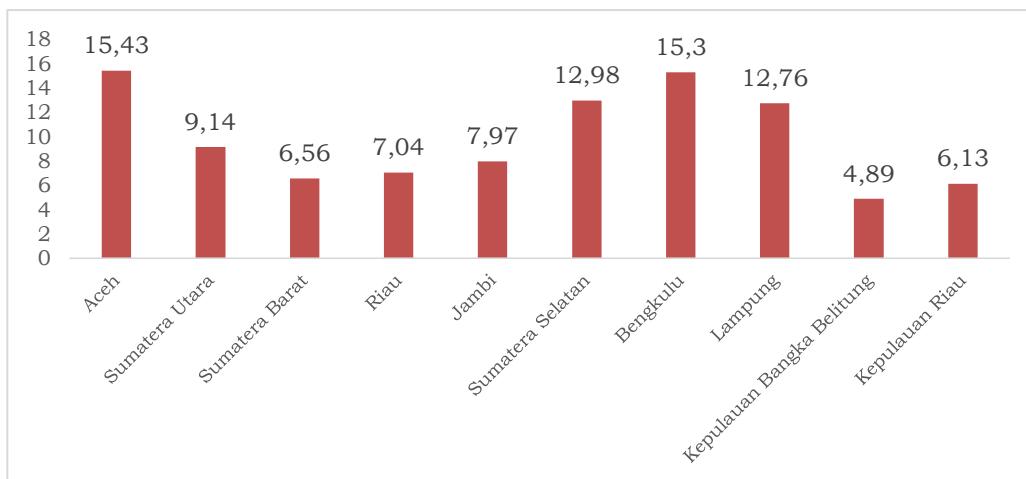
Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 menunjukkan sebesar 6,13% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,80%. Kondisi tersebut sama halnya dengan nasional ditahun 2020 sebesar 9,78% naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sebesar 6,13% berada di bawah tingkat kemiskinan Nasional sebesar 10,19%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.8 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 September (%)**

Dibandingkan dengan provinsi lain di wilayah Sumatera, tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau menempati posisi terendah kedua setelah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (4,53%). Posisi relatif tingkat kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dikemukakan pada gambar berikut.



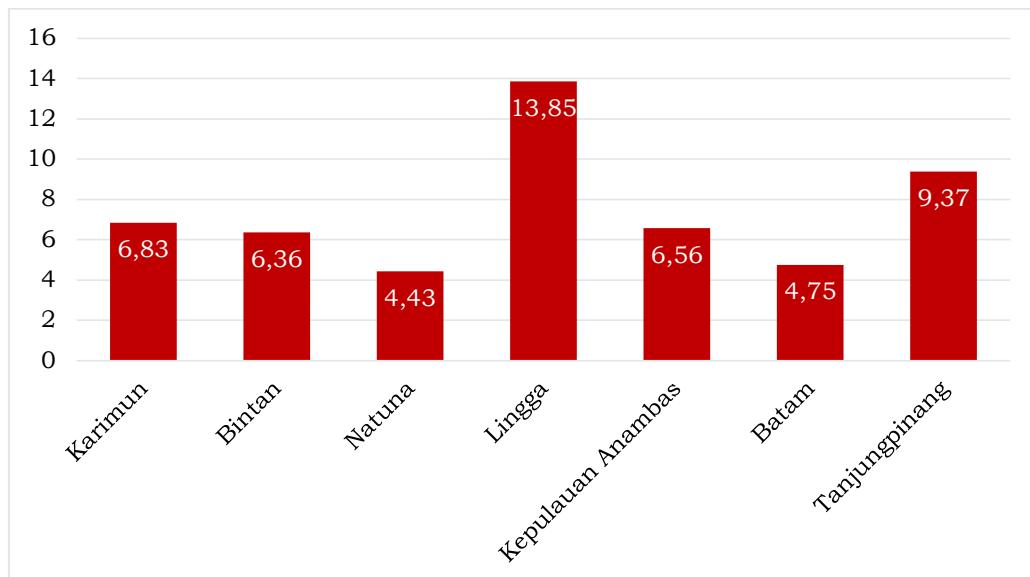
Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Nasional, 2021

**Gambar 2.9 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2020 September (%)**

Berdasarkan data Kemiskinan Maret 2020 persentase penduduk miskin Kepulauan Riau sebesar 5,92%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Lingga menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se-provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 13,85%. Sementara itu tingkat kemiskinan terendah berada di



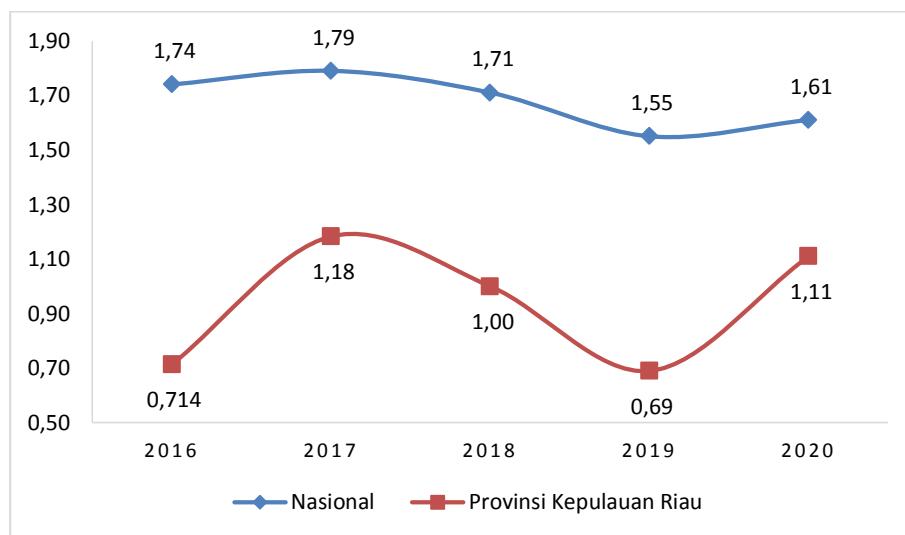
Kabupaten Natuna sebesar 4,43%. Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.10 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Maret (%)**

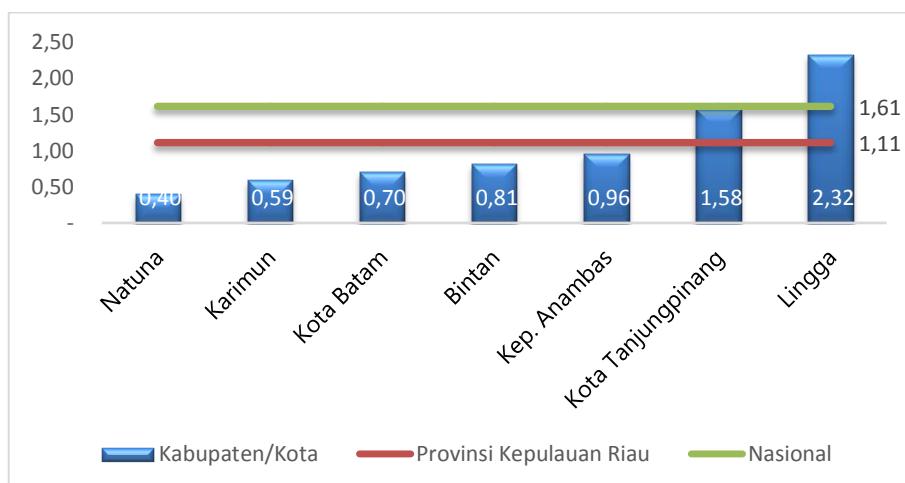
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dilihat dari ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*). Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kepulauan Riau mengalami kenaikan ditahun 2020 menjadi sebesar 1,11 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,69. Kondisi tersebut sama dengan kondisi nasional, dimana tahun 2020 sebesar 1,61 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.11 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

Posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada periode Maret tahun 2020, diketahui P1 Kabupaten Lingga sebesar 2,32 menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu indeks kedalaman kemiskinan terendah berada di Kabupaten Natuna sebesar 0,40. Perbandingan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

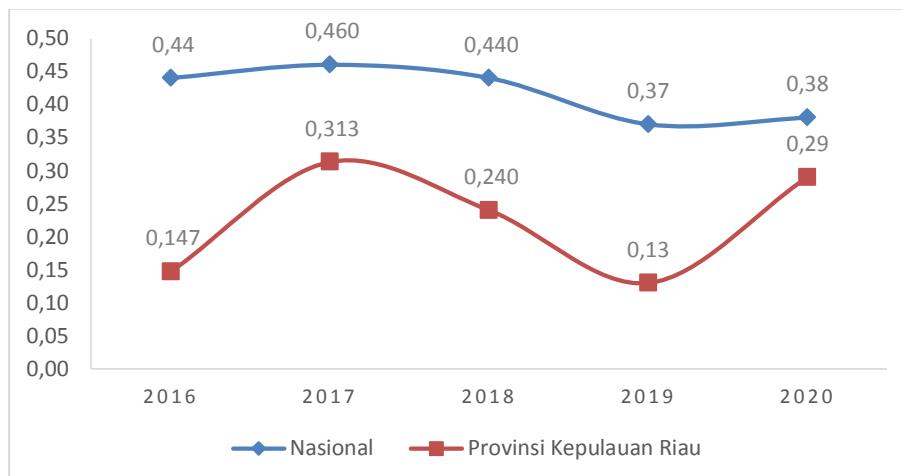


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.12 Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020**



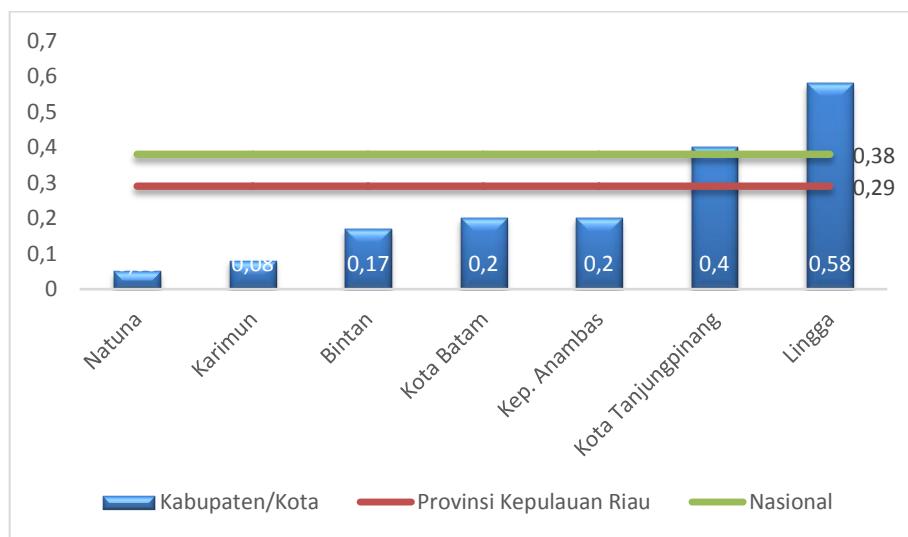
Sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin itu sendiri diukur dengan menggunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P2*), yaitu ukuran indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau ditahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,29 dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 0,13. Kondisi tersebut sama dengan P2 nasional yg ditahun 2020 naik sebesar 0,38 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.13 Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2020**

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau pada periode Maret tahun 2020, diketahui Kabupaten Lingga sebesar 0,58 menempati posisi tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan terendah berada di Kabupaten Natuna sebesar 0,05. Penyebaran Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut ini.

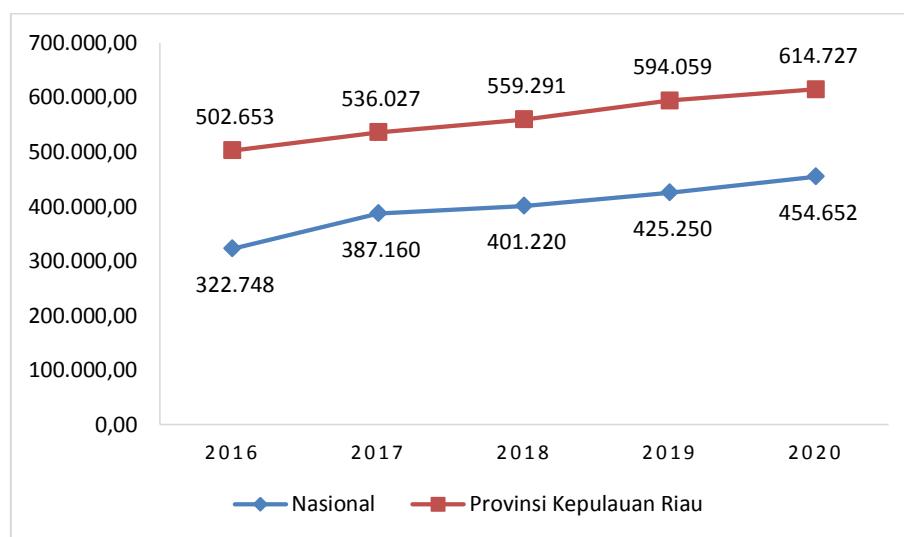


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2020

**Gambar 2.14 Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Periode Maret 2020**

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan garis kemiskinan yaitu nilai rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum pangan dan non-pangan esensial. Garis Kemiskinan adalah harga yang dibayar oleh kelompok acuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi dan lainnya.

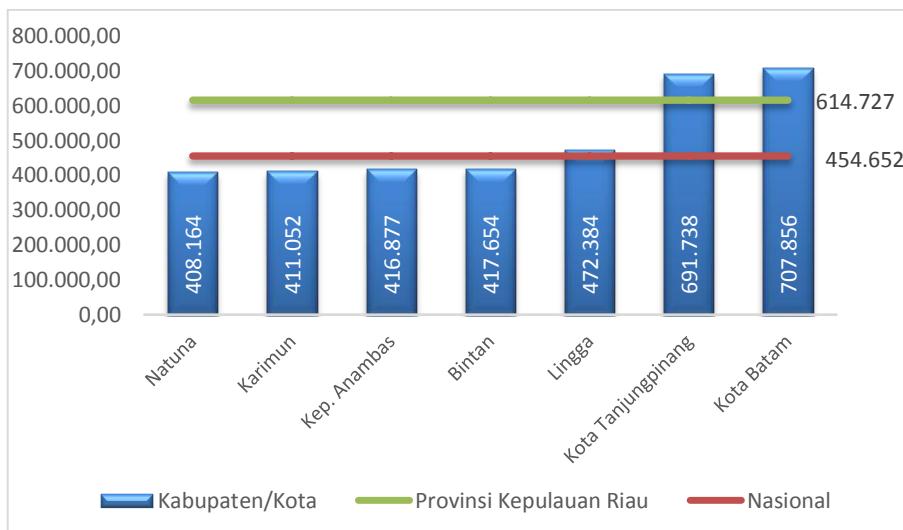
Tren garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan. Tahun 2016 garis kemiskinan sebesar Rp502.653/kapita/bulan meningkat menjadi sebesar Rp614.727/kapita/bulan pada tahun 2020. Kondisi tersebut sama halnya dengan garis kemiskinan nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut ini.



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.15 Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020**

Penyebaran garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 menempati posisi tertinggi berada di Kota Batam sebesar Rp707.856/kapita/bulan, dan berada diatas rata-rata Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional. Sementara itu garis kemiskinan terendah berada di Kabupaten Natuna sebesar Rp408.164/kapita/bulan, dan berada di bawah rata-rata Provinsi Kepulauan dan Nasional. Penyebaran garis kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



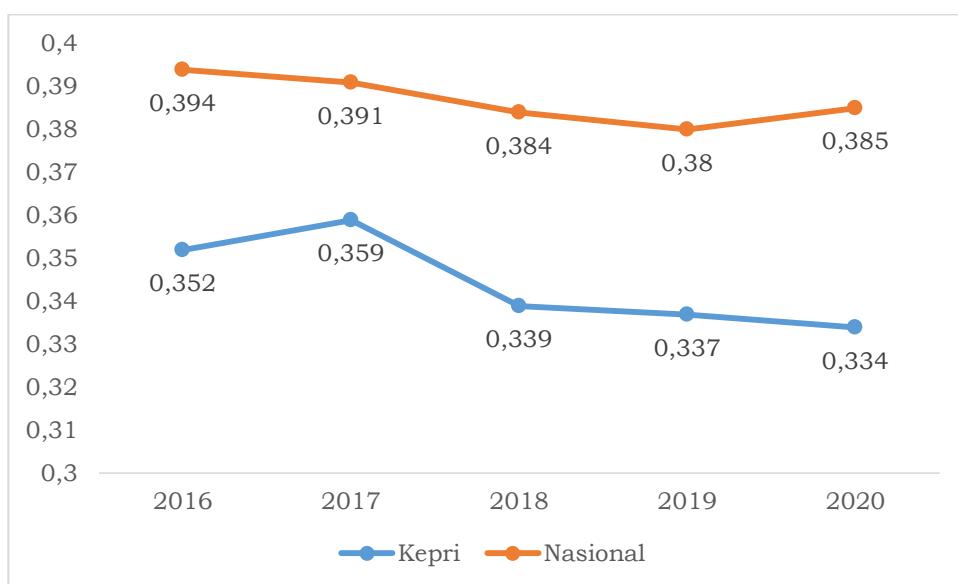
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.16 Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**



## 5. Indeks Gini

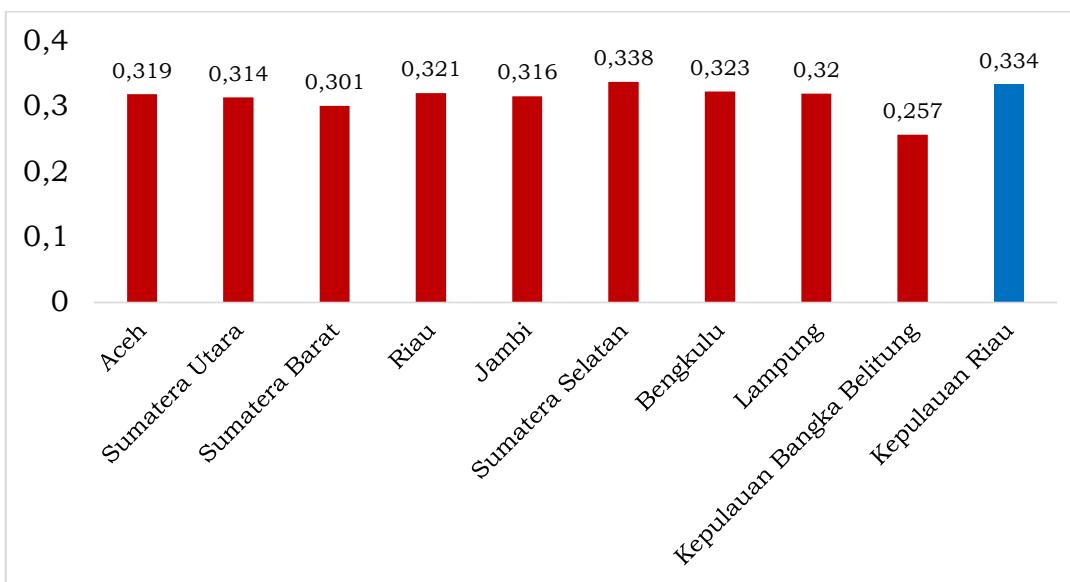
Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks gini bernilai 0 hingga 1. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dikatakan ketimpangan “Rendah” bila Indeks Gini kurang dari 0,3, dikatakan Ketimpangan “Sedang” bila Indeks Gini antara > 0,3 – 0,4; dan Ketimpangan “Tinggi” bila Indeks Gini di atas 0,4. Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 0,334 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,337. Angka ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Kepri, 2021

**Gambar 2.17 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020 September**

Dibandingkan provinsi lain di Wilayah Sumatera tahun 2020, Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,334 tertinggi kedua setelah Provinsi Sumatera Selatan (0,338). Selengkapnya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Nasional, 2021

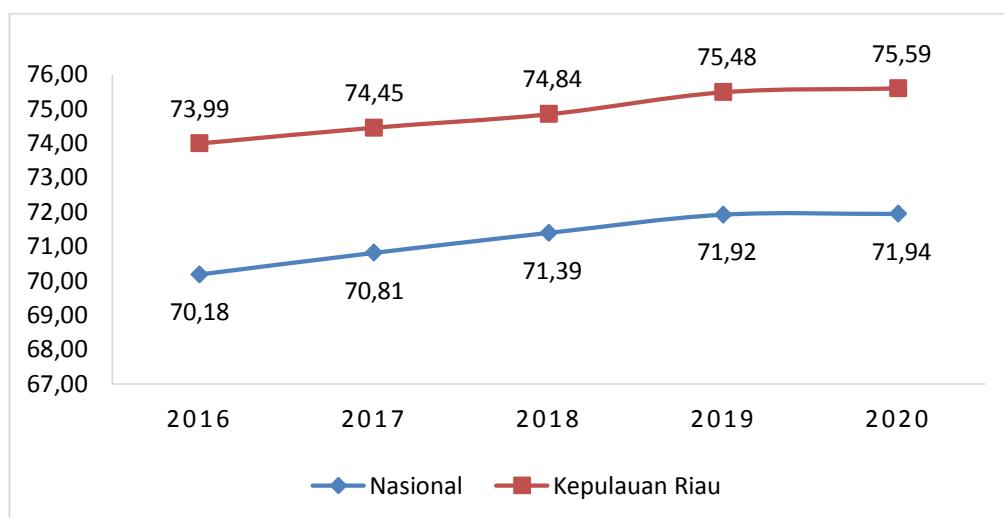
**Gambar 2.18 Perbandingan Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2020 September**

### 2.1.3 Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar (komponen pembentuk): (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*).

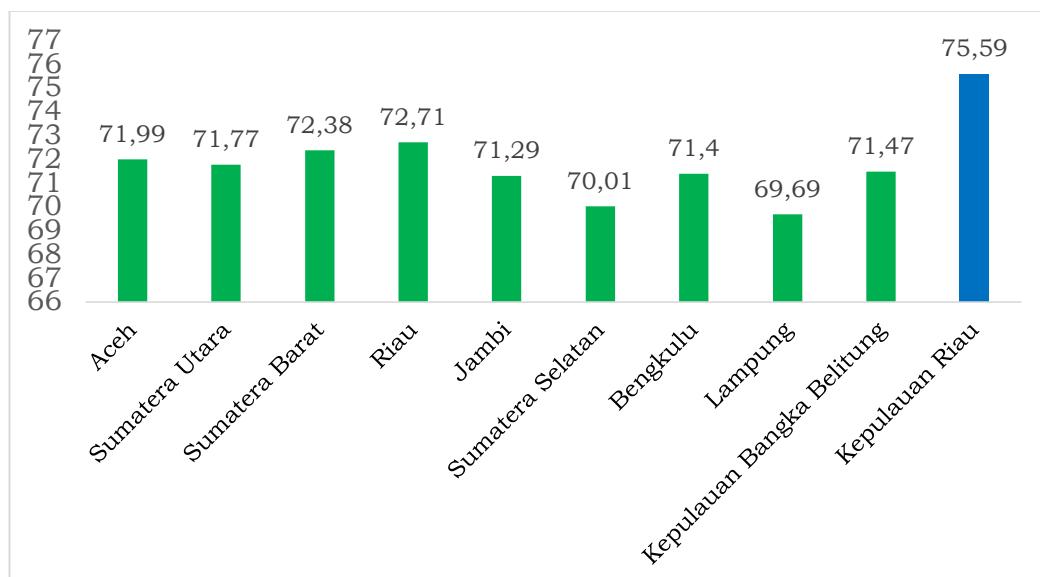
IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 73,99 meningkat menjadi 75,59 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

Dibandingkan provinsi lain di wilayah Sumatera, IPM Provinsi Kepri pada tahun 2020 menempati posisi tertinggi, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

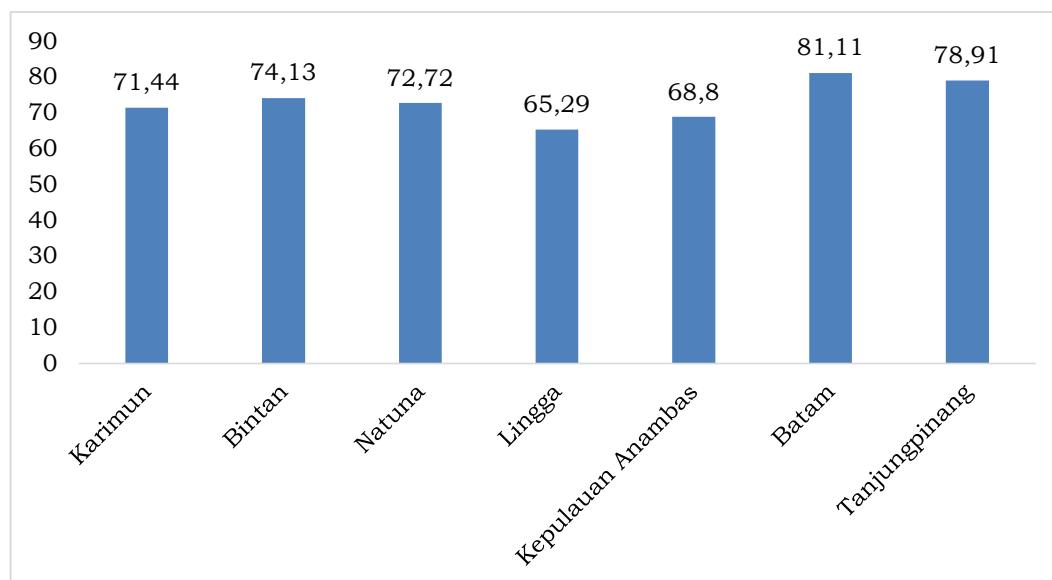


**Gambar 2.20 Perbandingan IPM Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2020**

Pada tahun 2020, Batam telah memiliki IPM dengan status sangat tinggi yaitu sebesar 81,11. Kemudian, terdapat empat kabupaten/kota yang berstatus pembangunan manusia “tinggi”, yaitu Tanjungpinang, Bintan, Karimun, dan Natuna. Sementara itu hingga 2020, masih terdapat dua kabupaten yang berstatus pembangunan manusia “sedang”, yaitu Kepulauan Anambas dan Lingga. Ada tiga



kabupaten/kota dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Kabupaten Karimun (0,478%), Kabupaten Lingga (0,477%), dan Kabupaten Kep. Anambas (0,467%). Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kabupaten Bintan (0,203%), Kabupaten Natuna (0,124%), dan Kota Batam (0,025%) tercatat paling lambat di Kepulauan Riau.



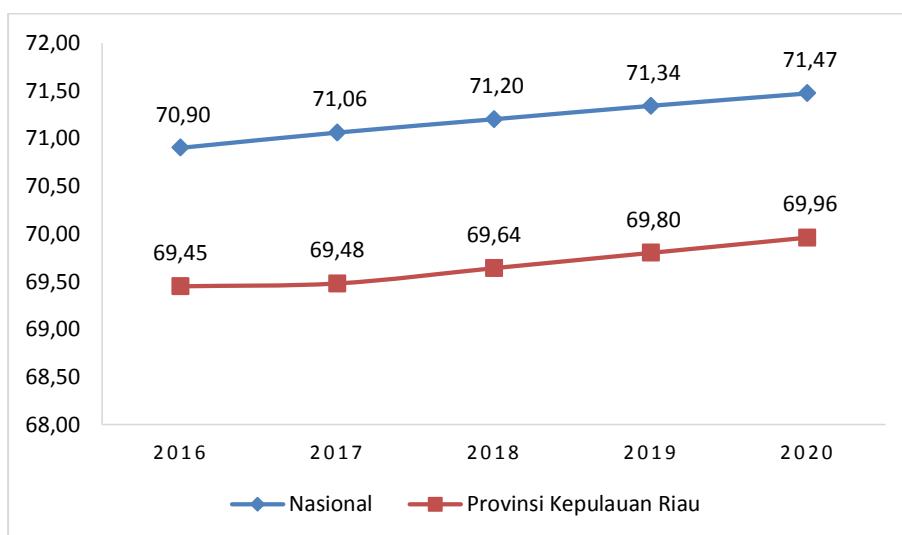
*Sumber: BPS Nasional, 2021*

**Gambar 2.21 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2020**

Gambaran komponen pembentuk IPM Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut:

**a) Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat**

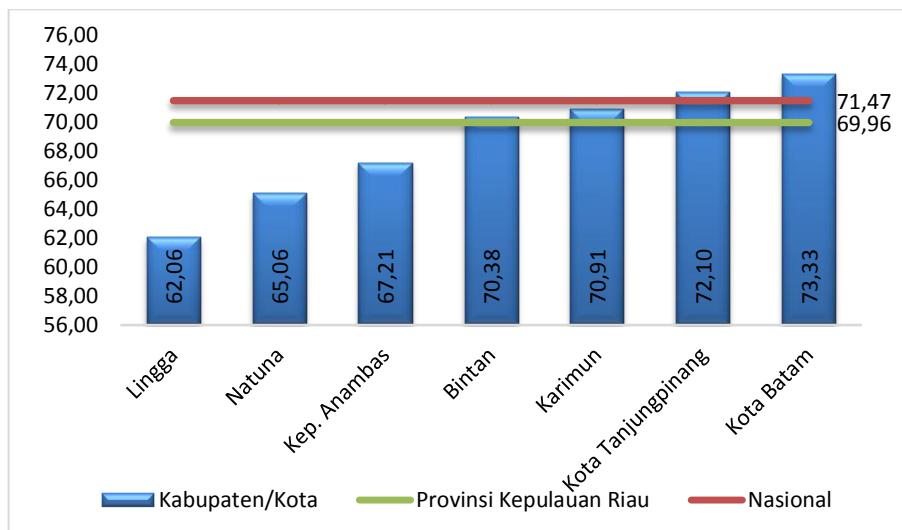
Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Umur Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Kepulauan Riau telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir. Tahun 2016 UHH sebesar 69,45 tahun dan ditahun 2020 menjadi sebesar 69,96 tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.22 Perkembangan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 (Tahun)**

Pada tahun 2020, UHH di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 69,96 tahun. Dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota UHH tertinggi berada di Kota Batam sebesar 73,33 tahun, diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 71,10 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Lingga sebesar 62,06 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



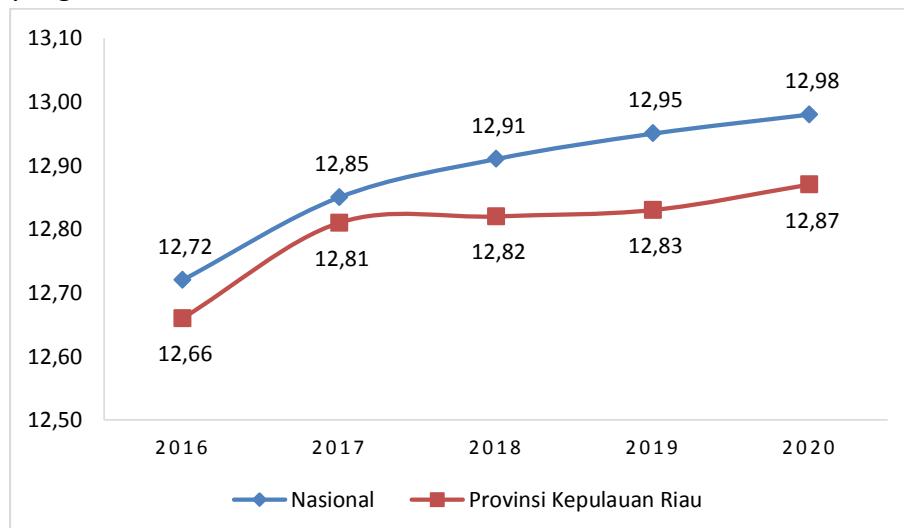
Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.23 Perbandingan Umur Harapan Hidup (UHH) Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2020**



### b) Dimensi Pengetahuan

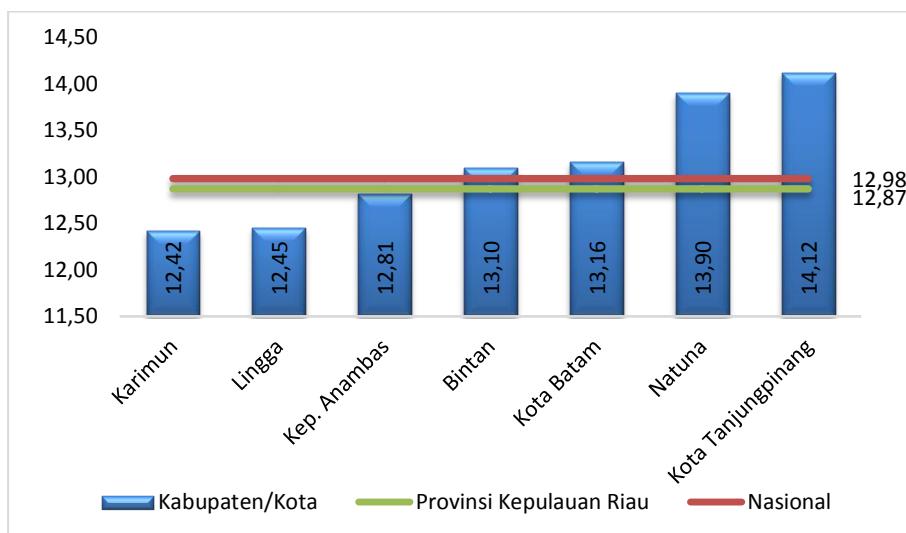
Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah (HLS) terus meningkat dari tahun ke tahun. selama periode 2016 hingga 2020, HLS di Kepulauan Riau telah meningkat dari sebesar 12,66 tahun ditahun 2016 menjadi sebesar 12,87 tahun ditahun 2020, yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA. Meningkatnya HLS menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah.



Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.24 Perkembangan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020 (Tahun)**

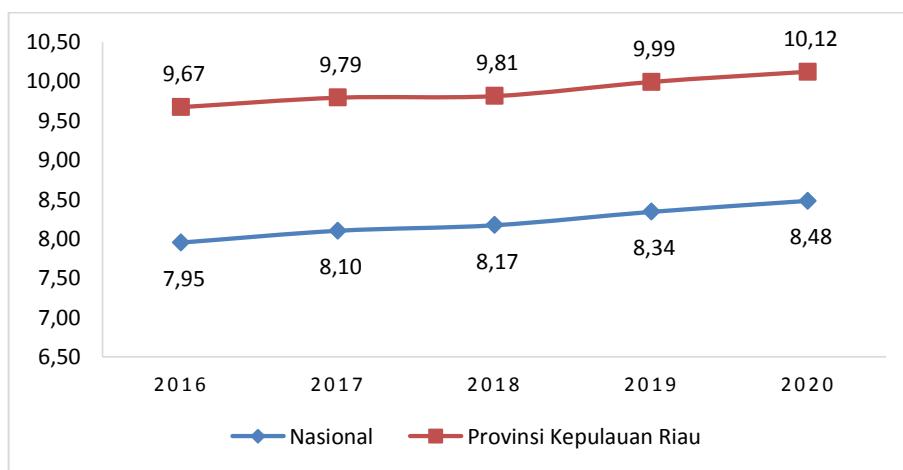
Dilihat pada level Kabupaten/Kota capaian harapan lama sekolah tertinggi berada di Kota Tanjungpinang (14,12 tahun) dan terendah di Kabupaten Karimun (12,42 tahun). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.25 Perbandingan Harapan Lama (HLS) Sekolah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2020**

Sementara itu Rata-rata lama sekolah hingga tahun 2020 secara rata-rata penduduk Kepulauan Riau usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga 10,12 tahun atau setara dengan kelas XI (SLTA kelas II). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian RLS Kepulauan Riau selalu meningkat setiap tahunnya, sama halnya dengan Nasional.

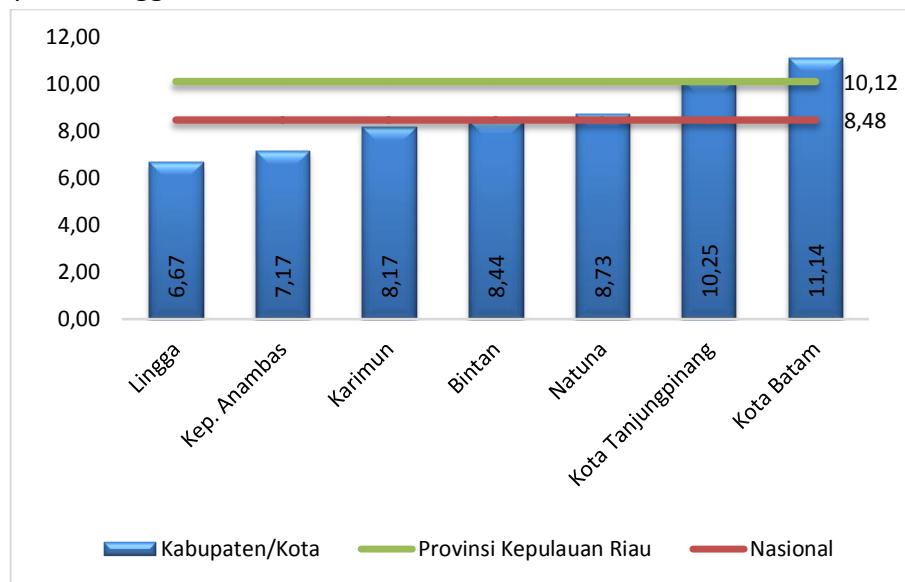


Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.26 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020**



Pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah Kabupaten/Kota tertinggi di Provinsi kepulauan Riau berada di Kota Batam sebesar 11,14 tahun, sedangkan terendah di Kabupaten Lingga sebesar 6,67 tahun.



Sumber: BPS Nasional, 2021

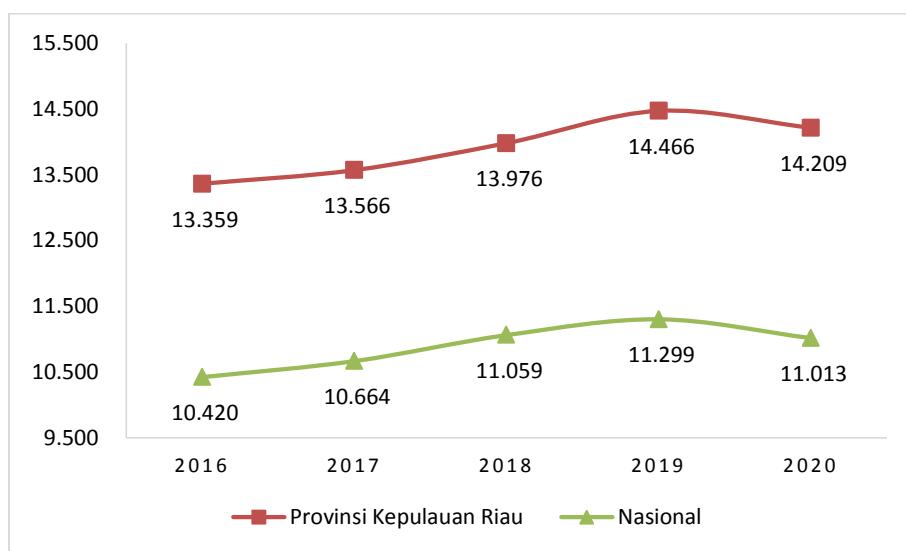
**Gambar 2.27 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Kabupaten/Kota tahun 2020**

**c) Dimensi Standar Hidup Layak**

Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan prioritas daya beli. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita masyarakat Kepulauan Riau mencapai 14.209 ribu rupiah per orang per tahun, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 14.466 ribu rupiah per orang per tahun. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami penurunan di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



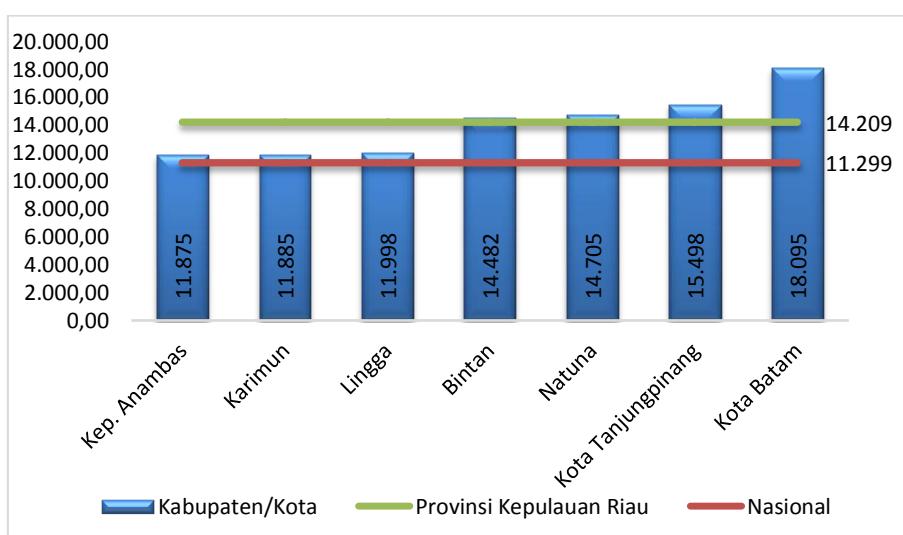
## RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022



Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.28 Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2020**

Pengeluaran per kapita disesuaikan di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2020 tertinggi berada di Kota Batam sebesar 18.095 ribu rupiah per orang per tahun dan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 11.875 ribu rupiah per orang per tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.29 Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**



### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar

##### 1) Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pelayanan pendidikan yang berkualitas akan memiliki kontribusi yang tinggi dalam perwujudan sumberdaya manusia yang berulaitas. Pelaksanaan urusan pendidikan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Pengelolaan pendidikan menengah; Pengelolaan pendidikan khusus; Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus; Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi; Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat; Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan pendidikan dilihat dari sisi ketersediaan pendidikan pada jenjang SMA/MA/SMK/MAK sudah baik, antara lain terlihat dari capaian Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) sebesar 96,02%, Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 77,2%, Angka Putus Sekolah sebesar 0,4%. Sementara itu capaian Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMA/MA/SMK/MAK telah mencapai target tahun 2020, sebesar 95,61% dari target 88,50%. Sementara itu capaian Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik telah mencapai 95,43% dari target sebesar 90,00%.

Dilihat dari sisi mutu pendidikan, Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4 pada tahun 2020 mencapai 95,63% telah melampaui target. Begitu juga dengan indikator Persentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi dengan capaian sebesar 58,51%, dan Persentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha sebesar 60,1%. Indikator Persentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B belum mencapai target dengan capaian sebesar 73,76% dari target sebesar 82,00%. Sedangkan untuk Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN) SMA/MA/SMK/MAK ditahun 2020 UN ditiadakan dikarenakan pandemi covid-19. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19) syarak kelulusan siswa SMA /sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester gelap kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan. Sementara SMK /sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir dan nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai.



Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pendidikan ditunjukkan melalui 14 Indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke 14 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat sebanyak 12 indikator telah mencapai target tahun 2020, dan 2 indikator tidak mencapai target tahun 2020. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut ini.

**Tabel 2.22**  
**Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	<b>Program Pendidikan Menengah dan Khusus</b>										
	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,69	9,69	9,69	9,79	9,81	10,31	10,12	98,16	Tidak Tercapai
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/MAK	%	85,17	85,17	87,11	92,12	92,12	89,00	96,02	107,89	Tercapai
	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SLB	%	NA	NA	70,12	72,00	72	71,00	82,49	116,18	Tercapai
	Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK/MAK	%	74,59	74,59	75,87	77,300	77,3	77,00	77,2	100,26	Tercapai
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK/MAK	%	0,5	0,5	0,44	0,42	0,41	0,40	0,4	100,00	Tercapai
	Persentase Ruang Kelas SMA/MA/SMK/MAK Dalam Kondisi Baik	%	86,68	86,68	85,1	92,10	95,84	88,50	95,61	108,03	Tercapai
	Persentase Ruang Kelas SLB Dalam Kondisi Baik	%	NA	NA	70	94,00	100	90,00	95,43	106,03	Tercapai
	Jumlah penambahan ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Unit	18	18	112	60,00	43	50	70	140,00	Tercapai
	Rasio siswa per ruang kelas SMA/MA/SMK/MAK	Rasio	1:40	1:40	1:35	1:33	01:33	01:36	1:28	91,67	Tercapai
2)	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>										
	Persentase Guru SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang berkualifikasi S1/D4	%	80	84	90,15	95,99	96,11	95,00	95,63	100,66	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program				
			Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status						
3)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan (2018-2021)/ Penggabungan dari 4 Program tahun 2017 yaitu: Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; Program Pendidikan Anak Usia Dini; Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Program Pendidikan Non Formal											
	Percentase SMA/MA/SMK/MAK/SLB yang terakreditasi minimal B	%	75	75,8	72,81	74,00	62,5	82,00	73,76	89,95	Tidak Tercapai	
4)	Program Peningkatan Mutu Pendidikan											
	Percentase lulusan SMA/MA yang diterima di Perguruan Tinggi	%	NA	15	35,42	43,00	56,3	55,00	58,51	106,38	Tercapai	
	Percentase lulusan SMK/MAK yang diterima di Dunia Usaha/Dunia Industri dan berwirausaha	%	NA	15	50	50,00	56,87	55,00	60,1	109,27	Tercapai	
	Rata-rata Nilai Ujian Nasional(UN) SMA/MA/SMK/MAK	Angka	53,14	53,87	53,87	50,59	52,31	54,50	"-	100,00	Tercapai	

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah provinsi terdiri atas: (1) pendidikan menengah; dan (2) pendidikan khusus. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan belum mencapai target sebesar 100%, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.23**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Kinerja
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK (85.880)	100%	96,01%
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB (1.427)	100%	82,48%

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021

Pencapaian SPM yang belum mampu mencapai target dipengaruhi oleh penganggaran kegiatan pendukung SPM secara spesifik belum dapat termuat dalam Dokumen Perencanaan baik Renstra maupun Renja Dinas Pendidikan, walaupun sebenarnya sebagian besar kegiatan yang ada sudah berkesesuaian dengan Indikator Standar Pelayanan Minimal.

## 2) Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat tergambar dari Angka kematian ibu di Kepri dengan capaian sebesar 925 per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 11 per 1.000 KH, persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2020 mencapai sebesar 6,4% dan Cakupan Kabupaten/Kota Sehat sebesar 100%. Capaian Angka kematian ibu menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2019, sementara Angka kematian bayi, dan persentase kekurangan gizi (underweight) pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dari tahun 2019.

Kasus kematian ibu di Provinsi Kepulauan Riau disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan sulitnya menjangkau akses pelayanan kesehatan. Kematian ibu dikarenakan oleh keputusan dalam penyelamatan kehamilan. Keputusan tertinggi berada pada suami, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Selain itu penyebab non medis adalah rendahnya kapasitas perempuan untuk mengambil sementara suami yang memiliki mata pencaharian nelayan tidak selalu mendampingi istri dalam persiapan kelahiran.

Kematian pada bayi antara lain disebabkan oleh asfeksia, BBLR, Tetanus Neonatorum (TN), Sepsis, kelainan congital, dan Icterus. Faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi kurang adalah ketersediaan bahan pangan pada tingkat rumah tangga, salah satunya disebabkan oleh kemiskinan, dan faktor geografis kepulauan yang menghambat dalam mengakses bahan pangan. Dalam



penanganannya, kasus gizi buruk dan gizi kurang yang terjadi dilakukan dengan kerjasama lintas sektor antar instansi pemerintah.

Berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, kinerja ditunjukkan beberapa indikator, antara lain Insidens rate DBD per 100.000 penduduk pada tahun 2019 sebesar 91. Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB 164 per 100.000 penduduk, belum mencapai target tahun 2020 sebesar 170 per 100.000 penduduk.

Kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan, terlihat dari Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi mencapai sebesar 100%; Persentase Puskesmas terakreditasi hanya sebesar 96,51%, Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS 86,1%; Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78,24; Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS) tingkat Paripurna dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,5; Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 49,43% tidak tercapai karena masih berada dibawah target 2020 sebesar 63,00; Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang 51,72%; Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD dan Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang 85,71%; dan Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa sebesar 100%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kesehatan ditunjukkan melalui 25 indikator yang tersebar pada 7 program (program pembangunan). Dari ke 25 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat sebesar 21 indikator dengan telah mencapai target tahun 2020 dan sebanyak 4 indikator belum mencapai target ditahun 2020 diantaranya: (1)Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang ; (3)Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan; dan (4) Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang. Secara rinci realisasi kinerja indikator program pembangunan urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 2.24**  
**Perkembangan Kinerja Urusan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Kesehatan Masyarakat</b>										
	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 KH	per 100,000 KH	144	120	131	130	98	129	92	128,66	Tercapai
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1,000 KH	per 1,000 KH	35*	35	18	15	13	31	11	164,22	Tercapai
	Persentase kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	%	17,07	17,7	16,4	13	11,9	16,50	5,6	166	Tercapai
	Cakupan Kabupaten/Kota Sehat	%	14,3	43	57	71	100	70,00	100	142,86	Tercapai
2	<b>Program pencegahan dan pengendalian penyakit</b>										
	Prevalensi HIV	%	0,38	<0,5	<0,5	<0,5	<0.5	<0,5	<0,05	100	Tercapai
	Case Notification Rate (CNR) Semua Kasus TB per 100,000 penduduk	per 100,000 penduduk	139	171	181	177	316	170	164	103	Tercapai
	Angka Keberhasilan Pengobatan TB (success rate)	%	41	78,6	88	81	87,7	83,00	90,5	108,99	Tercapai
	Insidens rate DBD Per 100,000 penduduk	Per 100,000 penduduk	98	102	38,2	56	91	91	76,15	116	Tercapai
	API (Annual Paracite Incidence) per 1,000 penduduk	per 1,000 penduduk	0,41 (*rata-rata 2011-2015)	0,37	0,2	0,14	0,1	0,29	0,09	169	Tercapai
	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat	%	74,5	88,7	94	91	96,9	93,00	85,3	91,67	Tidak Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2020					Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
	imunisasi dasar lengkap										
	Prevalensi tekanan darah tinggi	%	35	22,4	27	27,4	28,2	28,10	26,28	106	Tercapai
3	<b>Program pelayanan kesehatan</b>										
	Percentase Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 1 RS yang tersertifikasi akreditasi	%	9,09	28,6	71,4	100	100	57,14	100	175,01	Tercapai
	Percentase Puskesmas terakreditasi	%	0	6,49	19,48	79,30	96,5	50,00	96,51	193,02	Tercapai
	Percentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	61	63	71,49	82,6	86,1	78,00	86,1	110,38	Tercapai
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang (Versi KARS)	Status	-	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100	Tercapai
	Status Akreditasi RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban (Versi KARS)	Status	-	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	100	Tercapai
4	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan</b>										
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	75	77,9	78	80,42	80,6	80,00	78,24	97,80	Tidak Tercapai
	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri Tanjung Uban	%	67	71,7	76,5	80	85,5	78,00	81,5	104,49	Tercapai
5	<b>Program pengembangan</b>										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2020					Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
	dan pemberdayaan SDM kesehatan										
	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	%	58	53	50	56,32	77	63,00	49,43	78,45	Tidak Tercapai
	Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang	%	59	54,5	58	73,68	73,7	68,00	51,72	76,06	Tidak Tercapai
	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	55	61	70,2	84,04	82,2	69,00	85,71	124,22	Tercapai
	Persentase tenaga kesehatan terlatih layanan kesehatan jiwa	%	0	0	26,7	53,33	93,3	70,00	100	142,86	Tercapai
6	<b>Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan</b>										
	Persentase ketersediaan obat di pelayanan kesehatan dasar	%	77	75,5	88,5	93,10	92	85,00	93,18	109,62	Tercapai
7	<b>Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya</b>										
	Persentase dokumen perencanaan dan anggaran yang dihasilkan	%	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
	Persentase pegawai Dinas Kesehatan Provinsi	%	99	100	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2020				Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status	
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019				
	Kepulauan Riau dengan nilai kinerja minimal baik										

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan daerah provinsi terdiri atas: (1) pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan (2) pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan telah mencapai target sebesar 100%, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.25**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Kinerja
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah warganegara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapat layanan kesehatan (332.214)	100%	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapat layanan kesehatan (16)	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan, 2021

### 3) Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

Infrastruktur Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan



masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Sumber Daya Air (SDA); Air Minum; Persampahan; Air Limbah; Drainase; Permukiman; Bangunan Gedung; Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Jalan; Jasa Konstruksi; dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 48,64% terealisasi sebesar 46,5%; Persentase jalan provinsi berkondisi baik, ditargetkan sebesar 73,24% terealisasi pada tahun 2020 sebesar 74,51%; panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi ditargetkan sebesar 52,85% terealisasi 62,62%. Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik di targetkan sebesar 83,51% terealisasi 87,35%; dan Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda di targetkan sebanyak 3 perda namun belum terealisasi di tahun 2020.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan melalui 12 Indikator yang tersebar pada 8 program (program pembangunan). Dari ke-12 indikator yang telah rilis data tahun 2020 yang tercapai sebanyak 8 indikator, sedangkan yang tidak tercapai sebanyak 4 indikator. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.26**  
**Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pengelolahan Sumber Daya Air										
	Persentase Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	%	33,64	36,64	35,05	46,5	46,50	48,64	46,5	95,60	Tidak Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	pada sistem irigasi yang sudah ada										
	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	62,6	64,1	64,82	70,42	73,13	74,10	74,96	101,16	Tercapai
	Jumlah titik rawan banjir	Lokasi	32	30	28	25	22,00	18,00	20	111,11	Tercapai
2	<b>Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>										
	Persentase jalan Provinsi berkondisi baik	%	71,37	66,22	67,3	70,31	73,64	73,24	74,51	101,73	Tercapai
	Persentase jembatan Provinsi berkondisi baik	%	71,27	78,67	80,11	80,11	80,11	83,51	87,35	104,60	Tercapai
3	<b>Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan</b>										
	Tingkat Konektivitas Antar Wilayah Strategis (panjang jalan baru yang dibangun yang menghubungkan antar wilayah strategis)	km	2,89	4,65	6,97	16,2	25,96	32,29	32,33	100,12	Tercapai
	panjang jalan yang ditingkatkan sesuai mutu layanan jalan Provinsi	km	8,81	14,59	25,47	28,67	45,80	52,85	62,62	118,49	Tercapai
4	<b>Program Pembinaan Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi</b>										
	Persentase Pemenuhan Nilai Layanan Dasar SIPJAKI	%	0	0	30	80	80,00	90,00	90	100,00	Tercapai
5	<b>Program Pembinaan Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi (tenaga ahli konstruksi)	Orang	NA	NA	60	147	223,00	200	185	92,50	Tidak Tercapai
6	<b>Program Layanan Pengujian Jasa Konstruksi</b>										
	Persentase capaian kontribusi retribusi laboratorium pengujian jasa konstruksi terhadap total retribusi daerah	%	0	1,6	1,26	1,6	3,18	0,06	3,18	5.157,92	Tercapai
7	<b>Program pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang</b>										
	persentase kab/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	NA	NA	14,28	28,57	57,14	85,71	85,71	100,00	Tidak Tercapai
8	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>										
	Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda	perda	0	0	0	0	0,00	3	0	0	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah provinsi terdiri atas: (1) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota; dan (2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pekerjaan umum telah mencapai target sebesar 100% untuk indikator Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota, sedangkan indikator jumlah warga negara yang



memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik belum mencapai target, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.27**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Kinerja
1.	Pemenuhan kebutuhan Air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (51 KK)	100%	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	0

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

#### **4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia, maka perlu adanya adanya penciptaan kondisi yang dapat mendorong pembangunan perumahan untuk menjaga kelangsungan penyediaan perumahan dan permukiman. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan pada sub urusan Perumahan; Kawasan Permukiman; Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Gambaran perkembangan indikator tahun 2020 untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan untuk indikator luasan kawasan kumuh, dimana target tahun 2020 sebesar 379,57 Ha dengan realisasi sebesar 399,8 Ha. Untuk Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman, belum mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 97,59%, baru terealisasi sebesar 92,68%.

Cakupan pelayanan Sanitasi yang mencakup air limbah, persampahan dan drainase pada tahun 2020 masih belum mencapai target. Cakupan persampahan baru mencapai 83,84%, cakupan air limbah baru mencapai 59,99%; dan cakupan drainase baru mencapai 45,10%.



Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman ditunjukkan melalui 6 Indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke-6 indikator yang telah rilis data tahun 2020 bahwa sebanyak 1 indikator telah mencapai target dan 5 indikator berstatus tidak tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.28**  
**Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Dukungan Layanan Dasar Permukiman dan Perumahan										
	Luas kawasan kumuh	ha	823,44	823,44	752,62	529,82	476,85	379,57	399,8	94,94	Tidak Tercapai
2	Program pengembangan kinerja pengelolaan air bersih/air minum										
	Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman	%	72,01	72,01	89,44	92,15	92,47	97,59	92,68	94,97	Tidak Tercapai
3	Program Peningkatan Pemenuhan Akses Sanitasi										
	Cakupan pelayanan Sanitasi :										
	Air Limbah	%	81,81	81,81	86,41	86,62	87,06	96,36	83,84	87,01	Tidak Tercapai
	Persampahan	%	54	54	56	59,93	59,99	64,00	59,99	93,73	Tidak Tercapai
	Drainase	%	27,24	27,24	32,24	36,48	37,26	47,24	45,10	95,47	Tidak Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
4	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan										
	Persentase fasilitas bangunan publik/fasilitas umum dan lingkungan di KSP/KSN yang terbangun per Tahun	%	0	0	15	18	20	23,00	23,00	100	Tercapai

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan daerah provinsi terdiri atas: (1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 tidak mempunyai program kegiatan yang berimplikasi kepada relokasi pemukiman masyarakat. Dengan demikian pemerintah tidak menganggarkan program kegiatan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.29**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Kinerja
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100%	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	Jumlah Warga negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak	100%	-



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Kinerja
	provinsi	Huni		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021

##### 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi (1) Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, (2) Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur, (3) Pembinaan PPNS provinsi, (4) Penanggulangan bencana provinsi, dan (5) Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran.

Terkait dengan ketentram dan ketertiban umum, capaian kinerja indikator-indikator kuncinya masih belum optimal. Indikator Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur tahun 2020 tidak ada pelanggaran. Selanjutnya jumlah indikator Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri juga masih belum mencapai target capainnya baru sebesar 22 orang di tahun 2020. Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan juga belum mencapai target di tahun 2020 realisasi capaian masih 43%. Indikator Persentase Kab/ Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran, capaianya baru 42,85% di tahun 2020. Dari lima indikator yang ada hanya satu indikator yang dapat memenuhi target yang ditetapkan, yakni persentase demo yang berjalan aman capainnya sebesar 100%.

Secara lengkap kinerja ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.30**

##### Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Penerapan dan Penegakan Hukum serta HAM										
	Jumlah Pelanggaran Peraturan	Kasus	NA	272	240	240	235	185	0	100	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Daerah Dan Peraturan Gubernur										
	Jumlah PPNS di lingkungan Pemerintah Kepri	Orang	NA	16	16	22	23	45	22	49	Tidak Tercapai
2	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>										
	Persentase demo yang berjalan aman	%	90	91	92	100	100	97,00	100	103	Tercapai
3	<b>Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan</b>										
	Persentase Anggota Satlinmas yang memiliki kompetensi dalam Pengendalian dan Kenyamanan Lingkungan	%	7,3	55	41	42	43	75,00	43	57	Tidak Tercapai
4	<b>Program Penanggulangan Kebakaran</b>										
	Persentase Kab/Kota yang Tersedianya peta rawan kebakaran	%	0	0	28,57	28,57	42,85	85,71	42,85	49,99	Tidak Tercapai

Sumber: Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau , 2021

Urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga dapat dilihat kinerjanya dari penanganan kebencanaan. Kinerja pengelolaan bencana di Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2017-2020 menunjukkan kondisi yang semakin membaik, hal tersebut dapat dilihat dari



capaian kinerja masing-masing indikator yang semuanya sudah sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

**Tabel 2.31**

**Capaian Kinerja Kebencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>										
	Percentase desa/kel tangguh bencana	%	NA	NA	1,2	1,2	3,61	2,64	0,48	18,18	Tidak Tercapai
2	<b>Program Penanganan Tanggap Darurat Bencana</b>										
	Percentase kejadian bencana kab/kota yang tertangani dengan baik	%	100	100	100	100	100,0 0	100	98,00	98,00	Tidak Tercapai
3	<b>Program Pemulihan Pasca Bencana</b>										
	Jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan	Jumlah	NA	NA	1	2	2	2	1	50,00	Tidak Tercapai

*Sumber: BPBD Provinsi Kepulauan Riau, 2021*

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 8 Indikator yang tersebar pada 7 program (program pembangunan). Dari ke 8 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat sebanyak 2 indikator yang telah tercapai, dan 6 indikator yang belum tercapai targetnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu: Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi. Pada tahun 2020 tidak terdapat warga negara yang mengalami kerugian akibat dari penegakan hukum perda dan



perkada di provinsi. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.32**

**Realisasi Pencapaian SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum  
Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Kinerja
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di provinsi	100%	-

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2021

## 6) Sosial

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Sosial seperti yang termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: (1) Penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi; (3) Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal; (4) Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti; (5) Penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal; (6) Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi; (7) Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi.

Salah satu indikator utama bidang sosial adalah terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Untuk mengatasi kemiskinan, salah satu yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin. Dari tahun 2015 sampai tahun 2020 keluarga miskin yang telah mendapatkan bantuan melalui mekanisme usaha ekonomi produktif terlihat meningkat, meskipun capaiannya masih sangat kecil yakni 1,05%. Sedangkan untuk keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya kondisinya fluktuatif, yakni dari 5,59% di tahun 2015 meningkat menjadi 51,53% di tahun 2017, lalu turun lagi menjadi 38,09% pada tahun 2019 selanjutnya ditahun 2020 meningkat sebesar 53,97%.

Permasalahan lain yang ditangani dalam urusan sosial adalah penanganan PMKS (Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial). Penanganan



PMKS didasarkan atas jenis-jenis PMKS yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian kinerja penanganan PMKS belum begitu optimal dikarenakan rata-rata capaianya masih rendah dibandingkan dengan total PMKS yang ada.

Sementara itu, untuk menunjang kinerja penanganan PMKS, pemerintah Provinsi juga melibatkan lembaga-lembaga penyelenggara pemberdayaan sosial, dan juga tenaga-tenaga kesejahteraan sosial masyarakat. Lembaga/organisasi sosial yang bergerak dalam penanganan PMKS tersebut secara rutin dan berkala selalu mendapatkan pembinaan dari pemerintah. Frekuensi pembinaan terhadap lembaga tersebut selalu meningkat dari tahun ketahun. Demikian pula terkait dengan tenaga kesejahteraan sosial kemasayarakatan yang dibina, perenstasenya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Secara lengkap kinerja urusan sosial sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.33**

**Capaian Kinerja Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Penanggulangan Kemiskinan</b>										
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	%	0,27	0,37	0,61	0,61	0,81	1,38	1,05	76,15	Tidak Tercapai
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan melalui mekanisme Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,31	0,47	150,00	Tercapai
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	5,59	26,88	51,53	38,09	38,09	41,19	53,97	131,02	Tercapai
2	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>										
	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	%	0,1	0,19	0,24	0,27	0,29	0,31	0,61	198,43	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
								Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	berbasis lembaga (panti dan LKS)										
	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,13	2,1	4,91	6,03	7,02	9,91	8,05	81,28	Tidak Tercapai
	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,56	1,4	23,06	23,76	25,86	28,72	27,04	94,16	Tidak Tercapai
	Persentase tunasosial yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	0,68	0,85	1,3	1,42	1,57	1,96	1,69	86,27	Tidak Tercapai
	Persentase korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan manusia yang mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS)	%	78,37	78,37	44,76	9,81	15,88	78,37	8,44	10,77	Tidak Tercapai
	Persentase lembaga penyelenggara pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	26,49	35,68	38,92	43,78	49,73	65,41	51,89	79,34	Tidak Tercapai
3	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>										
	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan	%	0	19,67	19,33	25,00	25,83	25,00	25,00	100,00	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	pemenuhan kebutuhan dasar										
	Percentase PMKS ruang lingkup Jaminan Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	30,36	30,36	30,36	39,37	37,71	60,35	38,08	63,10	Tidak Tercapai
4	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>										
	Percentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	8,03	11,04	20,4	28,43	42,81	51,51	46,15	89,61	Tidak Tercapai
	Percentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	0	0	8,12	32,49	49,24	62,94	79,70	126,61	Tercapai
	Percentase pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan yang mendapat bantuan kesejahteraan sosial	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
5	<b>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana-Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>										
	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibangun atau	unit	1	1	1	1	1	2,00	5,00	250,00	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	disediakan										
	Jumlah sarana-prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dipelihara	unit	1	1	1	1	1	3,00	1,00	33,33	Tidak Tercapai
6	<b>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</b>										
	Persentase pemangku kepentingan yang mendapat penyuluhan sosial	%	1,44	1,44	7,22	9,42	13,91	10,32	13,91	134,82	Tercapai
	Persentase kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendapat monitoring dan evaluasi	%	28,57	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan sosial di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 18 Indikator yang tersebar pada 6 program (program pembangunan). Dari ke 18 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat sebanyak 9 indikator yang telah tercapai, dan 9 indikator yang tidak tercapai targetnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial yaitu:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) di dalam panti;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.



Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial semuanya sebanyak 5 indikator telah mencapai 100%, dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.34**  
**Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi Kinerja
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;	Percentase Penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (252)	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;	Percentase anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (602)	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;	Percentase lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (554)	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) di dalam panti;	Percentase tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (13)	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	Percentase korban bencana alam dan korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (1500)	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial, 2021

#### **2.1.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

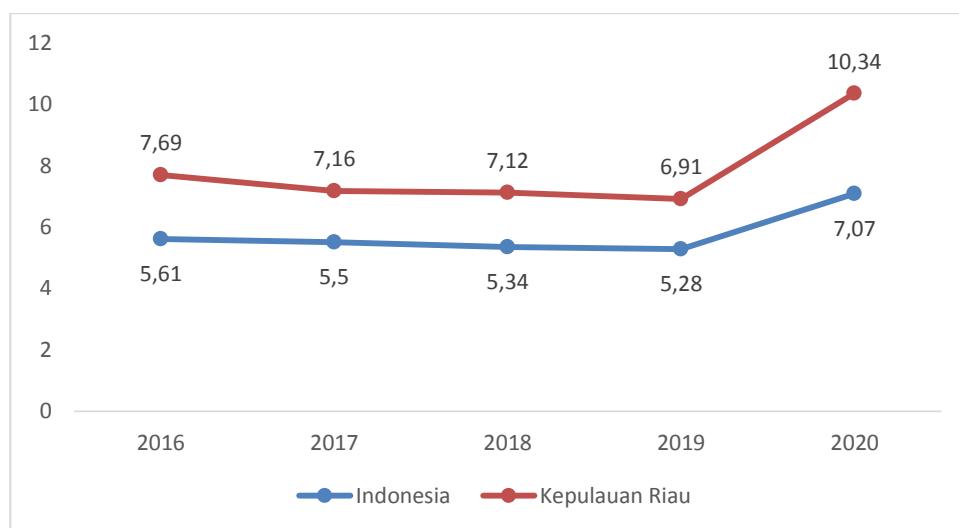
##### **1) Tenaga kerja**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi pada urusan tenaga kerja memiliki kewenangan terkait dengan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2020 sebanyak 1.133.776 orang, naik 64.802 orang dibanding Agustus 2019. Terdapat 288.549 orang (16,87% penduduk usia kerja) yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (42.210 orang), BAK karena Covid-19 (8.587 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (12.568 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (225.184 orang).



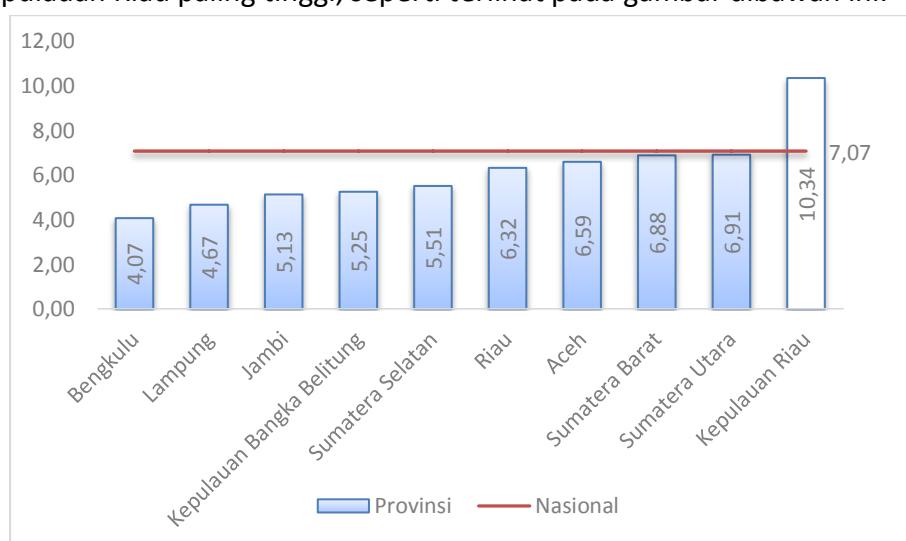
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau Agustus 2020 sebesar 10,34%, mengalami peningkatan sebesar 2,84% poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan rata-rata TPT Nasional yaitu sebesar 7,07%.



Sumber : BPS Prov. Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 2.30 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2016-2020**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 mencapai 10,34%. Dibandingkan dengan Provinsi lain di Wilayah Sumatera pada Tahun 2020 (Agustus), tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Kepulauan Riau paling tinggi, seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

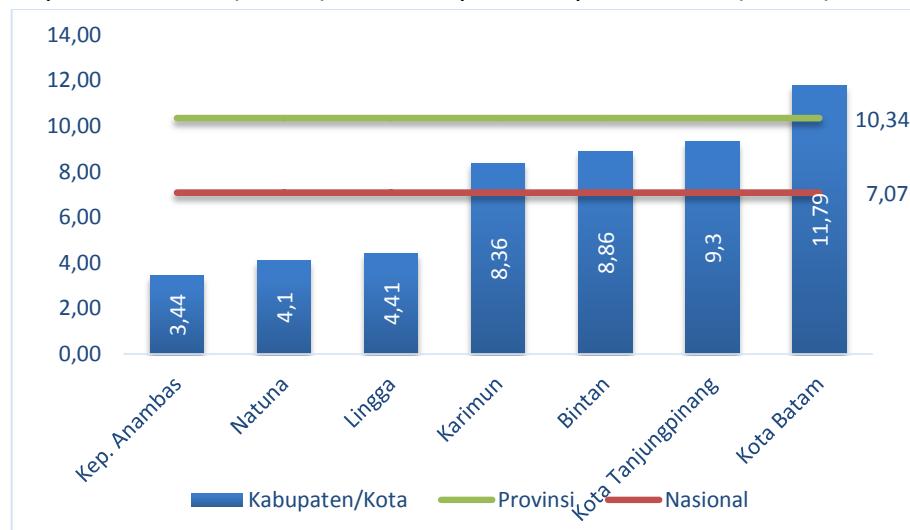


Sumber: BPS, berita resmi statistik nasional, 2021

**Gambar 2.31 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Lain di Wilayah Sumatera Tahun 2020 (Agustus) (%)**



Posisi relatif Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020, ditunjukkan bahwa Kota Batam (11,79%) TPT nya paling tinggi berada di atas Provinsi Kepulauan Riau (10,34%) dan Nasional (7,07%) selanjutnya yang berada dibawah rata-rata TPT Provinsi Kepulauan Riau dan diatas nasional adalah Kota Tanjungpinang (9,30%), Kabupaten Bintan (8,86%), Kabupaten Karimun (8,36%). Sementara yang berada dibawah Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional ada Kabupaten Lingga (4,41%), Kabupaten Natuna (4,10%) dan Kabupaten Kep. Anambas (3,44%).



Sumber : BPS, Berita Resmi Statistik Nasional, 2021

**Gambar 2.32 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kinerja urusan tenaga kerja dalam kurun waktu 2017-2020 Terkait dengan kualitas tenaga kerja, dapat dilihat bahwa indikator Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya, capaian ditahun 2020 sebesar 11,82% kondisi tersebut tidak sesuai yang ditargetkan ditahun 2020 sebesar 48,13%. Kegiatan Pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja maupun yang bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta banyak yang tidak dilaksanakan karena terjadi kebijakan refocusing anggaran pada Triwulan II 2020. Di samping itu juga untuk mendukung pelaksanaan pencegahan Covid-19 melalui pembatasan aktivitas pertemuan langsung di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2020.

Indikator Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan ditahun 2020 sebesar 42,86% meningkat dibandingkan tahun 2019, tetapi capaian ditahun 2020 tidak masih dibawah target (43,13%), dikarenakan Selama situasi pandemi Covid-19 rendahnya penyerapan tenaga



kerja berdampak juga pada lulusan BLK ditahun 2020 capaian nya hanya sebesar 21,88%. Di samping penyerapan tenaga kerja yang rendah juga beberapa kegiatan pelatihan di BLK maupun LPK yang tertunda akibat adanya kebijakan terkait keuangan maupun pelaksanaan pencegahan covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu tahun 2020.

Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi ditahun 2020 capaiannya 0%. kondisi tersebut dikarenakan kebijakan refocusing anggaran untuk mendukung pelaksanaan pencegahan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau selama kurun waktu 2020.

Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan sebesar 10,34% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian indikator Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan mengalami peningkatan menjadi 67,50% dari sebelumnya hanya 64,76% di tahun 2019. Indikator Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga mengalami peningkatan menjadi 94,8%; Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 juga mengalami peningkatan menjadi 3,65%; Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani realisasinya sebesar 74,71%; dan Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan capaianya sebesar 100%. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.35**

**Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b>										
	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	95	47,63	100	48,49	79,79	48,13	11,82	24,57	Tidak Tercapai
	Besaran Calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	85	42,63	0	52,3	40,53	43,13	42,86	99,37	Tidak Tercapai
	Persentase Lulusan BLK yang diterima kerja	%	80	80	75	86,04	70	88,00	21,88	24,86	Tidak Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Jumlah calon tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi bidang kemaritiman	orang	0	0	32	20	40	16,00	38	237,50	Tercapai
2	<b>Program Penempatan dan perluasan Kesempatan Kerja</b>										
	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	52	54	48,8	60,5	60,69	62,00	64,31	103,72	Tercapai
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	65,07	66	66,41	64,72	64,76	67,43	67,50	100,10	Tercapai
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,2	7,69	7,16	7,12	6,91	6,74	10,34	46,59	Tidak Tercapai
3	<b>Program Perlindungan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Tenaga Kerja.</b>										
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	42,75	70	70	89%	88,72	90,00	94,8	105,33	Tercapai
	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3	%	0,7	1	1,2	12%	2,74	3,00	3,65	121,67	Tercapai
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	65	65	62	100	83,72	85,00	74,71	87,89	Tidak Tercapai
4	<b>Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</b>										
	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang diselesaikan	%	20	23	97,4	100	100	27,00	100	370,37	Tercapai

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 11 Indikator pada

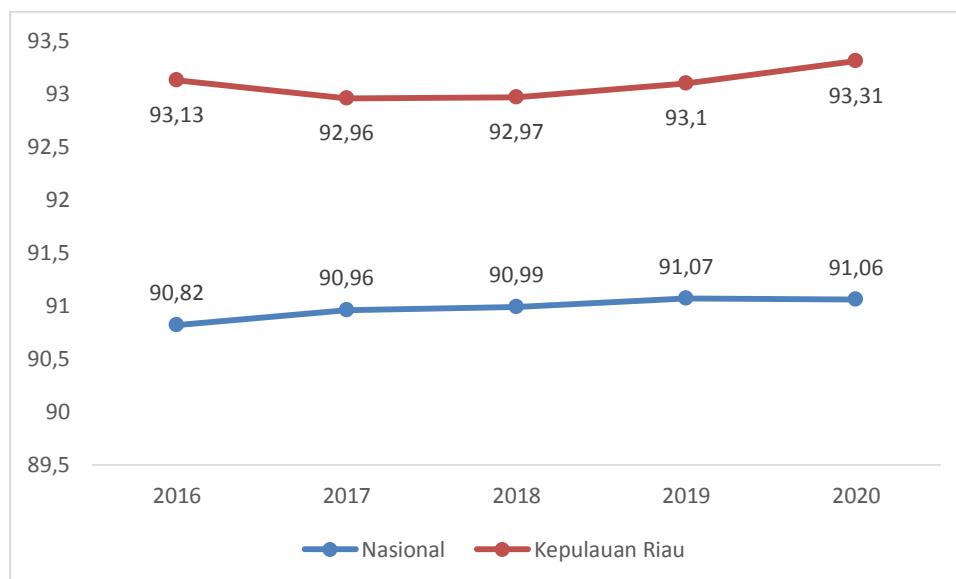


4 program (program pembangunan). Dari 11 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat 6 indikator yang belum tercapai targetnya dan 5 indikator sudah tercapai dari yang ditargetkan.

### 2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Kinerja pemberdayaan perempuan antara lain dapat diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IPG merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kemampuan pembangunan manusia dari perspektif gender (perbandingan laki-laki dengan perempuan). Indeks Pembangunan Gender menggunakan indikator yang sama dengan IPM namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun 2016 sebesar 93,13 menjadi sebesar 93,31 pada tahun 2020. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Nasional yang mengalami kenaikan selama kurun waktu 5 tahun.



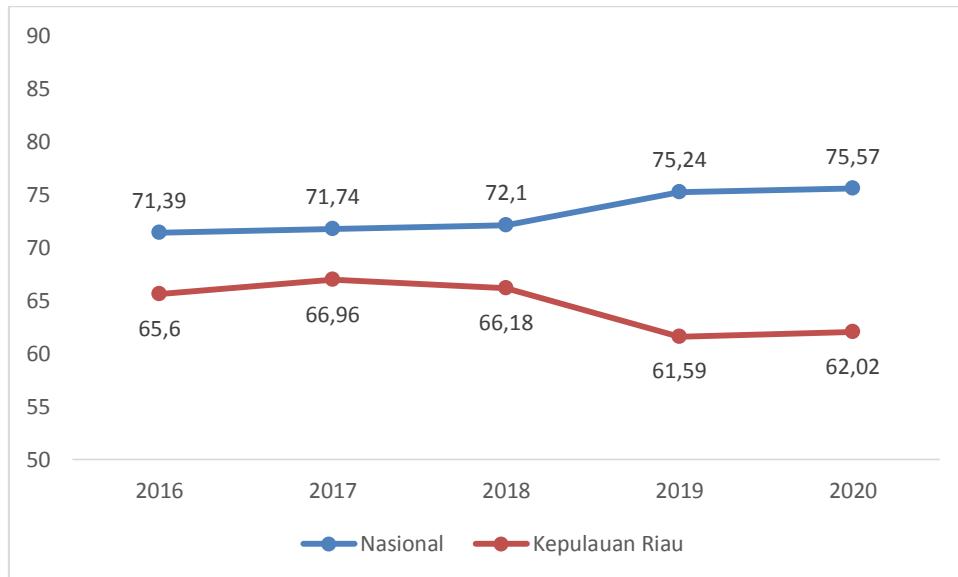
Sumber : BPS, 2021

**Gambar 2.33 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur sejauhmana keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebutuhan dan permasalahannya dapat mempengaruhi serta teraktualisasi dalam hasil keputusan kebijakan pembangunan yang menyangkut kepentingan perempuan baik di lembaga



legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Perkembangan IDG Provinsi Kepulauan Riau cenderung menurun dari sebesar 62,6 pada tahun 2016 menjadi sebesar 62,02 pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2021

**Gambar 2.34 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

Kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau, indikator Persentase anggaran responsif gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi menunjukkan penurunan ditahun 2020 sebesar 5,34% dibanding tahun 2019 sebesar 11,24%. Kondisi tersebut tidak tercapai dari yang ditargetkan yaitu 6,50%, dikarenakan Adanya refocusing anggaran akibat Pandemi Covid-19 sehingga anggaran responsif gender dari masing-masing OPD banyak yang tidak dapat dilaksanakan.

Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak juga semakin membaik. Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan peningkatan sebesar 33,42% dari tahun sebelumnya 30,52%. Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama capaiannya sudah menunjukkan sebesar 100%. Rasio Kekerasan terhadap Anak capaiannya sebesar 2,9 per 10.000 anak.

Kualitas keluarga kondisinya masih dibawah yang ditargetkan ditahun 2020, ditunjukkan dengan Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill capaian baru sebesar 1,30%.

Secara lengkap kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.36

**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak										
	Persentase anggaran responsif gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi	%	4,10	4,68	6,4	9,32	11,24	6,50	5,34	82,15	Tidak Tercapai
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan										
	Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000 Perempuan	33,19	33,18	27,7	28,08	30,52	30,01	33,42	89,79	Tercapai
3	Program Perlindungan Anak										
	Persentase Kab/Kota yang melaksanakan KLA dengan pencapaian Peringkat Pratama	%	28,57	28,57	57	71,43	100	57,14	100	175,00	Tercapai
	Rasio Kekerasan terhadap Anak	Per 10.000 anak	4,28	4,22	3,4	2,56	3,09	3,70	2,9	127,58	Tercapai
4	Program Kualitas Keluarga										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2020			Tahun 2020					
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill	%	0,44	0,59	0,76	1,13	1,16	1,32	1,30	98,48	Tidak Tercapai

Sumber: DP3AP2KB Provinsi Kepulauan Riau, 2021

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 5 Indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke 5 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat sebanyak 3 indikator yang sudah mampu mencapai targetnya dan 2 indikator yang belum mampu mencapai target.

### 3) Pangan

Pelaksanaan urusan ketahanan pangan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: sub urusan Penyelenggaraan Pangan Berdasarkan Kedaulatan Dan Kemandirian meliputi Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi. Sub urusan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan meliputi Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi, Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi. Sub urusan Penanganan Kerawanan Pangan meliputi Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, Penanganan kerawanan pangan provinsi, Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. Sub urusan Keamanan Pangan meliputi Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota.



Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap warga. Ketahanan pangan mencakup sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi pangan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kondisi geografis yang sangat luas dengan jumlah pulau berpenghuni yang cukup banyak. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan pangan di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Dalam rangka menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan dan keamanan pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Ketahanan Pangan bekerjasama dengan Perum BULOG Sub Divre Tanjungpinang dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sejak tahun 2014. Kerjasama diarahkan pada pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan keterjangkauan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, kekurangan pangan, kerawanan pangan sebesar 200 ton ekivalen beras. Pemerintah mendorong agar seluruh kabupaten/kota memiliki Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa (lumbung pangan masyarakat desa).

Gambaran capaian kinerja urusan ketahanan pangan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020 sudah baik, dilihat dari Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan ditahun 2020 capaainnya sebesar 103,99. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi tahun 2020 sebesar 89,1.

Percentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen sebesar 11,7% belum mampu mencapai dari yang ditargetkan karena Harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen di empat Kabupaten tinggi.

Dilihat dari 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2020, sebanyak 1 indikator belum mencapai dari yang ditarget dan 5 indikator sudah melampaui target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.37**  
**Capaian Kinerja Urusan Pangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Distribusi Pangan,										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	(1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	skor	87,76	88	83,09	82,29	99,19	92,00	103,99	113,03	Tercapai
	(2) Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	%	15,2	12,6	9,2	9,2	9,26	CV < 10	11,7	83,0	Tidak Tercapai
2	<b>Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan</b>										
	(1) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	skor	83,8	84,5	88,4	87	89,1	89,00	89,1	100,11	Tercapai
3	<b>Program Penanganan Kerawanan Pangan</b>										
	(1) Angka Rawan Pangan	%	18,58	17,58	10,07	11,32	11,32	17,06	4,12	175,85	Tercapai
4	<b>Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan</b>										
	(1) Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	70	75	76	82,61	94	80,00	94	117,50	Tercapai
5	<b>Program Pengembangan SDM dan Penyuluh pertanian</b>										
	(1) Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya/ko mpetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	30,91	30,91	31	34,55	37,28	38,18	38,97	102,07	Tercapai



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2021

#### 4) Pertanahan

Kewenangan pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pertanahan meliputi: Pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi; Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi; Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota; Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; Penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; dan Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota; serta Perencanaan penggunaan tanah yang hamparnya lintas daerah kabupaten/kota.

Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Urusan Pertanahan ditunjukkan dengan indikator Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi capaiannya sudah 100%. secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.38**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah										
	(1) Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD/Kab/Kota yang terfasilitasi	%	NA	NA	100	100	0,00	100	100	100	Tercapai

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan



### 5) Lingkungan hidup

Lingkungan dengan kualitas baik sangat penting bagi terciptanya kehidupan manusia yang sehat, aman dan sejahtera. Menurunnya kualitas lingkungan berarti hilangnya berbagai manfaat yang disediakan alam bagi manusia. Pelaksanaan urusan lingkungan hidup di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait pengelolaan: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu RPPLH provinsi; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk KRP provinsi; 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; (4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); (5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); (7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; (8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; (10) Pengaduan Lingkungan Hidup; dan (11) Persampaahan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup sudah cukup baik, dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ditahun 2020 sebesar 67,00% tetapi masih belum mencapai dari yang ditargetkan 69,20. Kondisi tersebut dikarenakan Penurunan Kondisi Udara dalam aspek umur kendaraan yang sudah tua dan juga kurangnya penghijauan di Provinsi Kepulauan Riau.

Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu ditahun 2020 capaiannya baru sebesar 40,00 masih belum tercapai dari yang ditargetkan 90,91, dikarenakan Rasionalisasi Anggaran sehingga beberapa kegiatan tidak terlaksana.

Persentase pelaku usaha/ industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar sebesar 20%; Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai Baku Mutu sebesar 100%. Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional Sesuai dengan Surat Edaran KLHK No. S.275/PSLB3/PS/PLB.0/7/2020 tanggal 13 Juli 2020 Bahwa Kegiatan Adipura ditiadakan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan lingkungan hidup ditunjukkan melalui 9 Indikator yang tersebar pada 3 program (program pembangunan). Dari ke 9 indikator yang telah rilis data tahun 2018, terdapat 5 indikator yang belum mencapai target yakni indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu; Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu; Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar nominasi Adipura dan Jumlah



sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.39**

**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program Dan Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			
								Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</b>										
	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,97	66,97	70,19	70,34	66,5	69,20	67,00	96,82	Tidak Tercapai
	2) Persentase waduk yang memiliki kualitas air sesuai baku mutu	%	63,64	63,64	80	100,00	100	90,91	40,00	44,00	Tidak Tercapai
	3) Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas air laut sesuai baku mutu	%	57,14	57,14	57,14	57,14	71,43	85,71	42,85	49,99	Tidak Tercapai
	4) Persentase pelaku usaha /industri yang memiliki pengelolaan limbah B3 sesuai standar	%	15	19	20,6	22,02	20,3	18,50	20	108,11	Tercapai
	5) Persentase Kab/Kota yang memiliki kualitas mutu udara ambien sesuai Baku Mutu	%	57,14	57,14	78,6	100,00	85,71	100,00	100	100	Tercapai
	6) Persentase Kab/Kota yang memenuhi standar nominasi Adipura	%	71,43	71,43	71,43	85,71	85,71	100,00	0	0	Tidak Tercapai
2	<b>Program perlindungan dan</b>										



No	Program Dan Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	<b>Konservasi Sumber Daya Alam</b>										
	7) Jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata Provinsi dan atau tingkat Nasional	Sekolah	8	10	25	51	39	35	0	0	Tidak Tercapai
	8) Luas Kawasan mangrove yang terehabilitasi	Ha	1	5	2	5	4	6	50	833	Tercapai
<b>3</b>	<b>Program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup</b>										
	9) Program peningkatan kualitas akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

## 6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kewenangan provinsi pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu penyusunan profil kependudukan provinsi. Kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyusun profil kependudukan. Selain penyusunan profil kependudukan, pemerintah provinsi juga mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat. Kinerja tersebut ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain: rasio penduduk ber-KTP, Rasio bayi ber-akte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah dan Persentase kepemilikan kartu keluarga.

Perkembangan urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil di Provinsi Kepulauan Riau ditunjukkan sebanyak 2 indikator kinerja program



dengan pencapaian kedua kategori sudah mencapai target. Rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2020 terealisasi sebesar 99,96%; sedangkan Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran mencapai sebesar 96,61%. Walaupun telah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020, namun masih perlu ada peningkatan kinerja agar lebih optimal. Secara rinci kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.40**  
**Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD					Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja				
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan													
	Rasio penduduk ber-KTP	%	85,4	89,68	90,7	94,71	98,05	98,00	99,96	100,00	Tercapai			
	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	%	64	75,00	83,19	86,63	88,91	80,00	96,61	100,00	Tercapai			

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020*

## 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut: Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif dengan realisasi sebesar 53,45%; Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif sebesar 184 unit; Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat sebesar 16,67%; dan Jumlah Desa Cepat Berkembang sebanyak 57 desa.

Kinerja program pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan melalui 4 indikator yang tersebar pada 4 program yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dari ke 4 indikator yang ditargetkan pada tahun 2020, realisasinya telah mampu mencapai target tahun 2020. Pada indikator Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif selama pandemi COVID-19, terdapat beberapa unit usaha yang terdampak seperti unit usaha pariwisata dan sewa tenda.

Secara rinci realisasi kinerja indikator program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel 2.41**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</b>										
	(1) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif	%	0	36,62	40	46,63	64,48	53,45	53,45	100,00	Sangat Tinggi
2	<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>										
	(1) Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang aktif	Unit BUMDesa	0	0	35	80	108	125	184	147,2	Sangat Tinggi
3	<b>Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna</b>										
	(2) Persentase Inovasi TTG yang dimanfaatkan masyarakat	%	0	0	16,67	33,33	16,67	16,67	16,67	100,00	Sangat Tinggi
4	<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa (2017)</b>										
	(1) Jumlah Desa Cepat Berkembang	Desa	0	0	15	28	30	42	57	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

## 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintah bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sesuai dengan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: (1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; (2) Pemetaan perkiraan pengendalian



penduduk cakupan Daerah provinsi; (3) Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local; (4) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB; (5) Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan (6) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Implementasi program Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan kinerja yang cukup baik. Tahun 2020 persentase penggunaan alat kontrasepsi capaiannya sebesar 83,1%. Angka tersebut meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 46,2%. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian tersebut adalah karena dibentuknya kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) oleh pemerintah dan masyarakat. Tahun 2020 baru ada 1 kampung KB yang difasilitasi untuk dibentuk.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 2 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dari 2 indikator yang telah rilis data tahun 2020, semuanya sudah tercapai targetnya. Secara lengkap kinerja urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.42**  
**Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2020				Tahun 2020				
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Keluarga berencana										
	Pembentukan Kampung KB	Angka	NA	NA	NA	1	1,00	1	1	100	Tercapai
	Persentase penggunaan alat kontrasepsi (CPR)	%	46,2	46,5	46,73	79,81	78,60	49,73	83,1	167,10	Tercapai

*Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2021*



### 9) Perhubungan

Sektor perhubungan mempunyai peran yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan mendukung terciptanya kemadirian ekonomi suatu negara. Pelaksanaan urusan Perhubungan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); (2) Pelayaran; dan (3) Perkeretaapian.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sebagian sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (ro-ro) capainnya sebesar 133,33%; Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis sebesar 107,6%; Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik sebesar 100,00%; Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis sebesar 71,43%; Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis sebesar 120,00%; Persentase ketersediaan Bandar Udara sebesar 100%; Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis sebesar 133,33%; Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik sebesar 100%; dan Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan sebesar 246%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perhubungan ditunjukkan melalui 15 Indikator yang tersebar pada 7 program (program pembangunan). Dari ke 15 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat sebanyak 12 indikator tercapai, dan 3 indikator belum tercapai yakni Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (ro-ro) dikarenakan dibutuhkan anggaran yang besar untuk membangun pelabuhan penyeberangan sebesar 150 Milyar. Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas dikarenakan kegiatan untuk mendukung pencapaian target ini tidak dianggarkan karena keterbatasan pagu anggaran OPD. Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut dikarenakan dibutuhkan anggaran yang besar untuk membangun/pengadaan 1 kapal sebesar 50 Milyar. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perhubungan dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel 2.43**  
**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat										
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (ro-ro)	%	57,14	57,14	71,43	71,43	71,43	92,86	71,43	76,92	Tidak Tercapai
	Persentase ketersediaan Kapal Penyeberangan (ro-ro)	%	77,78	77,78	77,78	77,78	88,89	100,00	133,33	133,33	Tercapai
	Persentase pelayanan jaringan trayek angkutan penyebrangan perintis	%	46,15	46,15	53,85	53,85	76,92	92,31	107,6	116,57	Tercapai
	Persentase pelabuhan penyebrangan terkelola dengan baik	%	70	70	72,73	72,73	90,91	100,00	100,00	100,00	Tercapai
2	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas										
	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	39,94	64,32	67,27	70,88	75,50	92,19	96,16	104,31	Tercapai
3	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan										
	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	%	6,67	6,67	7,67	9,67	9,67	18,50	9,67	52,27	Tidak Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis	%	7.14	21,43	42,86	71,43	71,43	85,71	85,71	100,00	Tercapai
4	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Udara</b>										
	Persentase ketersediaan jaringan trayek angkutan udara perintis	%	66.67	66,67	75	91,67	91,67	100,00	120	120,00	Tercapai
	Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara	%	NA	NA	NA	0,00	0,00	75,00	75	100,00	Tercapai
	Persentase ketersediaan Bandar Udara	%	66.67	66,67	77,78	88,89	88,89	100,00	100	100,00	Tercapai
5	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut</b>										
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	58.82	58,82	58,82	73,53	82,35	91,18	97,06	106,45	Tercapai
6	<b>Program Pembangunan Transportasi Laut</b>										
	Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut	%	44.44	44,44	55,56	55,56	55,56	88,89	77,78	87,50	Tidak Tercapai
	Persentase ketersediaan jaringan Trayek angkutan laut perintis	%	33.33	33,33	55,56	55,56	55,56	88,89	133,33	150,00	Tercapai
	Persentase pelabuhan laut terkelola dengan baik	%	58.33	75	75	83,33	91,67	100,00	100,00	100,00	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
7	Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah										
	Persentase peningkatan retribusi pendapatan dari urusan perhubungan	%	NA	NA	0	216,00	145	30,00	246	820,00	Tercapai

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021

## 10) Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan informatika sangat berkaitan dengan penyampaian pesan dari satu orang ke orang lain. Pembangunan jaringan komunikasi maupun informasi bertujuan untuk dapat mempercepat koordinasi dan penyelesaian berbagai tugas organisasi kelompok maupun perorangan. Pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Provinsi; pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat dan sub domain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi; Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja urusan Komunikasi dan informatika dilihat dari akses dan kualitas informasi publik, terlihat capaian nilai keterbukaan informasi Provinsi Kepri mengalami fluktuasi tetapi cenderung menurun yaitu capaian pada tahun 2015 sebesar 59,5 menurun menjadi sebesar 74,18 pada tahun 2020.

Sedangkan dilihat dari E-Government mengalami perkembangan yang cukup baik yaitu Nilai e-government provinsi kepri/nilai indeks SPBE mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 1,85 kemudian naik menjadi 2,4 pada tahun 2019, pada tahun 2020 tidak ada data realisasi nya sehingga status capaian tidak tercapai. Dan indikator Persentase Domain dan Sub Domain di lingkungan pemerintah Provinsi Kepri yang Telah Dimanfaatkan capaiannya sebesar 76,85% telah melampaui target tahun 2020 sebesar 55%.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan komunikasi dan informatika ditunjukkan melalui 3 Indikator yang tersebar pada 2 program (program pembangunan). Dari ke 3 indikator yang telah rilis data tahun 2020, 1



indikator tersebut tidak mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.44**  
**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	<b>Program peningkatan akses dan kualitas informasi publik</b>										
	Nilai keterbukaan informasi provinsi Kepri	skala nilai 0-100	59,5	59,5	13,03	53,87	43,24	65,00	74,18	114,12	tercapai
2)	<b>Program e-government</b>										
	Nilai e-government provinsi kepri/nilai indeks SPBE	skala nilai 1-4	1,85	1,85	2,1	2,1*	2,4	2,40	0	0,00	Tidak Tercapai
	Persentase domain dan subdomain di lingkungan pemerintah provinsi kepri yang telah dimanfaatkan	%	-	-	25	47,82	68,08	55,00	76,85	139,73	Tercapai

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021*

## 11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Pelaksanaan urusan koperasi usaha kecil dan menengah di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait bidang: (1) Izin Usaha Simpan Pinjam; (2) Pengawasan dan Pemeriksaan; (3) Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi; (4) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; (5) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; (6) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan (7) Pengembangan UMKM.

Kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilihat dari kualitas kelembagaan koperasi sudah cukup baik yaitu persentase koperasi aktif di Provinsi Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang fluktuatif cenderung menurun dimana pada tahun 2015 sebesar 49,00% menurun menjadi sebesar 41,39% pada tahun 2020, sedangkan pertumbuhan koperasi di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar 1,97%. Dilihat dari daya saing UKM dan koperasi di Kepulauan Riau yaitu Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk



diterima dipasar modern atau tersertifikasi mengalami perkembangan yang meningkat dari sebesar 17,80% pada tahun 2016 meningkat menjadi sebesar 20,93% pada tahun 2020, namun memiliki status belum mencapai target tahun 2020.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Koperasi, usaha kecil dan menengah ditunjukkan melalui 5 Indikator yang tersebar pada 3 program (program pembangunan). Dimana 5 indikator urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah pada tahun 2020 terdapat 2 indikator yang belum mencapai target yakni indikator persentase koperasi aktif dan indikator Persentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau tersertifikasi. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.45**  
**Capaian Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi										
	Percentase Koperasi Aktif	%	49,00	49,04	51,80	54,95	39,93	58,80	40,85	69,47	Tidak Tercapai
	Percentase KSP/USP sehat	%	NA	7,60	8,40	36,11	38,19	38,30	41,86	109,30	Tercapai
	Pertumbuhan koperasi	%	NA	NA	3,30	5,10	2.72	2,50	1,97	78,8	Tidak Tercapai
2)	Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan										
	Jumlah UKM yang naik kelas/ aktif	%	0	0,21	0,33	0,41	0,55	0,61	0,79	129,51	Tercapai
3)	Program Peningkatan Daya Saing UKM dan Koperasi										
	Percentase Koperasi dan UKM yang memiliki Produk diterima dipasar modern atau	%	NA	17,8	19,8	19,3	19,85	21,22	21,27	100,24	Tercapai



No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	tersertifikasi										

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,2021

## 12) Penanaman Modal

Pelaksanaan urusan penanaman modal di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, Pelayanan Penanaman Modal, Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Gambaran perkembangan indikator urusan penanaman modal, secara umum capaian kinerjanya tergolong cukup baik. Dilihat dari nilai investasi (PMA) pada tahun 2020 sebesar Rp 23.751 miliar dengan jumlah investor berskala nasional sebesar 660 investor. Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN) sebesar 14.249 miliar pada tahun 2020 dengan jumlah investor sebanyak 5.054 investor. Distribusi investasi di Provinsi Kepulauan Riau belum merata, dengan kecenderungan investasi terbesar di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Beberapa upaya peningkatan investasi terus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan promosi investasi, baik secara nasional maupun internasional.

Kinerja pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ditunjukkan dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP) sebesar 81,93% dari target sebesar 88%; dan Persentase Pelayanan Sesuai SOP dengan capaian sebesar 95,21%. Kinerja indikator program pembangunan pada urusan penanaman modal melalui 6 indikator yang tersebar pada 3 program pembangunan. Dari ke 6 indikator yang ditargetkan pada tahun 2020, sebanyak 1 indikator memiliki status belum tercapai dan 5 indikator memiliki status telah tercapai. Indikator yang memiliki status belum tercapai diantaranya yaitu : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP).

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.46**  
**Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>										
	1) Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMA)	Rp Milyar	10.065	7.108	13.823	11.139	20.450	7.900	23.751	300,65	Tercapai
	2) Jumlah Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	Rp Milyar	1.384	492,5	1.398	4.385	5.656	800	14.249	1.781	Tercapai
2	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>										
	3) Jumlah Investor Dalam Negeri	Investor	160	191	291	157	4.365	150	5.054	3.369	Tercapai
	4) Jumlah Investor Luar Negeri	Investor	226	175	203	120	493	106	660	623	Tercapai
3	<b>Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan</b>										
	5) Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP)	nilai	NA	81	76,61	77,2	82,34	88,00	81,93	93,10	Tidak Tercapai
	6) Persentase Pelayanan Sesuai SOP	%	80	100	100	100	92,88	83,00	95,21	114,71	Tercapai

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021

### 13) Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan kepemudaan dan olahraga, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki kewenangan untuk: Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi; Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi; Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan (SLTA) yang menjadi kewenangan Daerah provinsi; Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi;



Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional; Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi; dan Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat daerah provinsi .

Kinerja terkait dengan kepemudaan terlihat dari pemuda pelopor semakin meningkat yaitu pada tahun 2015 sebanyak 650 orang mengalami perkembangan fluktuatif cenderung meningkat menjadi sebesar 988 orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 karena terjadinya pandemi covid-19 mengakibatkan tidak diperbolehkannya orang berkerumunan sehingga jumlah pemuda berpelopor menurun yaitu sebesar 260 orang dari 850 orang yang di targetkan pada tahun 2002. Jumlah pemuda yang berwirausaha masih terbilang sedikit yaitu sebanyak 12 orang tahun 2015 meningkat menjadi 60 orang pada tahun 2019 dan menurun kembali karena adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 sehingga tidak ada pelaksanaan kegiatan ini.

Kinerja terkait dengan olahraga prestasi terlihat dari indikator jumlah prestasi olahraga tingkat nasional, dengan capaian sebanyak 35 penghargaan pada tahun 2019. Karena adanya pandemi covid-19 mengakibatkan tidak diperbolehkannya orang berkerumunan sehingga pada tahun 2020 jumlah prestasi olah raga tingkat nasional sebesar 13 penghargaan. Dalam rangka memacu prestasi olahraga, jumlah event olahraga yang diselenggarakan masyarakat pada tahun 2020 sebanyak 16 event. Sedangkan dari sisi jumlah kader pemuda anti narkoba pada tahun 2020 berjumlah 65 orang.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan melalui 6 Indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari 6 indikator yang telah rilis data tahun 2020, sebanyak 3 indikator mencapai target dan sebanyak 3 indikator tidak mencapai target tahun 2020. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.47**  
**Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program peningkatan Peran Serta Kepemudaan										
	Jumlah pemuda pelopor	Orang	672	650	2.287	557	988	850	260	30,59	Tidak Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
2	Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda										
	Jumlah pemuda yang berwirausaha	Orang	56	12	22	25	60	35	0	0,00	Tidak Tercapai
3	Program pembinaan Dan pemasyarakatan Olah Raga										
	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/nasional/internasional	Penghargaan	6	5	21	17	35	18	13	72,22	Tidak Tercapai
	Jumlah event olahraga tingkat daerah yang diselenggarakan masyarakat	Event	10	3	16	17	14	16	16	100,00	Tercapai
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah raga										
	Persentase sarana dan prasarana yang dibangun terhadap kebutuhan masyarakat	%	14,29	14,29	76	90,48	104,76	80,95	319,05	394,12	Tercapai
5	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba										
	Jumlah kader pemuda anti narkoba	Orang	50	100	34	55	60	65	300	461,54	Tercapai

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021

#### 14) Statistik

Kegiatan Statistik diarahkan untuk mendukung pembangunan, mengembangkan sistem yang andal, efektif, dan efisien, meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti dan kegunaan statistik serta mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pelaksanaan urusan statistik di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi.



Kinerja urusan statistik dapat dilihat dari persentase ketersediaan data statistik sektoral Provinsi Kepulauan Riau yang pada tahun 2020 mencapai 99,67% dimana pada tahun-tahun sebelumnya masih belum ada data statistik sektoral di Provinsi Kepulauan Riau sedangkan pada tahun 2020 tidak tersedia data sehingga status capaian tidak tercapai.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan statistik ditunjukkan melalui 1 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dimana 1 indikator urusan statistik pada tahun 2020 dapat mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan statistik dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.48**

**Capaian Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	Program pengembangan data/informasi statistik sektoral										
	Persentase ketersediaan data statistik sektoral provinsi kepri	%	NA	NA	NA	25	99,67	30,00	30,00	100,00	Tidak tercapai

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021*

## 15) Persandian

Pelaksanaan urusan persandian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi; dan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah provinsi.

Kinerja urusan persandian di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi yang mengalami perkembangan kenaikan cukup signifikan yaitu pada tahun 2017 sebesar 2,5% meningkat pada tahun 2020 menjadi 100%. Pengelolaan persandian masih terkendala kurangnya SDM ASN dengan kualifikasi yang memahami keamanan informasi. Diharapkan adanya penambahan SDM ASN yang memahami keamanan informasi atau pengiriman



pegawai untuk mengikuti pelatihan Sandiman atau diklat teknis terkait oleh BSSN.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Persandian ditunjukkan melalui 1 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dimana 1 indikator urusan persandian pada tahun 2020 telah mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan persandian dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.49**

**Capaian Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja		Tahun 2019	Pencapaian Target Kinerja Program 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018		Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	<b>Program persandian untuk pengamanan informasi</b>										
	Percentase perangkat daerah yang telah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi	%	NA	NA	2,5	20	100	40,00	100	333,33	tercapai

*Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2021*

## 16) Kebudayaan

Kepulauan Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi peninggalan sejarah maupun adat istiadat Melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya Melayu yang masih kental menjadikan daya tarik yang patut dipertahankan. Kawasan-kawasan bersejarah di Provinsi Kepulauan Riau yang tersebar merata hampir di seluruh kabupaten/kota mempunyai nilai tawar yang layak dijual. Disamping itu peninggalan seni dan budaya Melayu menjadi nilai tambah dari objek wisata yang ditawarkan di masing-masing daerah.

Pelaksanaan urusan kebudayaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan lembaga adat yang penganutnya



lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota Pembinaan sejarah lokal provinsi; Penetapan cagar budaya peringkat provinsi; Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi; Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi dan Pengelolaan museum provinsi.

Gambaran perkembangan indikator dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indikator Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Terlihat capaian pada tahun 2016 sebesar 4,87% meningkat menjadi 55,85% pada tahun 2020. Pada gambaran kinerja pada indikator Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju, dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan. Capain pada tahun 2017 sebesar 14,49% meningkat menjadi 98,55% pada tahun 2020.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kebudayaan melalui 5 indikator yang tersebar pada 3 progam pembangunan. Dari ke 5 indikator yang ditargetkan pada tahun 2020, 4 indikator memiliki status telah tercapai dan 1 indikator memiliki status tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase bangunan yang berciri khas melayu,. Pada tahun 2019, maka telah di rencanakan akan di buat pergub bangunan berciri khas melayu dan surat himbauan terkait bangunan berciri khas melayu kepada pihak pemerintah dan swasta dan ditahun 2020 juga dilakukan sosialisasi perda bangunan berciri khas melayu dan inventarisasi data bangunan berciri khas melayu. Namun hal ini belum terealisasikan dikarenakan adanya Refocusing yang terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemic covid-19 yang mengakibatkan anggaran yang digunakan untuk mensosialisasikan perda tersebut tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan berdampak besar bagi Dinas kebudayaan dalam mengejar target yang telah ditetapkan pada kinerja bangunan berciri khas melayu.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 2.50**  
**Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>										
	Persentase bangunan yang berciri khas melayu	%	NA	5,28	8,28	11,68	14,32	49,70	26,16	52,64	Tidak Tercapai
	Presentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi	%	NA	4,87	10,2	19,98	40,46	49,08	55,85	113,79	Tercapai
2	<b>Program pengelolaan kekayaan budaya</b>										
	Persentase warisan budaya tangible yang lestari	%	14,97	18,53	19,58	19,93	22,03	21,68	22,73	104,85	Tercapai
3	<b>Program pengelolaan keragaman budaya</b>										
	Persentase Organisasi Budaya Berkategori Maju	%	NA	0	14,49	37,68	94,2	57,97	98,55	170,00	Tercapai
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	A	3,1	6,49	13,29	66,02	52,61	79,61	151,32	Tercapai

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2021

### 17) Perpustakaan

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Dari fakta tersebut, perpustakaan diharapkan sebagai pusat kegiatan pengembangan minat baca dan kebiasaan membaca. Perpustakaan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap peningkatan dan pengembangan minat dan kegemaran membaca. Hal ini dilatari oleh peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pengembangan minat baca. Pelaksanaan urusan Perpustakaan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah



provinsi; (2) Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi; (3) Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi; (4) Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah; (5) Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi; dan (6) Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan sudah cukup baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja yang sudah mencapai 100% yang dijabarkan pada masing-masing indikator antara lain: Persentase peningkatan bahan pustaka dari target yang ditetapkan sebesar 54,58% pada tahun 2020 realisasi capaian sebesar 54,71%; dan IKM pelayanan perpustakaan tahun 2020 sebesar 88,17%.

Sedangkan indikator persentase peningkatan pengunjung perpustakaan hingga tahun 2020 tidak mencapai target, hal ini dikarenakan kondisi Pandemik COVID-19 yang mengakibatkan perpustakaan harus tutup selama berapa bulan dan hanya terbuka terbatas dari Hari Senin s/d Jumat. Sebagai tambahan Mobil Perpustakaan Keliling juga tidak dapat dijalankan karena pembelajaran sekolah dilaksanakan secara daring.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Perpustakaan ditunjukkan melalui 3 Indikator yang tersebar pada 2 program (program pembangunan). Dari ke 3 indikator yang telah rilis data tahun 2020, ada 1 indikator yang tidak tercapai, yaitu persentase peningkatan pengunjung perpustakaan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Perpustakaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.51**  
**Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan										
	Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan	%	-	20,25	27,65	28	28,64	29,75	-65,26	-219,36	Tidak Tercapai
	Persentase Peningkatan Bahan Pustaka	%	-	26,72	41,32	45,88	52,96	54,58	55,40	101,50	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
2	Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola perpustakaan										
	IKM Pelayanan Perpustakaan	poin	-	75	81,94	84,35	84,60	87	88,17	101,34	Tercapai

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2021

### 18) Kearsipan

Arsip mempunyai peran penting dalam kelangsungan hidup organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Manfaat arsip bagi suatu organisasi antara lain berisi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan juga dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi masalah dan juga dapat dijadikan alat pertanggungjawaban menajemen serta dapat dijadikan alat transparansi birokrasi. Arsip dapat bermanfaat secara optimal bagi organisasi apabila dikelola dengan tertib dan teratur, namun sebaliknya apabila arsip dikelola dengan tidak tertib akan menimbulkan masalah bagi suatu organisasi.

Pelaksanaan urusan Kearsipan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: (1) Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi; (2) Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi; (3) Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi; (4) Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; (5) Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi; (6) Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah Kabupaten/kota; (7) Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga karsipan provinsi; (8) Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip; (9) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga karsipan Daerah provinsi.



Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan masih kurang baik, dilihat dari capaian realisasi kinerja dari 2 indikator yang di targetkan di tahun 2002 masih ada 1 indikator yang tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu Persentase perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku, target tahun 2020 sebesar 93,62% hingga akhir tahun 2020 baru mencapai 63,83%. Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan Arsip secara baku pada Tahun 2020 sebanyak 30 OPD dari target 47 OPD/BUMD. Hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19, sehingga target 47 OPD/BUMD semula direncanakan dengan memberikan bimbingan secara langsung dengan lokus seluruh Sekretariat OPD, namun dengan adanya pandemi ini pembinaan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Kemudian pada BUMD Provinsi sudah dikunjungi, dikarenakan tidak adanya SDM yang kompeten untuk bisa membantu pengelolaan arsip dan juga kurangnya Sarana dan Prasarana untuk pengelolaan arsip.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Kearsipan ditunjukkan melalui 2 Indikator yang tersebar pada 2 program (program pembangunan). Dari ke-2 indikator yang telah rilis data tahun 2020 1 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kearsipan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.52**

**Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pengelolaan dan Pengolahan Arsip										
	Persentase Peningkatan Dokumen Arsip Daerah yang diselamatkan	%	10.439 arsip	0,22	1,21	1,21	1,70	2,14	2,14	100	Tercapai
2	Program pembinaan dan peningkatan kapasitas Pengelola Kearsipan										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Persentase perangkat daerah provinsi dan BUMD provinsi yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	%	42,55	48,94	74,47	74,47	85,11	93,62	63,83	68,18	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Perpustakaan Daerah dan Kearsipan, 2021

### 2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 1) Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan urusan kelautan dan perikanan di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup: pada sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil yaitu Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi, Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi., Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pada sub urusan Perikanan Tangkap meliputi Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dcan Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, pada sub urusan Perikanan Budidaya meliputi Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, pada sub urusan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil, pada sub urusan Pengolahan dan Pemasaran meliputi Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar karena memiliki 96% wilayah berupa laut dan merupakan salah satu daerah penangkapan ikan yang potensial. Potensi perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari perikanan tangkap,



perikanan budidaya, pengolahan produk perikanan, industri bioteknologi kelautan, industri sumberdaya laut-dalam dan pemanfaatan muatan barang kapal tenggelam, wisata bahari dan potensi mangrove dan terumbu karang. Komoditas hasil kelautan dan perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (seaweed), ikan dan biota laut bernilai ekonomi tinggi serta komoditi hasil budidaya perikanan.

Gambaran perkembangan indikator dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan kinerja yang baik. Pada indikator jumlah produksi perikanan tangkap, capaian kinerjanya cenderung fluktuatif. Terlihat pada tahun 2020 sebesar 319.196,89 ton menurun jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 375.411,66 ton. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya persentase kapal penangkap ikan bermotor berbanding armada perikanan tangkap yang ada termasuk kapal tanpa motor (perahu nelayan tradisional). Produksi perikanan budidaya hingga tahun 2020 sebanyak 21.421,10 ton, masih dibawah target tahun 2020.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan melalui 10 indikator yang tersebar pada 7 program pembangunan. Dari ke 10 indikator yang ditargetkan pada tahun 2020, 5 indikator memiliki status tidak tercapai dan 5 indikator memiliki status telah tercapai. Indikator yang tidak tercapai yaitu Nilai Tukar Nelayan (NTN), Jumlah produksi perikanan budidaya, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III, Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kelautan Dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.53**  
**Capaian Kinerja Urusan Kelautan Dan perikanan Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap										
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	375.411,66	303.411,28	304.038,71	304.975,02	309.287,15	305.850,75	319.196,89	104,36	Tercapai
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		107,14	109,36	110,70	115,26	117,42	110,33	103,56	93,86	Tidak Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
2	<b>Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya</b>										
	Jumlah produksi perikanan budidaya	Ton	33.515,48	77.746,10	34.302	34.399,86	33.003,11	33.852,66	21.421,10	63,28	Tidak Tercapai
	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		108,43	107,28	107,23	108,20	126,77	108,23	101,63	93,90	Tidak Tercapai
3	<b>Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan</b>										
	Jumlah produk olahan Hasil perikanan	Ton	1.315,67	1.318,30	1.902,48	1.336,82	1.803,55	1.328,88	6.205,90	467,00	Tercapai
4	<b>Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>										
	Nilai Ekspor Hasil Perikanan	US \$	30.789,629	31.766,987	27.371,747	70.168,692,13	33.994,231,2	31.792,408	35.493.497	111,64	Tercapai
5	<b>Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>										
	Peningkatan status kawasan konservasi perairan Level III	Kawasan	-	-	1	1,00	1	4	0	-	Tidak Tercapai
	Produk peraturan perundang-undangan tentang pengaturan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	Dokumen/ Peraturan			1 (dok. pendukung RZWP3K)	-	-	1 (Pergub Rencana Zonasi Rinci WP3K)	0	-	Tidak Tercapai
6	<b>Program Pengawasan Sumberdaya</b>										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>										
	% Jumlah kasus luu Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	75	100	89	100,00	100,00	100	100	100,00	Tercapai
7	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan</b>										
	Persentase kelompok (KUB,Poklahsar, Pokdakan) yang dibina disuluh	%	7,20	9,00	10,42	12,00	13,3	16,95	16,95	100,00	Tercapai

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2021

## 2) Pariwisata

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya tarik tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi. Pelaksanaan urusan pariwisata di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup : Pengelolaan daya tarik wisata provinsi ; Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi; Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi; Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi; Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan.

Gambaran perkembangan urusan pariwisata dari tahun 2015-2020 menunjukkan kinerja tidak baik. Dengan luas wilayah yang didominasi oleh lautan (sebesar 94% wilayah), menjadikan Kepulauan Riau sebagai salah satu destinasi pariwisata kemaritiman/bahari. Terdapat beberapa potensi yang belum



dikembangkan sebagai pariwisata bahari, seperti: (1) potensi keindahan alam bawah laut di Kabupaten Kepulauan Anambas; (2) keindahan pasir putih di beberapa kawasan di Kabupaten Natuna dan Lingga; (3) dan kawasan industri pariwisata taraf dunia di Kabupaten Bintan. Kedepan potensi wisata bahari perlu dikembangkan menjadi obyek wisata yang menarik dan memiliki daya saing, sehingga kunjungan wisatawan nusantara dan manca negara semakin meningkat.

Dilihat dari indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau dari tahun 2015-2019 mempunyai kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 2,07 juta orang dengan rata-rata tingkat hunian hotel sebesar 52,65% meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 2,86 juta orang dengan rata-rata tingkat hunian hotel sebesar 50,87%. Namun pada tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara menurun menjadi 0,411 juta orang dengan rata-rata tingkat hunian hotel sebesar 22,76%. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau terkait Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia melalui Menkumham RI yang berlaku sejak 2 April 2020 akibat merebaknya wabah Covid-19 sehingga dampaknya tentu sangat besar terhadap industri pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan pada indikator rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau hingga tahun 2020 juga tidak tercapai. Hal ini disebabkan menurunnya kunjungan wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau yang diakibatkan Pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 berdasarkan data yang ada sampai dengan akhir tahun 2020 tercatat hanya sebanyak 411,248 Wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang sangat signifikan bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya (-85,62%), hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pariwisata ditunjukkan melalui 7 indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari 7 indikator yang ditargetkan pada tahun 2020, terdapat sebanyak 1 indikator dengan status telah tercapai dan 6 indikator dengan status tidak tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 2.54**  
**Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Pengembangan Destinasi Pariwisata</b>										
	(1) Rata – rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau	hari	1,84	1,9	2,09	1,87	1,96	2,15	1,83	85,12	Tidak Tercapai
2	<b>Program Pengembangan Industri Pariwisata</b>										
	(1) Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	%	2,16	2,34	2,2	2,32	2,46	2,5	1,63	65,20	Tidak Tercapai
3	<b>Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata</b>										
	(1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	Juta orang	2,03	2,1	2,07	2,6356	2,8648	2,40	0,411248	17,14	Tidak Tercapai
	(2) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	Juta orang	NA	1,48	2,89	3,547	4,227	1,60	7,15	447,11	Tercapai
	(3) Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Miliar Rupiah	NA	NA	NA	14.299	19.625	15.050	14.422	95,83	Tidak Tercapai
4	<b>Program Pengembangan Kelembagaan Pariwisata</b>										
	(1) Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau	%	49.15	48,19	52,66	53,75	50,87	51,50	22,76	44,19	Tidak Tercapai
5	<b>Program Pengembangan</b>										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	<b>Ekonomi Kreatif</b>										
	(1) Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif aktif	%	-	-	2,73	13,3	24,21	30,00	22,15	73,83	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Pariwisata, 2021

### 3) Pertanian

Pelaksanaan urusan pertanian di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup sub urusan: (1) Sarana Pertanian; (2) Prasarana Pertanian; (3) Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; (4) Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian; dan (5) Perizinan Usaha Pertanian.

Sebagian kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan. Sektor pertanian menjadi sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun dan Kota Batam. Disamping palawija dan hortikultura, tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

Gambaran capaian indikator dari urusan pertanian dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 relatif baik. Pada Sektor pertanian memberikan kontribusi kecil terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Riau, yaitu hanya 2,5%. Tingkat kesejahteraan petani di Provinsi Kepulauan Riau tergolong baik namun belum optimal, ditandai dengan Nilai Tukar Petani sebesar 99,45% pada tahun 2015 meningkat menjadi 99,84% pada tahun 2020.

Pada Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan, pada indikator jumlah produksi Tanaman Perkebunan pada tahun 2020 indikator ini tidak tercapai, terlihat dari 32.103 yang ditargetkan hanya mampu mencapai 25.690 ton pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena rendahnya harga karet sehingga petani tidak melakukan panen karet.

Di bidang peternakan, pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak terdapat 1 indikator yang capaiannya belum tercapai, yaitu indikator Persentase Angka Prevalensi Penyakit Besar yang pada tahun



2020 masih mencapai 0,021 % dari target yang telah ditetapkan yaitu 0,020%. Tidak tercapainya target kinerja disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran untuk pembelian obat karena adanya refocusing belanja bahan obat-obatan hewan.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan pertanian melalui 12 indikator yang tersebar pada 5 program pembangunan. Dari ke 12 indikator yang ditargetkan pada tahun 2020, sebanyak 3 indikator memiliki status tidak tercapai dan 9 indikator memiliki status telah tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.55**  
**Capaian Kinerja Urusan Pertanian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program peningkatan kesejahteraan Petani										
	(1) Nilai Tukar Petani (NTP)	%	99,45	98,16	97,98	97,02	101,41	99,30	99,84	100,54	Tercapai
	(2) Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	1,21	1,16	1,16	1,2	1,2	1,24	1,24	100,00	Tercapai
2	Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan										
	(1) Jumlah Produksi Padi (ton)	ton	959	627	601	833	1.167,8	1.020	852,54	83,58	Tidak Tercapai
	(2) Jumlah Produksi Tanaman Palawija	ton	12.637	12.637	19531,5	14.957	19.482,46	12.742	20.606,84	161,73	Tercapai
	(3) Jumlah Produksi Tanaman Komoditas Hortikultura	ton	14.000	38.338	40301	55.055	72.654,90	44.644	57.401	128,57	Tercapai
	(4) Jumlah produksi Tanaman Perkebunan	ton	21.694	21.694	47930	40.916	33.946,80	32.103	30.205	94,09	Tidak Tercapai
3	Program Pencegahan dan Penanggulangan										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	<b>Penyakit Ternak</b>										
	(1) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Besar	%	0,042	0,042	0,04	0,032	0,04	0,020	0,021	95,00	Tidak Tercapai
	(2) Persentase Angka Prevalensi Penyakit Hewan Kecil	%	0,0045	0,0035	0,0035	0,0027	0,002	0,002	0,002	100,00	Tercapai
	(3) Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	51,27	76,34	78,84	85,71	57,31	57,60	67,18	116,63	Tercapai
4	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>										
	(1) Persentase Peningkatan Populasi Ternak	%	5,98	5,98	4,67	5,05	5,32	5,00	5,00	100,00	Tercapai
5	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Peternakan</b>										
	(1) Persentase Peternak yang memanfaatkan teknologi tepat guna	%	3,11	3,11	3	5	5,28	5,56	5,56	100,08	Tercapai
	(2) Persentase Kelompok Tani Menerapkan Teknologi pertanian /perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura	%	3,28	3,28	4,53	4,63	6,85	4,73	6,95	146,94	Tercapai

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan, 2021

#### 4) Kehutanan

Perkembangan indikator kinerja pada urusan kehutanan Provinsi Riau dapat dilihat pada 5 indikator, terdapat 3 indikator yang mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2020 yaitu: Presentase terbentuk dan beroperasinya KPH



(KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau; Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dan Luas lahan kritis terehabilitasi.

Dari ke lima indikator tersebut terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target tahun 2020 yaitu Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB dan Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Hal ini terlihat dari 90% yang di targetkan di tahun 2020 baru terealisasi 83,33%, dikarenakan Dari 6 kasus yang ditangani terdapat 1 kasus yang belum selesai, yaitu penanganan kasus PT. Kartika Jemaja Jaya di Kepulauan Anambas. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Kehutanan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 2.56**  
**Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program pengembangan dan pemanfaatan kawasan hutan</b>										
	1) Persentase terbentuknya dan beroperasinya KPH (KPHL dan KPHP) yang beroperasi di seluruh Provinsi Kepulauan Riau	Angka	0	0	66,66	100	100,00	100,00	100	100	Tercapai
	2) Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,05	0,01	20,00	Tidak Tercapai
	3) Luas lahan kritis terehabilitasi	Ha	200	313	243	335	400	230	300	130,43	Tercapai
	4) Persentase KPH yang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat	%	0	19	20,6	100	100	83,33	83,33	100,00	Tercapai
	5) Persentase penanganan pengaduan kerusakan lingkungan hidup dan kehutanan yang ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan	%	70	72,73	75	87,5	85,00	90,00	83,33	100,00	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021



### 5) Energi dan Sumber Daya Mineral

Sumberdaya mineral sebagai salah satu sumberdaya alam, merupakan sumber yang sangat penting dalam menopang perekonomian Indonesia. Bahkan beberapa jenis mineral, yakni minyak dan gas bumi, pernah menjadi soko guru perekonomian Pemerintah. Dalam skala global, mineral khususnya penghasil energi utama; bahkan berperan strategis dalam menentukan peta perpolitikan dunia. Sementara mineral dalam bentuk logam mulia emas juga memiliki posisi penting dalam perekonomian dunia. Pelaksanaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral di tingkat provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan terkait sub urusan: (1) geologi; (2) mineral dan batubara; (3) Energi Baru Terbarukan; dan (4) Ketenagalistrikan.

Kinerja penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral kurang baik, dilihat pada masing-masing indikator antara lain: Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku tidak tercapai pada tahun 2020. Dilihat dari target yang di tetapkan sebesar 85%, sampai akhir tahun 2020 hanya mencapai 40%. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan yang semestinya dilakukan terhadap seluruh Pemegang IUP Operasi Produksi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dikarenakan refocussing kegiatan dan realokasi anggaran oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Indikator Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan pada tahun 2020 juga tidak tercapai, dilihat dari target yang di tetapkan sebesar 75%, baru terealisasi sebesar 43,33 % pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena belum adanya kajian atau data tentang cekungan air tanah dari Badan Geologi Kementerian ESDM maupun dari Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga wilayah Provinsi Kepulauan Riau belum ada penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan Energi dan Sumber Daya Mineral ditunjukkan melalui 9 Indikator yang tersebar pada 5 program (program pembangunan). Dari ke 9 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat sebanyak 5 indikator tercapai, dan 4 indikator tidak tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel 2.57**  
**Capaian Kinerja Urusan ESDM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah</b>										
	(1) Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan	%	-	13	20	23	33,33	75,00	43,33	57,77	Tidak Tercapai
	(2) Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral dan Air Tanah	Kab/Kota	-	-	-	3,	3,	1	1	100,00	Tercapai
2	<b>Program Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara</b>										
	(1) Persentase Pelayanan Perizinan IUP Mineral Logam, Bukan Logam dan Batuan sesuai SOP	%	-	65	70	100	90	85,00	88,33	103,29	Tercapai
	(2) Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	%	-	65	70	85,71	90,00	85,00	40,00	47,06	Tidak Tercapai
	(3) Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	%	-	0,84	1,91	1,28	1,35	1,50	1,25	83,33	Tidak Tercapai
3	<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>										
	(1) Rasio Elektrifikasi	%	83,72	89,14	91,44	91,50	92,59	92,50	93,72	101,32	Tercapai
	(2) Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	-	74,6	78,61	85,1	89,9	97,85	91,35	93,36	Tidak Tercapai
4	<b>Program Pembinaan Usaha Ketenagalistrikan</b>										
	(1) Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang	%	-	5	21,58	32,10	70,79	82,00	82,11	100,13	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Target Kinerja Program dan Pagu Indikatif Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	melaksanakan kegiatan usaha sesuai ketentuan										
5	<b>Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi</b>										
	(1) Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	0.0005	0,0005	0,0006	0,0007	0,0007	0,0009	0,00134	148,89	Tercapai

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021

## 6) Perdagangan

Pelaksanaan urusan perdagangan di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; (2) Sarana Distribusi Perdagangan; (3) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; (4) Pengembangan Ekspor; dan (5) Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Kinerja urusan perdagangan di Provinsi Kepulau Riau dilihat dari efisiensi perdagangan dalam negri yaitu pada indikator Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk setiap tahun mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebesar 80% meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 163%. Sedangkan dilihat pada perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan yaitu pada indikator persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi standar nasional indonesia (SNI) menurun yaitu pada tahun 2015 sebesar 40% menurun menjadi sebesar 20% pada tahun 2020, sedangkan pada indikator Pesentase penyelesaian kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK) mengalami peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 2015 sebesar 42% meningkat menjadi 100% pada tahun 2020.

Dilihat dari sisi peningkatan dan pengembangan ekspor di Provinsi Kepulauan Riau yaitu terutama pada indikator Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepulauan Riau selalu meningkat pada tahun 2015 sebesar US \$.1.112,40 meningkat menjadi sebesar US \$.3065,30 pada tahun 2020. Hal ini di sebabkan karena Masih Mahalnya Biaya Logistik.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perdagangan ditunjukkan melalui 9 Indikator yang tersebar pada 3 program (program



pembangunan). Dari ke 10 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat sebanyak 9 indikator dengan status Tercapai, dan 1 indikator dengan status tidak Tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perdagangan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.58****Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri (2018-2021)</b>										
	Fluktuasi Harga Bahan Pokok	Persen	7,2	7,6	7,5	2,54	8,33	< 10%	2,34	176	Tercapai
	Persentase pemenuhan rasio pasar terhadap jumlah penduduk	Persen	80	80	83	84	163	95,00	163	171	Tercapai
2)	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>										
	Persentase penurunan jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)	Persen	40	38	37	34	25	28	20	110,71	Tercapai
	Persentase penyelesaian Kasus pengaduan perlindungan konsumen (melalui BPSK)	%	42	40	100	100	100	100,00	100	100	Tercapai
	Presentase jenis komoditas dan atau alat yang mendapat pelayanan pengujian mutu							52,00	0	0	Tidak Tercapai



No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	barang atau kalibrasi										
3)	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor</b>										
	Nilai ekspor produk-produk berbahan baku lokal asal Kepri	juta US \$	1.112,40	1.185,67	2.915,73	3.034,45	2.727,48	1.478,75	3065,30	207	Tercapai
	Nilai ekspor Non Migas Provinsi Kepulauan Riau	Ribu US \$	8.657.953	8.019,70	8.654.142	8.489.050,00	7.793.311	9.500.000	9.773.647,60	103	Tercapai
	Jumlah ekspor berdasarkan penerbitan SKA	SKA	6.879	7.962	27.721	28.725	28.418	10.500	27.496	261	Tercapai
	Jumlah Produk unggulan daerah yang diterima pasar ekspor	Jenis	21	22	23	23	23	24	24	100	Tercapai
	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	7,73	8,34	7	8,56	9,07	8,44	8,50	100,71	Tercapai

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

## 7) Perindustrian

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri adalah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengelolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri, sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Pelaksanaan urusan perindustrian di tingkat Provinsi berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan yaitu: Penetapan rencana pembangunan industri Provinsi; Penerbitan IUI besar; Penerbitan IPUI bagi industri besar; Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Besar dan Izin perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.



Kinerja urusan perindustrian dilihat dari sentra-sentra industri potensial yaitu indikator jumlah sentra industri dilengkapi Infrastruktur penunjang sejumlah 8 sentra pada tahun 2020 meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dilihat dari penataan struktur industri yaitu pada indikator jumlah kawasan idustri di Provinsi Kepulauan Riau sejumlah 32 kawasan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020.

Dilihat dari pengembangan industri kecil dan menengah yaitu pada indikator jumlah industri Kecil dan menengah yang mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 sejumlah 1.632 unit meningkat menjadi sejumlah 2.500 unit pada tahun 2020. Pada indikator peningkatan omset industri pengolahan berbahan baku lokal mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 11,57% menurun menjadi sebesar 10% pada tahun 2020.

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan perindustri ditunjukkan melalui 10 Indikator yang tersebar pada 5 program (program pembangunan). Dari ke 10 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat sebanyak 3 indikator dengan status Tercapai, dan 7 indikator dengan status tidak Tercapai. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan perindustrian dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.59**

**Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1)	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial										
	Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang	Sentra	2	4	6	8	100,00	9	8	88,88	Tidak Tercapai
2)	Program Penataan Struktur Industri										
	Jumlah Industri Besar	Unit	751	761	779	553	70,57	790	697	88,23	Tidak Tercapai
	Jumlah kawasan industri	kawasan	26	26	26	26	100,00	26	32	123,08	Tercapai
	Jumlah Kelompok Klaster Industri	Klaster	0	0	2	1	100,00	1	2	200,00	Tercapai
3)	Program										



No	Program dan indikator kinerja program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal Rpjmd		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	<b>Pengembangan Industri Unggulan</b>										
	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB	%	38,60	38,60	37,00	36,12	100,19	38,00	41,7	109,74	Tercapai
	Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas	orang	125.575	125.575	137.396	121.026	100,00	135.000	107.858	79,89	Tidak Tercapai
4)	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>										
	Jumlah industri kecil dan Menengah	unit	1.632	1.723	2.000	2.200	100,00	2.700	2500	92,59	Tidak Tercapai
	Jumlah industri berbahan baku lokal	unit	1.251	1.276	1.750	1.850	100,00	2.117	1964	92,77	Tidak Tercapai
	Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal	%	11,57	11,60	11,60	11,85	100,00	12,28	10	81,43	Tidak Tercapai
5)	<b>Program Peningkatan Kapasitas dan Penggunaan IPTEK dalam Sistem Produksi</b>										
	Percentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepri	Persen	-	0,013	0,026	0,058	100,00	0	0	0	Tidak Tercapai

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2021

## 8) Transmigrasi

Salah satu urusan wajib pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah urusan ketenagakerjaan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi memiliki kewenangan terkait dengan ketenagakerjaan adalah (1) Pencadangan



tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; (2) Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan (3) Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan.

Kinerja urusan transmigrasi dapat dilihat dari dua indikator, yakni Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepri, dan Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata. Capaian untuk indikator Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepri hingga tahun 2020 status capaianya tidak tercapai, dari 2.730 KK yang ditargetkan di tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 1.845 KK dengan 2 kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata. Hal ini di sebabkan karena Belum terpenuhinya Rencana Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan Kementerian Desa Tertinggal di Kabupaten Natuna sebagai 144 kawasan yang masih menjadi prioritas pembangunan kawasan transmigrasi sehingga penetapan kawasan, pembangunan kawasan, dan penempatan warga transmigrasi yang telah ditargetkan belum dapat terpenuhi.

Secara rinci realisasi indikator program pembangunan urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.60**

**Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi</b>										
	Jumlah KK yang sudah bertransmigrasi di Kepri	KK	1.471	1.471	1.471	1.471	1.471	2.730	1.845	67,58	Tidak Tercapai
	Jumlah kawasan pemukiman transmigrasi yang tertata	Kawasan	2	2	2	2	2	3	2	66,67	Tidak Tercapai

*Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021*

Kinerja indikator program pembangunan pada urusan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat melalui capaian kinerja 2 Indikator pada 1 program (program pembangunan). Dari 2 indikator yang telah rilis data tahun 2020, semuanya mempunya status tidak tercapai.



### 2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1) Perencanaan

Upaya-upaya mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi secara nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah semakin ditingkatkan di Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021, dan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021. Perencanaan pembangunan tahunan berupa RKPD disusun setiap tahunnya. Selain itu untuk mendukung perencanaan yang komprehensif, dilakukan pula penyusunan beberapa dokumen perencanaan multi sektoral.

Untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan sesuai dengan yang direncanakan, dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai masukan dalam perencanaan pembangunan periode berikutnya. Setiap tahun Bapelitbang Provinsi Kepulauan Riau melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Kinerja dalam penyelenggaraan fungsi perencanaan pembangunan kedepannya masih perlu ditingkatkan dan dipertahankan. Indikator Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD hanya memiliki capaian 100% pada tahun 2020. Selain itu Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD miliki capaian sebesar 85%, dan keselarasan Renstra PD dengan RPJMD memiliki capaian 100% sesuai dengan target tahun 2020. Dilihat dari persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir di tahun 2020 sebesar 34%.

Di sisi lain untuk indikator persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah; Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah; dan Persentase kerjasama yang



diimplementasikan telah memiliki realisasi 100% sesuai dengan target tahun 2020. Sedangkan indikator Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki realisasi capaian sebesar 100%

Penyelenggaraan fungsi Perencanaan Pembangunan dilakukan melalui 8 program dan 12 indikator secara keseluruhan telah mencapai target tahun 2020 dan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.61**  
**Capaian Kinerja Fungsi Perencanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program perencanaan Pembangunan Daerah										
	Persentase Keselarasan Program RKPD dengan RPJMD	%	84	90	80	91,57	100	100,00	100	100,00	Tercapai
	Persentase Keselarasan Renja PD dengan Renstra PD	%	NA	NA	NA	83,87	85	86,00	86	100,00	Tercapai
	Persentase keselarasan Renstra PD dengan RPJMD	%	71	73	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai
	Persentase kegiatan prioritas yang didanai	%	NA	NA	80	80	81	81,00	81	100,00	Tercapai
	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir	%	25	28	86,25	87,15	33	34,00	34	100,00	Tercapai
2	Program perencanaan Perekonomian										
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Tercapai
3	Program Perencanaan sosial budaya										
	Persentase	%	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	ketersediaan dokumen perencanaan sosial budaya sesuai amanat pemerintah										
4	<b>Program Perencanaan sarana, prasarana wilayah dan Lingkungan Hidup</b>										
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Tercapai
5	<b>Program Perencanaan Pemerintahan</b>										
	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan pemerintahan sesuai amanat pemerintah	%	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Tercapai
6	<b>Program Kerjasama Pembangunan</b>										
	Persentase kerjasama yang diimplementasikan	%	100	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00	Tercapai
7	<b>Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>										
	Persentase Informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	0	20	100	100,00	80	100,00	100	100,00	Tercapai
8)	<b>Program Pengendalian dan Evaluasi</b>										
	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan	%	NA	NA	NA	100,00	100	100,00	100	100,00	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	pembangunan sesuai ketentuan										

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2021

## 2) Penelitian dan Pengembangan

Kewenangan pemerintah daerah provinsi pada fungsi Penelitian dan Pengembangan mencakup menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, menyusun program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintah provinsi, melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintah daerah provinsi, pelaksanaan inovasi daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan berada dibawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Kinerja penyelenggaraan fungsi penelitian dan pengembangan dilihat dari persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan oleh stakeholder. Capaian pada tahun 2020 sebesar 65% sesuai dengan target tahun 2020, dengan realisasi capaian target 100%. Selain itu indikator Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah memiliki realisasi sebesar 20% sesuai dengan target tahun 2020 yang juga 20%. Secara lebih rinci capaian kinerja penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.62**  
**Capaian Kinerja Fungsi Penelitian dan Pengembangan**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan										
	Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan oleh stakeholder	%	NA	NA	59	55	55	65,00	65	100	Tercapai
2	Program Pengembangan Inovasi										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	<b>Daerah</b>										
	Persentase Jumlah Inisiatif Inovasi yang sudah terbentuk menjadi Inovasi Daerah	%	NA	NA	NA	0	5	20,00	20	100	Tercapai

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, 2021

### 3) Keuangan

Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan hal tersebut, berbagai cara untuk memperoleh sumber keuangan, dan untuk apa saja sumber keuangan tersebut digunakan menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Kewenangan dalam menjalankan fungsi keuangan meliputi kegiatan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Fungsi Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dijalankan oleh dua perangkat daerah yakni Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).

Kinerja Fungsi Keuangan Daerah dapat dikatakan cukup baik, dilihat dari persentase perangkat daerah yang menyampaikan laporan sudah 94,33% perangkat daerah yang menyampaikan laporan. Namun persentase kepuasan pelayanan masih bernilai 94,33% pada tahun 2020. Persentase aset (barang milik daerah) Pemerintah daerah hanya sebesar 55%. Namun rata-rata nilai hasil evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten Kota masih belum diketahui skor nilai yang telah dicapai.

Dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2015-2029 selalu mengalami peningkatan dari 1,013 Triliun Rupiah pada tahun 2015 menjadi 1.306 triliun rupiah pada tahun 2019. Namun demikian pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi hanya sebesar 1,191 trilyun rupiah sebagai dampak Pandemi Covid-19. Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja fungsi keuangan daerah telah menggunakan E-samsat dan E-payment untuk mengurangi adanya korupsi dan mewujudkan transparansi dalam pengelolaan



keuangan. Meskipun telah menggunakan teknologi namun dilihat dari persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat masih sangat sedikit, dilihat dari realisasi kinerja pada tahun 2020 hanya 80% saja masyarakat yang menggunakan layanan inovasi teknologi samsat. Kondisi tersebut perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan pengenalan secara lebih luas kepada masyarakat terkait inovasi teknologi samsat yang telah digunakan.

Kinerja indikator urusan keuangan ditunjukkan melalui 13 indikator yang tersebar pada 7 program. Dari 13 indikator tersebut terdapat 8 indikator dengan status telah mencapai target tahun 2020; dan 5 indikator belum mencapai target. Secara rinci realisasi indikator program urusan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.63**

**Capaian Kinerja Fungsi Keuangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi	Status
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah										
	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	80	82	88	90	100	96,77	94,33	97,47	Tidak Tercapai
	Persentase kepuasan pelayanan	%	80	80	82	85	97	95,00	94,33	99,29	Tidak Tercapai
2	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah										
	Persentase aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah baik bergerak maupun yang tidak bergerak yang dilengkapi dengan	%	3,54	46,5	71,43	68,93	70	79,22	98,17	123,92	Tercapai



No	Program dan indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi	Status
	bukti legalitas kepemilikan										
	Percentase Aset (Barang Milik Daerah) Pemerintah daerah yang tidak bergerak yang dilakukan pengamanan (pagar,patok,papan nama)	%	17,78	24,44	41,95	55,56	70	86,67	98,17	113,27	Tercapai
3	<b>Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota</b>										
	Rata-rata Nilai hasil evaluasi APBD dan LPP APBD Kabupaten/Kota	Skor	NA	NA	BB	BB	BB	A	A	100	Tercapai
4	<b>Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah</b>										
	Realisasi pendapatan asli daerah	Triliun Rupiah	1.013	1.079	1.091	1.229	1.306	1,457	1,191	81,74	Tidak Tercapai
	Percentase realisasi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah	%	40,3	37,03	33,59	34,68	35,19	38,73	33,41	86,26	Tidak Tercapai
	Percentase tunggakan pajak daerah yang tertagih	%	NA	9	17,17	17	32	22,00	31,10	141,36	Tercapai
5	<b>Program Peningkatan Koordinasi Pengelolaan Dana Perimbangan Pusat dan Daerah</b>										
	Percentase realisasi	%	88,45	90	97,04	93,99	107,25	90,00	100,68	111,86	Tercapai



No	Program dan indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi	Status
	penerimaan dana perimbangan dibandingkan target tahun berjalan										
6	<b>Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi</b>										
	Jumlah jenis inovasi pelayanan berbasis Teknologi Informasi	Jenis layanan	Samsat online	Samsat Link	Samsat Link	E-Samsat dan e-paymen t	e Samsat dan e payment	e Samsat dan e payment	100,00	100,00	Tercapai
	Persentase wajib pajak yang memanfaatkan layanan inovasi teknologi samsat	%	2	6	7	10	3	30,00	3,00	10,00	Tercapai
7	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Informasi Publik</b>										
	Rata-rata lamanya waktu pelayanan Samsat (Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor)	Waktu (menit)	-	35	30	20	10	25	10	250	Tercapai
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SAMSAT	Kategori (scoring)	Baik (7,25)	-	7,5	7,75	8	Sangat baik (8.25)	Baik (7,97)	97,19	Tidak Tercapai

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah; dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

#### 4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peran dan fungsi ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan



pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan dan pelatihan meliputi penyusunan formasi; pengangkatan ASN daerah; penetapan kenaikan pangkat ASN daerah, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN; Pemberhentian sementara dari jabatan; dan penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kompetensi ASN. Dalam penyelenggaraan fungsi kepegawaian dan diklat di Provinsi Kepulauan Riau diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDM).

Kinerja fungsi kepegawaian dan diklat masih belum bisa memenuhi kebutuhan ASN di daerah Provinsi Kepulauan Riau, hal tersebut dilihat dari indikator persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan yang hanya memiliki realisasi capaian 56,74% pada tahun 2020. Dibandingkan dengan target tahun 2020 sebesar 65%, sehingga persentase realisasi indikator persentase ketersediaan ASN hanya sebesar 87,79% dengan status tidak mencapai target tahun 2020. Selain itu indikator penurunan kasus indisipliner pegawai tingkat sedang dan berat mengalami penurunan pada tahun 2020 yang realisasinya hanya 16 kasus dengan target di tahun 2020 sebanyak 10 kasus dengan persentase realisasi sebesar 40%. Hal ini disebabkan Adanya penerapan e-disiplin menyebabkan terpantauanya prilaku PNS yang melanggar peraturan disiplin pegawai.

Fungsi Kepegawaian memiliki 2 program dan 6 indikator, dari 6 indikator tersebut terdapat 2 indikator yang tidak mencapai target dan 4 indikator lainnya telah mencapai target tahun 2020. Secara lebih rinci capaian kinerja indikator program sebagai berikut.

**Tabel 2.64**  
**Capaian Kinerja Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur										
	Persentase ketersediaan ASN sesuai dengan kebutuhan	%	50	52	55,87	55,13	58,02	65,00	56,74	87,29	Tidak Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Percentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Administrasi yang Menduduki Jabatan sesuai dengan Syarat dan Kompetensi Jabatan	%	NA	NA	97,02	84,80	93,80	84,00	98,47	117,23	Tercapai
	Penurunan Kasus Indisipliner Pegawai Tingkat Sedang dan Berat	Kasus	13	8	15	13	12	10	16	40,00	Tidak Tercapai
	Percentase ASN yang Memiliki Penilaian Kinerja Baik	%	62	70	92,7	100	100	94,00	100	106,38	Tercapai
	Indeks Kepuasan Pelayanan ASN	indeks	B	B	B	B	B (77.70)	B (80)	B (80.69)	101,08	Tercapai
2	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>										
	Percentase peningkatan Kompetensi ASN melalui pengembangan kompetensi	%	5,3	8,5	17,17	13,68	31,20	30,78	31,2	101,36	Tercapai

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, 2021

## 5) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyusun dan mengajukan rancangan Perda, dan menyusun serta menetapkan RKPD, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugasnya Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau memiliki 3 program yakni Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat; Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan; dan Program Peningkatan Publikasi, komunikasi dan informasi.

Kinerja penyelenggaraan fungsi kesekretariatan DPRD sejauh ini dapat dikatakan cukup baik. Dilihat dari Percentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD capaiannya sudah 100% sesuai SOP. Hal yang sama juga terjadi pada persentase pelayanan administrasi keuangan DPRD yang sudah



100% sesuai SOP pada tahun 2020. Namun dilihat dari Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD masih berada pada skor 68. Meskipun kondisi tersebut telah mencapai target tahun 2020 namun masih perlu adanya peningkatan capain skor di tahun selanjutnya

Penataan peraturan perundang-undangan juga menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah SPRD sudah 100% sesuai SOP. Namun terkait dengan Jumlah Reses Anggota SPRD masih belum menunjukkan perkembangan yang baik karena belum mampu mencapai target tahun 2020 sebesar 135 orang/kali.

Penyelenggaraan Fungsi Sekretariat DPRD di lakukan melalui 3 program dan 8 indikator. Dibandingkan dengan target tahun 2020, sebanyak 7 indikator telah mencapai target tahun 2020, dan 1 indikator belum mencapai target tahun 2020. Secara lebih rinci capaian kinerja fungsi sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.65**  
**Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah										
	Percentase pelayanan humas dan keprotokolan DPRD sesuai SOP	%	85	87	100	100	100	94,00	100	106,38	Tercapai
	Percentase pelayanan administrasi keuangan DPRD sesuai SOP	%	85	87	100	100	100	94,00	100	106,38	Tercapai
	Indeks kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.	Skor	-	60	62	64	66	68,00	68	100,00	Tercapai
	Percentase Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100,00	100	100,00	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan										
	Persentase pelayanan pelaksanaan sidang dan risalah DPRD sesuai SOP	%	85	87	100	100	100	94,00	100	106,38	Tercapai
	Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi	Raperda	0	0	0	0	0	12,00	9	75,00	Tidak Tercapai
3	Program Peningkatan Publikasi, Komunikasi dan Informasi										
	Jumlah Media Massa yang berkerjasama dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	MoU				163	183	95	186	195,79	Tercapai
	Jumlah Reses anggota DPRD yang di fasilitasi	Orang Kali				135	135	135	135	100,00	Tercapai

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021

## 6) Sekretariat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 213 Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Dalam penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau memiliki 9 biro penunjang yakni Biro Pemerintahan dan Perbatasan; Biro Hukum; Biro Administrasi Pembangunan; Biro Administrasi Layanan Pengadaan; Biro Umum; Biro Kesejahteraan Rakyat; Biro Administrasi Perekonomian; Biro Organisasi dan Korpri; dan Biro Humas, Protokol, dan Penghubung.



Secara keseluruhan dalam Biro Pemerintahan dan Perbatasan pada tahun 2020 capaian indikatornya sudah baik. Terlihat dari 4 indikator yang di targetkan di tahun 2020, semuanya telah mencapai target tahun 2020. Yaitu indikator peringkat LPPD dengan Status Sangat Tinggi; indikator Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan dengan capaian 100%; Indikator Persentase Fasilitas Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota dengan capaian 100%; dan indikator Persentase Lokalisasi prioritas dan PKSB dengan capaian 100%.

Kinerja Biro hukum pada tahun 2020 masih harus terus ditingkatkan meskipun capainnya sudah mencapai target tahunan, dilihat dari Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesesilaan telah terealisasi 29 dokumen dari target 7 dokumen di tahun 2020. Selain itu jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemprov kepri hanya ada 9 kasus, sudah memenuhi target. Sedangkan Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi pada tahun 2020 sudah teralisisi 3 MoU. Kinerja Biro administrasi Pembangunan juga perlu di tingkatkan kedepannya.

Dilihat dari Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN secara fisik belum mencapai target pada tahun 2020 yakni realisasi fisik sebesar 99,35% sedangkan realisasi keuangan sudah mencapai 102,61%. Indikator Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IUJK ditingkat daerah juga tidak mencapai target tahunan dengan realisasi hanya sebesar 60%.

Kinerja Biro Umum sudah baik, dilihat dari semua indikator yang di targetkan di tahun 2020 semuanya telah mencapai target 2020. Penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah dilakukan melalui 24 program dengan 45 indikator indikator kinerja. Dilihat dari capaian tahun 2020 terdapat 3 indikator yang belum mencapai target tahun 2020 dan 68 indikator yang telah mencapai target tahun 2020. Secara lebih rinci dapat dilihat apada tabel berikut ini.



**Tabel 2.66**  
**Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	<b>Biro Pemerintahan dan Perbatasan</b>										
1	<b>Program Pelayanan Pemerintahan Umum Daerah</b>										
	Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD )	Peringkat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	125,00	Tercapai
	Presentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	%	100	100	94,21	100	100	100,00	100	100	Tercapai
2	<b>Program Pengembangan Wilayah Perbatasan</b>										
	Presentase Fasilitasi Penyelesaian Batas Darat Kab/Kota	%	80	80	85	95	100	100,00	100	100	Tercapai
	Presentase Lokasi Prioritas dan PKSB yang di data/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	%	9,76	34,15	N/A	100	100	100	100	100	Tercapai
	<b>Biro hukum</b>										
3	<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>										
	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-	Jumlah	NA	NA	10	6	4	7	29	414,29	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	undangan, kepentingan umum dan atau kesuilaan										
4	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum</b>										
	Percentase Ranperda Kab/Kota yang dievaluasi	%	16	49	100	100	100	100	100,00	100,00	Tercapai
3	<b>Program Pembinaan Hukum</b>										
	Percentase ranperda yang diusulkan pemrakarsa yang diakomodir dalam propemperda	%	21	15	67	73	80	80,00	80,00	100,00	Tercapai
4	<b>Program Fasilitasi Bantuan dan Layanan Hukum</b>										
	persentase perkara perdata dan TUN yang dihadapi oleh pemprov yang tertangani	%	2	5	57	48	120	50,00	40,00	20,00	Tidak Tercapai
	jumlah kasus masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum oleh pemprov kepri	Kasus	NA	NA	NA	4	10	5	9	180,00	Tercapai
	Jumlah MoU antara Gubernur Kepri dengan LBH dan atau OBH yang terverifikasi	Dokumen	NA	NA	NA	2	3	3	3	100,00	Tercapai
	<b>Biro Administrasi Pembangunan</b>										
5	<b>Program e-Government</b>										
	Jumlah sistem informasi administrasi pembangunan yang terintegrasi	Unit Sistem	NA	NA	2	3	5	7	7	100	Tercapai
6	<b>Program Peningkatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian</b>										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	<b>Pembangunan</b>										
	Percentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	%	Fisik 93,00 Keu 90,00	Fisik 94,00 Keu 89,00	Fisik 84,55 Keu 88,04	Fisik 98,50 Keu 95,98	Fisik 97,37 Keu 95,31	Fisik 100,00 Keu 95,00	Fisik 99,35 Keu 97,48	Fisik 99,35 Keu 102,61	Tercapai
7	<b>Program Peningkatan Administrasi Pembangunan</b>										
	Percentase dokumen administrasi pembangunan tersusun tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
8	<b>Program Pembinaan dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi</b>										
	Jumlah Kab/Kota yang telah menerbitkan regulasi IJUK ditingkat daerah	Kab/Kota	NA	NA	1	3	3	5	3	60,00	Tidak Tercapai
	<b>Biro Administrasi Layanan Pengadaan</b>										
9	<b>Program Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</b>										
	Percentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	%	NA	NA	65,26	69,64	75,39	83,00	86,57	104,30	Tercapai
10	<b>Program e-procurement</b>										
	Percentase pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (E-Procurement)	%	NA	NA	82,76	74,58	89,69	80,00	91,57	114,46	Tercapai
	<b>Biro Umum</b>										
11	<b>Program Pelayanan KDH/WKDH yang di fasilitasi (2018-2021)</b>										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Jumlah layanan kedinasan KDH/WKD yang sesuai prosedur	layanan	2	2	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai
	Jumlah layanan rumah tangga KDH/WKD yang dilayani sesuai prosedur	layanan	2	2	2	2	2	2	2	100,00	Tercapai
12	<b>Program Dukungan Pelayanan Umum</b>										
	Persentase pelaksanaan pelayanan umum sesuai SOP	%	50	50	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
13	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dilingkungan sekretariat daerah</b>										
	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang terjamin keamanannya	%	80	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	Persentase barang milik daerah dilingkungan sekretariat daerah yang dikelola sesuai dengan standar	%	80	90	100	90	90	90,00	90,00	100,00	Tercapai
	<b>Biro Kesejahteraan Rakyat</b>										
14	<b>Program Pengembangan Nilai-Nilai Keagamaan</b>										
	Persentase pelaksanaan hari-hari besar keagamaan	%	NA	NA	100	100	100	100,00	100,00	100,00	tercapai
	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	%	NA	NA	Na	25	50	80,00	80,00	100,00	tercapai
15	<b>Program Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan</b>										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	<b>Masyarakat</b>										
	Percentase Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Masyarakat tingkat provinsi	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	tercapai
	Percentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	tercapai
	Percentase Pembinaan , Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pendidikan	%	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	tercapai
	<b>Biro Administrasi Perekonomian</b>										
16	<b>Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Asistensi Pembangunan</b>										
	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	rekomendasi	NA	NA	13	13	6	7	7	100,00	Tercapai
	Jumlah koordinasi bidang perekonomian yang terlaksana	Angka	NA	NA	13	18	14	14	14	100,00	Tercapai
	Jumlah monitoring dan evaluasi dibidang perekonomian yang dilaksanakan	Laporan	NA	NA	NA	7	7	7	7	100,00	Tercapai
17	<b>Program Peningkatan Kinerja BUMD</b>										
	Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD	Skor	NA	NA	0	*56,06	33,33	40,00	56,32	140,80	Tercapai
	<b>Biro Organisasi dan Korpri</b>										
18	<b>Program kelembagaan organisasi</b>										



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	<b>pemerintah daerah</b>										
	Percentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	NA	NA	116	90	72	80,00	80,00	100,00	Tercapai
19	<b>Program pembinaan dan pengembangan aparatur</b>										
	Percentase Jabatan yang telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja	%	63	66	56	68,3	76	90,00	90,00	100,00	Tercapai
	Percentase Perangkat daerah yang telah memiliki dokumen evaluasi jabatan	%	53	53	67	68,3	80	90,00	90,00	100,00	Tercapai
	Percentase jabatan struktural yang telah disusun standar kompetensi Jabatan managerial sesuai ketentuan	%	50	58	99	99	99,00	99,00	99,00	100,00	Tercapai
20	<b>Program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik</b>										
	Percentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan standar pelayanan publik	%	55	71	74,83	77,42	85	90,00	90,00	100,00	Tercapai
	Percentase Perangkat Daerah yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh kementerian	%	NA	NA	4	4	46	69,00	69,00	100,00	Tercapai
	Percentase SOP pada seluruh Opd yang tersusun.	%	NA	NA	NA	62,28	71	86,00	86,00	100,00	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	Percentase SOP pada seluruh OPD yang telah diimplementasikan	%	66	71	78	88,88	95	96,00	96,00	100,00	Tercapai
	Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik	Skor SKM	NA	NA	76,09	NA	67	74,00	82,89	112,01	Tercapai
21	<b>Program pembentukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih</b>										
	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri	Angka	41,15	60	64,18	NA	65,83	72	65,83*	91,43	Tidak Tercapai
	<b>Biro humas, Protokol dan Penghubung</b>										
22	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH</b>										
	Percentase Pelayanan KDH/WKDH Bidang Kehumasan, Keprotokolan, dan Penghubung dan Kerjasama Yang Sesuai Dengan SOP	%	18	81	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
23	<b>Program Pengembangan Publikasi, Komunikasi dan Informasi</b>										
	Jumlah Media Massa Yang Bekerja Sama Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Media Massa	NA	NA	128	172	159	10,00	200,00	133,33	Tercapai
	Percentase Media Informasi Yang Digunakan	%	NA	NA	142,86	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
24	Program Fasilitasi dan Kerjasama dengan Berbagai Pihak										
	Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri yang Difasilitasi di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Kegiatan	7	2	4	4	4	4	3	100,00	Tercapai
	Jumlah Kerjasama Yang Difasilitasi Oleh Bagian Penghubung dan Kerjasama di Jakarta dan Tempat Lain di Luar Provinsi Kepri	Mou	-	-	8	9	10	10	18	180,00	Tercapai

Ket: \*) Nilai BUMD PDAM Tirta Kepri, sehubungan 2 BUMD lainnya belum memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian yang berpedoman pada Modul penilaian BUMD yang dikeluarkan oleh Mendagri pada Oktober 2017.

Sumber: Sekretariat Daerah, 2021

## 7) Pengawasan

Kinerja indikator program pembangunan pada fungsi pengawasan ditunjukkan melalui 9 indikator yang tersebar pada 4 program (program pembangunan). Dari ke 9 indikator yang telah rilis data tahun 2020, terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yakni Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Dari level 3 yang di targetkan pada tahun 2020, baru mencapai level 2+ hingga akhir tahun 2020.

Sedangkan indikator yang telah mencapai target meliputi: Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi, Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau, Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai, Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri, Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P, Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri. Secara rinci realisasi indikator program pembangunan fungsi pengawasan dapat dilihat pada Tabel berikut:



**Tabel 2.67**  
**Capaian Kinerja Fungsi Pengawasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.</b>										
	1) Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang memiliki sertifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai
	2) Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	2+	75	Tidak tercapai
	3) Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target sesuai dengan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda Se-Provinsi Kepulauan Riau	%	100	85,71	116	100	71,43	100	100	100	Tercapai
2	<b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan</b>										
	4) Persentase Pelaksanaan Tugas pada Inspektorat yang memiliki SOP yang memadai	%	30	30	60	92	92	70	95	136	Tercapai
3	<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah</b>										
	5) Opini BPK atas LKPD Pemprov Kepri	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Tercapai
	6) Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Level	1	2	3	3	3	3	3	100	Tercapai



No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program Tahun 2020			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
	7) Zona Kepatuhan Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Zona	Hijau	Kuning	Kuning	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	100	Tercapai
4	<b>Program Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri</b>										
	8) Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN, LHKASN dan LP2P	%	60	60	100	96	100	90,00	100	111	Tercapai
	9) Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri	Status	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	100	Tercapai

Sumber: Inspektorat Daerah, 2021

### 2.1.3.5 Urusan Pemerintahan Umum

#### 1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Selain mengenai ketentraman dan ketertiban, kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat juga dapat dilihat dari sisi wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat. Dilihat dari wawasan kebangsaan, dapat dilihat kinerja yang baik karena indikator persentase konflik yang tertangani trennya positif karena semua dapat ditangani dengan baik. Hal tersebut sama dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Adapun untuk kinerja pendidikan politik masyarakat, pada tahun 2020 dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat pemilik hak suara dalam memberikan suara pada pemilihan kepala daerah sebesar 67,01%. Untuk indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan, kinerjanya semakin baik karena mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.



**Tabel 2.68**  
**Capaian Kinerja Wawasan Kebangsaan dan Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

No	Program dan Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal RPJMD		Realisasi Kinerja			Pencapaian Target Kinerja Program			
			Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target	Realisasi	% Realisasi Kinerja	Status
1	<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>										
	Persentase Konflik Sosial Tertangani	%	100	100	100	100	100	100,00	100	100	Tercapai
2	<b>Program Pendidikan Politik Masyarakat</b>										
	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES)	%	Pilgub (2015): 55,25; Pileg (2014): 71,65; Pilpres (2014): 59,43	0	0	59	Pileg : 82,00; Pilpres : 82,00	PilGub : 61,50	Pilgub : 67,01	108,96	Tercapai
	Persentase Organisasi Kemasyarakatan dan LSM yang sesuai dengan aturan	Ormas	0	0	18,00	163,64	158,80	84,21	108,56	128,92	Tercapai

Sumber: Kesbangpol Provinsi Kepulauan Riau, 2021

#### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

##### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

###### 1. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan

Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan penduduk Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 sebesar Rp 1.574.392 pada tahun 2018 menjadi seperti Rp 1.778.150,00 pada tahun 2019, namun menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar 1.773.521, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.



**Tabel 2.69**  
**Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2018-2020**

No	Uraian	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	1.574.392	1.778.150	1.773.521

## 2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi salah satu indikator produksi untuk melihat tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Dengan kata lain, NTP menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Dari lima subsektor penyusun NTP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, tercatat sektor yang melebihi 100 yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, sedangkan sektor peternakan dan sektor Perkebunan rakyat kurang dari 100, seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.70**  
**Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTP-P)	99,50	98,57	97,27	96,41	95,25	104,54
2.	Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTP-H)	102,68	102,53	98,41	93,74	103,92	105,39
3.	Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-Pr)	85,49	80,15	80,15	72,99	71,43	89,57
4.	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTP-Pt)	104,66	104,05	104,76	104,68	104,44	99,86
5.	Nilai Tukar Petani Perikanan (NTP-Pi)	107,39	108,98	111,7	116,13	115,15	108,53
6.	Nilai Tukar Petani (NTP) umum	99,45	98,16	97,98	96,08	97,54	101,35

Sumber : BPS Kepri 2020, Berita Resmi Statistik "Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Kepulauan Riau 2019

### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

#### 1. Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan

Di Provinsi Kepulauan Riau terjadi peningkatan panjang jalan Provinsi dari 679,49 km pada tahun 2011 meningkat menjadi sepanjang 896,46 km pada tahun 2019. Sementara itu jumlah kendaraan mencapai sebanyak 1.242.891 unit, terdiri dari sejumlah 151.443 mobil penumpang; sebanyak 2.897 unit bus; dan sebanyak 1.088.551 unit sepeda motor. Jumlah kendaraan terbanyak di Kota Batam; Kota



Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Gambaran jumlah kendaraan bermotor dikemukakan pada tabel berikut ini.

## 2. Jumlah Bank dan Kantor Cabang

Keberadaan lembaga keuangan/perbankan sangat penting dalam menjaga kelangsungan perekonomian daerah dan ketersediaan dana bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan darrah. Tidak saja sebagai sarana penyaluran dana tetapi juga berfungsi sebagai salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi. Terdapat sebanyak 479 unit Bank Umum di Kepulauan Riau pada tahun 2019, dengan perincian tercantum pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.71**

**Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Jenisnya Di Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2020**

No	Jenis	Kantor Pusat	Kantor Cabang dan Cabang Pembantu	Kantor Kas	Jumlah
1.	Bank Umum Pemerintah	0	204	117	321
2.	Bank Umum Syariah	0	20	4	24
3.	Unit Usaha Syariah	0	8	41	49
4.	Bank Perkreditan Rakyat	43	29	9	81
5.	Bank Perkreditan Rakyat Syariah	2	2		4
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>263</b>	<b>171</b>	<b>479</b>

*Sumber: BPS Kepri, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2020*

## 3. Jumlah Penginapan dan Hotel

Terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak besar terhadap sektor pariwisata. Dampak yang terjadi di Provinsi Kepri yang merupakan salah satu tujuan pariwisata oleh wisatawan mancanegara maupun domestik adalah tutupnya beberapa hotel dan akomodasi lainnya. Hotel yang tidak dapat bertahan selama pandemi Covid-19 memilih untuk tutup permanen, sehingga jumlah hotel dan akomodasi lainnya di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu juga banyak hotel ataupun akomodasi lainnya yang memilih tutup sementara selama tahun 2020 sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan.

Perkembangan jumlah perhotelan di Provinsi Kepri terdiri dari hotel berbintang dan hotel non-bintang. Banyaknya hotel pada tahun 2020 sebanyak 462 hotel meningkat dari sebanyak 426 unit tahun 215. Demikian pula jumlah kamar dari sebanyak 23.821 kamar pada tahun 2017 meningkat menjadi sebanyak 18.418 unit pada tahun 2015. Secara rinci jumlah hotel dan jumlah kamar hotel berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.72****Jumlah Hotel dan Kamar Hotel di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020**

No	Kabupaten/ Kota	Hotel						Kamar					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Karimun	69	72	65	66	62	62	1.174	2.355	2230	2230	2230	2230
2.	Bintan	36	38	42	42	47	45	1.416	2.339	2921	2921	2921	2921
3.	Natuna	44	42	39	42	45	39	320	532	523	523	523	523
4.	Lingga	22	20	23	22	22	23	360	451	513	513	513	513
5.	Kepulauan Anambas	21	20	16	16	16	14	100	323	263	263	263	263
6.	Batam	190	191	203	221	233	230	13.388	12.983	15.146	15.146	15.146	15.146
7.	Tanjungpinang	44	46	45	47	49	49	1.660	2.211	2.225	2.225	2.225	2.225
<b>Kepulauan Riau</b>		<b>426</b>	<b>429</b>	<b>433</b>	<b>456</b>	<b>473</b>	<b>462</b>	<b>18.418</b>	<b>21.194</b>	<b>23.821</b>	<b>23.821</b>	<b>23.821</b>	<b>23.821</b>

*Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2020***4. Jumlah Restoran**

Jumlah restoran di Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan dari sebanyak 825 unit pada tahun 2016 menjadi sebanyak 966 unit pada tahun 2018, dengan perincian dan penyebaran restoran tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.73****Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Karimun	39	49	67	69	69
2.	Bintan	70	72	72	...	...
3.	Natuna	57	37	50	57	57
4.	Lingga	78	78	144	152	152
5.	Kepulauan Anambas	40	40	36	56	56
6.	Batam	500	531	544	...	...
7.	Tanjungpinang	41	41	53	...	...
<b>Kepulauan Riau</b>		<b>825</b>	<b>848</b>	<b>966</b>	...	...

*Sumber: Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2020***5. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih**

Penggunaan air minum yang disalurkan oleh PDAM Tirta Kepulauan Riau Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2019 sebanyak 90.442.713,00 m<sup>3</sup>. Di samping itu, dibangun pula sarana dan prasarana air bersih berbasis masyarakat. Persentasi pelayanan akses air bersih/minum yang aman menunjukkan peningkatan dari sebesar 72,01% pada tahun 2016, menjadi 92,68% pada tahun 2020 seperti terlihat pada Tabel berikut ini.



**Tabel 2.74**  
**Percentase Pelayanan Akses Air Bersih/Minum yang Aman di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Percentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman (%)	%	72,01	89,44	92,15	92,47	92,68

*Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman*

## 6. Ketersediaan daya listrik

Pembangunan suatu wilayah yang cukup pesat seperti di Provinsi Kepulauan Riau tentu membutuhkan sarana pendukung seperti ketersediaan sumber energi. Berdasarkan data yang diperoleh dari PLN, di tahun 2019 daya terpasang yang tersedia sebesar 887.408 KWh. Produksi listrik sebesar 3.530.198.463 KWh dengan listrik terjual sebanyak 3.335.579.325 KWh. Kebutuhan listrik sangat besar, sehingga perlu ada penambahan daya terpasang. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.75**  
**Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero)**  
**pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019**

No	Kabupaten/Kota	Daya Terpasang (KWh)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
1	Karimun	74.600.	244.543.724.	218.419.826.	306.928.	14.139.229
2	Bintan	35.024.	139.590168	224.684.294	645.754	9.044.040
3	Natuna	27.175.	58.052.046	52639.161	127.579	4.809.404
4	Lingga	12.979.	40.076.116	37.240.017	61.291	2.603.535
5	Kepulauan Anambas	11.585.	28.070.832	25.455.656	55.170	1.495.508
6	Batam	686.028.	3.017.106.622	2.460.987.735	23.844.232	114.190.527
7	Tanjungpinang	40.017.	2.758.954.	316.152.636	579.131	19.765.274
	<b>Kepulauan Riau</b>	<b>887.408</b>	<b>3.530.198.463</b>	<b>3.335.579.325</b>	<b>25.620.086</b>	<b>166.047.518</b>

*Sumber: BPS Kepri, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2020*

### 2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

#### 1. Jumlah Tindak Pidana

Jumlah tindak pidana menggambarkan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu di suatu derah. Jumlah tindak pidana menunjukkan penurunan dari sebanyak 5.220 kasus pada tahun 2015 menjadi 3.909 kasus pada tahun 2019. Hal ini perlu mendapatkan perhatian untuk



penanganan. Gambaran penyebaran berdasarkan kabupaten/kota dengan perincian sebagai berikut ini.

**Tabel 2.76**  
**Jumlah Tindak Pidana di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015-2020**

No	Kepolisian Resort	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Karimun	535	529	382	330	326	326
2.	Bintan	220	166	144	225	132	132
3.	Natuna	148	104	90	50	64	64
4.	Lingga	74	66	70	109	48	48
5.	Kepulauan Anambas	-	-	21	13	24	24
6.	Batam	4.270	3.701	2.925	2.602	2.694	2.694
7.	Tanjungpinang	685	673	519	396	396	396
	POLDA Kepulauan Riau	252	235	199	283	225	225
	Jumlah Total	6.184	5.474	4.350	4.008	3.909	3.909

Sumber: BPS Kepri, Provinsi Kepulauan Riau dalam Angka 2018

## 2. Pelayanan Perizinan

Pelayanan Perizinan di Provinsi Kepulauan Riau secara bertahap dipindahkan dari perangkat daerah ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP), sebagai suatu kemudahan pelayanan dan keterpaduan pelayanan. Jumlah Izin dan non perizinan yang dilayani sampai dengan tahun 2020 sebanyak 928 jenis perizinan/ non perizinan. Sedangkan jenis izin dan non perizinan yang diterbitkan oleh BPMPTSP hanya sebanyak 110 jenis. Masih terdapat beberapa jenis perizinan yang ditangani oleh perangkat daerah. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 81,93% seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.77**  
**Pelayanan Perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Izin dan nonperizinan yang dilayani oleh Pelayanan terpadu satu pintu	izin	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264
2	Jumlah jenis Izin dan non Izin yang diterbitkan BPMPTSP	jenis	110	110	110	110	110
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan Satu Pintu (PTSP)	%	81,25	76,61	77,2	82,34	81,93

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu



### 3. Fokus Sumber Daya Manusia

#### a. Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Saat ini, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas Umum yaitu sebanyak 30,93 persen pada Agustus 2020. Dibandingkan dengan Agustus 2019, kontribusi pendidikan pada penduduk bekerja mengalami penurunan pada pendidikan SD ke bawah (1,98 persen poin). Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SMP, SMA, SMK, Diploma I/II/III, dan Universitas mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar pada pendidikan SMA sebesar 0,64 persen poin.

**Tabel 2.78**

#### Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan tahun 2015-2020

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD Ke bawah	219.943	205.942	210 169	203 761	189 319
2	Sekolah Menengah Pertama	133.638	131.444	111 249	122 867	132 858
3	Sekolah Menengah Atas Umum	229.176	259.131	241 069	300 142	314 435
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	136.540	153.146	201 063	184 810	193 460
5	Perguruan Tinggi	140.516	147.268	174.470	177.237	186.528
	Jumlah	859.813	896.931	938.000	988.817	1.016.600

Sumber : BPS, berita resmi statistik "Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau", 2020

#### b. Rasio ketergantungan

Rasio Ketergantungan (Defendancy Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun keatas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun. Rasio Ketergantungan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 diketahui sebesar 47,32 %. Perincian angka ketergantungan terlihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.79**

#### Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Penduduk Usia Tidak Produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas)	328.846	315.451	644.297
2	Penduduk Usia Produktif (15-64 tahun)	758.216	728.254	1.486.370
3	Jumlah penduduk	28.803	30.183	58.986
4	Rasio Ketergantungan	47,17	47,46	47,32

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Kepulauan Riau Dalam Angka 2020).



### 2.1.5 Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2020 Provinsi Kepulauan Riau



#### Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 5 target yang diukur melalui 19 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 1 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.80**  
**Capaian Tujuan 1 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (10)
<b>Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan</b>								
<b>Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</b>								
1.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	% (kondisi Maret)	6.24	5.83	5,92		
<b>Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</b>								



## RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (10)
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan	BPKAD	Rupiah	NA	PM		PM	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	BPKAD	Miliar Rupiah, Fungsi Pendidikan	544.46	1,035,736,696,06 6.13	201,196,503,938. 00	▶	
			Miliar Rupiah, Fungsi Kesehatan	223.96	404,433,773,527. 54	179,712,580,522. 94	▶	
			Miliar Rupiah, Fungsi Perlindungan Sosial		33,520,878,884.7 1	13,413,080,413.0 0	▶	
<b>Target 1.3 Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.</b>								
1.3.1(a)	Cakupan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)	Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan	Jumlah orang	150,796	PM	584,136	▶	
1.3.1.(b)	Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	BPJS Ketenagakerjaan	%	25.01	40.98	43.45	●	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (10)
<b>Target 1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro</b>								
1.4.1(a)	Percentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	77.95	PM		PM	
1.4.1(b)	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	PM	PM		PM	
1.4.1(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. (kelompok penduduk 40% terbawah)	BKKBN	Percentase peserta KB yang menggunakan semua cara	46.11	48,70	79.90	<span style="color: green;">●</span>	
1.4.1. (d)	Percentase rumah tangga yang memiliki Akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	69.77	PM	PM	PM	telah sesuai. Perlu dipastikan bahwa data ini dimintakan ke BPS untuk dihitung khusus pada kelompok penduduk miskin dan rentan (Q1-Q2)



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (10)
1.4.1.(e)	Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS	%	55.81	PM	PM	PM	Indikator ini tersedia pada tingkat provinsi dan BPS telah biasa menyediakan data ini sejak MDGs. Jadi bisa komunikasikan dgn BPS untuk diminta data persentase ini khusus untuk kelompok miskin dan rentan saja (Q1-Q2)
1.4.1.(f)	Percentase rumah tangga kumuh perkotaan.	BPS	%	PM	PM	PM	PM	Sebelumnya Jumlah RTLH, Perlu disesuaikan dan diganti dengan definisi nasional (dalam persentase) karena BPS biasa menyediakan data ini hingga tingkat provinsi sejak MDGs
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS Susenas	%	99.56	PM	PM	PM	
1.4.1(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat) (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS Susenas	%	82.79	PM	PM	PM	



## RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (10)
1.4.1(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/sederajat. (kelompok penduduk 40% terbawah)	BPS Susenas	%	65.61	PM	PM	PM	
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	BPS	%	PM	PM		PM	data terkait belum publis
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	DESDM	%	PM	PM		▶	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.
<b>1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana</b>								
1.5.1.(b)	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	Dinas Sosial	org	57	150	75	▼	Target 150 org adalah target dari Bencana Alam 75 org dan Bencana Sosial 75 org
1.5.1.(c)	Jumlah korban bencana sosial yang mendapatkan pendampingan psikososial	Dinas Sosial	org	NA	150	75	▼	Target 150 org adalah target dari Bencana Alam 75 org dan Bencana Sosial 75 org
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	RPB Provinsi Kepri	Dokumen	1	1		▼	Dokumen Belum dilakukan pembaharuan



### Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Tujuan 2 TPB/SDGs adalah menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 target yang diukur melalui 7 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 2 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.81**  
**Capaian Tujuan 2 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 2 Tanpa Kelaparan</b>								
<b>Target 2.1 Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan rentan, termasuk bayi, untuk memperoleh makanan yang aman, bergizi dan cukup sepanjang tahun</b>								
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	BPS		PM	PM		▶	kewenangan pusat
2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi ( <i>underweight</i> ) pada anak balita	Profil Kesehatan, Renstra Dinkes, dan Laporan Rutin Seksi	%	17	16.5	6.70	▶	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
		Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau						
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	BPS	%	26.53	17.06		▶	Diperoleh di akhir tahun
<b>Target 2.2 Pada tahun 2030, mengakhiri segala bentuk kekurangan gizi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional untuk stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui serta orang tua</b>								
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anakbalita	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anakbalita	%	22.9	20.35	9.10	▶	
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi/ wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Persentase	% Wasting (Kurus dan Sangat Kurus pada Anak Balita)	12	9.5	5.40	▶	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
		Prevalensi obesitas pada balita tersedia pada Riskesdas	% Obesitas pada balita tersedia pada Riskesdas	2.7	PM	1.44		
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	BPS, diolah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	Skor PPH	83,8	93,5		▶	ada perubahan target Renstra untuk Skor PPH sebesar 89 di tahun 2020 dan Skor PPH dilakukan penghitungan di akhir tahun
<b>Target 2.3 Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk akses yang aman dan sama terhadap tanah, sumber daya produktif lainnya dan input, pengetahuan, jasa keuangan, pasar dan peluang untuk penambahan nilai, dan pekerjaan non-pertanian.</b>								
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	BPS, Sakernas	Rp/tenaga Kerja	76,720	112,787	72,165	▶	



## Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 10 target yang diukur melalui 20 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 20120 untuk target dan indikator pada tujuan 3 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.82**  
**Capaian Tujuan 3 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</b>								
<b>Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</b>								
3.1.1*	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Profil Kesehatan, Renstra Dinkes, dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	per 100.000 kelahiran hidup	146,53	129	111,6		



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
3.1.2*	Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil (Susenas)	Laporan Rutin Seksi Kesga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepri	%	93	87	37.58		
<b>Target 3.2 Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 KH</b>								
3.2.1*	Angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	per 1000 kelahiran hidup	11.48	PM	6.8		
3.2.2*	Angka kematian neonatal (AKN)	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	per 1000 kelahiran hidup	7.79	PM	4.84		



<b>Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit menular lainnya</b>								
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
3.3.1(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	0.38	< 0,5	< 0,5		
3.3.2(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	per 100.000 penduduk	145	PM	PM	PM	
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	API (Annual Paracite Incidence) per 1000 penduduk	0.41	0.29	0.08		
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Dinkes	% Orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta)	52,6	PM	PM	PM	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
		Profil Kesehatan	per 10.000 penduduk yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis)	0.49	PM	PM	PM	
<b>Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga angka kematian dini akibat dari penyakit tidak menular (NCD), melalui pencegahan dan pengobatan, serta mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan</b>								
3.4.1(a)	Persentase merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	%	NA	PM	PM	PM	
3.4.1(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	37,3	28,1	25,7	▶	
3.4.1(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	42,7	16	28,75	▶	
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Polda Kepulauan Riau	Jumlah	12	PM	15	▼	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan</b>								
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna narkotika dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis.	LAKIP dan RENSTRA BNN	Orang	762	129	40		
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pascarehabilitasi.	LAKIP dan RENSTRA BNN	Orang	163	80	20		
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	LAKIP dan RENSTRA BNN	%	2,74	PM	0,30		
<b>Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional</b>								
3.7.2*	Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun ( <i>age specific fertility rate/ ASFR</i> )	BPS		PM	PM		PM	
<b>Target 3.8 Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang</b>								
3.8.1*	<i>Unmeet need</i> pelayanan kesehatan	BPS	%	3.12	PM			



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Target 3.a Memperkuat pelaksanaan Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara secara tepat</b>								
3.a.1	Prevalensi merokok pada penduduk usia $\geq 15$ tahun	BPS	%	26.9	PM		PM	
<b>Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular maupun tidak menular yang sangat berpengaruh terhadap negara-negara berkembang, menyediakan akses obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai Doha Declaration tentang TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek terkait Perdagangan pada Hak Properti Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan pada khususnya, menyediakan akses obat bagi semua orang.</b>								
3.b.1(a)	Peningkatan persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Profil Kesehatan dan Renstra Dinkes	%	69,29	85	92.99		
<b>Target 3.c Meningkatkan pembiayaan kesehatan dan pengadaan, pengembangan, pelatihan, dan penyimpanan tenaga kesehatan secara bermakna di negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang</b>								
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Sumber : Profil Kesehatan)							
	Kepadatan dan distribusi dokter spesialis	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.19	PM	PM		
	Kepadatan dan distribusi dokter umum	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.42	PM	PM		
	Kepadatan dan distribusi dokter gigi	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.12	PM	PM		
	Kepadatan dan distribusi perawat	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	1.93	PM	PM		



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
	Kepadatan dan distribusi perawat gigi	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.04	PM	PM		
	Kepadatan dan distribusi bidan	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.89	PM	PM		
	Kepadatan dan distribusi tenaga gizi	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.07	PM	PM		
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan lingkungan	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.6	PM	PM		
	Kepadatan dan distribusi tenaga keterapi fisik	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.23	PM	PM		
	Kepadatan dan distribusi tenaga keteknisan medis	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.03	PM	PM		
	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan masyarakat	Profil Kesehatan	per 1000 penduduk	0.1	PM	PM		



## Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua pada tahun 2030, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 7 target yang diukur melalui 8 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 4 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.83**  
**Capaian Tujuan 4 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas</b>								
<b>Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas</b>								
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	BPS	%	32.33	PM		PM	
<b>Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua wanita dan pria, terhadap pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang berkualitas dan terjangkau, termasuk universitas</b>								
4.3.1(a)	Persentase APK SMA/SMK/MA/sederajat	Renstra Dinas Pendidikan Prov. Kepri	%		89.00	PM	PM	
4.3.1(b)	Persentase APK Perguruan Tinggi (PT)	BPS	%	21.14	PM	NA	NA	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
4.3.1(b)	Percentase APK Perguruan Tinggi (PT)	BPS	%	21.14	PM		PM	
<b>Target 4.4 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan</b>								
4.4.1*	4.4.1. Proporsi remaja/dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komputer (TIK) menurut tipe keterampilan	Susenas BPS			PM	NA	NA	
<b>Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat adat, dan anak-anak dalam kondisi rentan</b>								
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.							
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SD/MI/sederajat	BPS	%	99.13	PM	PM	PM	
	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMP/MTs/sederajat	BPS	%	100.49	PM	PM	PM	
	Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMA/SMK/MA/sederajat	Renstra Dinas Pendidikan Prov. Kepri	%	71.16	77	PM	PM	
	Rasio APK Perempuan/laki-laki di PT	BPS	%	141.23	PM	PM	PM	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</b>								
4.6.1(a)	Persentase angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	BPS	%	98.79	PM		PM	
<b>Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, penyandang cacat dan gender, serta memberikan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua</b>								
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke: (a) listrik	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke:(b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke: (b) internet untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke:	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
	(b) internet untuk tujuan pengajaran							
	Proporsi sekolah SMA dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SMK dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah SLB dengan akses ke: (c) komputer untuk tujuan pengajaran	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas	Dapodik	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (e) air minum layak	Dapodik, dipecah untuk SMK, SMA dan SLB	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (f) fasilitas sanitasi dasar perjenis kelamin	Dapodik, dipecah untuk SMK, SMA dan SLB	%	NA	PM	PM	PM	
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Dapodik, dipecah untuk SMK, SMA dan SLB	%	NA	PM	NA	NA	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Target 4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.</b>								
4.c.1*	1. Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK SLB yang bersertifikat pendidik	Profil Disdik	%	50.05	70	PM	PM	
	<b>Jenjang Pendidikan Menengah</b>	<b>Jenjang Pendidikan Menengah</b>						
	1. Persentase Guru SM yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Renstra Dinas Pendidikan Prov. Kepri	%	86.00	93.00	PM	PM	
	1. Persentase Guru TK yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	19.20	PM	NA	NA	
	1. Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	58.69	PM	NA	NA	
	1. Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	78.23	PM	NA	NA	
	1. Persentase Guru SMA yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	90.14	99	PM	PM	
	1. Persentase Guru SMK yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	90.5	95	PM	PM	
	1. Persentase Guru SLB yang memenuhi kualifikasi minimal S1/D4	Profil Disdik	%	35.46	78	PM	PM	



## Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 4 target yang diukur melalui 6 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 5 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.84**  
**Capaian Tujuan 5 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 5 Kesetaraan Gender</b>								
Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksplorasi seksual, serta berbagai jenis eksplorasi lainnya.								
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	UPTD P2TP2A	orang	96	100	231	▼	Target 2020 menjadi orang



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
5.2.2*	Proporsi perempuan dan anak perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan, dalam 12 bulan terakhir, menurut kelompok umur dan tempat kejadian	UPTD P2TP2A	kasus	29	100	85		Target 2020 menjadi orang
<b>Target 5.3 Menghilangkan semua praktek-praktek berbahaya, seperti pernikahan dini dan paksa serta sunat perempuan</b>								
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	BPS	% (sebelum umur 15 tahun)	1.52	PM	PM		Data belum tersedia di BPS, merupakan sensus 4 tahunan
		BPS	% (sebelum umur 18 tahun)	11.73	PM	PM		Data belum tersedia di BPS, merupakan sensus 4 tahunan
<b>Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan di kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat</b>								
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen di tingkat pusat dan pemerintah daerah	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan	%	3,09	30	14.43		



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
		kluarga berencana						
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	BPS		PM	PM	PM	PM	Data tidak tersedia, belum ada survey
<b>Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.</b>								
5.b.1 *	Proporsi individu yang memiliki telepon genggam, menurut jenis kelamin	BPS		PM	PM		PM	



6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK



### Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Tujuan 6 SDGs adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 6 target yang diukur melalui 19 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 6 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.85**  
**Capaian Tujuan 6 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</b>								
<b>Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</b>								
6.1.1. (a)	Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	BPS	%	84.12	97.59	2.26		



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
6.1.1. (b)	Kapasitas sarana dan prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Pola PSDA WS Kep. Riau	m <sup>3</sup> /detik	0.04	0.016	0	▼	Ada perubahan target dan tidak dapat tercapai akibat anggaran mengalami Refocusing (COVID 19)
6.1.1. (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	BPS	%	PM	PM		PM	
<b>Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.</b>								
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Susenas BPS	%	PM	PM		PM	
6.2.1.(b)	Percentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	BPS	%	71.97	PM		PM	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga	Desa	215	PM	383		
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Profil Kesehatan dan Laporan Rutin Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah raga	Desa	30	PM	85		
6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	kota/kab	7	7	-		Tidak ada kegiatan di Tahun 2020



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	PM	PM	PM	PM	
<b>6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan dumping dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi separuh proporsi air limbah yang tidak diolah, dan meningkatkan daur ulang serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global</b>								
6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	kota/kab	3	5	-	<span style="color: red;">▼</span>	Tidak ada kegiatan di Tahun 2020
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	PM	PM	PM	PM	
<b>6.4 Pada tahun 2030, secara bermakna meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin keberlanjutan penggunaan dan pasokan air tawar untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara bermakna mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air</b>								
6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Laporan KemenESDM	Kegiatan	-	1		PM	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat</b>								
6.5.1(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	BP Dashl	RPDAS	1	-	-	<span style="color: green;">●</span>	
6.5.1.(c)	Jumlah Jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk	Pola PSDA WS Kep. Riau	buah	1	1	1	<span style="color: green;">●</span>	
6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu(HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	BP Dashl	Hektar	425	182	182	<span style="color: yellow;">▶</span>	
6.5.1.(g)	Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air	Pola PSDA WS Kep. Riau	buah	2	11	9	<span style="color: yellow;">▶</span>	
6.5.1.(h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	BP Dashl	DAS	PM	2	2	<span style="color: yellow;">▶</span>	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
6.5.1.(i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah	Pola PSDA WS Kep. Riau	buah	1	2	0		
<b>6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau</b>								
6.6.1 (d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	BP Dashl	Hektar	200	550	550		



### Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Tujuan 7 SDGs adalah menjamin menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua. Dalam rangka mencapai Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau pada tahun 2030, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 Target yang diukur melalui 3 Indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 7 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.86**  
**Capaian Tujuan 7 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau</b>								
<b>Target 7.1 Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, handal, dan modern</b>								
7.1.1*	Rasio Elektrifikasi	DESDM	%	83.72	92.5	92.59		
7.1.1. (a)	Konsumsi listrik per kapita	BPS / DESDM	Kwh/Kapita	332.18	595.36			
<b>7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global</b>								
7.2.1*	Bauran Energi Terbarukan	DESDM	%	9%	12%			



### Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan 8 SDGs adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Dalam rangka mencapai Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan 6 target yang diukur melalui 15 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 8 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.87**  
**Capaian Tujuan 8 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.</b>								
<b>Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.</b>								
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	BPS	%	6.01	PM	NA	PM	blm release dari BPS
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	BPS	%	101	PM	NA	PM	blm release dari BPS



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.</b>								
8.2.1*	Tingkat pertumbuhan PDRB riil	BPS	%	PM	PM	-2.32	Kontraksi	
<b>Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</b>								
8.3.1.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin	BPS	%	22.1	26.98	29.06%		
8.3.1.(a)	Percentase tenaga kerja formal.	BPS	%	71,90	75.44	64.59		
8.3.1.(b)	Percentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	%	76.49	78.93	25.75%		
8.3.1.(c)	Percentase akses UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau	%	NA	30.49	37,87		Data Per Agustus 2020



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Target 8.5 Pada tahun 2030, memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya</b>								
8.5.1	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	%	18,796	23,773	21,468		
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	%	6,20 laki-laki : 6,10 % Perempuan : 6,41 % Usia 15-24 : 21.98 % Usia 25 : 3.36 %	6,83 laki-laki : 4,77 % Perempuan : 10,36 % Usia 15-24 : 19.99 % Usia 25 : 3,38 %	10.34 laki-laki : 4,77 % Perempuan : 10,36 % Usia 15-24 : 19.99 % Usia 25 : 3,38 %	▼	
8.5.2 (a)	Persentase Setengah Pengangguran	BPS	%	3.52	3.95	5.75	▼	
<b>Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.</b>								
8.9.1(a)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kepulauan Riau	BPS RPJMD	Juta Orang	2.037.673	2.400.000	403,987	▶	Sampai Bulan Juni 2020
8.9.1(b)	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau	KEMENPAR/DISPAR		1.450.000	1.600.000	NA	PM	Belum Tersedia Data



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
8.9.1(c)	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	BPS/ KEMENPAR/ DISPAR	Jumlah Penerimaan devisa	NA	7.740.000.000.000	NA	PM	<i>Belum Tersedia Data</i>
<b>Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.</b>								
8.10.1*	a. Jumlah ATM per 100.000 penduduk dewasa	OJK Prov. Kepri	Unit	1.372	PM	97	<span style="color: green;">●</span>	Juli 2020
	b. Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk dewasa (Jumlah Bank Umum termasuk KP, KC, KCP, dan KK)	OJK Prov. Kepri	Unit	351	PM	31	<span style="color: green;">●</span>	Juli 2020
8.10.1.(a)	Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (BankUmum) (Km)	BPS	Km	Km	PM		PM	



## Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Tujuan 9 bertujuan untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Dalam rangka mencapai Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 4 target yang diukur melalui 8 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 9 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.88**  
**Capaian Tujuan 9 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur</b>								
<b>Target 9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua</b>								
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan Provinsi	Dinas PU, Penataan Ruang dan Pertanahan	%	71.37	73.24	73.64		Percentase jalan provinsi dengan kondisi baik (Panjang jalan Kondisi Baik/Total Panjang jalan keseluruhan)



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
9.1.2 (c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dishub Kepri	Unit	20	31	34		Akan ada penambahan 5 (lima) target (on progress)
<b>Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</b>								
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan perkapita	BPS	%	38.36	PM	40.53		Meningkat
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	%	35.00	23.29	22.76		
<b>Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negaranegara kurang berkembang pada tahun 2020.</b>								
9.c.1(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	%	74.17	PM		PM	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
9.c.1(b)	Proporsi individu yang menggunakan Internet.	BPS	%	37.02	PM	PM		data dari BPS Provinsi
<b>Target 9.4 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi</b>								
9.4.1*	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.	Rasio Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca dengan nilai tambah sektor industri.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	PM	PM		KLHK
9.4.1.(a)	Percentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Percentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Kementerian LH dan Kehutanan	%	PM	PM		KLHK



### Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Tujuan 10 bertujuan untuk mengurangi kesenjangan intra- dan antarnegara. Dalam rangka mencapai Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 4 target yang diukur melalui 8 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 10 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.89**

#### Capaian Tujuan 10 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
<b>Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan</b>								
<b>Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</b>								
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS dan RPJMD	% (September)	0.339	0,35±0,01	0,339		
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS dan RPJMD	% (September)	5.78	5.83	5,92		
10.1.1.(a)	Persentase Penduduk miskin	BPS dan RPJMD Prov. Kepri	% (September)	5.78	5.83	5.92		Capaian Kemiskinan Posisi Maret 2020



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal	Indeks Desa Membangun (IDM)	desa	NA	56	33		
10.1.1.(d)	jumlah desa mandiri	Indeks Desa Membangun (IDM)	desa	NA	5	1		
<b>Target 10.2</b> Pada tahun 2030, memberdayakan dan mempromosikan inklusivitas sosial, ekonomi dan politik pada semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, etnis, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya								
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	BPS	%	PM	PM		PM	
<b>Target 10.3</b> Pada tahun 2030, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang deskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.								
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	%	80.16	PM		PM	
<b>Target 10.4</b> Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar								
10.4.1(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS BATAM I	%	34.32	31.46	43.45		



### Tujuan 11 Kota dan Permukiman BerkelaJutan

Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Tujuan 11 Kota dan Permukiman BerkelaJutan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 7 target yang diukur melalui 12 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 11 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.90**  
**Capaian Tujuan 11 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 11 Kota dan Permukiman Yang BerkelaJutan</b>								
<b>Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan</b>								
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Orang	1.566	677,360	1.439		
11.5.1.(a).	indeks resiko bencana (IRBI)	Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)	indeks	0.52	PM	PM	PM	di RAN adalah : Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI)



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Dokumen Laporan Inventarisasi Wilayah Pasca Bencana	Rupiah	52.501	PM	PM	PM	Satuan di RAN : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
<p><b>Target 11.b</b> Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi melalui penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan Sendai Framework untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030</p>								
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	Dokumen	3	1		▼	- Dokumen Belum dilakukan pembaharuan
<p><b>Target 11.1</b> Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh</p>								
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	BPS	%	98.05	98	44.1	▶	
<p><b>Target 11.3</b> Pada tahun 2030 meningkatkan urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas partisipasi, serta perencanaan dan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi</p>								



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	PM	PM	PM	PM	PM	
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	PM	PM	PM	PM	PM	
<b>Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.</b>								
11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Dinas Perumahan dan Pemukiman	Kota/Kab	n.a	2	0		
<b>Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</b>								
11.6.1(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	n/a	80	65.97		Hanya 5 kab/Kota yang melaporkan, dan 2 Kab/Kota yang tidak melaporkan hingga saat ini yaitu Kota Tanjungpinang dan Kab.Natuna



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
11.6.1 (b)	Pemantauan Penilaian Kota Bersih dan Hijau (ADIPURA)	Renstra DLHK	Jumlah kabupaten/kota yang dilakukan Pemantauan Penilaian Kota Bersih dan Hijau (ADIPURA)	3	5	5		7 Kab/Kota tahun ini kegiatan adipura ditunda sampai waktu belum ditentukan, dan yang masuk nominasi 5 Kab/Kota sedangkan 2 kab tidak masuk penilaian karena tidak mempunyai TPA
	Jumlah Sekolah di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan pembinaan & penilaian Adiwiyata Tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	DLHK	Sekolah	8	35	0		Tidak diadakan lagi kegiatan adiwiyata baik tingkat nasional dan provinsi
<b>Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas.</b>								
11.7.2(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS	%	PM	PM		PM	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
11.7.1.(a).	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Kawasan Perkotaan Metropolitan / Kota Sedang	Kota Hijau				NA	Data ada di Perkim



### Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan

Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 3 target yang diukur melalui 5 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 12 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.91**  
**Capaian Tujuan 12 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2015 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 12 Pola Konsumsi Dan Produksi Yang Bertanggungjawab</b>								
<b>Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</b>								
12.4.1.(a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perusahaan	0	30		PM	Belum final



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2015 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundungan (sektor industri).	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perusahaan	PM	30	30		
12.5.1(a)	Tersedianya lokasi pengolahan Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lokasi	-	0		NA	tidak direncanakan pada tahun 2018/2019 dan 2020
	Jumlah timbulan sampah yang di daur ulang	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Ton	10,301	149,285,761	125,873,635		Hanya 5 kab/Kota yang melaporkan, dan 2 Kab/Kota yang tidak melaporkan hingga saat ini yaitu Kota Tanjungpinang dan Kab.Natuna
<b>Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktik-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.</b>								
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perusahaan	-	PM			Data di KLHK



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2015 (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<p><b>Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</b></p>								
12.8.1(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Fasilitas Publik	-	PM		▼	Data di KLHK



## Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Tujuan 13 SDGs adalah penanganan perubahan iklim dan penanggulangan kebencanaan. Dalam rangka mencapai Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 1 target yang diukur melalui 2 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2020 untuk target dan indikator pada tujuan 13 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.92**

**Capaian Tujuan 13 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim</b>								
<b>Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara</b>								
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	3	1		▼	- Dokumen Belum dilakukan pembaharuan
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	orang	1.566	677,360	1.439	▶	



### Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumberdaya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Tujuan 14 Ekosistem Lautan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 Target yang diukur melalui 2 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2019 untuk target dan indikator pada tujuan 14 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.93**

**Capaian Tujuan 14 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2019) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2019) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 14 Ekosistem Lautan</b>								
14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktik penangkapan ikan yang merusak dan melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, dalam rangka untuk memulihkan stok ikan secara layak dalam waktu singkat, setidaknya ke tingkat produksi maksimum yang lestari sesuai karakteristik biologisnya								
14.4.1	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Statistik Perikanan tangkap, satu data KKP	%	93.08	100	80.03		



14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan overfishing, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) dan menahan jenis subsidi baru, mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan setidaknya negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi

14.6.1 .(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha	DKP Kepri	%	100	100	80.03		
-------------	-----------------------------------	-----------	---	-----	-----	-------	---	--



### Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Dalam rangka mencapai Tujuan 15 Ekosistem Daratan, ditetapkan 3 target yang diukur melalui 3 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2019 untuk target dan indikator pada tujuan 15 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.94**  
**Capaian Tujuan 15 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 15 Ekosistem Daratan</b>								
Target 15. 1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.								
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%	-	PM		PM	BPKH
Target 15. 2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.								



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
15.2.1 (d)	Pengelolaan Hutan Lestari	Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Unit	1	6	6	<span style="background-color: green; border-radius: 50%; width: 20px; height: 20px; display: inline-block;"></span>	
<b>Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</b>								
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	%		PM		PM	



### Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 Merupakan tujuan yang menjadi prasyarat utama dalam pencapaian seluruh tujuan dalam Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan 16 berupaya menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai, terwujudnya penegakan keadilan dengan menyediakan akses keadilan untuk semua, serta membangun institusi yang tangguh. Dalam rangka mencapai Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 7 target yang tertuang didalam 19 indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2019 untuk target dan indikator pada tujuan 16 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.95**  
**Capaian Tujuan 16 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
<b>Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</b>								
<b>Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.</b>								
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Polda Kepulauan Riau	Jumlah Kasus	19	PM	7		
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Polda Kepulauan Riau	Jumlah	0	PM	PM	PM	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
16.1.3(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS	%	0.79	PM		PM	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	BPS	%	76,53 ( 2014)	PM	PM	PM	Pemenuhan data SDGs ini tidak tersedia di OPD (terlampir BA), data merupakan sensus 5 Tahunan dan tersedia pada semester II 2020
<b>Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</b>								
16.2.1(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	BPS	PM	PM	PM	PM	PM	Pemenuhan data SDGs ini tidak tersedia di OPD (terlampir BA)
16.2.1(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	UPTD P2TP2A	orang	29	50	206	▼	data dari Simfoni PPA per 30 Juni 2020
16.2.3(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	BPS	PM	PM	PM		PM	



## RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
<b>Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua</b>								
16.3.1(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	BPS	PM	PM	PM		PM	
16.3.1(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	UPTD P2TP2A	orang	Bantuan hukum diberikan 96	Bantuan hukum diberikan PM	37	▶	data dari Simfoni PPA per 30 Juni 2020
		UPTD P2TP2A		non litigasi : 50	non litigasi : PM	29	▶	Sumber Data UPTD P2TP2A
		UPTD P2TP2A		Litigasi : 95	Litigasi : PM	7	▶	
<b>Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat</b>								
16.6.1 ( c )	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	BPJ	%	NA	80	48.96	▶	



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
16.6.2.(a)	Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Ombudsman RI	Zona	Hijau	Hijau	Hijau	<span style="color: green;">●</span>	100%
<b>Target 16.7 Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan</b>								
16.7.1.(b)	Percentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM PROVINSI KEPRI	%	9.09	PM	10.75	<span style="color: green;">●</span>	
16.7.2(a)	Indeks Lembaga Demokrasi (dari IDI)	BPS	%	66.13			PM	
16.7.2(b)	Indeks Kebebasan Sipil (dari IDI)	BPS	%	80.16			PM	
16.7.2(c)	Indeks Hak-hak Politik (dari IDI)	BPS	%	65.01			PM	
<b>Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.</b>								
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahiran dicatat oleh lembaga pencatatan sipil terpilah menurut umur	BPS	%	88.64	99	99	<span style="color: green;">●</span>	Sumber data kependudukan pada Dpmd dukcapil prov. Kepri
16.9.1(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	BPS	%	PM	PM	PM	PM	Tidak Ada Data



## RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan
16.9.1(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Renstra 2016-2021	Rasio anak (0-18 tahun) berakte kelahiran	64.01	80	92.43	<span style="color: green;">●</span>	Sumber data kependudukan pada Dpmd dukcapil prov. Kepri
<b>Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.</b>								
16.10.1(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	UPTD P2TP2A	orang	66	100	231	<span style="color: green;">●</span>	Data per 30 Juni 2020



### Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Tujuan 17 TPB/SDGs adalah menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai Tujuan 17 Kemitraan Global Untuk Mencapai Tujuan, Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 6 Target yang diukur melalui 10 Indikator. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non pemerintah. Hasil pemantauan semester I pada tahun 2019 untuk target dan indikator pada tujuan 17 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.96**

**Capaian Tujuan 17 Indikator TPB/SDGs Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020**

Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
<b>Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan</b>								
<b>17.1 Penguatan mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional untuk negara-negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan</b>								
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah daerah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya	BP2RD	%	0.51	0.52	0.98		
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik	BP2RD	%	36.54	32.38	Data Belum Lengkap	PM	
<b>Target 17.6 Meningkatkan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerja sama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagai pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.</b>								



Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
17.6.2.(b)	Tingkat akses tetap pitalebar (fixed broadband): Perkotaan dan Perdesaan	BPS		PM	PM		PM	
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband.	BPS	%	37.02	PM		PM	
<b>Target 17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</b>								
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	BPS		37.02	PM		PM	
<b>Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.</b>								
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas	BPS		PM	PM	6.82	<span style="color: green;">●</span>	
<b>Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilih berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</b>								
17.18.1(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS		PM	PM		PM	



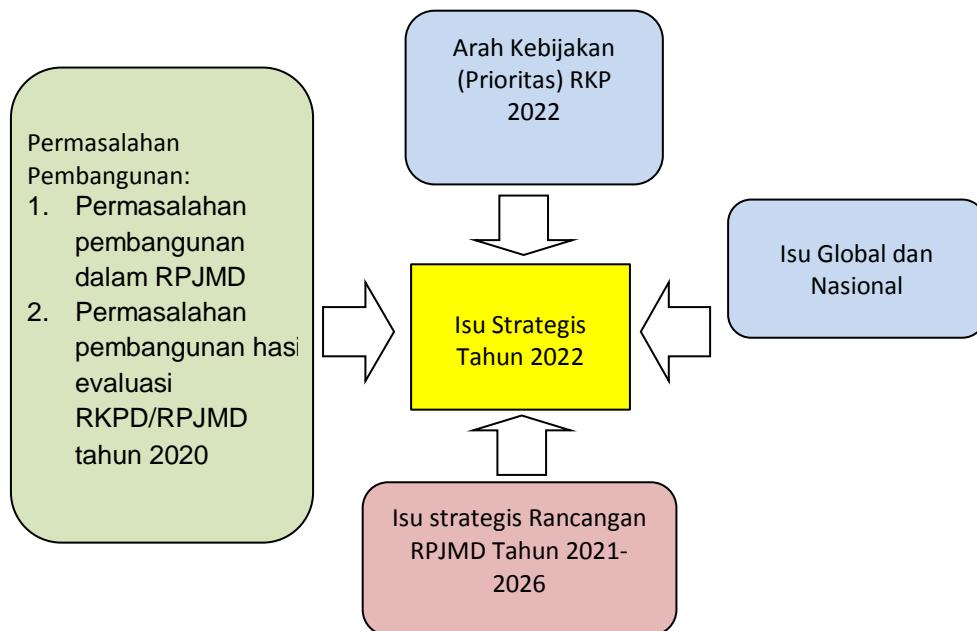
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber data (5)	Satuan (6)	Baseline (7)	Target SDGs Tahun Berjalan (2020) (8)	Capaian SDGs Tahun Berjalan (2020) (9)	Status (10)	Keterangan (11)
17.18.1(d)	Percentase indikator SDGs terpilih yang relevan dengan target	BPS		PM	PM		PM	
<b>Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</b>								
17.19.1(a)	Jumlah pejabat fungsional statistisi dan pranata komputer pada OPD di daerah	BPS	orang	30	PM		PM	
17.19.1(b)	Percentase OPD yang sudah memiliki pejabat fungsional statistisi dan/atau pranata komputer.	BPS	%		PM		PM	



### 2.2 Permasalahan Pembangunan

#### 2.2.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (Isu strategis)

Perumusan isu strategis tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik yang bersumber dari tiga (3) aspek penting, yaitu: (1) Hasil Evaluasi capaian indikator RPJMD tahun 2020, (2) rumusan isu strategis berdasarkan rancangan teknokratik RPJMD tahun 2021-2026, isu global dan nasional. Secara skematis dikemukakan pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.35 Skema Perumusan Isu Strategis Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022**

Hasil perumusan isu strategis dalam pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022, disajikan pada tabel berikut ini.

#### 1. Kualitas Pembangunan Manusia

Kualitas pembangunan manusia masih menjadi permasalahan yang dihadapi sampai dengan tahun 2020. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan manusia tahun 2020 baru mencapai sebesar 75,59, sedikit meningkat dari tahun 2019 sebesar 74,55. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 10,34%, meningkat dari tahun 2019 sebesar 6,74%. Tentunya diperlukan peningkatan kesempatan kerja agar dapat menyerap tenaga kerja. Persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dari sebesar 5,80% pada tahun 2019 menjadi 5,92% pada tahun 2020. Indeks gini menunjukkan peningkatan dari sebesar 0,337 pada tahun 2019 menjadi 0,34 pada tahun 2020. Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase penduduk miskin dan indeks gini pada tahun 2020 dipengaruhi oleh dampak Pandemic Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret tahun 2020.



### 2. Penurunan Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi perekonomian daerah pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar dipengaruhi oleh dampak Pandemic Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kepri mencapai sebesar -3,80%. Sementara itu inflasi mengalami penurunan dari sebesar 2,03% menjadi 1,18%. Pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi pada hampir semua sektor PDRB.

### 3. Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Kondisi infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang pada tahun 2020 tergambar dari persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sebesar 46,5%; persentase jalan provinsi berkondisi baik sebesar 74,51%; persentase jembatan Provinsi berkondisi baik sebesar 87,35%; dan Jumlah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang telah ditetapkan dalam Perda belum terealisasi pada tahun 2020. Terkait perumahan dan kawasan permukiman, luasan kawasan kumuh di Provinsi Kepulauan Riau tersisa 399,8 Ha yang belum tertangani. Untuk Persentase pelayanan akses air bersih/minum yang aman baru mencapai sebesar 92,68%. Cakupan pelayanan Sanitasi yang mencakup air limbah, persampahan dan drainase pada tahun 2020 masih belum mencapai target. Cakupan persampahan baru mencapai 83,84%, cakupan air limbah baru mencapai 59,99%; dan cakupan drainase baru mencapai 45,10%.

Kondisi sarana dan prasarana perhubungan perlu ada peningkatan, dapat dilihat dari Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan (ro-ro) sebesar 71,43%, Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 96,16%, Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas 9,67%, Persentase ketersediaan jaringan trayek bus perintis 85,71%, Persentase ketersediaan prasarana sisi darat perhubungan udara 75%, Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut 97,06%, dan Persentase ketersediaan Kapal Angkutan Laut 77,78%.

### 4. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Pencapaian tata kelola pemerintahan ditunjukkan dengan Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepri baru mencapai 65,83 pada tahun 2019. Pencapaian reformasi birokrasi didukung beberapa indikator seperti Skor Kepuasan Masyarakat pada seluruh OPD yang menyelenggarakan pelayanan Publik dengan realisasi sebesar 82,89%, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP, dan Nilai Keterbukaan informasi publik sebesar 114,12 pada tahun 2020.

#### 2.2.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan penyajiannya dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan. Perumusan permasalahan dilakukan dengan mendasarkan pada data hasil evaluasi RKPD tahun 2020.

##### 2.2.2.1 Urusan Pemerintahan Pelayanan Dasar

###### 1) Pendidikan

- a. Masih rendahnya APM SMA/SMK/MA/MAK, yang pada tahun 2020 mencapai 77,2%
- b. Masih tingginya Angka Putus sekolah SMA/SMK/MA/MAK, pada tahun 2020 masih sebesar 0,4%, masih di atas standar nasional yaitu sebesar 0,2%.



- c. Banyaknya SMA/SMK/MA/MAK yang belum terakreditasi minimal B pada tahun 2020 masih sebesar 26,24%,

### 2) Kesehatan

- a. Belum optimalnya imunisasi dasar lengkap, terlihat dari Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 85,3%
- b. Masih kurangnya tenaga kesehatan, terlihat dari Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 78,45%, dan Persentase RS Kelas C yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 Dokter spesialis penunjang 76,06%
- c. Belum optimalnya kualitas layanan RSUD, terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Provinsi Kepri 78,24%
- d. Kurangnya sarana RSUD untuk mempertahankan status akreditasi paripurna.

### 3) Pekerjaan umum dan Penataan Ruang

- a. Masih kurangnya penyediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, dilihat dari capaian tahun 2020 hanya sebesar 46,5% masih belum mencapai target sebesar 48,64%.
- b. Masih kurangnya penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk pada tahun 2020 hanya sebesar 74,96%.

### 4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih luasnya kawasan kumuh yang belum tertangani mencapai 399,8 Ha, belum mencapai target tahun 2020 sebesar 379,57 Ha.
- b. Masih kurangnya akses sanitasi layak, terlihat dari akses Air Limbah 83,84%; Persampahan 59,99%; dan Drainase 45,10%.

### 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

- a. Masih terbatasnya jumlah PPNS yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dimana tahun 2020 baru ada sebanyak 22 orang dari 45 orang yang ditargetkan;
- b. Masih terbatasnya anggota satlinmas yang memiliki kompetensi dalam pengendalian dan kenyamanan lingkungnya dimana tahun 2020 baru 43% dari 75% yang ditargetkan;
- c. Masih adanya kabupaten/kota yang belum memiliki peta rawan kebakaran. Dari total 7 kabupaten/kota yang ada, baru 42,85% atau 3 kabupaten/kota yang telah memiliki peta rawan kebakaran yaitu Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kota Bintan;
- d. Masih sedikitnya desa/kelurahan yang terbentuk menjadi desa/kelurahan tangguh bencana, sampai tahun 2020 baru sebesar 0,48% dari total desa/kelurahan yang telah menjadi desa/kelurahan tangguh bencana.
- e. Jumlah wilayah pasca bencana yang terpulihkan ditahun 2020 sebanyak 1 sementara yang ditargetkan 2 .



### 6) Sosial

- a. Masih rendahnya keluarga miskin yang mendapatkan bantuan, melalui mekanisme Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Tahun 2020 hanya 1,38% dari target 1,38%.
- b. Masih banyaknya lansia terlantar belum mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS). Ditahun 2020 lansia yang sudah mendapatkan pelayanan sosial berbasis lembaga (panti dan LKS) baru mencapai 8,05% dari yang ditargetkan 9,91%.
- c. Masih banyaknya PMKS penyandang disabilitas yang belum mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS). Ditahun 2020 yang suda mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sebesar 27,04% dari yang ditargetkan 28,72%.
- d. Masih banyaknya tunasosial yang belum mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS). Ditahun 2020 yang sudah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sebesar 1,69% dari yang ditargetkan 1,96%
- e. Masih banyaknya korban tindak kekerasan, eksplorasi, dan perdagangan manusia yang belum mendapatkan rehabilitasi sosial berbasis lembaga (panti dan LKS). Ditahun 2020 yang sudah mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi baru sebesar 8,44% dari yang ditargetkan 78,37%.
- f. Belum optimalnya lembaga pelayanan dan rehabilitasi sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi. Ditahun 2020 capaiannya baru sebesar 51,89%
- g. Masih banyaknya PMKS Jaminan Kesejahteraan Sosial yang belum mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial. Ditahun 2020 baru mencapai 38,08% dari yang ditargetkan 60,35%.
- h. Masih belum optimalnya lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi ditahun 2020 capaiannya baru sebesar 46,15%.

#### 2.2.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

##### 1) Tenaga kerja

- a. Masih rendahnya calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada tahun 2020 hanya 11,82% saja;
- b. Masih minimnya calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, hanya 42,86% di tahun 2020;
- c. Masih rendahnya lulusan BLK yang diterima kerja, tahun 2020 hanya sebesar 21,88%
- d. Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) capaian ditahun 2020 sebesar 10,34%.

##### 2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

- a. Belum optimalnya PUG dalam pembangunan, terlihat dari Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD Provinsi ditahun 2020 hanya sebesar 5,34%.



- b. Masih adanya kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari Rasio kekerasan terhadap Perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebesar 33,42 per 100.000 Perempuan.
- c. Rendahnya Persentase perempuan (keluarga miskin) yang mendapatkan peningkatan kapasitas lifeskill, tahun 2020 hanya 1,30%.

### 3) Pangan

- a. Masih rendahnya ketersediaan pangan di Kepulauan Riau, terlihat dari ketersediaan Beras sebagai komoditas utama yang masih tergantung dari daerah lain;
- b. Harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen di empat kabupaten tinggi, dan tingginya fluktuasi harga pangan, terlihat dari persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen, pada tahun 2020 hanya 11,70%.

### 4) Pertanahan

- a. Belum optimalnya fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

### 5) Lingkungan hidup

- a. Masih rendahnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), capainnya tahun 2020 masih 67,00;
- b. Belum semua waduk memenuhi standart kualitas air sesuai baku mutu, pada tahun 2020 hanya sebesar 40,00%.

### 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

- a. Belum semua penduduk di kabupaten/kota wajib memiliki KTP dilihat dari capaian tahun 2020 sebesar 99,96%.
- b. Belum semua anak usia 0-18 tahun dikabupaten/kota memiliki akte kelahiran, dapat dilihat capaian tahun 2020 sebesar 96,61%.

### 7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, terlihat dari Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang telah aktif baru mencapai 53,45%.

### 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Belum optimalnya pembentukan kampung KB, pada tahun 2020 hanya 1 kampung KB yang terfasilitasi.

### 9) Perhubungan

- a. Masih terbatasnya ketersediaan pelabuhan penyebrangan (ro-ro) pada tahun 2020 baru sebesar 71,43%;
- b. Masih terbatassnya Prasarana lalu lintas, pada tahun 2020 baru tersedia 9,67%;
- c. Rendahnya ketersediaan Kapal Angkutan Laut pada tahun 2020 hanya sebesar 77,78%.



### **10) Komunikasi dan Informatika**

- a. Belum optimalnya keterbukaan informasi publik, terlihat dari Nilai keterbukaan informasi provinsi Kepri baru mencapai skor 74,18 pada tahun 2020.
- b. Belum optimalnya pengembangan smart goverment yang terintegrasi, terlihat dari pencapaian skor nilai e-government provinsi kepri/nilai indeks SPBE baru mencapai 2,40 pada tahun 2020.

### **11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Masih banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan dan melaporkan hasil RAT, dilihat pada tahun 2020 koperasi aktif hanya 40,85%.
- b. Masih rendahnya kesehatan koperasi, terlihat dari Persentase KSP/USP sehat 41,86% pada tahun 2020.
- c. Menurunnya omset usaha kecil dan menengah akibat pandemic covid-19 sehingga banyak UKM yang terdampak pada usahanya.

### **12) Penanaman modal**

- a. Masih rendahnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pelayanan Perijinan Satu Pintu (PTSP), karena tim teknis perijinan masih berada di masing-masing perangkat daerah, belum menyatu di DPMPTSP. Hal ini terlihat dari capaiannya baru sebesar 81,93% pada tahun 2020;
- b. Penyebaran realisasi investasi tahun 2020 masih terfokus di Kota Batam sebagai pusat industri dan Kabupaten Bintan sebagai wilayah strategis pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

### **13) Kepemudaan dan olah raga**

- a. Kurangnya pengembangan pemuda dalam hal kepeloporan maupun kewirausahaan, pada tahun 2020 Jumlah pemuda pelopor hanya 260 orang dari target 850 orang, dan Jumlah pemuda yang berwirausaha nol.
- b. Kurangnya prestasi pemuda dan olahraga tingkat nasional/internasional, terlihat dari Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/ nasional/internasional hanya 13 penghargaan dari target 18 penghargaan.
- c. Kurangnya budaya berolahraga pada masyarakat umum;

### **14) Statistik**

- a. Belum optimalnya pengembangan satu data Kepulauan Riau
- b. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral

### **15) Persandian**

- a. Belum optimalnya pemanfaatan email Aksara yang sudah menggunakan persandian untuk pengamanan informasi.



### 16) Kebudayaan

- a. Masih sedikitnya bangunan berciri khas melayu, terlihat dari capaian indikator Persentase bangunan yang berciri khas melayu sampai dengan tahun 2020 sebesar 52,64%;
- b. Belum optimalnya pelestarian nilai adat dan tradisi, terlihat dari Persentase Nilai Adat dan tradisi yang digali diaktualisasi dan revitalisasi 55,85%;
- c. Belum optimalnya warisan budaya tangible yang lestari, pada tahun 2020 capaiannya hanya sebesar 22,73%.

### 17) Perpustakaan

- a. Terjadinya penurunan kunjungan perpustakaan akibat Pandemi Covid-19, terlihat dari Persentase Peningkatan Pengunjung Perpustakaan -65,26%.
- b. Kurangnya koleksi bahan bacaan digital untuk menunjang perpustakaan digital.

### 18) Kearsipan

- a. Masih kurangnya kualitas pengelolaan arsip di perangkat daerah, terlihat dari Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan Arsip secara baku pada Tahun 2020 baru mencapai sebanyak 30 OPD dari target 47 OPD/BUMD.
- b. Pengelolaan arsip pada BUMD Provinsi tidak optimal dikarenakan kurangnya Sarana dan Prasarana untuk pengelolaan arsip dan tidak adanya SDM yang kompeten untuk bisa membantu pengelolaan arsip.

#### 2.2.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

##### 1) Kelautan dan Perikanan

- a. Menurunnya produksi perikanan budidaya dari tahun ke tahun, terlihat dari produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 33.003,11 menjadi hanya 21.421,10 ton pada tahun 2020.
- b. Belum tersedianya SDM dalam unit organisasi pengelola pada 3 kawasan konservasi yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai level 3 (kawasan konservasi dikelola minimum)
- c. Belum ditetapkannya Ranperda dan Dokumen Final RZWP3K.

##### 2) Pariwisata

- a. Tidak tercapainya target kunjungan, rata-rata lama tinggal, rata-rata pengeluaran wisatawan, dan tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau tahun 2020 dikarenakan adanya wabah Pandemic Covid-19 yang dimulai pada awal Maret 2020 dengan kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat dan wisatawan, Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, pembatasan pelaksanaan atraksi wisata, pembatalan beberapa event dan pameran sebagai ajang promosi dan kerjasama kemitraan pariwisata.
- b. Penurunan produksi dan penghasilan para pelaku ekonomi kreatif akibat Pandemic covid-19, sehingga banyak produk ekonomi kreatif (sebagai contoh souvenir) yang



tidak bisa dijual karena minimnya turis/wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka produksi dan penghasilan para pelaku ekonomi kreatif aktif.

### 3) Pertanian

- a. Jumlah produksi Tanaman Perkebunan, pada tahun 2020 terealisasi hanya sebesar 25.690 ton dari target 32.103 ton pada tahun 2020 disebabkan banyak tanaman dalam usia tua sehingga kurang produktif.
- b. Tingginya resiko Kepulauan Riau terkena virus/penyakit tanaman akibat dari banyaknya bibit/benih atau produk pertanian yang masuk Kepulauan Riau dari luar negeri.
- c. Terjadinya peningkatan kejadian kasus penyakit helminthiasis (cacingan), dan terbatasnya ketersediaan obat-obatan hewan untuk melakukan pengobatan terhadap ternak yang sakit.

### 4) Kehutanan

- a. Menurunnya permintaan Kayu andang yang berkaitan dengan kontruksi bangunan.
- b. Usaha dibidang Kehutanan (Industri Primer) banyak yang tidak lagi berjalan (Perusahaan tutup).

### 5) Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Persentase Pelaku Usaha yang Memanfaatkan Air Tanah Sesuai dengan Aturan belum mencapai target disebabkan oleh: belum adanya kajian atau data tentang cekungan air tanah dari Badan Geologi Kementerian ESDM maupun dari Pemerintah Kabupaten/kota dan Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Pertambangan Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku belum mencapai target disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai Pemegang Izin Usaha Pertambangan; Terhambatnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan akibat pandemi Covid-19; dan masih kurangnya ketersediaan jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi di bidang pertambangan.
- c. Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah belum mencapai target disebabkan oleh kurangnya tingkat kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap kewajiban pembayaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- d. Masih terdapat sebagian masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau yang belum menikmati listrik, terutama di daerah terpencil dan kurang mampu.

### 6) Perdagangan

- a. Rendahnya jenis barang beredar yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
- b. Belum optimalnya pengawasan terhadap pasar tradisional yang dapat berakibat pada inflasi dan tidak terlindunginya konsumen;



- c. Belum optimalnya pelayanan pengujian mutu barang atau kalibrasi, terlihat dari persentase jenis komoditas dan atau alat yang mendapat pelayanan pengujian mutu barang atau kalibrasi.

### 7) Perindustrian

- a. Jumlah Sentra Industri dilengkapi Infrastruktur penunjang belum mencapai target disebabkan beberapa Pembangunan Sentra masih dalam bentuk Perencanaan
- b. Jumlah Industri Besar belum mencapai target disebabkan belum optimalnya pengembangan kawasan industri untuk menarik minat investor dengan skala industri besar
- c. Jumlah tenaga kerja di sektor industri tanpa migas belum mencapai target disebabkan pengurangan Tenaga Kerja Akibat Pandemi Covid-19
- d. Peningkatan omset industri Pengolahan berbahan baku lokal belum mencapai target disebabkan belum optimalnya peningkatan kualitas bahan baku lokal pada industri pengolahan.
- e. Persentase peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Industri yang bersertifikasi di Provinsi Kepulauan Riau belum mencapai target disebabkan tidak terlaksananya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM industri yang bersertifikasi akibat COVID-19.

### 8) Transmigrasi

- a. Belum optimalnya pendataan Transmigran di Kepulauan Riau.
- b. Belum terpenuhinya Rencana Kawasan Transmigrasi yang telah ditetapkan Kementerian Desa Tertinggal di Kabupaten Natuna sebagai 144 kawasan yang masih menjadi prioritas pembangunan kawasan transmigrasi sehingga penetapan kawasan, pembangunan kawasan, dan penempatan warga transmigran yang telah ditargetkan belum dapat terpenuhi.

#### 2.2.2.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

##### 1) Perencanaan

- a. Belum optimalnya keselarasan program Renja PD dengan Renstra PD, baru mencapai 85%.
- b. Masih rendahnya penyerapan aspirasi masyarakat dalam Musrenbang, terlihat dari Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir baru mencapai 34%.
- c. Masih belum lengkapnya ketersediaan dokumen perencanaan ekonomi; dokumen perencanaan sosial budaya; dokumen perencanaan sarana prasarana wilayah dan lingkungan hidup; dan dokumen perencanaan pemerintahan.



### 2) Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya penelitian dan pengembangan untuk menunjang pembangunan daerah, dan belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangda oleh stakeholder, pada tahun 2020 hanya 65% saja yang dimanfaatkan.
- b. Masih rendahnya inisiatif inovasi yang menjadi inovasi daerah, tercatat pada tahun 2020 hanya 20% saja.

### 3) Keuangan

- a. Belum optimalnya ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perangkat daerah, terlihat dari Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan keuangan tepat waktu 94,33%.
- b. Menurunnya pendapatan asli daerah akibat Pandemi Covid-19, terlihat dari realisasi pendapatan asli daerah 1,191 trilyun rupiah dari target 1,457 trilyun rupiah.

### 4) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

- a. Masih adanya pejabat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang belum sesuai dengan kekentuan.
- b. Penilaian kinerja pegawai yang tidak tepat waktu disampaikan oleh masing-masing pegawai.

### 5) Sekretariat DPRD

- a. Jumlah ranperda dalam propemperda yang difasilitasi tidak mencapai target kinerja.
- b. Belum optimalnya pelayanan untuk menunjang kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.

### 6) Sekretariat Daerah

- a. Tenaga penyusun perancangan peraturan perundang-undangan tidak tersedia, serta kekurangsiapan perangkat daerah pemrakarsa dalam menyampaikan Ranperda yang diusulkan, minimnya koordinasi yang dilakukan kab/kota baik dari eksekutif maupun legislatif dalam proses sinkronisasi pembentukan produk hukum daerah, dan sumber daya manusia yang kurang update terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tidak mengetahui perubahan terhadap aturan perundang-undangan yang ada, serta ada beberapa OBH yang berkeinginan bekerjasama namun belum terverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- b. Belum terbitnya Peraturan Pemerintah (Juklak) terkait penerbitan regulasi IUJK oleh daerah. Lalu terbit Undang-undang Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa tanggungjawab dan kewenangan serta perizinan berusaha terkait Jasa Konstruksi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian pemerintah daerah sampai sekarang masih menunggu kebijakan dimaksud.
- c. Pelaksanaan evaluasi triwulan BUMD tidak optimal karena tidak ada anggaran tenaga konsultan dalam penelaahan hasil kajian, serta adanya penundaan pembahasan di Pansus DPRD Kepri.



- d. Belum optimalnya pencapaian reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik pada unit-unit pelayanan publik.

### 7) Pengawasan

- a. Belum tercapainya target Level Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
- b. Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah.



## BAB III

### RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

#### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan daerah Provinsi Kepulauan Riau disusun dengan memperhatikan asumsi dasar ekonomi makro nasional, dan perkembangan kondisi perekonomian Provinsi Kepulauan Riau.

##### 3.1.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

Berdasarkan Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Triwulan IV 2020, pemulihan perekonomian global yang mulai terlihat pada triwulan IV 2020 diprakirakan semakin baik pada 2021. Pemulihan ekonomi global pada triwulan IV 2020, terutama didorong oleh perbaikan ekonomi di Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Pada 2021, pemulihan ekonomi global diprakirakan akan berlanjut sejalan dengan implementasi vaksinasi Covid-19 di banyak negara untuk membangun herd immunity dan mendorong mobilitas, serta berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Kinerja positif sejumlah indikator, seperti Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur dan jasa serta penjualan ritel dan keyakinan konsumen di beberapa negara, mengonfirmasi pemulihan ekonomi global yang terus berlangsung. Perkembangan tersebut juga sejalan dengan kenaikan kasus harian Covid-19 global dan gelombang ketiga Covid-19 di beberapa negara yang mulai mereda yang dibarengi dengan tingkat fatalitas yang menurun. Dengan perkembangan positif itu, pertumbuhan ekonomi global pada 2021 diprakirakan mencapai 5,1%, lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya sebesar 5,0%.

Di pasar keuangan global, ketidakpastian diprakirakan menurun seiring dengan ekspektasi perbaikan perekonomian dunia. Kondisi likuiditas global juga tetap besar dan suku bunga tetap rendah sejalan dengan stimulus kebijakan moneter yang masih berlanjut. Perkembangan itu mendorong aliran modal ke negara berkembang berlanjut dan menopang penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Perekonomian domestik juga menunjukkan perbaikan yang berlangsung secara bertahap pada triwulan IV 2020 dan Januari 2021. Meskipun masih terkontraksi, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020 menunjukkan tren perbaikan. Hal ini tercermin dari kontraksi yang semakin berkurang, ditopang oleh realisasi stimulus dan perbaikan kinerja ekspor. Perkembangan indikator terkini pada Januari 2021 mengonfirmasi arah perbaikan ekonomi domestik yang



berlanjut. Perbaikan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh prospek global yang semakin baik, namun juga akseleksi implementasi vaksinasi dan sinergi kebijakan nasional yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Di pasar keuangan, aliran modal kembali masuk ke pasar keuangan domestik dan mendorong penguatan Rupiah pada Januari 2021.

Untuk keseluruhan tahun 2021, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 4,3%-5,3%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya pada kisaran 4,8%-5,8%, sejalan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2020. Sementara itu, stabilitas ekonomi diprakirakan tetap terjaga, ditopang oleh inflasi yang terkendali dalam sasaran  $3,0\% \pm 1\%$  pada 2021 dan stabilitas sistem keuangan yang tetap baik.

Berdasarkan Buku Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2021 (Kementerian Keuangan); mengacu pada kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19, stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami tekanan luar biasa. Namun apabila berbagai upaya *countercyclical* yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap dalam periode 2020-2024.

Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesepatan kerja. Sementara itu harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) masih relatif rendah seiring dengan masih lemahnya permintaan global.



**Tabel 3.1**  
**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Jangka Menengah 2020-2024**

Indikator	2020		2021	2022	2023	2024
	APBN	Outlook				
a. Pertumbuhan ekonomi (%,yoy)	5,3	(0,4) – 2,3	4,5 – 5,5	5,4 – 6,0	5,5 – 6,3	5,5 – 6,5
b. Inflasi (%, yoy)	3,1	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0	2,0 – 4,0	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
c. Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,4	4,5	–	–	–	–
Tingkat suku bunga SBN 10Y (%)	–	–	6,67	5,98	5,82	5,67
			–	–	–	–
			9,56	8,07	8,16	8,24
d. Nilai tukar (Rp/US\$)	14.400	14.900	14.900	13.900	13.900	13.900
	–	–	–	–	–	–
		15.500	15.300	14.700	14.850	15.000
e. Harga minyak mentah (US\$/barel)	63	30 – 35	40 – 50	60 – 70	60 – 70	60 – 70
f. Lifting minyak (ribu barel per hari)	755	705	677 – 737	636 – 735	570 – 735	534 – 722
g. Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.191	992	1.085	1.232	1.224	1.228
			–	–	–	–
			1.173	1.341	1.336	1.324

Sumber: Buku Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2021, Kementerian Keuangan

Secara umum, pengelolaan fiskal jangka menengah diarahkan untuk mendorong pengelolaan fiskal yang fleksibel untuk melakukan *countercyclical* dengan tetap memelihara berkelanjutan dalam jangka menengah serta lebih fokus untuk mendukung pemulihan sekaligus secara simultan melakukan reformasi untuk penguatan fondasi agar mampu keluar dari middle income trap menuju Indonesia Maju di tahun 2045.

Pengendalian risiko utang ditempuh dengan meningkatkan inovasi dan fleksibilitas pembiayaan dengan tetap menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas aman dalam jangka menengah. Ketiga, mendorong inovasi kebijakan dengan memanfaatkan momentum bonus demografi, dimana porsi penduduk didominasi oleh penduduk usia produktif dengan komposisi masyarakat berpenghasilan menengah yang tumbuh secara pesat. Optimalisasi penerimaan perpajakan ditempuh dengan tetap pemberian insentif fiskal untuk daya saing dan investasi. Keempat, mendorong keseimbangan primer mulai menuju positif dalam jangka menengah. Melalui berbagai langkah tersebut, dalam jangka menengah diharapkan pendapatan negara akan kembali meningkat secara bertahap sesuai kapasitas perekonomian dan defisit akan kembali di bawah 3,0 persen PDB pada tahun 2023.



Dampak pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kinerja perekonomian domestik, sehingga berimplikasi pada perumusan kerangka fiskal jangka menengah 2020-2024. Pada tahun 2022, pendapatan negara dan hibah diperkirakan berada pada kisaran 10,32-11,30 persen PDB dan pada tahun 2024 diperkirakan berkisar 10,84-12,15 persen PDB. Hal ini dipengaruhi kinerja perpajakan yang masih belum optimal, seiring dengan perekonomian yang masih dalam proses pemulihan. Sementara ini pada sisi belanja, pemerintah tetap berupaya mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi sekaligus melakukan reformasi untuk penguatan fondasi untuk mendukung transformasi ekonomi agar mampu keluar dari Middle Income Trap. Dalam jangka menengah arah kebijakan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing serta memanfaatkan bonus demografi untuk mendukung transformasi ekonomi.

Searah dengan kebijakan fiskal tersebut, maka postur makro fiskal Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Kerangka Fiskal Jangka Menengah Tahun 2020-2024 (% PDB)**

Uraian	APBN 2020 (Perpres 54/2020)	Proyeksi			
		2021	2022	2023	2024
Pendapatan Negara dan Hibah	10,46	9,90 – 11,00	10,32 – 11,30	10,53 – 11,69	10,84 – 12,15
Penerimaan Perpajakan	8,69	8,25 – 8,63	8,27 – 8,70	8,38 – 9,09	8,59 – 9,55
Tax Ratio*)	9,14	9,30 – 9,68	9,32 – 9,75	9,43 – 10,14	9,64 – 10,60
Belanja Negara	15,53	13,11 – 15,17	13,11 – 14,85	12,88 – 14,41	13,03 – 14,66
Keseimbangan Primer	(3,08)	(1,24) – (2,07)	(0,94) – (1,70)	(0,49) – (0,87)	(0,34) – (0,66)
Surplus/(Defisit)	(5,07)	(3,21) – (4,17)	(2,79) – (3,55)	(2,35) – (2,72)	(2,19) – (2,51)
Rasio Utang**	36,38	36,67 – 37,97	36,65 – 37,39	36,45 – 37,36	36,08 – 37,18

Keterangan:

\*) Tax ratio : Penerimaan perpajakan + PNBP SDA Migas dan PNBP SDA Pertambangan Minerba

\*\*) Besaran rasio utang terutama dipengaruhi volatilitas nilai tukar dan kebutuhan pembiayaan untuk penanganan COVID-19 dan *recovery* ekonomi

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, pertumbuhan ekonomi nasional diproyeksikan sebesar 5,0%. Dilihat dari Konsumsi rumah tangga, meningkatnya pengangguran dan turunnya pendapatan pekerja akan berdampak pada lambatnya pemulihan konsumsi rumah tangga, meski alokasi bansos yang masih besar akan membantu. Dari sisi investasi/PMTB. Pada tahun 2021, investasi masih lemah disebabkan oleh: tingginya ketidakpastian karena COVID-



19 masih tinggi akan menahan investasi, kapasitas produksi yang saat ini masih pada kisaran 70%, neraca perusahaan, baik domestik maupun global, yang masih mengalami tekanan, dan potensi realokasi belanja modal lebih besar, untuk pemenuhan kebutuhan vaksin. Konsumsi pemerintah pada tahun 2021 diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan program vaksinasi dan stimulus PEN yang direncanakan masih besar. Ekspor diperkirakan akan mengalami akselerasi pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi global yang didorong oleh China dan negara maju yang telah memulai program vaksinasinya. Kinerja impor diperkirakan masih lemah seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang masih berjalan.

Prospek perekonomian nasional tahun 2022 diharapkan semakin membaik. Dari sisi konsumsi rumah tangga, pada tahun 2022, ketika COVID-19 mulai terkendali, tingginya saving masyarakat kelas menengah atas akan menjadi pendorong akselerasi konsumsi RT. Akselerasi terutama akan terjadi pada konsumsi leisure – transportasi dan pariwisata. Konsumsi masyarakat bawah masih akan tetap dibantu melalui bansos meski menurun jumlahnya. Pada tahun 2022, dorongan investasi akan bersumber dari terkendalinya COVID-19 seiring dengan selesainya vaksinasi dan dampak reform yang dilakukan (implementasi UU ciptaker & SWF). Dorongan investasi juga didorong oleh tingginya likuiditas di sektor perbankan, yang memungkinkan kredit untuk tumbuh tinggi. Bantuan tetap perlu diberikan kepada dunia usaha untuk bisa mengakselerasi proses pemulihan. Project infrastruktur pemerintah kembali berjalan normal. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan semakin melamban. Namun kinerja ekspor diperkirakan akan mampu terjaga didorong oleh peningkatan ekspor jasa yang mulai akan kembali pulih secara perlahan seiring dengan vaksinasi yang sudah meluas dan terkendalinya COVID-19. Kinerja impor meningkat tajam seiring dengan peningkatan permintaan domestik. Pada tahun 2022, konsumsi pemerintah melambat seiring dengan konsolidasi fiskal. Dorongan belanja stimulus akan berkurang dari tahun-tahun sebelumnya.

**Tabel 3.3**

**Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2021-2022**

Pertumbuhan YoY (Persen)	Realisasi	Proyeksi	Proyeksi
	2020	2021	2022
PDB	-2,1	5,0	5,4 – 6,0
Konsumsi Rumah Tangga	-2,6	4,7	5,2 – 5,8
Konsumsi LNPRT	-4,3		
Konsumsi Pemerintah	1,9	6,2	2,8 – 4,2
Pembentukan Modal Tetap bruto	-4,9	6,4	6,4 – 7,2



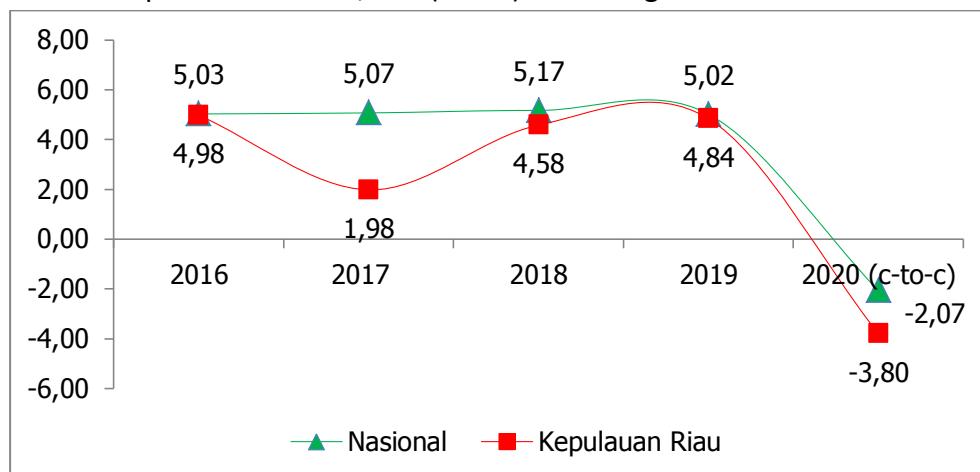
Pertumbuhan YoY (Persen)	Realisasi	Proyeksi	Proyeksi
	2020	2021	2022
Ekspor Barang dan Jasa	-7,7	4,5	6,3 – 6,7
Impor Barang dan Jasa	-14,7	5,9	8,2 – 9,2

### 3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

#### 1. Perkembangan Kondisi Perekonomian Daerah

##### a. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kepulauan Riau tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -3,80% setelah pada tahun 2019 mampu tumbuh sebesar 4,84%. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yang mengalami kontraksi pertumbuhan -2,07% (c-to-c) dibandingkan tahun 2019.

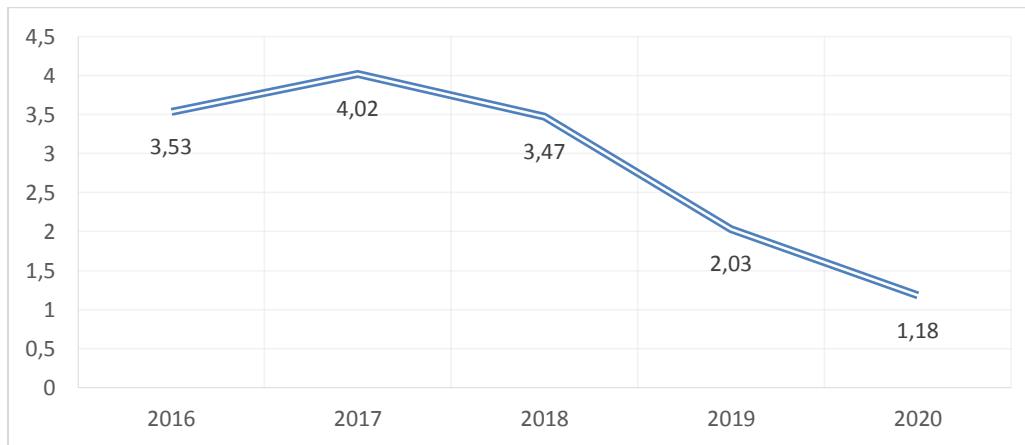


Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

**Gambar 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dengan Nasional Tahun 2016-2020**

##### b. Inflasi

Tingkat inflasi selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan dari sebesar 3,53% pada tahun 2016 menjadi sebesar 1,18% pada tahun 2020. Perkembangan laju inflasi Provinsi Kepulauan Riau (gabungan dua kota) dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



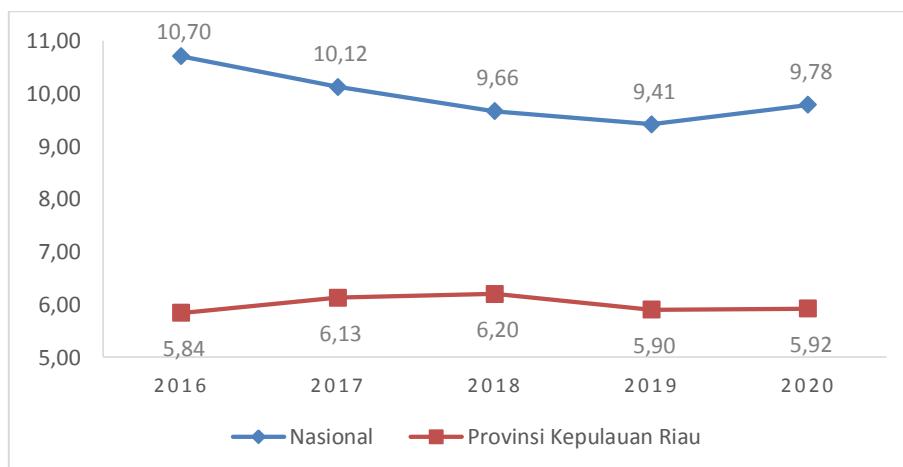
Sumber: BPS Provinsi Kepri, 2021

**Gambar 3.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

Pada tahun 2020 sebanyak 10 komoditas yang memberikan andil terbesar sumbangan inflasi adalah emas perhiasan, selanjutnya rokok kretek filter, cabai merah, minyak goreng, bawang merah, rokok putih, telur ayam ras, taman kanak-kanak, ikan selar/ikan tude, dan sotong.

### c. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 menunjukkan sebesar 5,92% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,90%. Kondisi tersebut sama halnya dengan nasional ditahun 2020 sebesar 9,78% naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



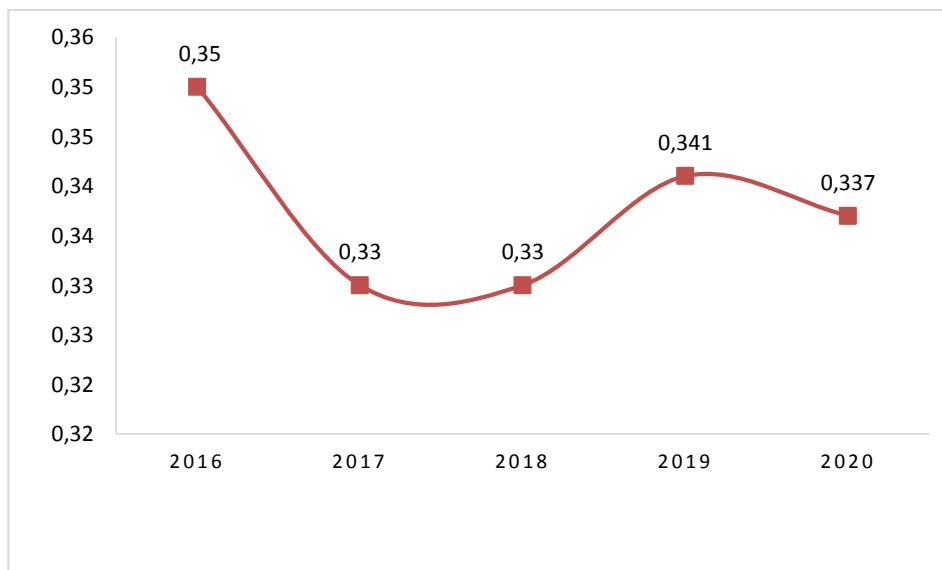
Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau, 2021

**Gambar 3.3 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**



### d. Indeks Gini

Nilai Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau mengalami penurunan ditahun 2020 sebesar 0,337 dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 0,341. Angka ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan di Provinsi Kepulauan Riau termasuk kategori Sedang. Hal ini perlu diwaspadai agar peningkatan pendapatan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi (orang kaya) tetapi juga kelompok menengah dan rendah. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar berikut.

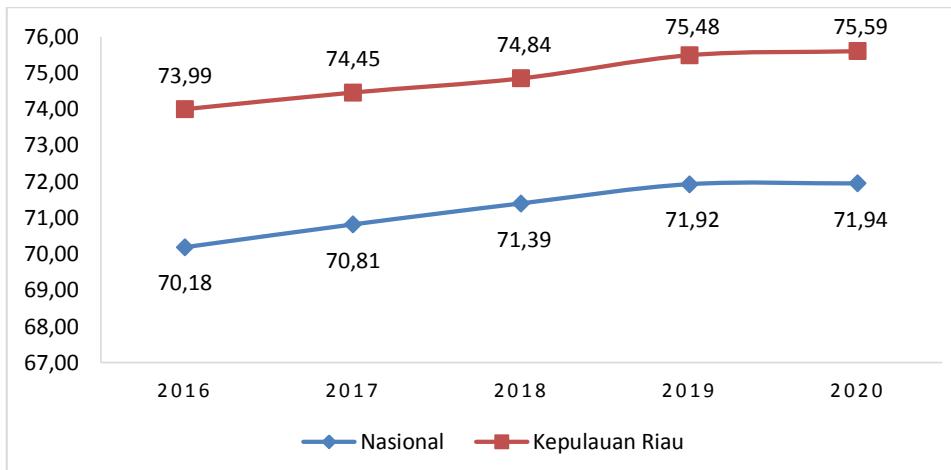


*Sumber : BPS Provinsi Kepri, 2021*

**Gambar 3.4 Indeks Gini Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

### e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 73,99 meningkat menjadi 75,59 pada tahun 2020. Kondisi tersebut relevan dengan Nasional yang juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

**Gambar 3.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2020**

### 2. Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2022

Perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 dan 2022 diperkirakan masih akan melanjutkan trend pemulihan meski secara terbatas dan masih dibawah level sebelum pandemi COVID-19. Dari sisi eksternal dengan semakin terkendalinya penyebaran COVID-19 di negara maju akan mendorong dilakukannya aktivitas yang akan mendorong permintaan ekspor dari negara lain termasuk indonesia. Kondisi ini menjadi peluang untuk mendorong ekspor termasuk dari Kepri khususnya ekspor elektronik, logam dasar dan alat transportasi. Sementara dari sisi internal berlanjutnya stimulus fiskal pada tahun depan termasuk program bantuan sosial kepada rumah tangga akan mendorong daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat.

Adanya peningkatan permintaan produk ekspor dari Kepri khususnya produk industri pengolahan akan mendorong terjadinya peningkatan investasi yang diperlukan guna meningkatkan kapasitas produksi maupun upgrade teknologi mesin yang digunakan. Selain itu rencana investasi yang tertunda pada tahun 2020 diperkirakan akan mulai direalisasikan pada tahun 2021 dan 2022. Faktor pendorong lainnya yang juga diharapkan berasal dari domestik yakni realisasi belanja pemerintah yang diharapkan dapat dilakukan pada awal tahun. Apabila realisasi belanja dapat dilakukan pada awal tahun, maka dampak terhadap perekonomian yang dihasilkan akan lebih optimal.

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha utama akan mengalami peningkatan, yaitu industri pengolahan, konstruksi, serta pertambangan dan penggalian. Peningkatan kinerja industri pengolahan terjadi seiring dengan pelonggaran aktivitas di negara mitra dagang Kepri yang akan



mendorong peningkatan ekspor produk elektronik yang didukung kelancaran supply bahan baku industri di Kepri. Realisasi investasi sektor swasta dan belanja pemerintah juga akan mendorong perbaikan kinerja pada lapangan usaha konstruksi. Sejalan dengan pemulihan ekonomi secara global, permintaan minyak dan gas juga diperkirakan akan mengalami peningkatan dan mendorong kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu jumlah wisatawan yang masuk ke wilayah Kepri diperkirakan masih terbatas jika belum ada kesepakatan untuk membuka akses kunjungan wisatawan asing.

Dari sisi pengeluaran perbaikan ekonomi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjadi pada semua komponen PDRB, terutama konsumsi rumah tangga, investasi serta kinerja net ekspor yang meningkat seiring dengan optimisme pemulihan kesehatan dan kondisi ekonomi. Konsumsi rumah tangga diperkirakan meningkat yang didukung optimisme pemulihan kinerja dunia usaha yang mendorong permintaan tenaga kerja. Optimisme tersebut terindikasi dari indeks penghasilan konsumen dan indeks ketersediaan lapangan kerja pada survei konsumen Bank Indonesia yang menunjukkan peningkatan. Selain itu, program pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2021 dan 2022 akan mendorong daya beli masyarakat khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Tingkat inflasi yang rendah dan terkendali diharapkan dapat mendukung terjaganya daya beli masyarakat sehingga mendorong konsumsi.

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dunia dan nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 diproyeksikan sebesar 3,7%, dan inflasi dijaga pada kisaran angka  $3,50\pm 1$ , Tingkat Pengangguran Terbuka diproyeksikan sebesar 10,1%, Persentase penduduk miskin ditargetkan sebesar 6,01%, dan Indeks Gini diproyeksikan sebesar 0,332, Persentase penduduk miskin meningkat menjadi sebesar 6,01%, dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 76,7%.

Target indikator makro ekonomi Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4**

### **Realisasi dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau**

**Tahun 2016-2022**

<b>No</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi</b>					<b>Target</b>	
			<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	2,01	4-4,4	4,89	-3,80	3,53	3,7
2	Laju Inflasi	%	3,53	4,02	3,47	2,03	1,18	$3,50\pm 1$	$3,50\pm 1$
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,69	7,16	7,12	6,91	10,34	10,2	10,1



No	Indikator	Satuan	Realisasi					Target	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,359	0,339	0,337	0,34	0,33	0,332
5	Persentase penduduk miskin	%	5,84	6,13	5,83	5,80	5,92	6,07	6,01
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,18	70,81	71,39	74,71	75,59	76,26	76,7

Sumber: Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026

### 3. Strategi dan Arah kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam rangka mendorong ekonomi daerah, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diarahkan pada:

a. **Peningkatan pertumbuhan ekonomi** melalui:

- 1) Mendorong pemulihan aspek kesehatan masyarakat dari penyebaran Covid-19 yang seimbang dengan upaya mendorong pemulihan ekonomi.
- 2) Melakukan realisasi belanja pemerintah lebih awal terutama belanja modal infrastruktur untuk menghasilkan dampak lebih optimal bagi perekonomian daerah.
- 3) Mendorong kelancaran implementasi program pemulihan ekonomi nasional di daerah
- 4) Mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus Nongsa digital park dan KEK maintenance, repair and overhoul (MRO) Batam Aero Technic dalam rangka peningkatan realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja.
- 5) Mendorong pemulihan pariwisata dengan mendorong kesiapan penerapan protokol kesehatan CHSE pada daerah tujuan wisata tertentu, mendorong pembukaan wisata secara bertahap dan mendorong penggunaan transaksi elektronik non tunai, dan memberikan insentif kepada pelaku usaha pariwisata.
- 6) Mendorong perekonomian dan keuangan yang inklusif dengan cara: mendorong industri eksisting untuk meningkatkan pangsa penggunaan bahan baku berbasis potensi sumberdaya lokal; memprioritaskan investasi dalam pengembangan agroindustri berbasis potensi SDA di Kepri seperti hasil pertanian dan perikanan; mendorong penguatan dan kemitraan serta menjaga daya saing dan kinerja UMKM melalui digitalisasi UMKM, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung (transportasi jalan, jembatan, bandara, pelabuhan) untuk menekan biaya logistik dan konektivitas.



**b. Pengendalian Inflasi agar tetap terjaga melalui:**

- 1) Mendorong peningkatan kapasitas produksi pangan daerah untuk membangun kemandirian pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian antara lain melalui perluasan lahan, penguatan teknik budidaya, penerapan urban framing, integrated farming dan digital farming.
- 2) Mendorong pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan efisiensi tata niaga komoditas bahan pangan dari produsen, distributor hingga tingkat konsumen.
- 3) Melakukan kerjasama antar daerah untuk mengantisipasi kurangnya ketersediaan barang karena kapasitas produksi yang masih lebih rendah dari kebutuhan sekaligus untuk melindungi harga jual di tingkat produsen pada saat terjadi kelebihan pasokan (over supply).
- 4) Mendorong tersedianya Neraca Bahan Pangan dan informasi harga komoditas sebagai dasar perumusan kebijakan stabilisasi harga serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

### **3.2 Kerangka Pendanaan dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Secara umum pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Landasan hukum dalam pengelolaan pendapatan daerah tercantum dalam amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan landasan hukum tersebut, Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur dengan menghitung potensi dari masing-masing sumber pendapatan berdasarkan kondisi objektif terkini khususnya kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah di Indonesia serta analisa pertumbuhan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terus diupayakan mengalami tren peningkatan sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah belanja daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.



Untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah diperlukan kebijakan-kebijakan di bidang Pendapatan Daerah yaitu meliputi:

1. Untuk sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditujukan untuk meningkatkan PAD melalui modernisasi pelayanan Kantor Samsat dan peningkatan jumlah OPD yang terlibat aktif melakukan pemungutan retribusi daerah;
2. Untuk Sektor Dana Perimbangan dititikberatkan pada peningkatan koordinasi dengan instansi terkait di Pemerintah Pusat khususnya yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
3. Untuk sektor Dana Alokasi Umum (DAU) akan diperjuangkan agar dalam memperhitungkan besaran DAU juga memperhatikan beberapa karakteristik khusus Provinsi Kepulauan Riau selain wilayah kelautan yaitu antara lain sebagai daerah perbatasan, pengembangan ekonomi FTZ yang kiranya juga dapat diperhitungkan secara optimal sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal; dan
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kesehatan fiskal, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan sebagai indikator dalam penerimaan Dana Insentif Daerah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah merupakan program-program kerja yang disusun untuk mengupayakan optimalisasi penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah yang efektif dan efisien dengan rincian sebagai berikut:

### **1. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Upaya Intensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:

- a. Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem komputerisasi/database pada tiap unit kantor pelaksana teknis pemungutan;
- b. Penyempurnaan legalisasi Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- c. Sosialisasi, penyuluhan dan penegakan hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan Penerimaan Daerah khususnya terhadap UPT;
- e. Pengembangan sistem informasi *online* Pendapatan Daerah.
- f. Mengupayakan peningkatan jumlah OPD yang melakukan kegiatan pemungutan retribusi daerah
- g. Pemprov bersama-sama dengan DPRD akan mempercepat pembahasan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-



Pulau Kecil (RZWP3K). Perda tersebut nantinya sebagai payung hukum dalam pemungutan retribusi pemanfaatan ruang laut yang bisa menjadi andalan penerimaan retribusi daerah ke depan

- h. Pemprov sudah mengalokasikan OPD Penghasil retribusi dengan memberikan anggaran dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus untuk pemenuhan sarana prasarana baik kelengkapan laboratorium pengujian pertanian, PUPR, kesehatan hewan dan pengadaan kelengkapan sarana balai bibit perikanan serta peningkatan sertifikasi SDM laboratorium.
- i. Melakukan inventarisasi aset pemerintah provinsi yang bisa dimanfaatkan dengan tujuan komersil sehingga bisa mendapatkan retribusi atas pemakaian kekayaan aset daerah.
- j. Melakukan perbaikan kinerja dan tata kelola perusahaan BUMD.
- k. Memperkuat struktur permodalan sebagai upaya mendorong BUMD melakukan perluasan usaha dan memanfaatkan peluang kerjasama dengan pihak swasta lainnya.
- l. Penataan manajemen BLUD dan peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan pada 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik pemerintah provinsi kepulauan riau yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang).

### 2. **Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah**

Upaya Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah khususnya dengan melakukan Pengkajian terhadap jenis objek Retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah.

### 3. **Peningkatan Dana Perimbangan** dilakukan melalui:

- a. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi departemen terkait Pemerintah Pusat;
- b. Koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Pajak (Kanwil Pajak, KPP dan KPPBB) yang berada di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau; dan
- c. Pengkajian dan verifikasi data realisasi DBH Pajak dan Bukan Pajak antara lain dengan instansi Pemerintah Pusat dan kontraktor pertambangan yang beroperasi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2022 merupakan proyeksi target penerimaan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan didasarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Asumsi-asumsi dalam menghitung proyeksi pendapatan tidak hanya dengan cara menganalisa tren pertumbuhan realisasi 5 (lima) tahun sebelumnya, tapi yang lebih penting adalah memperhatikan kondisi objektif



yang terjadi saat ini dimana bangsa indonesia dimulai pada awal tahun 2020 mengalami kemerosotan ekonomi secara nasional akibat adanya wabah/pandemi COVID-19 yang dialami oleh seluruh negara-negara di dunia termasuk indonesia.

Kondisi wabah/pandemi COVID-19 sangat memengaruhi terjadinya perubahan yang sangat besar dalam seluruh sektor perekonomian baik berdampak bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menghitung proyeksi pendapatan tahun 2021-2026 digunakan sebagai data awal (*baseline*) adalah target pendapatan daerah pada tahun 2020 dimana baik sektor penerimaan PAD maupun Dana Perimbangan mengalami penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan tahun sebelumnya. Hingga tahun 2021 belum ada kepastian kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir dan kapan titik balik perekonomian akan pulih kembali.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih mengandalkan penerimaan dari pajak daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan yang sangat drastis akibat adanya pandemi COVID-19. Dengan kondisi tersebut, dengan memperhatikan data dan informasi yang ada, maka dilakukan penyesuaian pertumbuhan baru dalam menentukan proyeksi target pajak daerah tahun 2021 sampai dengan 2026.

Retribusi daerah merupakan salah satu yang mengalami dampak akibat terjadinya pandemi COVID-19. Saat ini terdapat 8 (delapan) OPD dan 9 (sembilan) Unit Pelaksana Teknis penghasil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berasal dari antara lain:

1. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Dinas Perhubungan;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan;
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan;
8. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
9. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah I Kota Batam;
10. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Wilayah II Kabupaten karimun;
11. UPT Penyelenggaraan Pelabuhan Daerah III Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan;
12. UPT P3 Antang;
13. UPT Laboratorium dan Klinik Hewan;
14. UPT Balai Benih Induk Pertanian;
15. UPT Laboratorium Pengujian Kontruksi;



16. UPT Balai Benih Ikan Pengujan; dan
17. UPTD BPMP2KP;

Proyeksi penerimaan akan diupayakan Penerimaan dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT. Pelabuhan Kepulauan Riau yang rencananya akan melakukan pengelolaan Pelabuhan Dompak dan Pelabuhan Bongkar Muat Tanjungmoco.

Proyeksi penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang memberikan kontribusi terbesar berasal dari Pendapatan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Penerimaan BLUD berasal dari 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yaitu RSUD Engku Haji Daud (Tanjunguban) dan RSUD Raja Ahmad Thabib (Tanjungpinang). Selebihnya penerimaan lain-lain PAD yang sah berasal dari penerimaan Jasa Giro Kas Daerah dan Denda Pajak Daerah.

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam upaya peningkatan penerimaan Lain-lain PAD yang sah antara lain melalui Peningkatan jasa layanan kesehatan oleh 2 (dua) RSUD yang dimiliki oleh Pemprov Kepulauan Riau. Walaupun sudah berstatus BLUD namun bisa ditingkatkan penerimaannya dengan menaikkan kapasitas pelayanan rumah sakit. Anggaran terhadap peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan RSUD akan terus ditingkatkan selain sebagai pemenuhan hak masyarakat akan kesehatan juga diharapkan dapat meningkatkan PAD Kepulauan Riau.

Untuk sektor penerimaan Dana Perimbangan berasal dari penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Penerimaan Dana Perimbangan sangat tergantung dari realisasi penerimaan keuangan negara dan arah kebijakan pemerintah pusat dalam menyusun pos anggaran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada APBN.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan, tata cara penyesuaian rencana alokasi dengan realisasi DBH, tata cara penyaluran, pedoman umum, petunjuk teknis pelaksanaan DBH, pemantauan dan evaluasi, dan tata cara pemotongan atas sanksi administrasi DBH diatur dengan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan.

Diasumsikan pandemi COVID-19 sudah mulai membaik di tahun 2021, namun diproyeksikan Pendapatan Daerah dari Dana Perimbangan akan hanya meningkat dengan persentase yang tidak signifikan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau optimis pada tahun 2022 keuangan negara segera membaik seiring dengan teratasnya pandemi COVID-19. Namun demikian peningkatan pertumbuhan realisasi penerimaan Dana Perimbangan akan tetap diupayakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat, dengan tujuan agar penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dicapai secara optimal.



Proyeksi penerimaan lain-lain pendapatan daerah diperoleh dari Dana Insentif Daerah dan hibah pihak ketiga yang berasal dari PT. Jasa Raharja (Persero) dimana peningkatannya sebanding dengan tingkat realisasi penerimaan dari Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan (SWDKLLAJ).

Penyusunan proyeksi pendapatan daerah telah memperhitungkan dan mempertimbangkan pemulihan ekonomi dampak Pandemi Covid-19. Secara rinci proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.5**

### Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Kode Akun			Uraian Akun	Pendapatan Tahun 2022
	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>				
<b>1</b>	<b>4</b>			<b>PENDAPATAN DAERAH (2+7+10)</b>	<b>3.642.636.646.107,16</b>
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>		<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (3+4+5+6)</b>	<b>1.250.581.749.447,16</b>
3	4	1	01	Pajak Daerah	1.111.035.036.467,16
4	4	1	02	Retribusi Daerah	17.271.712.980,00
5	4	1	03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.650.000.000,00
6	4	1	04	Lain-lain PAD yang Sah	111.625.000.000,00
<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>		<b>PENDAPATAN TRANSFER (8+9)</b>	<b>2.390.706.696.660,00</b>
8	4	2	01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.390.706.696.660,00
9	4	2	02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
<b>10</b>	<b>4</b>	<b>3</b>		<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (11+12+13)</b>	<b>1.348.200.000,00</b>
11	4	3	01	Pendapatan Hibah	1.348.200.000,00
12	4	3	02	Dana Darurat	
13	4	3	03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

## 2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

### a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja pegawai terdiri dari:

#### 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan:

- Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.



- b) Penghitungan kebutuhan gaji dari segi jumlah PNS berdasarkan pertumbuhan Zero Growth.
- c) Gaji DPRD Provinsi Kepri.
- d) Tambahan Penghasilan PNS.
- e) Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

## 2) Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Belanja barang dan jasa diarahkan pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- c) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.
- d) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

## 3) Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. Belanja bunga akan menampung kewajiban bunga pinjaman daerah, ditambah bunga rencana pinjaman daerah Tahun 2022.

## 4) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

## 5) Belanja Hibah

- a) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah guna mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,



rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada Perangkat Daerah berkenaan.

### **6) Belanja Bantuan Sosial**

- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah bersangkutan.

### **b. Belanja Modal**

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pemenuhan infrastruktur dasar dan perkotaan yang mengarah pada:

- a) Pemenuhan kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b) Pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
- c) Pelaksanaan Program Unggulan Gubernur dan prioritas pembangunan daerah tahun 2022.
- d) Pelaksanaan program perangkat daerah sesuai dengan kewenangan daerah dan tugas dan fungsi perangkat daerah.

### **c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.



#### d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

Lebih lengkapnya terkait Belanja Daerah dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terlihat pada lampiran dokumen ini.

### 3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah. Penerimaan daerah terdiri dari: Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, Penerimaan Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi, Penerimaan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir dan Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya. Sedangkan pengeluaran daerah terdiri dari: Penyertaan Modal Pemerintah, Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah dan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan. Kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yaitu: Penerimaan pembiayaan daerah diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), dan Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya.

Kinerja pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6**

#### Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

No	Kode Akun			Uraian Akun	2022
14	6			<b>PEMBIAYAAN</b>	
15	6	1		<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN (16+17+18+19+20+21)</b>	<b>40.000.000.000,00</b>
16	6	1	01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.000.000.000,00
17	6	1	02	Pencairan Dana Cadangan	
18	6	1	03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
19	6	1	04	Penerimaan Pinjaman Daerah	
20	6	1	05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	
21	6	1	06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
36	6	2		<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN (37+38+39+40+41))</b>	<b>0</b>



No	Kode Akun			Uraian Akun	2022
	6	2	01		
37	6	2	01	Pembentukan Dana Cadangan	
38	6	2	02	Penyertaan Modal Daerah	
39	6	2	03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
40	6	2	04	Pemberian Pinjaman Daerah	
41	6	2	05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah



### BAB IV

#### PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 didahului dengan pengkajian terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah, prioritas nasional tahun 2022, dan isu strategis daerah tahun 2022.

##### **4.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

###### **4.1.1 Visi**

Visi pembangunan jangka menengah daerah merupakan visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah: ***"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"***.

Kata kunci dari visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 dapat dijelaskan sebagai berikut:

###### **a. Makmur**

Makmur menunjukkan kondisi kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat dan sejahtera.

###### **b. Berdaya Saing**

Berdaya saing menunjukkan kondisi terwujudnya masyarakat, birokrasi dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.

###### **c. Berbudaya**

Berbudaya menunjukkan kondisi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

###### **4.1.2 Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi ***"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya"***, misi yang ditempuh sebanyak 5 (lima) misi, yaitu sebagai berikut.

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.



2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Taqwa.
3. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir.

### 4.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan daerah yang ingin diwujudkan Provinsi Kepulauan Riau meliputi sebagai berikut:

1. Terwujudnya Percepatan Pemulihan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.  
Sasaran yang akan dicapai yaitu
  - a. Terwujudnya peningkatan PDRB pada sektor konstruksi, industri pengolahan, dan sektor perdagangan.
  - b. Terwujudnya Peningkatan PAD
  - c. Terwujudnya Peningkatan sektor pariwisata
  - d. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)
2. Terwujudnya Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Lingkungan.  
Sasaran yang akan dicapai yaitu:
  - a. Terwujudnya Optimalisasi Sektor Perikanan dan Kelautan
  - b. Terwujudnya Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup
  - c. Terwujudnya Hutan Lestari
3. Terwujudnya Penguatan Jaring Pengaman Sosial.  
Sasaran yang akan dicapai yaitu:
  - a. Menurunnya angka kemiskinan
  - b. Terwujudnya Masyarakat Desa yang Tangguh dan Adaptif
4. Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter.
  - a. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
  - b. Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan
  - c. Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif.
  - a. Terwujudnya Peningkatan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat
  - b. Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
  - c. Terwujudnya Managemen ASN yang Profesional
  - d. Terwujudnya Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana



6. Terwujudnya Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat.
  - e. Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu
  - f. Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama
7. Terwujudnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau.
  - a. Terwujudnya Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

Dalam RPJMD telah ditetapkan tahapan arah kebijakan pembangunan yang mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memperhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari tahun ke tahun dalam rangka mencapai sasaran RPJMD Kepulauan Riau, sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.1**  
**Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2021-2026**

<b>Arah Kebijakan</b>				
<b>Tahun-1</b>	<b>Tahun-2</b>	<b>Tahun-3</b>	<b>Tahun-4</b>	<b>Tahun-5</b>
<b>Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.</b>	<b>Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.</b>	<b>Peningkatan Investasi dan Daya Saing Daerah untuk Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.</b>	<b>Optimalisasi PAD secara intensif dan ekstensif Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.</b>	<b>Keberlanjutan Pembangunan untuk Kemantapan Daya Saing Daerah dan Kemakmuran Rakyat Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.</b>

Pembangunan pada tahun pertama akan diarahkan pada **Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional**. Pada tahun pertama ini, fokus utama kebijakan pembangunan yang akan dijalankan ialah terkait dengan upaya pemulihan ekonomi serta menjamin layanan



Kesehatan masyarakat ditengah Pandemi Covid-19. Beberapa strategi yang akan difokuskan pada tahun pertama ini ialah peningkatan kapasitas permodalan bagi UMKM, pemberian insentif dan akses permodalan bagi para industri yang mengalami kesulitan ekonomi, peningkatan promosi wisata melalui berbagai event dengan memanfaatkan media dan teknologi informasi, peningkatan kapasitas dan perlindungan bagi para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), eksistensi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penopang ekonomi desa, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan secara merata bagi seluruh masyarakat, meningkatkan kualitas Pendidikan dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif, mengembangkan layanan Pendidikan yang inklusif, terjangkau, dan merata, mendorong keberlanjutan sekolah dari dasar hingga perguruan tinggi, serta pengoptimalan pengelolaan sumber daya kesehatan secara berkelanjutan, efisien, dan efektif.

Penjabaran sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2**

**Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022  
dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD				
					2022				
<b>“TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU YANG MAKMUR, BERDAYA SAING DAN BERBUDAYA”</b>									
<b>MISI 1 PERCEPATAN PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS MARITIM, BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN KEUNGGULAN WILAYAH UNTUK PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT</b>									
<b>(1.1) Terwujudnya percepatan pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi</b>	<b>PDRB per Kapita ADHK</b>			<b>Juta Rupiah</b>	<b>80,07</b>				
	<b>Indeks Gini</b>			<b>Indeks</b>	<b>0,332</b>				
	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>			<b>%</b>	<b>4,8 - 5,6</b>				
	<b>(1.1.1) Terwujudnya peningkatan PDRB pada sektor konstruksi, industri pengolahan, dan sektor perdagangan.</b>	<b>(1.1.1) Terwujudnya peningkatan PDRB pada sektor konstruksi, industri pengolahan, dan sektor perdagangan.</b>	<b>Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>55,744</b>				
			<b>Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>106.079</b>				
		<b>(1.1.2) Terwujudnya Peningkatan PAD</b>	<b>Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>21.570</b>				
	<b>(1.1.3) Terwujudnya Peningkatan sektor</b>	<b>Persentase Peningkatan PAD</b>	<b>%</b>	<b>6,09</b>					
		<b>Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap</b>	<b>Miliar Rupiah</b>	<b>2.387</b>					



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD
					2022
		pariwisata	PDRB harga berlaku		
		(1.1.4) Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.177
<b>(1.2) Terwujudnya Optimalisasi Potensi Kemaritiman dan Lingkungan</b>	<b>Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku</b>			<b>Miliar Rupiah</b>	<b>3.297</b>
		(1.2.1) Terwujudnya Optimalisasi Sektor Perikanan dan Kelautan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.297
		(1.2.2) Terwujudnya Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	69,73
		(1.2.3) Terwujudnya Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	27,10
<b>MISI 2 MEWUJUDKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS, SEHAT DAN BERDAYA SAING DENGAN BERBASISKAN IMAN DAN TAQWA</b>					
<b>(2.1) Terwujudnya Penguatan Jaring Pengaman Sosial</b>	<b>Angka Kemiskinan</b>			<b>%</b>	<b>6.01</b>
	(2.1.1) Menurunnya angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	6.01	
	(2.1.2) Terwujudnya Masyarakat Desa yang Tangguh dan Adaptif	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6840 (Desa Berkembang)	
<b>(2.2) Terwujudnya Pembangunan Manusia yang Unggul dan Berkarakter</b>	<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>			<b>Indeks</b>	<b>76,7</b>
	(2.2.1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,27	
		Prevalensi Stunting	%	15,80	
	(2.2.2) Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	
		Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10,14	
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,80	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD
					2022
		(2.2.3) Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,20
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,50
<b>MISI 3 MELAKSANAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, TERBUKA, DAN BERORIENTASI PELAYANAN</b>					
<b>(3.1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>		<b>Indeks</b>	<b>73,23</b>
		(3.1.1) Terwujudnya Peningkatan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat	Nilai Keterbukaan Informasi	Indeks	78
		(3.1.2) Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB
		(3.1.3) Terwujudnya Managemen ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	Baik (285)
		(3.1.4) Terwujudnya Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,37
<b>MISI 4 MENGEMBANGKAN DAN MELESTARIKAN BUDAYA MELAYU DAN NASIONAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>					
<b>(4.1) Terwujudnya Pembinaan Keagamaan, Pelestarian Budaya, dan Harmoni Masyarakat</b>		<b>Indeks Pembangunan Kebudayaan</b>		<b>Indeks</b>	<b>62,9</b>
		(4.1.1) Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	Nilai Ekonomi Budaya	Nilai	28,11
			Nilai Warisan budaya	Nilai	48,84
			Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	1,49
			Nilai Budaya Literasi	Nilai	69
		(4.1.2) Terwujudnya Peningkatan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	74,46



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target RPJMD
					2022
		Harmonisasi Antar Umat Beragama			
<b>MISI 5 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR ANTAR PULAU GUNA PENGINTEGRASIAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PESISIR</b>					
<b>(5.1) Terwujudnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian Antar Pulau</b>		<b>Rasio Konektivitas</b>			<b>Ratio</b>
		(5.1.1) Terwujudnya Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Ratio	18
			Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Ratio	31,82

#### 4.2. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2022

Visi Presiden 2020-2024 pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Visi dan Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan



5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022: "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural", pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
2. Pembangunan Rendah Karbon
3. Reformasi Perlindungan Sosial
4. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
5. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
  - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
  - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
  - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
  - b. Nilai Tukar Petani 102-104
  - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
  - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
  - e. Ketersediaan Protein Hewani 2,7 juta ton
  - f. Nilai Tambah Tenaga Kerja Pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn

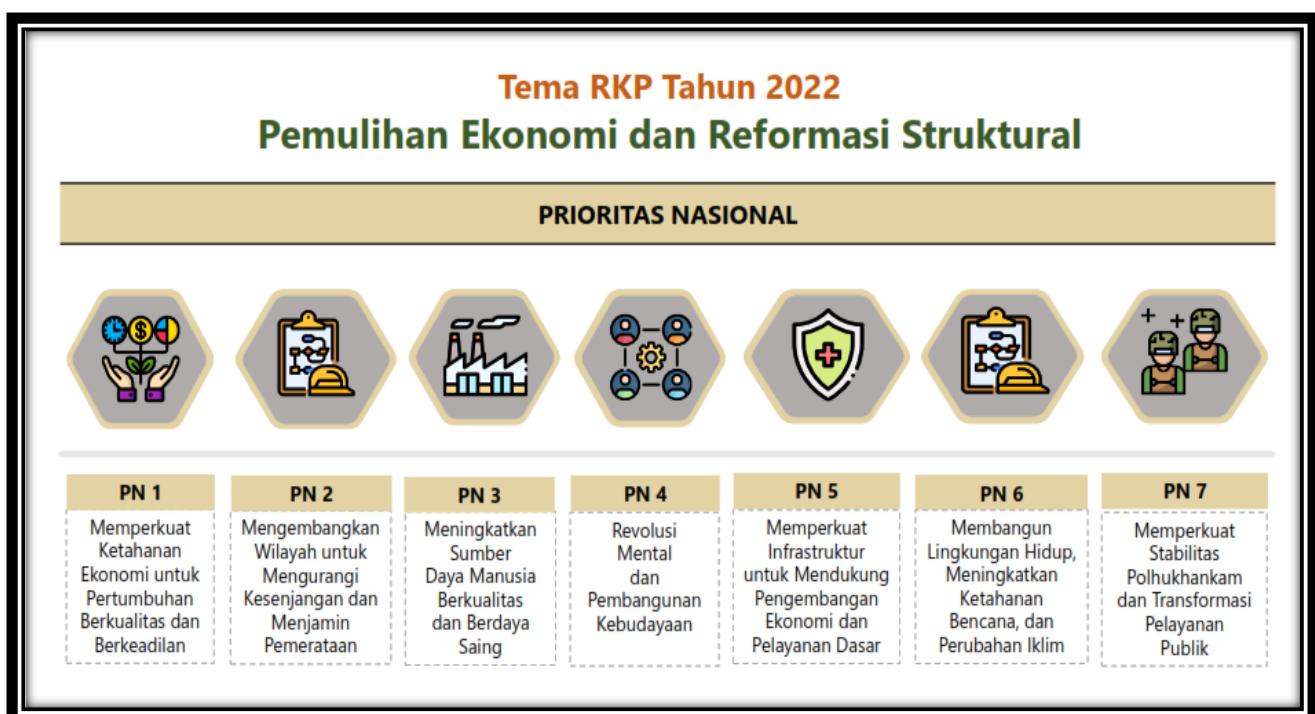


4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
  - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
  - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
  - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
  - c. Panjang Jalan Tol Baru: 400 km
  - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m<sup>3</sup>/s
  - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
  - f. Pembangunan Akses Sanitasi Aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
  - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
  - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
  - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
  - c. 72.500 SDM talenta digital
  - d. 12,4 juta local champion literasi digital
  - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang DIREGISTRASI
  - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Penurunan Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
  - b. Penurunan Intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
  - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
  - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Tingkat Kemiskinan 8,5-9%
  - b. Penduduk yang tercakup dalam Program Jaminan Sosial 87%
  - c. Rumah Tangga Miskin dan Rentan yang Memperoleh Bantuan Sosial 60%
  - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk



9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
  - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
  - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
  - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasiskan Teknologi (PPBT)
  - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
  - b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk
  - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
  - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
  - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
  - f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
  - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
  - h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sebanyak 7 Prioritas Nasional tahun 2022 sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

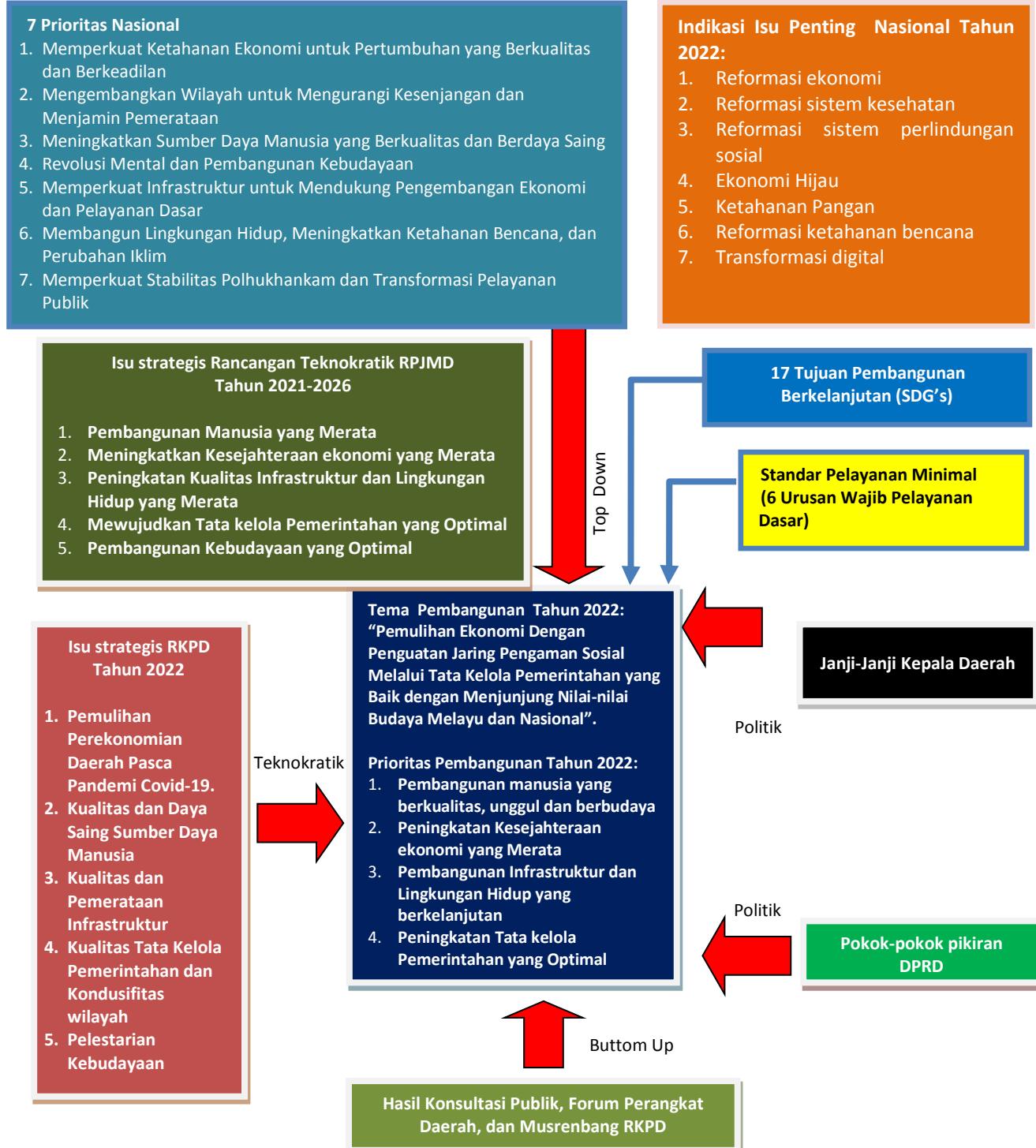


**Gambar 4.1 Tema dan Prioritas RKP Tahun 2022**



### 4.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Perumusan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dilakukan dengan memperhatikan isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, Indikasi Isu Penting Nasional Tahun 2022, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), Standar Pelayanan Minimal, Janji-janji kepala daerah dan Pokok-pokok Pikiran DPRD (pendekatan Politik), serta hasil Konsultasi publik (pendekatan Bottom up) sebagaimana terlihat pada skema berikut ini.



**Gambar 4.2 Skema Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2022 berdasarkan Isu Strategis Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2021-2026, Prioritas RKPD tahun 2022, SDG's, SPM, Isu Strategis daerah RKPD, Visi Kepala Daerah, dan Pokok-pokok Pikiran DPRD.**



Mendasarkan hasil perumusan prioritas diatas, maka ditetapkan Tema pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2022 yaitu: **“Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Jaring Pengaman Sosial Melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Menjunjung Nilai-nilai Budaya Melayu dan Nasional.”**

Keterkaitan antara Tema Pembangunan Tahun 2022 dengan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025 Tahap RPJMD Ke-4 sebagai berikut:



**Gambar 4.3 Tema Pembangunan Tahun 2022 dengan Arah Kebijakan RPJPD 2005-2025 Tahap RPJMD Ke-4**

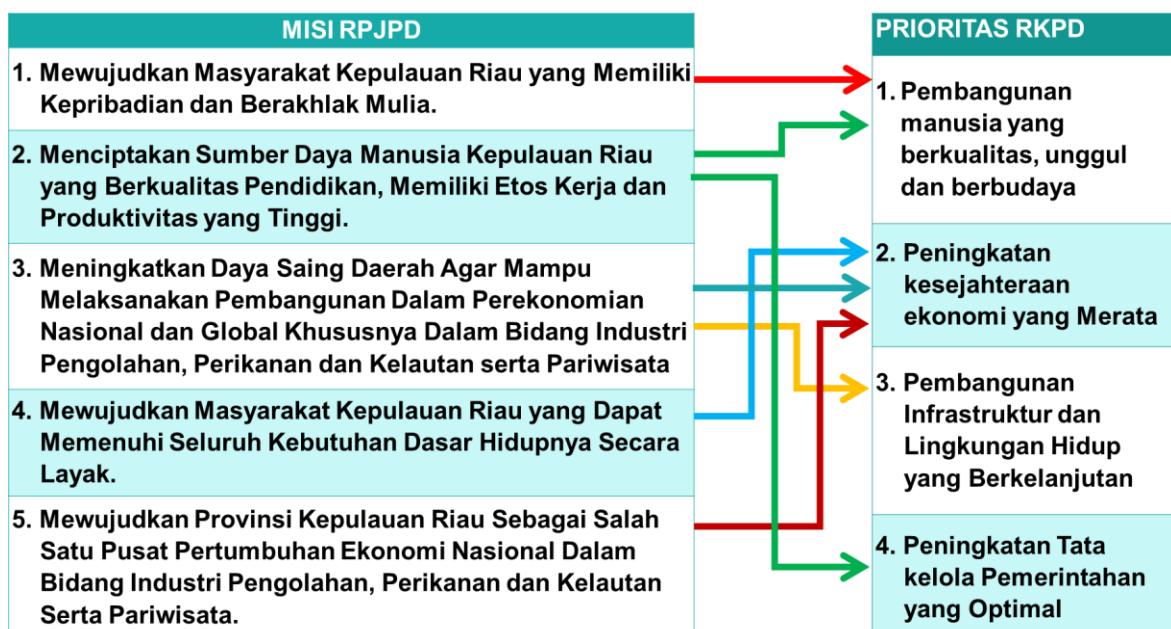
Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 yaitu:

1. Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya
2. Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang Merata
3. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
4. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal



Gambar 4.4 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Keterkaitan Misi RPJPD dengan Prioritas RKPD Tahun 2022 tercantum pada gambar berikut ini.



Gambar 4.5 Keterkaitan Misi RPJPD dengan Prioritas RKPD Tahun 2022



Keterkaitan Prioritas RKPD Provinsi Kepri Tahun 2022 dengan 7 Agenda Pembangunan RPJMN tercantum pada gambar berikut ini.

### Prioritas Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

- 1** Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya
- 2** Peningkatan Kesejahteraan ekonomi yang Merata
- 3** Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan
- 4** Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal

### 7 Prioritas Nasional RKP 2022

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

**Gambar 4.6 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan 7 Prioritas Nasional RKP Tahun 2022**

Keterkaitan Prioritas RKPD Provinsi Kepri Tahun 2022 dengan Misi RPJMD Tahun Tahun 2021-2026 tercantum pada gambar berikut ini.



**Gambar 4.7 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022 dengan Misi RPJMD Tahun 2021-2026**



Perincian arah kebijakan dan program yang mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 4.3**

### **Prioritas, Arah Kebijakan, Sasaran dan Program Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Program
1. Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya	a. Peningkatan layanan kesehatan yang responsif dan komprehensif melalui: Pembudayaan hidup bersih dan sehat pada masyarakat didukung peningkatan pelayanan sanitasi, peningkatan gizi ibu dan anak, pencegahan penyakit menular; Penyediaan kajian pengembangan sarana dan prasarana kesehatan layanan dasar dan rujukan.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	• Angka Harapan Hidup	Tahun	70,27	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li><li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li><li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</li><li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li></ul>
	b. Pemenuhan standar layanan rumah sakit dan digitalisasi layanan kesehatan berbasis IT; dan Peningkatan kompetensi dan fasilitasi pendidikan bagi tenaga medis.		• Prevalensi Stunting	%	15,80	
	c. Peningkatan kualitas pendidikan menengah melalui: pembangunan	Meningkatnya Mutu dan Akses	• Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li></ul>
			• Rata-rata lama	Tahun	10,14	



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Program
	sarana dan prasarana pendidikan; fasilitasi peningkatan kompetensi dan fasilitasi pendidikan bagi guru; dan penyediaan beasiswa	Layanan Pendidikan	Sekolah  • Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,80	• Program Pengelolaan Pendidikan
	d. Peningkatan rehabilitasi sosial dasar didalam panti dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan warga terdampak covid-19	Menurunnya angka kemiskinan	• Angka Kemiskinan	%	6,01	• Program Pemberdayaan Sosial • Program Rehabilitasi Sosial • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
	e. Pengembangan kebudayaan dan penyediaan prasarana pusat kebudayaan melayu Kepri	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu	• Nilai Ekonomi Budaya • Nilai Warisan budaya • Nilai Ekspresi Budaya • Nilai Budaya Literasi	Nilai	28,11 48,84 1,49 69	• Program Pengembangan Kebudayaan • Program Pengembangan Kesenian Tradisional • Program Pembinaan Sejarah • Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Pengelolaan Permuseuman • Program Pembinaan Perpustakaan
	f. Pemberdayaan ekonomi dan partisipasi politik perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)  Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	93,20 65,50	• Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan • Program Perlindungan Perempuan



## RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Program
2. Peningkatan Kesejahteraan ekonomi yang Merata	Fasilitasi pembangunan industri pengolahan ikan, industri pengolahan rumput laut, dan penguatan industri maritim.	Terwujudnya peningkatan PDRB pada sektor konstruksi, industri pengolahan, dan sektor perdagangan.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	106.079	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</li><li>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri</li><li>• Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li></ul>
	Peningkatan ekspor dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat		Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	55.744	
	Peningkatan kualitas koperasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah melalui penguatan kompetensi, digitalisasi UMKM, dan internasionalisasi produk UMKM.		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	21.570	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li><li>• Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</li><li>• Program Pengembangan Ekspor</li><li>• Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</li><li>• Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li></ul>



## RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Program	
						<p>Perlindungan Koperasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</li><li>• Program Pengembangan UMKM</li></ul>	
	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja.	Terwujudnya Penciptaan Lapangan Baru dan Peningkatan Investasi	Kerja dan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10,1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Perencanaan Tenaga Kerja</li><li>• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li><li>• Program Penempatan Tenaga Kerja</li><li>• Program Hubungan Industrial</li><li>• Program Pengawasan Ketenagakerjaan</li><li>• Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</li><li>• Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</li></ul>
	Peningkatan investasi melalui kemudahan layanan perizinan, insentif investasi, dan pengkoordinasian penyediaan infrastruktur penunjang investasi			Nilai realisasi investasi PMA	Milliar Rp	22.500	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li><li>• Program Promosi Penanaman Modal</li><li>• Program Pelayanan Penanaman Modal</li><li>• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman</li></ul>
				Nilai realisasi investasi PMDN	Milliar Rp	12.500	



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Program
						<p>Modal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li></ul>
	Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pertanian dan perkebunan, serta pemberdayaan petani	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.177	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</li><li>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li><li>• Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li><li>• Program Penyuluhan Pertanian.</li><li>• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li><li>• Program Penanganan Kerawanan Pangan</li><li>• Program Pengawasan Keamanan Pangan</li></ul>
	Peningkatan penggunaan teknologi perikanan, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, penyediaan sarana penunjang kegiatan	Terwujudnya Optimalisasi Sektor Perikanan dan Kelautan	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.297	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil</li><li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li><li>• Program Pengelolaan</li></ul>



## RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022

Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Program
	perikanan, serta pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan					<p>Perikanan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</li><li>• Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</li></ul>
	Diversifikasi wisata budaya, alam dan kuliner, penerapan wisata ramah kesehatan, dan peningkatan promosi wisata	Terwujudnya Peningkatan sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.387	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li><li>• Program Pemasaran Pariwisata</li><li>• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li><li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</li></ul>
3. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Peningkatan pembangunan pelabuhan (roro, barang dan bongkar muat) dan gudang logistik, penyediaan transportasi antar pulau dan antar kabupaten.	Terwujudnya Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rasio Konektivitas Angkutan Darat</li><li>• Rasio Konektivitas Angkutan Laut</li></ul>	Rasio	18	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li><li>• Program Pengelolaan Pelayaran</li></ul>
	Sinkronisasi pembangunan berwawasan lingkungan, dan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup dalam rangka pencegahan	Terwujudnya Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	69,73	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li><li>• Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li></ul>



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Program
1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Lingkungan Hidup				<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</li><li>• Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li><li>• Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li><li>• Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li><li>• Program Pengelolaan Persampahan</li></ul>
		Terwujudnya Hutan Lestari	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	27,10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Hutan</li><li>• Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</li></ul>
4. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal	Peningkatan keterbukaan informasi publik, smart service (e-goverment, layanan berbasis aplikasi)	Terwujudnya Peningkatan Keterbukaan Informasi kepada	Nilai Keterbukaan Informasi	Indeks	78	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</li><li>• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li></ul>



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Program
Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan untuk menunjang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</li><li>• Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</li></ul>
	Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah		Akuntabilitas Keuangan	Opini BPK	WTP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li><li>• Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>• Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</li></ul>
	Penguatan kematangan organisasi pemerintah daerah, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah		<ul style="list-style-type: none"><li>• Tingkat Kematangan Organisasi Daerah</li></ul>	Total Skor	38	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Perbatasan</li><li>• Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum</li><li>• Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</li><li>• Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Program Kesejahteraan Rakyat</li><li>• Program Perekonomian Dan Pembangunan Program</li></ul>



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Program
						<p>Penataan Organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pelayanan Penghubung</li><li>• Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah</li></ul>
	Penggalian potensi Pendapatan Asli daerah	Terwujudnya Peningkatan PAD	Persentase Peningkatan PAD	%	6,09%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li></ul>
	Perbaikan sistem manajemen ASN, mencakup penataan dan penempatan ASN berbasis merit system, peningkatan kompetensi pegawai dan fasilitasi pendidikan, dan peningkatan sarana prasarana dikat ASN.	Terwujudnya Managemen ASN yang Profesional	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	Baik (285)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Kepegawaian Daerah</li><li>• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li></ul>
	Peningkatan kualitas pembangunan desa	Terwujudnya Masyarakat Desa yang Tangguh dan Adaptif	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6840 (Desa Berkembang)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penataan Desa</li><li>• Program Administrasi Pemerintahan Desa</li><li>• Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</li></ul>
	Penguatan ketangguhan bencana untuk menunjang ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,37	Program Penanggulangan Bencana



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Program
		bencana				<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</li><li>• Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</li><li>• Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li><li>• Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</li><li>• Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</li></ul>



### 4.2 Strategi Pemulihan Ekonomi

Pada tahun 2022 diharapkan Pandemi Covid-19 sudah tertangani dengan baik, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat sudah berjalan dengan normal kembali. Oleh karena itu, pada tahun 2022 fokus pembangunan akan diarahkan pada akselerasi untuk meningkatkan ekonomi yang sudah pulih kembali.

Beberapa strategi pemulihan ekonomi yang akan difokuskan pada tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kelembagaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi,
2. Penguatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
3. kemampuan manajemen usaha, diversifikasi usaha, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas produk.
4. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar.
5. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
6. Peningkatan kompetensi pemasaran produk melalui e-commerce.
7. Fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung investasi, penyediaan informasi potensi dan peluang investasi berbasis produk unggulan daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan insentif bagi investor.
8. optimalisasi penerapan Free Trade Zone secara menyeluruh,
9. pengembangan tourism linkage networking antar kabupaten dan kota,
10. diversifikasi objek wisata yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan,
11. peningkatan kapasitas dan kualitas para pelaku ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan,
12. peningkatan kualitas tata kelola dan layanan Pendidikan yang bermuatan lokal dan sinkron dengan kebutuhan Industri,
13. Diversifikasi produk, inovasi teknologi industri kecil dan peningkatan kompetensi pemasaran produk melalui e-commerce.
14. Peningkatan kemampuan manajemen usaha, diversifikasi usaha, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas produk industri.
15. Pemberdayaan usaha perdagangan dan peningkatan kompetensi pemasaran melalui e-commerce.
16. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor.
17. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor.
18. pemetaan kluster daerah pertanian secara terpadu dengan menyesuaikan kondisi dan potensi masing-masing daerah,
19. Penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengendalian hama terpadu, dan pemberdayaan petani.



20. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan peternakan melalui pemberdayaan kelompok tani dan peternak dalam pengolahan dan pemasaran produk pertanian dan peternakan.
21. pengembangan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi perikanan dan kelautan,
22. penguatan kerjasama antar lembaga vertikal dan horizontal dalam mengoptimalkan produksi perikanan dan kelautan,
23. Optimalisasi perikanan tangkap dan pengembangan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan.
24. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan.
25. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha perikanan skala kecil.
26. peningkatan kapasitas ekonomi perempuan pada sektor produktif dan ekonomi keluarga,
27. peningkatan partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata berbasis budaya lokal,
28. Peningkatan akses ke kawasan wisata dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan.
29. Penataan manajemen pengelolaan dan peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata.
30. Peningkatan sinergi kerjasama dengan stakeholder pariwisata.
31. mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah daratan dan pesisir.



## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

#### 5.1 Sasaran Pembangunan Kabupaten/kota

Pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau diharapkan mampu mencapai target indikator sasaran pembangunan yang mencakup pertumbuhan ekonomi, persentase penduduk miskin, dan tingkat pengangguran terbuka, dengan target tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.1**  
**Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

No	Kab/Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Penduduk Miskin	Tingkat Pengangguran Terbuka
1	Karimun	2,48	7,04	8,35
2	Bintan	3,76	6,50	8,81
3	Natuna	0,47	4,55	3,82
4	Lingga	3,06	14,17	4,31
5	Kepulauan Anambas	0,37	6,56	3,30
6	Kota Batam	4,61	4,72	11,68
7	Kota Tanjungpinang	3,66	9,43	9,18
8	Provinsi Kepulauan Riau	3,7	6,01	10,1

#### 5.6 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Arah pengembangan wilayah Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota sebagai berikut:

##### 1) Kabupaten Karimun

Kabupaten Karimun menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan Karimun (BBK) yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dengan cakupan meliputi sebagian dari wilayah Pulau Karimun dan seluruh Pulau Karimun Anak. Penetapan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian di Kabupaten Karimun.



Potensi keunggulan wilayah yang dimiliki Kabupaten Karimun meliputi Produk pertanian padi sawah, hortikultura, peternakan. Penyerapan hasil produk pertanian padi sawah, hortikultura (buah, sayuran hasil perkebunan) cukup tinggi terutama dipasarkan di Kota Batam dan Tanjungpinang (contohnya durian tanjung batu dari pulau Kundur jadi ikon kabupaten Karimun). Permasalahan yang dihadapi antara lain: belum berkembangnya budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di Kabupaten Karimun Pulau Moro dan sekitarnya), serta skala produksi olahan perikanan yang masih terbatas (skala rumah tangga) karena keterbatasan modal serta kontinuitas bahan produksi. Potensi unggulan lainnya adalah perikanan, dengan produk perikanan yang dihasilkan berupa ikan segar hasil penangkapan, budi daya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Batam, Kota Tanjungpinang maupun di ekspor serta untuk industri olahan hasil perikanan.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Karimun ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat industri maritim dan perikanan. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Karimun diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pelabuhan Penumpang Domestik di Kabupaten Karimun;
2. Pengembangan Bandara Domestik Raja Haji Abdullah;
3. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan industri;
4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
5. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);
6. Pengembangan Kepri terang (listrik masuk pulau);
7. Pengembangan Industri Galangan Kapal;
8. Pengembangan Industri Oil Tanking, Refinery Oil, dan Industri Berat lainnya;
9. Pengembangan Industri Pertambangan Granit;
10. Pengembangan Industri Perikanan di Pulau Moro; dan
11. Fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

## 2) Kabupaten Bintan

Kabupaten Bintan menjadi bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan. Cakupan wilayah meliputi sebagian dari wilayah Kabupaten Bintan serta seluruh Kawasan Industri Galang Batang, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur, dan Pulau Lobam, Sebagian dari wilayah Kota Tanjungpinang yang meliputi Kawasan Industri Senggarang dan Kawasan Industri Dompak Darat. Penetapan Bintan sebagai Kawasan Perdagangan



Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut diharapkan mampu mengembangkan perekonomian Kabupaten Bintan.

Kawasan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Pemanfaatan lain adalah kawasan pariwisata dengan kondisi yang ada di Wilayah Kecamatan Teluk Sebong dengan objek wisata Lagoi mencapai luas sebesar 23.000 Ha, Pantai Trikora di Kecamatan Gunung Kijang, dan Pantai Mapur di Bintan Timur seluas 5.243,74 Ha. Pada kawasan industri pemanfaatannya sebesar 7.285,69 Ha terdapat di Kecamatan Bintan Timur, Gunung Kijang dan Kecamatan Seri Kuala Lobam. Sedangkan kawasan pertambangan tersebar merata di Kabupaten Bintan di antaranya di Kecamatan Bintan Timur, Bintan Utara, Kecamatan Teluk Sebong, Kecamatan Teluk Bintan, dan Kecamatan Gunung Kijang.

Pemanfaatan budidaya laut berupa budidaya perikanan laut pada umumnya terdapat disepanjang perairan di wilayah Kabupaten Bintan. Kegiatan budidaya laut di beberapa pulau di Kabupaten Bintan ini mempunyai potensi yang besar dengan dilakukan penangkapan ikan dari alam dengan menggunakan alat yang tidak merusak lingkungan. Pada umumnya ikan yang mempunyai komoditas ekspor seperti ikan kerapu dan ikan kakap mengalami permintaan yang terus meningkat baik untuk lokal maupun international. Hal ini mendorong harus dilakukannya budidaya ikan terutama jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Beberapa jenis ikan biota laut yang telah dibudidayakan antara lain seperti ikan kerapu (*Ephinephelus spp*), kakap (*Lutjanus spp*), rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan daerah tangkapan ikan terbagi atas kegiatan perikanan pantai (*coastal fisheries*) dan perikanan lepas pantai (*offshore fisheries*) mencapai luasan sebesar 96.268,00 Km2. Penangkapan ikan di areal penangkapan (*fishing ground*) di kawasan pulau-pulau dengan perairan yang luas di Kabupaten Bintan.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bintan ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pariwisata internasional, industri MRO (*maintenance, repair, and overhaul*) dan industri pengolahan makanan. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Bintan diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan wisata alam, olahraga rekreasi berstandar internasional;
2. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pariwisata;
3. Pengembangan Pusat Pelatihan Vokasi sektor industri, logistik dan pariwisata;
4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
5. Percepatan dan fasilitasi pembangunan jembatan Batam-Bintan;
6. Pengembangan pusat industri pengolahan pertambangan;
7. Pengembangan pusat industri pengolahan bahan makanan;
8. Pengembangan Kawasan Industri Lobam dan Pelabuhan (BIIE);
9. Pengembangan Industri MRO dan Transportasi; dan



10. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal).

### 3) Kabupaten Natuna

Kabupaten Natuna yang terletak di ujung utara Indonesia dikelilingi Laut Cina Selatan merupakan bagian dari simpul pelayaran di dunia (Selat Malaka-Singapura-Phillip) karena jalur pelayaran internasional ini berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Untuk menangkap dan menjawab permasalahan di jalur internasional terpadat pada Selat Malaka-Singapura-Filipina yang sempit, dangkal, berbelok-belok, ramai, dan terbatas, maka jalur pelayaran ALKI I-A di Laut Cina Selatan menjadi alternatif. Hal ini dikarenakan Laut Cina Selatan merupakan lautan lepas dengan kondisi perairan yang cukup lebar dan dalam, dari gugus Pulau Karimun-Barelang-Bintan hingga gugus Pulau Bunguran yang dilewati kapal-kapal internasional.

Kabupaten Natuna sebagai salah satu Kabupaten yang berada di Laut Cina Selatan memiliki potensi yang sangat strategis dan memiliki peluang bagi aktivitas pelayaran internasional, dimana Ranai menjadi lokasi Pengembangan Pemantapan Pelabuhan Nasional. Kabupaten Natuna mempunyai potensi yang sangat besar dalam sub sektor perikanan. Potensi ikan meliputi kerapu napoleon, kakap merah dan kerap turis dengan sentra produksi berada di Pulau Tiga. Potensi perikanan yang dimiliki sangat besar namun daya tangkap yang diperolah masih rendah.

Budidaya ikan laut di Kabupaten Natuna seluas 6.021,3 Ha memiliki potensi produksi yang sangat sebesar yaitu 96.137 ton/tahun (ikan kerapu dan ikan bawal). Budidaya ikan air tawar yang dimiliki seluas 22 Ha juga memiliki potensi yang sangat besar yaitu 2.807 ton/tahun (ikan lele, ikan nila, ikan mas, ikan mujair dan ikan gurame). Budidaya ikan air payau seluas 507 Ha juga tidak kalah besar potensinya, yaitu 11.851 ton/tahun (udang vanname, udang windu, ikan bandeng dan ikan kakap putih). Sedangkan potensi rumput laut seluas 4000Ha ialah sebesar 920.881 ton/tahun.

Potensi unggulan lainnya adalah pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Produk pertanian padi tada hujan dan sawah terdapat di Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Tengah, Bunguran Utara dan selasar Timur. Potensi lahan yang ada mencapai seluas 4.940 Ha. Untuk hortikultura (durian, rambutan dan mangga) produksinya cukup tinggi, dengan produk olahan berupa lempok (dodol) yang sudah dipasarkan ke Batam. Untuk perkebunan, produk unggulan lokal yang dimiliki berupa cengkeh, kelapa, dan karet. Untuk cengkeh sudah dipasarkan ke Jawa Timur oleh penampung lokal, sedangkan karet sudah dipasarkan sampai Kalimantan. Produk unggulan yang ada yaitu tikar pandan yang terdapat di Kecamatan Serasan dengan pemasaran sampai ke luar negeri.



Pemasaran rotan sudah sampai di Kota Batam. Potensi perkebunan lainnya adalah kembang semangkok yang terdapat di Gunung Ranai. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Natuna antara lain Pulau Senoa, Pantai setanau dan sengiapi, Pantai teluk depih, Pantai batu kasah, Pantai teluk selahang, Pantai teluk buton, Pantai sisi, Pulau kembang, Batu seduyung, dan Batu catur.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Natuna ditujukan untuk dikembangkan sebagai jalur perdagangan laut, sentra perikanan dan kelautan serta wisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Natuna diuraikan sebagai berikut:

1. Fasilitasi pembangunan bandara baru;
2. Fasilitasi pembangunan pelabuhan skala internasional;
3. Penyediaan transportasi antara Natuna dan Anambas;
4. Fasilitasi pembangunan pusat logistik kapal perikanan;
5. Pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan perikanan, manajemen dan pemasaran;
6. Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan;
7. Pembangunan wisata bahari;
8. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
9. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara;
10. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);
11. Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau); dan
12. Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM.

### 4) Kabupaten Lingga

Kabupaten Lingga memiliki beragam potensi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi di bidang pertanian dan perkebunan juga ditunjang oleh potensi ketersediaan sumber daya air yang melimpah, dan dapat didayagunakan lebih lanjut antara lain untuk kepentingan irigasi pertanian maupun sumber air baku bagi kegiatan industri. Potensi areal tanam atau potensi lahan di Kabupaten Lingga sangat besar untuk dikembangkan. Namun pada kenyataannya potensi lahan yang digunakan masih sangat minim dan kurang optimal sehingga produksi yang dihasilkan masih rendah.

Selain memiliki potensi produksi dan potensi lahan, Kabupaten Lingga juga memiliki potensi tenaga kerja yang dapat diserap sebagai tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan. Kabupaten Lingga dapat dikembangkan menjadi salah satu sentra produksi produk pangan pertanian yang dapat menyangga dan meningkatkan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Riau. Letak geografis Kabupaten Lingga yang berada pada peri-peri Kawasan Strategis



Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun memberikan peluang pemasaran yang sangat besar untuk produk pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan dari Kabupaten Lingga. Jika memungkinkan hasil pertanian dan perkebunan tersebut dapat dieksport ke luar negeri melalui kawasan FTZ BBK tersebut.

Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut antara lain: Bentang pesisir pantai, Bentang laut, dan Kolam air dan dasar laut. Potensi wisata berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan antara lain: Pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya, Perairan sungai dan danau, Perkebunan, Pertanian, bentang alam khusus seperti goa, padang pasir dan sejenisnya. Potensi wisata budaya berupa hasil olah cipta, rasa dan kausa manusia sebagai makhluk budaya yang meliputi: Cagar budaya, Perkampungan tradisional, Museum, Adat istiadat, dan Kesenian. Potensi wisata Buatan Manusia yang berupa kreasi artifisial dan kegiatan manusia meliputi: Taman bermain, Tugu, dan Fasilitas rekreasi dan hiburan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Lingga ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pertanian, perkebunan dan peternakan serta wisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Lingga diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan pusat pertanian, perkebunan dan peternakan terpadu;
2. Pengembangan pusat wisata sejarah dan budaya;
3. Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan;
4. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, air bersih, listrik dan pelabuhan;
5. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara;
6. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);
7. Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau);
8. Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM; dan
9. Fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

### 5) Kabupaten Kepulauan Anambas

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi perikanan dan kelautan dengan daerah tangkapan yang luas, dimana 98,65% dari luasan Kabupaten Kepulauan Anambas berupa lautan. Di samping itu, sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang bersifat pulih, sehingga ketersediaan potensi perikanan selalu ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Selain perikanan tangkap, kabupaten ini juga memiliki potensi budidaya perikanan.



Kabupaten Kepulauan Anambas juga kaya dengan keindahan pantai dan terumbu karang. Kawasan objek wisata tersebut dapat dijumpai di sejumlah kawasan objek wisata. Objek wisata laut/pantai seperti terumbu karang di Kecamatan Jemaja; Obyek wisata air terjun seperti Air Terjun Ulu Maras, Air Terjun Temurun Air Terjun Air Bini, Air Terjun Neraja di Jemaja; Wisata bahari dan minat khusus seperti di Pulau Kelong. Pulau Batu Alam, Pulau Penjalin, Pulau Punjong, Pulau Bawah, Pulau Tukong, Pulau Semut, Pulau Berhala, Pulau Rengek, Pulau Langok, Pulau Tukong Berlayar, Pantai Melang, Pantai Kusik, Pantai Telagak, Pantai Temawan, dan Pantai Selat Rangsang. Terdapat pula wilayah konservasi laut yaitu di Penjalin, Pulau Durai, dan Pulau Pahat.

Pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan untuk dikembangkan sebagai sentra perikanan dan wisata. Kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan sentra perikanan rakyat;
2. Peningkatan penguasaan teknologi perikanan dan kelautan;
3. Bantuan peralatan dan teknologi perikanan dan kelautan (bantuan kapal, alat tangkap);
4. Pemberian modal dan pemasaran produk perikanan dan kelautan;
5. Pengembangan wisata bahari dan ekowisata berstandar internasional;
6. Pembangunan jalan, jembatan, air bersih, listrik dan pelabuhan;
7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana transportasi laut dan udara;
8. Peningkatan akses telekomunikasi informasi dan komunikasi (tiap pulau ada signal);
9. Pembangunan Kepri terang (listrik masuk pulau);
10. Jaminan ketersediaan dan penyaluran BBM; dan
11. Fasilitasi dan pengembangan UMKM.

### 6) Kota Batam

Kota Batam menjadi pusat kegiatan pelayanan perkotaan dengan ditetapkannya Kota Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dalam RTRWN. Batam Center merupakan pusat kota dalam sistem pusat pelayanan kota, yang berperan sebagai pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa dan industri. Sub pusat kota tersebar di beberapa wilayah kota termasuk di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Belakang Padang, dan Pulau Buluh dengan peran masing-masing baik sebagai sub pusat pelayanan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Potensi industri di Kota Batam lebih kurang 29 Kawasan Industri di Kota Batam yang tersebar di 6 zona peruntukan Industri yang telah dikembangkan di Kota Batam. Lebih dari 100 industri perkapalan beroperasi



di Kota Batam yang tersebar di Tanjung Uncang, Sagulung, Sekupang, Batu Ampar, dan Kabil.

Kota Batam merupakan 3 besar pintu masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah Jakarta dan Bali. Setiap tahun lebih kurang 1,9 juta wisatawan asing berkunjung ke Batam. Pulau-pulau kecil di wilayah Utara Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya seperti Pulau Lengkana, Pulau Air Asam, Pulau Air Manis, Pulau Leroy, Pulau Sekila (Kec. Belakang Padang), Pulau Puteri (Kec. Nongsa). Pulau-pulau kecil di wilayah Selatan Kota Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari dan eko-wisata termasuk wisata budaya. Memiliki lokasi untuk Rekreasi pantai, terumbu karang, olahraga air, spot pemancingan Kawasan Perairan Pulau Abang dan Pulau Petong.

Pengembangan wilayah di Kota Batam ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat hubungan logistik internasional, Pariwisata, Industri kedirgantaraan, industri digital dan kreatif, *international trade and finance center*. Kebijakan pengembangan wilayah Kota Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Pengembangan jalur transportasi lokal dan internasional;
2. Pembangunan jalan, jembatan dan drainase;
3. Pembangunan infrastruktur utama dan penunjang kegiatan industri;
4. Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus);
5. Pengembangan industri galangan kapal, jasa kepelabuhan, pergudangan, offshore, dan elektronik;
6. Pengembangan pelabuhan logistik;
7. Pengembangan kawasan industri dan pariwisata Galang Rempang;
8. Manjadikan Batam sebagai tujuan utama wisata MICE di Indonesia;
9. Fasilitasi dan percepatan pembangunan jembatan Batam-Bintan; dan
10. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

### 7) Kota Tanjungpinang

Kota Tanjungpinang memiliki potensi produk pertanian hortikultura, peternakan yang tidak memerlukan lahan luas. Potensi lahan kosong di sekitar permukiman pinggiran kota masih ada menjadi peluang untuk peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura untuk memasok kebutuhan penduduk kota. Peluang penyerapan hasil produk pertanian hortikultura (buah dan sayuran) di kota cukup tinggi. Permasalahan yang ditemui yaitu pemanfaatan lahan kosong terutama di kawasan pinggiran kota arah Kijang, Senggarang dan pulau Dompak yang belum optimal, dan terbatasnya pengetahuan dan keterampilan penduduk untuk bercocok tanam memanfaatkan lahan produktif di perkotaan.



Di sektor perikanan, potensi berupa ikan segar hasil budidaya sebagai bahan makanan untuk wisata kuliner di Kota Tanjungpinang serta untuk industri olahan hasil perikanan (ciri khas oleh-oleh dari Kota Tanjungpinang). Permasalahan yang dihadapi yaitu belum berkembangnya kegiatan budidaya ikan pada kawasan daratan maupun perairan di kota Tanjungpinang, skala produksi olahan perikanan masih terbatas (skala rumahtangga) karena keterbatasan modal, serta kontinuitas bahan produksi yang belum terjamin.

Pengembangan wilayah di Kota Tanjungpinang ditujukan untuk dikembangkan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, wisata Budaya Melayu dan industri halal. Kebijakan pengembangan wilayah Kota Tanjungpinang diuraikan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan penataan Pulau Dompak;
2. Fasilitasi dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
3. Pembangunan sarana air bersih dan Pembangunan Bendungan Dompak;
4. Penataan, pembangunan, perluasan jalan dan drainase;
5. Integrasi Pelabuhan di Tanjungpinang (Sri Bintan Pura, Pelabuhan Penyengat, Tanjung Mocoh & Sri Payung Batu 6);
6. Pengembangan Jalan Lingkar antar KPPB di Tanjungpinang-Bintan;
7. Peningkatan Integrasi Pariwisata Tanjungpinang-Bintan;
8. Pengembangan Pulau Penyengat sebagai pusat Budaya Melayu;
9. Pendirian Museum Melayu Center;
10. Pengembangan Industri Halal dan Industri Produk Perikanan di Tanjungpinang; dan
11. Fasilitasi dan pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.



### BAB VI

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJMD periode sebelumnya dan memperhatikan prioritas pemerintah pusat dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat tersebut diusulkan melalui mekanisme forum Musrenbang, namun karena keterbatasan anggaran tidak semua rencana program/kegiatan yang diusulkan dalam Musrenbang tidak dapat diakomodir dalam dokumen RKPD. Oleh karena itu, ditetapkan skala prioritas program dan kegiatan yang dapat dianggarkan.

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2022 terutama diarahkan pada upaya penyelesaian isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan pada Tahun 2022 tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, namun juga bersumber dari luar APBD, yaitu dari APBN dan sumber-sumber lainnya yang datang atas partisipasi masyarakat ataupun dunia usaha.

#### 6.1 Dukungan Program RKPD Terhadap Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 mendukung pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tercantum pada tabel berikut ini.



**Tabel 6.1**

### Dukungan Program RKPD Tahun 2022 Terhadap Pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Program
1. Pembangunan manusia yang berkualitas, unggul dan berbudaya	<p>a. Peningkatan layanan kesehatan yang responsif dan komprehensif melalui: Pembudayaan hidup bersih dan sehat pada masyarakat didukung peningkatan pelayanan sanitasi, peningkatan gizi ibu dan anak, pencegahan penyakit menular; Penyediaan kajian pengembangan sarana dan prasarana kesehatan layanan dasar dan rujukan.</p> <p>b. Pemenuhan standar layanan rumah sakit dan digitalisasi layanan kesehatan berbasis IT; dan Peningkatan kompetensi dan fasilitasi pendidikan bagi tenaga medis.</p> <p>c. Peningkatan kualitas pendidikan menengah melalui: pembangunan sarana dan prasarana pendidikan; fasilitasi peningkatan kompetensi dan fasilitasi pendidikan bagi guru; dan penyediaan beasiswa</p> <p>d. Peningkatan rehabilitasi sosial dasar didalam panti dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan warga terdampak covid-19</p> <p>e. Pengembangan kebudayaan dan penyediaan prasarana pusat kebudayaan melayu Kepri</p>	<p>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</p> <p>Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan Pendidikan</p> <p>Menurunnya angka kemiskinan</p> <p>Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pelestarian Budaya Melayu</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li><li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li><li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</li><li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li><li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemberdayaan Sosial</li><li>• Program Rehabilitasi Sosial</li><li>• Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengembangan Kebudayaan</li><li>• Program Pengembangan Kesenian Tradisional</li><li>• Program Pembinaan Sejarah</li><li>• Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya</li><li>• Program Pengelolaan Permuseuman</li><li>• Program Pembinaan Perpustakaan</li></ul>



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Program
	f. Pemberdayaan ekonomi dan partisipasi politik perempuan, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</li><li>• Program Perlindungan Perempuan</li></ul>
<b>2. Peningkatan Kesejahteraan ekonomi yang Merata</b>	<p>Fasilitasi pembangunan industri pengolahan ikan, industri pengolahan rumput laut, dan penguatan industri maritim.</p> <p>Peningkatan ekspor dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat</p>	Terwujudnya peningkatan PDRB pada sektor konstruksi, industri pengolahan, dan sektor perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</li><li>• Program Pengendalian Izin Usaha Industri</li><li>• Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li><li>• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li><li>• Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</li><li>• Program Pengembangan Ekspor</li><li>• Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</li><li>• Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li></ul>
	Peningkatan kualitas koperasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah melalui penguatan kompetensi, digitalisasi UMKM, dan internasionalisasi produk UMKM.		<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam</li><li>• Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi</li><li>• Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</li><li>• Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian</li><li>• Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</li><li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</li><li>• Program Pengembangan UMKM</li></ul>
	Peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja, serta perlindungan tenaga kerja.	Terwujudnya Penciptaan Lapangan Baru Kerja dan Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Perencanaan Tenaga Kerja</li><li>• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li><li>• Program Penempatan</li></ul>



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Program
	Peningkatan investasi melalui kemudahan layanan perizinan, insentif investasi, dan pengkoordinasian penyediaan infrastruktur penunjang investasi	Investasi	<p>Tenaga Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Hubungan Industrial</li><li>• Program Pengawasan Ketenagakerjaan</li><li>• Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</li><li>• Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li><li>• Program Promosi Penanaman Modal</li><li>• Program Pelayanan Penanaman Modal</li><li>• Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</li><li>• Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal</li></ul>
	Peningkatan ketahanan pangan, pengembangan pertanian dan perkebunan, serta pemberdayaan petani	Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perkebunan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</li><li>• Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li><li>• Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li><li>• Program Penyuluhan Pertanian.</li><li>• Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li><li>• Program Penanganan Kerawanan Pangan</li><li>• Program Pengawasan Keamanan Pangan</li></ul>
	Peningkatan penggunaan teknologi perikanan, penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan, penyediaan sarana penunjang kegiatan perikanan, serta pembinaan nelayan dan pembudidaya ikan	Terwujudnya Optimalisasi Sektor Perikanan dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil</li><li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li></ul>



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Program
			<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li><li>• Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</li><li>• Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</li></ul>
	Diversifikasi wisata budaya, alam dan kuliner, penerapan wisata ramah kesehatan, dan peningkatan promosi wisata	Terwujudnya Peningkatan sektor pariwisata	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li><li>• Program Pemasaran Pariwisata</li><li>• Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li><li>• Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</li></ul>
3. Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangkit listrik dan jaringan baru, pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan, pemanfaatan sumberdaya pertambangan secara ekonomis dan berkelanjutan	Terwujudnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Aspek Kegeologian</li><li>• Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara</li><li>• Program Pengelolaan Energi Terbarukan</li><li>• Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</li></ul>
	Peningkatan pembangunan pelabuhan (ro-ro, barang dan bongkar muat) dan gudang logistik, penyediaan transportasi antar pulau dan antar kabupaten.	Terwujudnya Pembangunan Antar Pulau dan Pesisir	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li><li>• Program Pengelolaan Pelayaran</li></ul>
	Sinkronisasi pembangunan berwawasan lingkungan, dan pengawasan pelaksanaan dokumen lingkungan hidup dalam rangka pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.	Terwujudnya Penurunan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li><li>• Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li><li>• Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</li><li>• Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin</li></ul>



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Program
			<p>Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</li><li>• Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</li><li>• Program Pengelolaan Persampahan</li></ul>
		Terwujudnya Hutan Lestari	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Hutan</li><li>• Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan</li></ul>
4. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan yang Optimal	Peningkatan keterbukaan informasi publik, smart service (e-government, layanan berbasis aplikasi)	Terwujudnya Peningkatan Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</li><li>• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li><li>• Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</li><li>• Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial</li></ul>
	Peningkatan kualitas dan sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan untuk menunjang akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li><li>• Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>• Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</li></ul>
	Peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah		<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>• Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li></ul>
	Penguatan kematangan organisasi pemerintah daerah, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah		<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Perbatasan</li><li>• Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum</li><li>• Program Kebijakan</li></ul>



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Program
			<p>Administrasi Pembangunan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa Program Kesejahteraan Rakyat</li><li>• Program Perekonomian Dan Pembangunan Program Penataan Organisasi</li><li>• Program Pelayanan Penghubung</li><li>• Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah</li></ul>
	Penggalian potensi Pendapatan Asli daerah	Terwujudnya Peningkatan PAD	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li></ul>
	Perbaikan sistem manajemen ASN, mencakup penataan dan penempatan ASN berbasis merit system, peningkatan kompetensi pegawai dan fasilitasi pendidikan, dan peningkatan sarana prasarana dikat ASN.	Terwujudnya Managemen ASN yang Profesional	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Kepegawaian Daerah</li><li>• Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li></ul>
	Peningkatan kualitas pembangunan desa	Terwujudnya Masyarakat Desa yang Tangguh dan Adaptif	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penataan Desa</li><li>• Program Administrasi Pemerintahan Desa</li><li>• Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat</li></ul>
	Penguatan ketangguhan bencana untuk menunjang ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Terwujudnya Pemerintah Provinsi Kepri yang Tanggap, Tangkas, dan Tangguh dalam menghadapi bencana	Program Penanggulangan Bencana
	Pengembangan wawasan kebangsaan dan pencegahan konflik sosial untuk menunjang kondusifitas wilayah	Terwujudnya Peningkatan Harmonisasi Antar Umat Beragama	<ul style="list-style-type: none"><li>• Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</li><li>• Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta</li></ul>



Prioritas RKPD	Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2022	Sasaran	Program
			<p>Budaya Politik</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li><li>• Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</li><li>• Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</li></ul>

### 5.2 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SPM

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 mendukung pencapaian target SPM. Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SPM tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.2**  
**Dukungan Program RKPD Tahun 2022 Terhadap Pencapaian Target SPM**  
**Provinsi Kepulauan Riau**

No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target 2022	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
1.	<b>Pendidikan</b>				
	a. pendidikan menengah;	Persentase Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	84,80	Program Pengelolaan Pendidikan
	b. pendidikan khusus;	Persentase Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk dissabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.	%	100,00	Program Pengelolaan Pendidikan
2.	<b>Kesehatan</b>				
	a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi;	Persentase Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat



No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target 2022	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
	b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi;	Percentase Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100,00	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3.	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
	a. pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota;	Percentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	100,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
	b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota;	Percentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	%	100,00	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
4.	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				
	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi;	Percentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	Program Pengembangan Perumahan
	b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;	Percentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	Program Pengembangan Perumahan
5.	<b>Ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat</b>				
	a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi;	Percentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	%	100,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
6.	<b>Sosial</b>				
	a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;	Percentase Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial



No	Urusan / Jenis Pelayanan SPM	Indikator SPM	Satuan	Target 2022	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SPM
		sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti			
	b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;	Percentase Warga Negara anak telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;	Percentase Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan	Percentase Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	%	100,00	Program Rehabilitasi Sosial
	e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi.	Percentase Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	%	100,00	Program Penanganan Bencana

### 5.3 Dukungan Program RKPD Terhadap Pencapaian Target SDGs

Program RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 mendukung pencapaian target SDGs dengan perincian kegiatan masing-masing program telah tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Secara ringkas dukungan Program RKPD terhadap pencapaian target SDGs tercantum pada tabel berikut ini.



**Tabel 6.3**

### **Dukungan Program RKPD Tahun 2022 Terhadap Pencapaian Target SDGs Provinsi Kepulauan Riau**

<b>Tujuan SDGs</b>	<b>Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs</b>
1. <b>Tidak Ada Kemiskinan:</b> Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja.	a. Program Pemberdayaan Sosial b. Program Rehabilitasi Sosial c. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) e. Program Pengembangan UMKM f. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja g. Program Penempatan Tenaga Kerja
2. <b>Menghapuskan Kelaparan:</b> Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan	a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat b. Program Penanganan Kerawanan Pangan c. Program Pengawasan Keamanan Pangan d. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian f. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner g. Program Penyuluhan Pertanian.
3. <b>Kesehatan Yang Baik:</b> Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia.	a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan e. Program Pengendalian Penduduk f. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) g. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) h. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
4. <b>Pendidikan Berkualitas:</b> Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas.	Program Pengelolaan Pendidikan



Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
<b>5. Kesetaraan Gender:</b> Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan.	a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan b. Program Perlindungan Perempuan c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) f. Program Perlindungan Khusus Anak
<b>6. Air Bersih dan Sanitasi:</b> Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.	a. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
<b>7. Energi Terbarukan:</b> Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang.	a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian b. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara c. Program Pengelolaan Energi Terbarukan d. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
<b>8. Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi:</b> Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.	a. Program Perencanaan Tenaga Kerja b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja c. Program Penempatan Tenaga Kerja d. Program Hubungan Industrial e. Program Pengawasan Ketenagakerjaan f. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan g. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting h. Program Pengembangan Ekspor i. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen j. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri k. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam l. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi m. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi n. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian o. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi p. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) q. Program Pengembangan UMKM r. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal s. Program Promosi Penanaman Modal t. Program Pelayanan Penanaman Modal u. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal v. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi



Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	Penanaman Modal w. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata x. Program Pemasaran Pariwisata y. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual z. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi.	a. Program Penyelenggaraan Jalan b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang c. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya d. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) e. Program Pengelolaan Pelayaran f. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri g. Program Pengendalian Izin Usaha Industri h. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional i. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
10. Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
11. Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh.	a. Program Pengembangan Perumahan b. Program Kawasan Permukiman c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) d. Program Penanggulangan Bencana e. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
12. Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan.	a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) d. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) e. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup f. Program Pengelolaan Persampahan g. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian



Tujuan SDGs	Program RKPd yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	h. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara i. Program Pengelolaan Energi Terbarukan j. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
13. Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup b. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
14. Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya	a. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan e. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
15. Kehidupan di Darat: Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan kenyekaragaman hayati.	a. Program Pengelolaan Hutan b. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
16. Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata.	a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial f. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum g. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah h. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan



Tujuan SDGs	Program RKPD yang Mendukung Pencapaian Target SDGs
	<p>Pembangunan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah</li><li>j. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>k. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</li><li>l. Program Penyelenggaraan Pengawasan</li><li>m. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi</li><li>n. Program Kepegawaian Daerah</li><li>o. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li><li>p. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</li><li>q. Program Perlindungan Perempuan</li><li>r. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li><li>s. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</li></ul>
<b>17. Kemitraan:</b> Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Program Pengembangan Eksport</li><li>b. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</li><li>c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li></ul>



### 5.4 Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah

Ringkasan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 diuraikan sebagai berikut.

#### 1. Pendidikan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pendidikan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.4**

**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pendidikan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengelolaan Pendidikan	1. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK 2. Angka partisipasi kasar (APK) SLB 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK 4. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK 6. Angka Putus Sekolah SMA/SMK 7. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah 8. Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	% % % % % % ratio %	97,43 84,00 98,00 78,00 84,80 0,38 33,75 95,94	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</li><li>• Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</li><li>• Pengelolaan Pendidikan Khusus</li></ul>
Program Pengembangan Kurikulum	1. Jumlah SMK yang Terevitalisasi 2. Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum 3. Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	% % %	24,32 60,00 30,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</li><li>• Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus</li></ul>
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	724,76	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</li></ul>



				<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</li></ul>
--	--	--	--	--

## 2. Kesehatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kesehatan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.5**

### **Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kesehatan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate) 2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup 3. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup 4. Capaian ODHA yang mendapatkan ARV 5. Eliminasi malaria (kabupaten/kota) 6. Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib 7. Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD 8. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas $\geq 80\%$ Puskesmas 9. Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS) 10. Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS 11. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial 12. Persentase Puskesmas terakreditasi 13. Persentase Rumah Sakit terakreditasi	% per 1.000 Kematian per 100.000 Kematian % % % % % % % % % %	90 14 125 64 42,86 78,5 81 57 2 89 92 96,00 85	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</li><li>• Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</li><li>• Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</li><li>• Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
	14. Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 15. Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan 16. Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan 17. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 18. Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib 19. Status Akreditas RSUD Provinsi Engku Haji Daud 20. Status Akreditas RSUD Raja Ahmad Tabib	% % % % Status Status Status	93,60 100 100 18,4 Satelit Paripurna Paripurna	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	% % %	52,00 75% 30,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</li><li>• Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</li></ul>
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	86,00	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	71,43	<ul style="list-style-type: none"><li>• Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi</li><li>• Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi</li></ul>

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.6**

**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Jumlah titik rawan banjir	titik	15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li></ul>
	Persentasi Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	3,53	
	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	53,69	



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	100	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan pelayanan air limbah	%	89,34	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Cakupan pelayanan drainase	%	48,1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	100	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	100	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan Jalan	Presentase Panjang Jalan Berkondisi Mantap	%	76,76	Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	9,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi</li><li>• Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</li></ul>
Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	%	100	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan pelayanan Persampahan	%	67,80	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	%	70%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi</li><li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang</li><li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</li><li>• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi</li></ul>
	persentase informasi/kesesuaian tata ruang.	%	40%	
	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	43%	

#### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu sebagai berikut:



**Tabel 6.7**

### **Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</li><li>• Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi</li></ul>
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	
Program Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"><li>• Persentase RTLH yang dibenahi</li><li>• Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani</li></ul>	%	10,00 27,45	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</li><li>• Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha</li></ul>
Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Unit	12.000	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Usaha	5	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah



### 5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.8**

#### **Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penindakan pelanggaran Ketenteraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	%	41,67	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur</li><li>• Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi</li></ul>
	Jumlah Demonstrasi yang Aman di Lingkungan Pemprov	%	100	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kabupaten/kota yang tersedianya Peta Rawan Kebakaran	%	60,00	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
Program Penanggulangan Bencana	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Indeks	0,63	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</li><li>• Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li><li>• Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li><li>• Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</li></ul>
	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Indeks	0,53	
	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Indeks	0,34	
	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Indeks	0,45	
	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Indeks	0,20	
	Pengembangan Sistem Pemulihan	Indeks	0,20	



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,46	

## 6. Sosial

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan sosial yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.9**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sosial**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	15,48	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	91,60	
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</li><li>• Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti</li><li>• Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</li><li>• Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti</li><li>• Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</li></ul>
	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	
	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	25,00	



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	
	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,42	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	5,84	
	Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63	
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	33,33	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi



### 7. Tenaga kerja

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.10**

**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Tenaga Kerja**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	51,28	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi</li><li>• Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja</li><li>• Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah</li><li>• Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi</li></ul>
	Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	Orang	120	
	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	40,00	
Program Penempatan Tenaga Kerja	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	61,00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</li><li>• Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi</li><li>• Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li></ul>
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,55	
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,10	
Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	35	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	100	<ul style="list-style-type: none"><li>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)</li></ul>
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	11,8	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	95,25	
	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	75,5	
Program Perencanaan Tenaga kerja	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	100	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

### 8. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu sebagai berikut:



**Tabel 6.11**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Pencapaian Angaran Responsif Gender (ARG)	%	5,4	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</li><li>• Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</li><li>• Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</li></ul>
	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,75	
	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	11,10	
Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000	44,07	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</li></ul>
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,75	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</li><li>• Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Profil Data Gender dan Anak Provinsi	Data	10	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	73,60	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</li><li>• Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</li></ul>
Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	86,64	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</li></ul>

### 9. Pangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pangan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.12**

#### **Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pangan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	113	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</li><li>• Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</li><li>• Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi</li></ul>
	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	≤11	
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	87,3	



Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	≤10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</li><li>• Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</li></ul>
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	81	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

### 10. Pertanahan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanahan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.13**

#### Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pertanahan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	%	100	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi

### 11. Lingkungan hidup

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.14**

#### Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Laporan Dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</li><li>• Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</li></ul>
Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	85,18	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li></ul>
	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,70	



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	85,15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li></ul>
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,08	
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Data Keanekaragaman Hayati di Kepulauan Riau	Dokumen	1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Pengawasan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3	%	33	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	42,85	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	57,14	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
Program Pengelolaan Persampahan	Target Pengurangan Sampah	%	26%	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
	Target Penanganan Sampah	%	73%	



### 12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.15**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Administrasi**  
**Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	Kab/Kota	7	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Tersedianya buku data kependudukan dan Buku Profil Kependudukan	Buku	2	Penyediaan Profil Kependudukan
Program Pencatatan Sipil	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%	75	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kab/ Kota yang menggunakan database konsolidasi bersih dari kemendagri sebagai data dasar pelayanan reguler administrasi kependudukan	Kab/Kota	7	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi

### 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu sebagai berikut:



**Tabel 6.16**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Percentase aparatur/ pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	25,68	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Percentase Desa /Kelurahan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa/ kelurahan	%	35,01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Program Penataan Desa	Percentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama desa yang difasilitasi	Kerjasama	1	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi

### 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu sebagai berikut:



**Tabel 6.17**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengendalian Penduduk	Contraceptive Fertility Rate	Rasio	49,01	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</li><li>• Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi</li></ul>
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Unmetneed	Rasio	9,50	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</li></ul>
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Indeks	59,30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li><li>• Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</li></ul>

### 15. Perhubungan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perhubungan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.18**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perhubungan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	93,88	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi</li><li>• Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi</li><li>• Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	%	84,62	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi</li><li>• Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi</li><li>• Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</li><li>• Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li></ul>
	Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat (AKDP dan Angkutan Perkotaan)	%	30	



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li></ul>
Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Meningkatnya Layanan Pelayaran	%	63,64	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi</li></ul>
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	89,47	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional</li></ul>
	Persentase Meningkatnya Layanan Penyeberangan	%	66,67	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional</li></ul>
	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan	%	84,62	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan</li><li>• Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi</li><li>• Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li></ul>
	Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi dan dalam Kondisi baik	%	84,62	



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyejaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas</li><li>• Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kotadalam Daerah Provinsi</li><li>• Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional</li><li>• Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional</li><li>• Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional</li><li>• Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional</li><li>• Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional</li><li>• Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional</li><li>• Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional</li></ul>

### 16. Komunikasi dan Informatika

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan komunikasi dan informatika yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.19**

#### Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	78	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Indeks	2,85	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</li><li>• Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</li></ul>

### 17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.20**

#### Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	7.34%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li></ul>
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang diperiksa	%	2,53%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li></ul>
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	%	4,67%	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Persentase Koperasi/UMKM mengikuti Pelatihan	%	9,80%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li></ul>
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang mendapat Pemberdayaan	%	30.18%	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rasio Wirausaha Baru	%	28.02%	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	23.30%	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah

### 18. Penanaman Modal

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan penanaman modal yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.21**

#### Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Penanaman Modal

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	90	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</li><li>• Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</li></ul>
Program Promosi Penanaman Modal	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	7%	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	85	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</li></ul>
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	83,15	
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase ketersediaan data/informasi perkembangan investasi di Kepulauan Riau	%	100	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi



### 19. Kepemudaan dan olah raga

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kepemudaan dan olahraga yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.22**

**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,09	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi</li><li>• Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi</li></ul>
	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	5,05	
Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/nasional/internasional yang memperoleh medali emas	Atlit	0	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</li><li>• Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga</li><li>• Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional</li><li>• Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</li></ul>
	Cakupan pembinaan atlet muda	%	0,64	
	Cakupan pembinaan olahraga	%	19,23	
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	38,09	
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Anggota Pramuka dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	8,43	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

### 20. Statistik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan statistik yaitu sebagai berikut:



**Tabel 6.23**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Statistik**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

### 21. Persandian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan persandian yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.24**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Persandian**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	310/455	<ul style="list-style-type: none"><li>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</li><li>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</li></ul>

### 22. Kebudayaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.25**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kebudayaan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	16,75%	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li></ul>
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang mejadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas)	%	0,08%	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Program Pembinaan Sejarah	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompетensi	%	20,00%	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	8,53%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</li><li>• Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</li></ul>
Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	%	2,84%	Pengelolaan Museum Provinsi

### 23. Perpustakaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perpustakaan yaitu sebagai berikut:



**Tabel 6.26**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perpustakaan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pembinaan Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	8,67	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</li><li>• Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</li></ul>
	Percentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	0,51%	
	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	0,15%	
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,07%	
	Percentase Perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	%	0,93	
	Keterlibatan masyarakat dalam KIE	Orang	250	
Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0075	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</li><li>• Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</li><li>• Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi</li></ul>

### 24. Kearsipan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kearsipan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.27**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kearsipan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	Skor	11,13	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</li><li>• Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</li></ul>
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	27,5	<ul style="list-style-type: none"><li>Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun</li><li>Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota</li></ul>
Program Perizinan Penggunaan Arsip	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di LKD Provinsi yang sesuai dengan SNPK	Skor	5	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi

## 25. Kelautan dan Perikanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kelautan dan perikanan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.28**

### Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	3	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</li><li>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</li><li>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li></ul>
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	307.076,60	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</li><li>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
				<p>Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</li><li>• Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan dimiliki oleh Nelayan Kecil</li><li>• Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas</li><li>• Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</li><li>• Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</li><li>• Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas</li><li>• Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT</li><li>• Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas</li></ul> <p>Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</p>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	26.491,92	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing</li><li>• Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</li></ul>
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90,00	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	1.334,88	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</li><li>• Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li></ul>

## 26. Pariwisata

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pariwisata yaitu sebagai berikut:



**Tabel 6.29**

### Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pariwisata

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,3	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi</li><li>• Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi</li><li>• Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi</li><li>• Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li></ul>
	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,7	
	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.	%	22,70%	
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Mancanegara	370.500	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Wisatawan Nusantara	1.988.600	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	2%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif</li><li>• Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</li></ul>
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Prosentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	3%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan</li><li>• Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif</li></ul>



## 27. Pertanian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan pertanian yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.30**

**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Pertanian**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,20%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</li><li>• Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</li><li>• Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi</li><li>• Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi</li></ul>
	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	58,32%	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,35%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penataan Prasarana Pertanian</li></ul>
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	0,74%	
	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	2,8%	
Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi	Pelaku usaha	1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</li></ul>
Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	62,00%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li><li>• Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan</li></ul>
	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	58,50%	



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
				<ul style="list-style-type: none"><li>dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi</li><li>• Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan</li><li>• Kesejahteraan Hewan</li></ul>
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%	38,0%	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	%	74,85%	
	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%	20%	
Program Penyuluhan Pertanian	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	99,88	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</li><li>• Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</li></ul>
	Persentase Penyuluhan yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	40%	

## 28. Kehutanan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan kehutanan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.31**

### **Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Kehutanan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	27,10	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</li><li>• Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan</li></ul>
	Rehabilitasi Lahan Kritis	ha	5 ha	



				<p>Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</li><li>• Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</li><li>• Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</li><li>• Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi &lt;6000 m<sup>3</sup>/Tahun</li></ul>
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	500	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

## 29. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan energi dan sumberdaya mineral yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.32**

**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah	Kab/Kota	2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</li><li>• Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	20%	
	Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	%	28,57%	
Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	13,00	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	%	95,50	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi</li><li>• Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi</li><li>• Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen dan Penatausahaan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan</li></ul>
	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100%	
	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	98,00	



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
				<p>oleh Daerah Provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi</li><li>• Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Majoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri</li><li>• Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</li></ul>
Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap Pendapatan Daerah	%	1,5	Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil

### 30. Perdagangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perdagangan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.33**

#### **Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perdagangan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan	%	50%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
	Perdagangan			<p>Minuman Beralkohol(SIUP-MB) bagi Distributor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar</li><li>• Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</li></ul>
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	70	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Nilai Inflasi	%	3,14+1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</li><li>• Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan</li><li>• Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</li></ul>
Program Pengembangan Ekspor	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	3,5	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
Program Standardisasi dan Perlindungan	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standaar pada	%	20%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Konsumen	saat dilakukan Pengawasan			<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</li></ul>
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	80	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri</li><li>• Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri</li><li>• Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</li></ul>

### 31. Perindustrian

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan perindustrian yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.34**

#### **Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Perindustrian**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Miliar Rp	38,5	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Izin Usaha Industri	%	60	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi

### 32. Transmigrasi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada urusan transmigrasi yaitu sebagai berikut:



**Tabel 6.35**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Transmigrasi**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Jumlah rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	Kawasan Permukiman	1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	Lahan	700	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Jumlah satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	Kawasan Permukiman	1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan

### 33. Sekretariat Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Daerah yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.36**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sekretariat Daerah**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	20	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual</li><li>• Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar</li><li>• Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar</li></ul>



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	90%	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian</li><li>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam</li><li>Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD</li></ul>
Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8.2	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</li><li>Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik</li><li>Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</li></ul>
Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	90%	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah</li><li>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</li></ul>
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	80,65	<ul style="list-style-type: none"><li>Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan</li><li>Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja</li></ul>
Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100	<ul style="list-style-type: none"><li>Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan</li><li>Fasilitasi Bantuan Hukum</li></ul>
Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase lokasi prioritas dan PKSN yang didata/dikaji/diedukasi dalam pengembangan kawasan perbatasan	%	100	<ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</li><li>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</li><li>Monitoring dan Evaluasi</li></ul>
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3,03	<ul style="list-style-type: none"><li>Pelaksanaan Tugas Pemerintahan</li><li>Pelaksanaan Otonomi Daerah</li><li>Fasilitasi Kerjasama Daerah</li></ul>
Program Pelayanan Penghubung	Persentase Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepri didalam dan diluar Provinsi Kepri Yang difasilitasi	%	100	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung



### 34. Sekretariat DPRD

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat DPRD yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.37**

#### Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Urusan Sekretariat DPRD

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	72	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD</li><li>• Pembahasan Kebijakan Anggaran</li><li>• Peningkatan Kapasitas DPRD</li><li>• Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</li><li>• Fasilitasi Tugas DPRD</li></ul>
	Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100%	

### 35. Unsur Penunjang Perencanaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang perencanaan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.38**

#### Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Perencanaan

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	82%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</li><li>• Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</li><li>• Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</li></ul>
	Rancangan RKPD Tahun n	Dokumen	1	
Program Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</li><li>• Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</li><li>• Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</li></ul>
	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%	95%	



### 36. Unsur Penunjang Keuangan Daerah

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang keuangan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.39**

**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Keuangan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	90%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</li><li>• Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</li><li>• Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</li><li>• Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</li><li>• Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</li><li>• Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</li></ul>
	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100%	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	4,89%	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Jumlah Inovasi Pelayanan	Jenis Pelayanan	1	
	Jumlah Pengguna Sistem Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah	Pengguna Sistem Aplikasi	15.300	
	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	22	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang Bersertifikat (Tanah)	%	57	Pengelolaan Barang Milik Daerah



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah	%	95,58%	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

### 37. Unsur Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.40**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Kepegawaian**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	44,63	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</li><li>Mutasi dan Promosi ASN</li><li>Pengembangan Kompetensi ASN</li><li>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</li></ul>
	Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	73	
	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	95	

### 38. Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.41**  
**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%	32	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan Kompetensi Teknis</li><li>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</li></ul>



### 39. Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.42**

**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangaan	%	75%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</li><li>• Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</li><li>• Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</li><li>• Pengembangan Inovasi dan Teknologi</li></ul>
	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	35%	

### 40. Unsur Penunjang Pengawasan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur penunjang pengawasan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.43**

**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pengawasan**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN	%	100%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</li><li>• Pendampingan dan Asistensi</li></ul>
	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN	%	100%	
	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Skor	Hijau	
	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko di atas Level 2	%	7%	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<10%	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyelenggaraan Pengawasan Internal</li><li>• Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</li></ul>
	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	80%	



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	55%	
	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB	%	75%	

### 41. Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu sebagai berikut:

**Tabel 6.44**

**Program, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Kegiatan Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik**

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik antar Agama	%	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu (PILKADA, PILEG, PILPRES)	%	0	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik



Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target 2022	Kegiatan
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan dan LSM Yang Sesuai Dengan Aturan	%	38	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

#### 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan PermenPAN Nomor 09 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indikator* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Berdasarkan PermenPAN No. 53 Tahun 2014, IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 dijabarkan dari misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 tertuang pada Tabel 7.1.

**Tabel 7.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD 2022
1	PDRB per Kapita ADHK	Juta Rupiah	80,07
2	Indeks Gini	Indeks	0,332
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,8 - 5,6
4	Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	3.297
5	Angka Kemiskinan	%	6.01
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,7
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,23
8	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	62,9
9	Rasio Konektivitas	Rasio	41,33
10	Kontribusi Sektor Konstruksi terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	55,744
11	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	106.079
12	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	21.570
13	Persentase Peningkatan PAD	%	6,09



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target RPJMD 2022
14	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.387
15	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	2.177
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi	Indeks	69,73
17	Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	27,10
18	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.6840 (Desa Berkembang)
19	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,27
20	Prevalensi Stunting	%	15,80
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92
22	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	10,14
23	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,80
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,20
25	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	65,50
26	Keterbukaan Informasi	Indeks	78
27	Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB
28	Indeks Sistem Merit (Penilaian Sistem Merit)	Indeks	Baik (285)
29	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,37
30	Nilai Ekonomi Budaya	Nilai	28,11
31	Nilai Warisan budaya	Nilai	48,84
32	Nilai Ekspresi Budaya	Nilai	1,49
33	Nilai Budaya Literasi	Nilai	69
34	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	74,46
35	Rasio Konektivitas Angkutan Darat	Rasio	18
36	Rasio Konektivitas Angkutan Laut	Rasio	31,82

## 7.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menyajikan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan sebagai indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD untuk tahun 2022. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah masa kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan target Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 tertuang pada Tabel 7.2.



**Tabel 7.2**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan**  
**Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>		
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,7
2	Laju Inflasi	%	3,14+1
3	Indeks Gini	Indeks	0.332
4	Angka Kemiskinan	%	6.01
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	76.7
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>		
	<b>Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar</b>		
	<b>Urusan Pendidikan</b>		
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK	%	84,80
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	%	98,00
3	Angka partisipasi kasar (APK) SLB	%	84,00
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/MAK	%	78,00
5	Angka Putus Sekolah SMA/SMK	%	0,38
6	Ruang kelas SMA/SMK/SLB dalam kondisi baik	%	95,94
7	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP ke SMA/SMK	%	97,43
8	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Rasio	33,75
9	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Literasi Minimum	%	60,00
10	Persentase Siswa dengan Nilai Kompetensi Numerasi Minimum	%	30,00
11	Jumlah SMK yang Terevitalisasi	%	24,32
12	Rasio Guru SMA/SMK terhadap Murid Sekolah Menengah	Rasio	724,76
13	Persentase SMA/SMK/SLB Swasta yang Memperoleh Izin	%	100,00
	<b>Urusan Kesehatan</b>		
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000 Kematian	125
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup	per 1.000 Kematian	14
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	18,4
4	Persentase warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100
5	Persentase warga negara pada kondisi kejadian luar biasa Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
6	Jumlah Kabupaten/kota sehat (KKS)	Kab/Kota	2,00
7	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Success Rate)	%	90,00
8	Capaian ODHA yang mendapatkan ARV	%	64,00
9	Eliminasi malaria (kabupaten/kota)	%	42,86
10	Persentase Usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	%	93,60
11	Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (pandu) PTM di atas >= 80% Puskesmas	%	57,14
12	Persentase penduduk dengan kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional/KIS	%	89,00
13	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	96,00
14	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	85,00
15	Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat essensial	%	92,00
16	Status Akreditasi RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Paripurna
17	Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Raja Ahmad Tabib	Status	Satelit
18	Indeks Kepuasan Masyarakat pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	78,5
19	Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD EHD	Indeks	81
20	Status Akreditasi RSUD Provinsi Engku Haji Daud	Status	Paripurna
21	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	52,00
22	Persentase tenaga kesehatan di area khusus (IBS, ICU, IGD & Perinatologi) yang tersertifikasi RSUD Provinsi Kepri Tanjungpinang	%	75%
23	Persentase Jumlah Karyawan yang Mengikuti Diklat >20Jam/Tahun pada RSUD Raja Ahmad Tabib	%	30,00
24	Persentase sarana distribusi farmasi cabang yang sesuai standar	%	86,00
25	Persentase kab/kota yang menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	%	71,43
<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
1	Jumlah titik rawan banjir	titik	15
2	Persentasi Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	3,53
3	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk	%	53,69
4	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	%	100
5	Cakupan pelayanan air limbah	%	89,34
6	Cakupan pelayanan drainase	%	48,1
7	Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur pada	%	100



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
	Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi		
8	Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	%	100
9	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	%	100
10	Cakupan pelayanan Persampahan	%	67,80
11	Presentase Panjang Jalan Berkondisi Mantap	%	76,76
12	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	9,00
13	Persentase proses Revisi RTRW Provinsi dan ditetapkan/perda	%	70%
14	persentase informasi/kesesuaian tata ruang.	%	40%
15	Persentase kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruangnya	%	43%
<b>Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>			
1	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100
2	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100
3	Persentase RTLH yang dibenahi	%	10,00
4	Persentasi luas kawasan kumuh 10 - 15 ha yang ditangani	%	27,45
5	Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Unit	12.000
6	Jumlah Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah yang diberi sertifikasi	Usaha	5
<b>Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>			
1	Persentase Penindakan pelanggaran Ketenteraman dan ketertiban serta Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	%	41,67
2	Jumlah Demonstrasi yang Aman di Lingkungan Pemprov	%	100
3	Persentase Kabupaten/kota yang tersedianya Peta Rawan Kebakaran	%	60,00
4	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Indeks	0,63
5	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Indeks	0,53
6	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	Indeks	0,34
7	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	Indeks	0,45
8	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Indeks	0,20



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
9	Pengembangan Sistem Pemulihan	Indeks	0,20
10	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Indeks	0,46
<b>Urusan Sosial</b>			
1	Persentase lembaga/orsos penyelenggara pemberdayaan sosial yang mendapat pembinaan, bantuan, dan/atau fasilitasi	%	15,48
2	Persentase tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang mendapat pembinaan, pelatihan, dan/atau fasilitasi	%	91,60
3	Persentase PMKS penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00
4	Persentase PMKS anak yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00
5	Persentase sarana-prasarana penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang tersedia	%	25,00
6	Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00
8	Persentase tuna sosial dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti	%	100,00
9	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan ekonomi produktif	%	0,42
10	Persentase keluarga miskin yang menerima bantuan kesejahteraan sosial lainnya	%	5,84
11	Persentase PMKS ruang lingkup jaminan kesejahteraan sosial yang mendapatkan bantuan langsung berkelanjutan dan/atau asuransi kesejahteraan sosial	%	31,63
12	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial provinsi yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	%	100,00
13	Persentase taman makam pahlawan yang dikelola	%	33,33
<b>Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>			
<b>Urusan Tenaga kerja</b>			
1	Besaran calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	51,28
2	Jumlah calon tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan baru	Orang	120
3	Persentase lulusan pelatihan yang diterima kerja	%	40,00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
4	Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	61,00
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	67,55
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,10
7	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	35
8	Tingkat upah riil terhadap UMP per jam	%	100
9	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja)	%	11,8
10	Persentase Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	95,25
11	Persentase kasus ketenagakerjaan yang tertangani	%	75,5
12	Persentase dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang berkualitas	%	100
	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>		
1	Persentase Pencapaian Angaran Responsif Gender (ARG)	%	5,4
2	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,75
3	Persentase Keterwakilan Perempuan di Parlemen	%	11,10
4	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,75
5	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	per 100.000	44,07
6	Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan	%	28,75
7	Profil Data Gender dan Anak Provinsi	Data	10
8	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	73,60
9	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	86,64
	<b>Urusan Pangan</b>		
1	Persentase angka kecukupan energi tingkat ketersediaan	%	113
2	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) ditingkat konsumen	%	≤11
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	%	87,3
4	Persentase Daerah Rentan terhadap Kerawanan Pangan	%	≤10
5	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	81
	<b>Pertanahan</b>		
1	Persentase permintaan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dari OPD, Kabupaten/ Kota yang terfasilitasi	%	100



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
	<b>Lingkungan Hidup</b>		
1	Laporan Dokumen Lingkungan Hidup	Dokumen	1
2	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	85,18
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,70
4	Indeks Kualitas Udara Ambien	Indeks	85,15
5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	59,08
6	Data Keanekaragaman Hayati di Kepulauan Riau	dokumen	1
7	Pengawasan terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3	%	33
8	Tingkat kepatuhan terhadap regulasi	%	100
9	Persentase Kab/Kota yang meraih Penghargaan	%	42,85
10	Persentase Perusahaan yang Taat Aturan	%	100
11	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	%	57,14
12	Target Pengurangan Sampah	%	26%
13	Target Penanganan Sampah	%	73%
	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>		
1	Jumlah Kab/ Kota yang tertib melaporkan data pelayanan pendaftaran penduduk	Kab/Kota	7
2	Tersedianya buku data kependudukan dan Buku Profil Kependudukan	Buku	2
3	Persentase ketersediaan data kutipan akta pencatatan sipil (akta lahir, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian)	%	75
4	Jumlah Kab/ Kota yang menggunakan database konsolidasi bersih dari kemendagri sebagai data dasar pelayanan reguler administrasi kependudukan	Kab/Kota	7
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		
1	Persentase aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes	%	25,68
2	Persentase Desa /Kelurahan yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa/ kelurahan	%	35,01
3	Persentase Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar	%	100
4	Jumlah kerjasama desa yang difasilitasi	Kerjasama	0
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>		
1	Contraceptive Fertility Rate	Rasio	49,01
2	Unmetneed	Rasio	9,50
3	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Indeks	59,30
	<b>Perhubungan</b>		
1	Persentase penyediaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	%	93,88
2	Persentase Ketersediaan Prasarana lalu lintas	%	84,62
3	Persentase Ketersediaan Trayek Angkutan Darat (AKDP dan Angkutan Perkotaan)	%	30



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
4	Persentase Meningkatnya Layanan Pelayaran	%	63,64
5	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut	%	89,47
6	Persentase Meningkatnya Layanan Penyeberangan	%	66,67
7	Persentase ketersediaan Pelabuhan Penyeberangan	%	84,62
8	Persentase Pelabuhan Penyeberangan Beroperasi dan dalam Kondisi baik	%	84,62
<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
1	Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai	78
2	Indeks SPBE	Indeks	2,85
<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>			
1	Persentase Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	%	7,34%
2	Persentase Koperasi yang mendapat Pemberdayaan	%	30,18%
3	Rasio Wirausaha Baru	%	28,02%
4	Persentase UMKM yang dikembangkan	%	23,30%
5	Persentase Koprasi/UMKM mengikuti Pelatihan	%	9,80%
6	Persentase Koperasi yang diperiksa	%	2,53%
7	Persentase KSP/USP yang dinilai Kesehatannya	%	4,67%
<b>Penanaman Modal</b>			
1	Persentase Perusahaan yang mendapatkan Insentif dan kemudahan Berusaha	%	90
2	Persentase kenaikan Minat Penanaman Modal	%	7%
3	Persentase Pelayanan Perizinan Sesuai SOP	%	85
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	83,15
5	Persentase Perusahaan Yang Menyampaikan LKPM	%	100
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>			
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,09
2	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	5,05
3	Jumlah atlet berprestasi olahraga tingkat regional/nasional/internasional yang memperoleh medali emas	Atlit	0
4	Cakupan pembinaan atlet muda	%	0,64
5	Cakupan pembinaan olahraga	%	19,23
6	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	38,09
7	Tingkat Partisipasi Anggota Pramuka dalam Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	8,43
<b>Statistik</b>			
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	100
<b>Persandian</b>			



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	310/455
	<b>Kebudayaan</b>		
1	Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	16,75%
2	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang mejadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas ) (lebih ke Indikator sasaran strategis)	%	0,08%
3	Persentase SDM sejarahwan yang Berkompotensi	%	20,00%
4	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	%	8,53%
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah/warisan dunia	%	2,84%
	<b>Perpustakaan</b>		
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	8,67
2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	%	0,51%
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	%	0,15%
4	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	0,07%
5	Persentase Perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan	%	0,93
6	Keterlibatan masyarakat dalam KIE	Orang	250
7	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Rasio	0,0075
	<b>Kearsipan</b>		
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Skor	11,13
2	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Skor	27,5
3	Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di LKD Provinsi yang sesuai dengan SNPK	Skor	5
	<b>Urusan Pilihan Dasar</b>		
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>		
1	Kawasan Konservasi yang Dikelola	Kawasan	3
2	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	307.076,60
3	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	26.491,92
4	Persentase kasus IUU Fishing / konflik pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang diselesaikan	%	90,00
5	Peningkatan Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton	1.334,88
	<b>Pariwisata</b>		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
1	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	Hari	2,3
2	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara	Hari	1,7
3	Rata-rata Tingkat Hunian Hotel di Kepulauan Riau.	%	22,70%
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Mancanegara	370.500
5	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Wisatawan Nusantara	1.988.600
6	Prosentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan	%	3%
7	Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya	%	2%
<b>Pertanian</b>			
1	Persentase Peningkatan Produktivitas Ternak	%	1,20%
2	Persentase Peningkatan Sarana Produksi Pertanian	%	58,32%
3	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	%	1,35%
4	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Hortikultura	%	0,74%
5	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Perkebunan	%	2,8%
6	Persentase Angka Kesembuhan Penyakit	%	62,00%
7	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat	%	58,50%
8	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Hortikultura)	%	38,0%
9	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Pangan)	%	74,85%
10	Persentase Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT (Tanaman Perkebunan)	%	20%
11	Nilai Tukar Petani (NTP)	Rasio	99,88
12	Persentase Penyuluh yang meningkat Kapasitasnya /kompetensinya sesuai dengan bidang keahliannya	%	40%
<b>Kehutanan</b>			
1	Meningkatnya PDRB Sektor Kehutanan	Miliar Rp	27,10
2	Rehabilitasi Lahan Kritis	ha	5 ha
3	Meningkatnya akses pengelolaan hutan oleh masyarakat	Ha	500
4	Meningkatnya Kesehatan Daerah Aliran Sungai Kepulauan Riau	DAS	2
<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
1	Jumlah kabupaten/kota tersedia Informasi Sumber	Kab/Kota	2



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
	Daya Mineral, Geologi dan Air Tanah		
2	Persentase pelaku usaha yang memanfaatkan air tanah sesuai dengan aturan	%	20%
3	Persentase Penetapan Wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang ditetapkan	%	28,57%
4	Persentase Kontribusi Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dalam Bauran Energi (Energy Mixed)	%	13,00
5	Rasio Elektrifikasi	%	95,50
6	Persentase Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Sesuai Ketentuan	%	100%
7	Rasio Desa/Kelurahan Berlistrik	%	98,00
<b>Perdagangan</b>			
1	Pesentase Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap kegiatan Perdagangan	%	50%
2	Pesentase Peningkatan sarana Distribusi perdagangan	%	70
3	Nilai Inflasi	%	3,14+1
4	Pertumbuhan Ekspor Non Migas Provinsi Kepri	%	3,5
5	Persentase Jumlah Barang yang tidak sesuai Standar pada saat dilakukan Pengawasan	%	20%
6	Persentase Produk Dalam Negeri yang dipasarkan di Pasar Rakyat	%	80
<b>Perindustrian</b>			
1	Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Miliar Rp	38,5
2	Persentase Izin Usaha Industri	%	60
<b>Transmigrasi</b>			
1	Jumlah rencana teknis kawasan transmigrasi yang clear and clean yang diusulkan untuk program transmigrasi baru Satuan Pemukiman Baru, Satuan Pemukiman Pugar, dan Satuan Pemukiman Tempatan	Kawasan Permukiman	1
2	Jumlah bidang lahan/KK yang tertata di lokasi kawasan transmigrasi	Lahan	700
3	Jumlah satuan kawasan permukiman transmigrasi yg mendapatkan pengembangan usaha ekonomi kawasan	Kawasan Permukiman	1
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>			
<b>Sekretariat Daerah</b>			
1	Persentase produk hukum daerah yang terselesaikan	%	100%
2	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	80,65
3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	%	20



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
4	Persentase Rekomendasi dan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti	%	90%
5	Persentase kebijakan administrasi pembangunan yang disusun secara aktual	%	90%
6	Persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	8.2
7	Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi (LPPD)	Skor	3,03
	<b>Sekretariat DPRD</b>		
1	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	72
2	Persentase Terlaksanaanya Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100%
	<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>		
	<b>Perencanaan</b>		
1	Persentase keselarasan muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kabupaten/Kota	%	82%
2	Rancangan RKPD Tahun n	Dokumen	1
3	Persentase keselarasan muatan renja perangkat daerah dengan RKPD	%	100%
4	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	%	95%
5	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	75%
6	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	35%
	<b>Keuangan</b>		
1	Persentase realisasi penerimaan dana transfer dibandingkan target tahun berjalan	%	90%
2	Presentase Perangkat Daerah Yang menyampaikan laporan keuangan tahunan yang tepat waktu dan akurat	%	100%
3	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	4,89%
4	Jumlah Inovasi Pelayanan	Jenis Pelayanan	1
5	Jumlah Pengguna Sistem Aplikasi Pengelolaan Pajak Daerah	Pengguna Sistem Aplikasi	15.300
6	Persentase Piutang Pajak Daerah yang tertagih	%	22
7	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang Bersertifikat (Tanah)	%	57
8	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Daerah	%	95,58%
	<b>Kepegawaian</b>		
1	Persentase pemenuhan ASN sesuai Kebutuhan	%	44,63
2	Persentase Penempatan ASN sesuai kualifikasi	%	73
3	Persentase ASN yang Memiliki Kinerja Baik	%	95
	<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>		



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2022
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan Kompetensi	%	32
	<b>Unsur Pengawasan</b>		
	<b>Inspektorat Daerah</b>		
1	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKPN	%	100%
2	Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib LHKASN	%	100%
3	Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi	Skor	Hijau
4	Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Level Kematangan Manajemen Risiko di atas Level 2	%	7%
5	Persentase Nilai Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil Pemeriksaan Inspektorat	%	<10%
6	Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP dan BPK	%	80%
7	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan	%	55%
8	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP BB	%	75%
9	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Auditor dan P2UPD	%	60%
10	Persentase Auditor dan P2UPD yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi	%	85%
11	Persentase Dukungan Penunjang Urusan Pengawasan	%	100%
	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>		
	<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>		
1	Persentase Konflik antar suku dan etnis	%	0%
2	Persentase Konflik antar Agama	%	0
3	Persentase Konflik Sosial yang Tertangani	%	0%
<b>C</b>	<b>Aspek Daya Saing</b>		
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks	83,15



### **BAB VIII** **PENUTUP**

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Mengingat dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2022 ini RPJMD tahun 2021-2026 belum ditetapkan, maka RKPD disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJPD Kepulauan Riau Tahun 2005-2025, Rancangan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022-2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung visi misi Gubernur Kepulauan Riau dan arah kebijakan tahun 2022 dalam Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026, serta prioritas dan program strategis nasional tahun 2022.

RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. RKPD menjadi pedoman bagi setiap kepala Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah. Dalam tahap penganggaran RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan disepakati dalam bentuk nota kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Pada tahap selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 yang dilengkapi dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, dan pada tahap akhir ditetapkan menjadi APBD dan Daftar Penetapan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. DPA akan dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah dan dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengetahui efektivitas pencapaian target kinerja dan efisiensi masing-masing program dan kegiatan.

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang harus diatati dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan RKPD sebagai berikut :

1. Dalam upaya meningkatkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan, maka perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana kerja yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah



yang berpedoman pada RKPD, dan berkewajiban menjamin konsistensi antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah tahun 2022.

2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RKPD, Barenlitbang berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2022 ke dalam Renja Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan provinsi dan kabupaten/kota, maka penyusunan RKPD Kabupaten/Kota tahun 2022 di wilayah Provinsi Kepulauan Riau agar mempedomani RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022.
4. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, maka penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 agar berpedoman pada RKPD Tahun 2022.
5. Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RKPD Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
6. Guna menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan kegiatan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur.
7. Masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun 2022.

Penjabaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 perlu didukung komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. Masing-masing pihak sesuai dengan kewenangannya berperan dalam pencapaian visi jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”**.